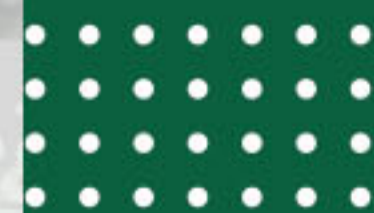


**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI JAWA TENGAH BAG. I





**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI JAWA TENGAH BAG. I





Peta Pembinaan Provinsi Jawa Tengah Bagian I

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88614-8-4

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Ahdaniyah Siregar, S.Stat
2. Tito Dwian Maulana, S.Stat
3. Anthonius Riva, SE, M.Si

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|----------------|--|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| DAFTAR TABEL | |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------|---|
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. MANFAAT | 2 |
| C. TUJUAN | 3 |
| D. RUANG LINGKUP | 3 |

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

| | |
|--------------------------------|----|
| A. KABUPATEN BANJARNEGARA | 5 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 5 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 6 |
| B. KABUPATEN BANYUMAS | 13 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 13 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 14 |
| C. KABUPATEN BATANG | 21 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 22 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 23 |
| D. KABUPATEN BLORA | 32 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 32 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 33 |
| E. KABUPATEN BOYOLALI | 46 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 46 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 47 |
| F. KABUPATEN BREBES | 53 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 54 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 55 |
| G. KABUPATEN CILACAP | 60 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 61 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 61 |
| H. KABUPATEN DEMAK | 72 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 73 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 74 |
| I. KABUPATEN GROBOGAN | 88 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 89 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 90 |
| J. KABUPATEN JEPARA | 96 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 96 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 97 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| K. KABUPATEN KARANGANYAR | 104 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 104 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 105 |
| L. KABUPATEN KEBUMEN | 112 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 112 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 113 |
| M. KABUPATEN KENDAL | 119 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 120 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 121 |
| N. KABUPATEN KLATEN | 129 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 130 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 131 |
| O. KABUPATEN KUDUS | 139 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 139 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 140 |
| P. KABUPATEN MAGELANG | 152 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 153 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 154 |
| Q. KABUPATEN PATI | 163 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 163 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 164 |
| R. KABUPATEN PEKALONGAN | 172 |
| Aspek Satuan Pemerintah Daerah | 172 |
| Aspek Satuan Inovasi Daerah | 173 |

BAB III REKOMENDASI KEBIJAKAN

| | |
|---------------------------|-----|
| A. KABUPATEN BANJARNEGARA | 181 |
| B. KABUPATEN BANYUMAS | 184 |
| C. KABUPATEN BATANG | 185 |
| D. KABUPATEN BLORA | 187 |
| E. KABUPATEN BOYOLALI | 188 |
| F. KABUPATEN BREBES | 190 |
| G. KABUPATEN CILACAP | 193 |
| H. KABUPATEN DEMAK | 195 |
| I. KABUPATEN GROBOGAN | 196 |
| J. KABUPATEN JEPARA | 198 |
| K. KABUPATEN KARANGANYAR | 200 |
| L. KABUPATEN KEBUMEN | 201 |
| M. KABUPATEN KENDAL | 202 |
| N. KABUPATEN KLATEN | 204 |
| O. KABUPATEN KUDUS | 205 |
| P. KABUPATEN MAGELANG | 206 |
| Q. KABUPATEN PATI | 209 |
| R. KABUPATEN PEKALONGAN | 210 |

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 01. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 02. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 03. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 04. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 05. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 06. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 07. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 08. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 09. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Banyumas
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banyumas
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Banyumas
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Banyumas
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Banyumas
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Banyumas
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Banyumas
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Banyumas
- Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Banyumas

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Batang

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Batang

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Batang

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Batang

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Batang

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Batang

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Batang

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Batang

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Batang

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Batang

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Blora

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Blora

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Blora

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Blora

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Blora

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Blora

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Blora

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Blora

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Blora

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blora

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Boyolali

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Boyolali

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Boyolali

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Boyolali

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Boyolali

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Boyolali

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Boyolali

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Boyolali

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Boyolali

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Brebes

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Brebes

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Brebes

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Brebes

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Brebes

Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Brebes

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Brebes

Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Brebes

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Brebes

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes

Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Cilacap

Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Cilacap

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Cilacap

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Cilacap

Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Cilacap

Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Cilacap

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Cilacap

Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Cilacap

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Cilacap

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap

Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Demak

Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Demak

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Demak

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Demak

Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Demak

Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Demak

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Demak

Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Demak

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Demak⁷⁷

Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Demak

Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Grobogan

Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Grobogan

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Grobogan

Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Grobogan

Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Grobogan

Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Grobogan

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Grobogan

Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Grobogan

Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Grobogan

Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Grobogan

Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Jepara

Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Jepara

Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Jepara

Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Jepara

Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Jepara

Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Jepara

Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Jepara

Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Jepara

Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Jepara

Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jepara

Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Karanganyar

Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Karanganyar

Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Karanganyar

Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Karanganyar

Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Karanganyar

Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Karanganyar

Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Karanganyar

Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Karanganyar

Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Karanganyar

Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar

Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kebumen

Gambar 123. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kebumen

Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kebumen

Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kebumen

Gambar 126. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kebumen

Gambar 127. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kebumen

Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kebumen

Gambar 129. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kebumen

Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kebumen

Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen

Gambar 132. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 133. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kendal

Gambar 134. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kendal

Gambar 135. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kendal

Gambar 136. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kendal

Gambar 137. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kendal

Gambar 138. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kendal

Gambar 139. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kendal

Gambar 140. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kendal

Gambar 141. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kendal

Gambar 142. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kendal

Gambar 143. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 144. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Klaten

Gambar 145. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Klaten

Gambar 146. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Klaten

Gambar 147. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Klaten

Gambar 148. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Klaten

Gambar 149. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Klaten

Gambar 150. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Klaten

Gambar 151. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Klaten

Gambar 152. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Klaten

Gambar 153. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten

Gambar 154. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 155. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kudus

Gambar 156. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kudus

Gambar 157. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kudus

Gambar 158. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kudus

Gambar 159. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kudus

Gambar 160. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kudus

Gambar 161. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kudus

Gambar 162. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kudus

Gambar 163. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kudus

Gambar 164. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kudus

Gambar 165. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 166. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Magelang

Gambar 167. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Magelang

Gambar 168. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Magelang

Gambar 169. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Magelang

Gambar 170. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Magelang

Gambar 171. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Magelang

Gambar 172. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Magelang

Gambar 173. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Magelang

Gambar 174. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Magelang

Gambar 175. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magelang

Gambar 176. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 177. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pati

Gambar 178. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pati

Gambar 179. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pati

Gambar 180. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pati

Gambar 181. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pati

Gambar 182. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pati

Gambar 183. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pati

Gambar 184. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pati

Gambar 185. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pati

Gambar 186. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pati

Gambar 187. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 188. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pekalongan

Gambar 189. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pekalongan

Gambar 190. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pekalongan

Gambar 191. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pekalongan

Gambar 192. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pekalongan

Gambar 193. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pekalongan

Gambar 194. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pekalongan

Gambar 195. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pekalongan

Gambar 196. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pekalongan

Gambar 197. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan

Gambar 198. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah
- Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Banjarnegara beserta Skor Kematangannya
- Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Banyumas beserta Skor Kematangannya
- Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Batang beserta Skor Kematangannya
- Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Blora beserta Skor Kematangannya
- Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Boyolali beserta Skor Kematangannya
- Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Brebes beserta Skor Kematangannya
- Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Cilacap beserta Skor Kematangannya
- Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Boyolali beserta Skor Kematangannya
- Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Grobogan beserta Skor Kematangannya
- Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Jepara beserta Skor Kematangannya
- Tabel 12. Daftar Inovasi Kabupaten Karanganyar beserta Skor Kematangannya
- Tabel 13. Daftar Inovasi Kabupaten Kebumen beserta Skor Kematangannya
- Tabel 14. Daftar Inovasi Kabupaten Kendal beserta Skor Kematangannya
- Tabel 15. Daftar Inovasi Kabupaten Klaten beserta Skor Kematangannya
- Tabel 16. Daftar Inovasi Kabupaten Kudus beserta Skor Kematangannya
- Tabel 17. Daftar Inovasi Kabupaten Magelang beserta Skor Kematangannya
- Tabel 18. Daftar Inovasi Kabupaten Pati beserta Skor Kematangannya
- Tabel 19. Daftar Inovasi Kabupaten Pekalongan beserta Skor Kematangannya
- Tabel 20. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 21. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Banjarnegara
- Tabel 22. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 23. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Banyumas
- Tabel 24. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Batang
- Tabel 25. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Blora
- Tabel 26. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 27. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Boyolali
- Tabel 28. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Brebes Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 29. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Brebes

Tabel 30. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 31. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Cilacap

Tabel 32. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Demak Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 33. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Demak

Tabel 34. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 35. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Grobogan

Tabel 36. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Jepara

Tabel 37. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Karanganyar

Tabel 38. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Kebumen

Tabel 39. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Kendal

Tabel 40. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Klaten

Tabel 41. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Kudus

Tabel 42. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 43. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Magelang

Tabel 44. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pati

Tabel 45. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pekalongan

The Page Left is Blank

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5

Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Tengah (bagian 1). Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Tengah (bagian 1) pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Pekalongan.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah (bagian 1) yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

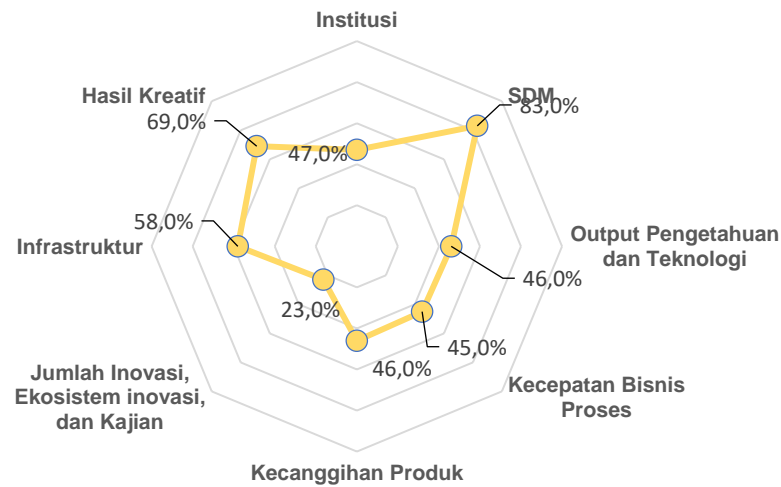
| ASPEK | VARIABEL | INDIKATOR |
|-------|-----------|--------------------------------|
| SPD | Institusi | Visi Misi |
| | | Tingkat Lembaga Kelitbangan |
| | | APBD Tepat Waktu |
| | | Kualitas Peningkatan Perizinan |
| | | Jumlah Pendapatan Perkapita |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| | | Jumlah Peningkatan Investasi |
| | | Jumlah Peningkatan PAD |

| ASPEK | VARIABEL | INDIKATOR |
|-------|---|--|
| | | Opini BPK |
| | | Nilai Capaian Lakip |
| | | Penurunan Angka Kemiskinan |
| | Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian | Jumlah Inovasi Daerah |
| | | Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi |
| | | Roadmap SiDA |
| SDM | Nilai IPM | |
| | Penghargaan Bagi Inovator | |
| SID | Hasil Kreatif | Kemanfaatan Inovasi |
| | | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | | Kualitas Inovasi Daerah |
| | Infrastruktur | Regulasi Inovasi Daerah |
| | | Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | | Dukungan Anggaran |
| | | Penggunaan IT |
| | | Bimtek Inovasi |
| | | Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| | Kecanggihan Produk | Replikasi |
| | | Online Sistem |
| | | Kecepatan Inovasi |
| | Kecepatan Bisnis Proses | Pedoman Teknis |
| | | Kemudahan Informasi Layanan |
| | | Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| | | Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan |
| | Output Pengetahuan dan Teknologi | Jejaring Inovasi |
| | | Pelaksana Inovasi Daerah |
| | | Keterlibatan aktor inovasi |
| | | Sosialisasi Inovasi Daerah |

BAB I

PENDAHULUAN

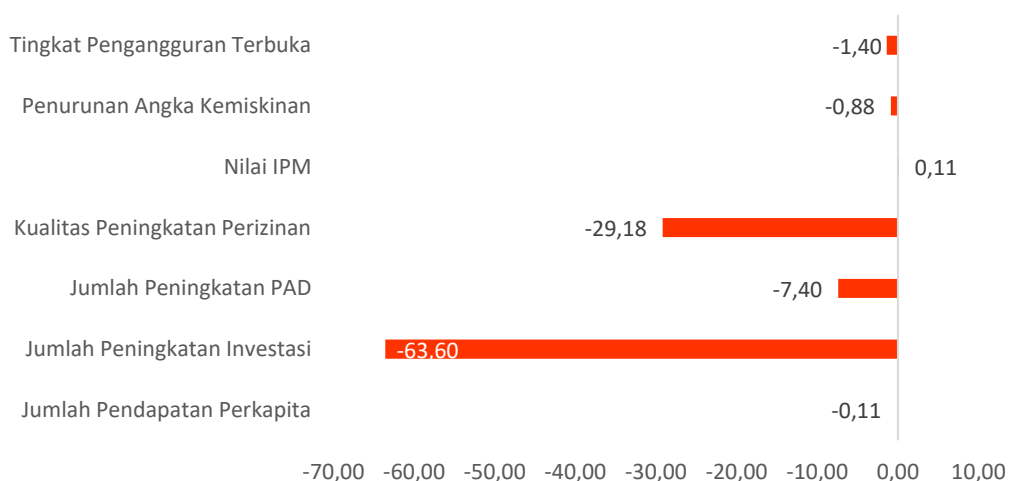
A. KABUPATEN BANJARNEGARA



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Banjarnegara memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 23.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

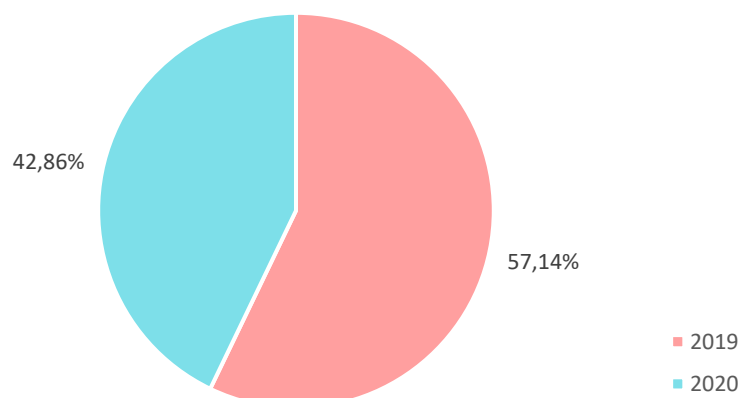


Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banjarnegara

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banjarnegara belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan hampir semua indikator tidak mengalami perbaikan, dimana indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 1.40% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 1.40% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.88%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara meningkat 0.88% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selain itu, Kualitas Peningkatan Perizinan menurun 29.18%, Jumlah Peningkatan PAD menurun 7.40%, serta Jumlah Peningkatan Investasi menurun 63.60%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga menurun 0.11% namun penurunan tersebut masih relatif lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%. Indikator yang mengalami perbaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 hanya indikator Nilai IPM, yaitu meningkat sebesar 0.11%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

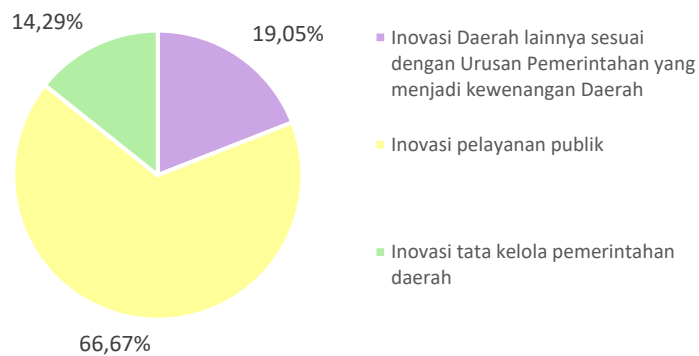
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Banjarnegara telah diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 12 (57.14%) inovasi dari 21 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 9 (42.86%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

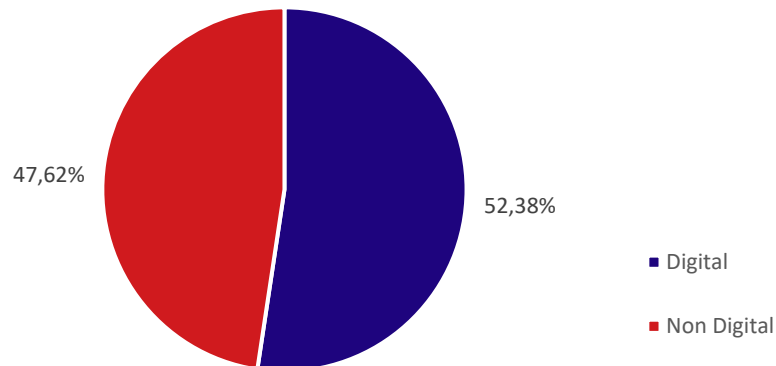
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 14 (66.67%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 3 (14.29%) inovasi dengan bentuk tata kelola pemerintahan daerah, dan 4 (19.05%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

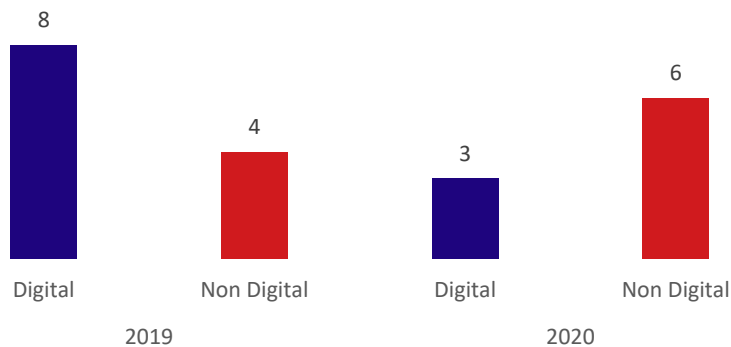
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 11 (52.38%) dari 21 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Banjarnegara merupakan inovasi digital, kemudian 10 (47.62%) inovasi merupakan inovasi non digital.

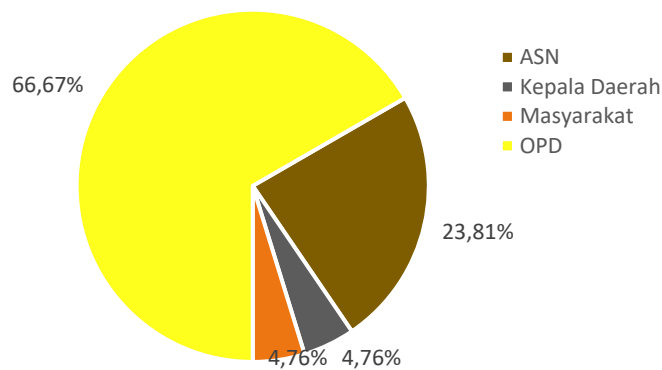
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Banjarnegara

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya inovasi digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 8 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 3 inovasi. Sementara itu inovasi non digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 6 inovasi.

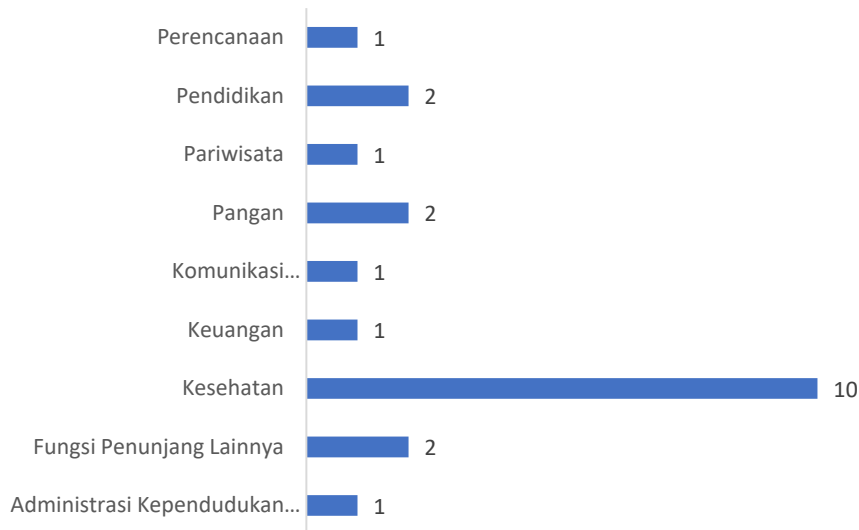
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 14 (66.67%) inovasi. Kemudian terdapat 5 (23.81%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN, 1 (4.76%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 1 (4.76%) inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat.

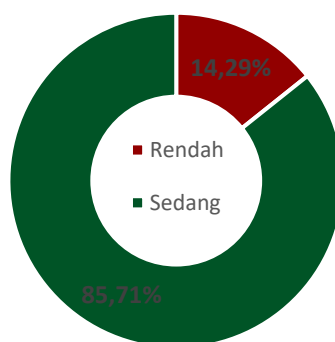
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Banjarnegara

Inovasi daerah pada Kabupaten Banjarnegara tersebar pada 9 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan kesehatan yaitu 10 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Banjarnegara, hanya terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan sejumlah 2 inovasi dan urusan kesehatan 10 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

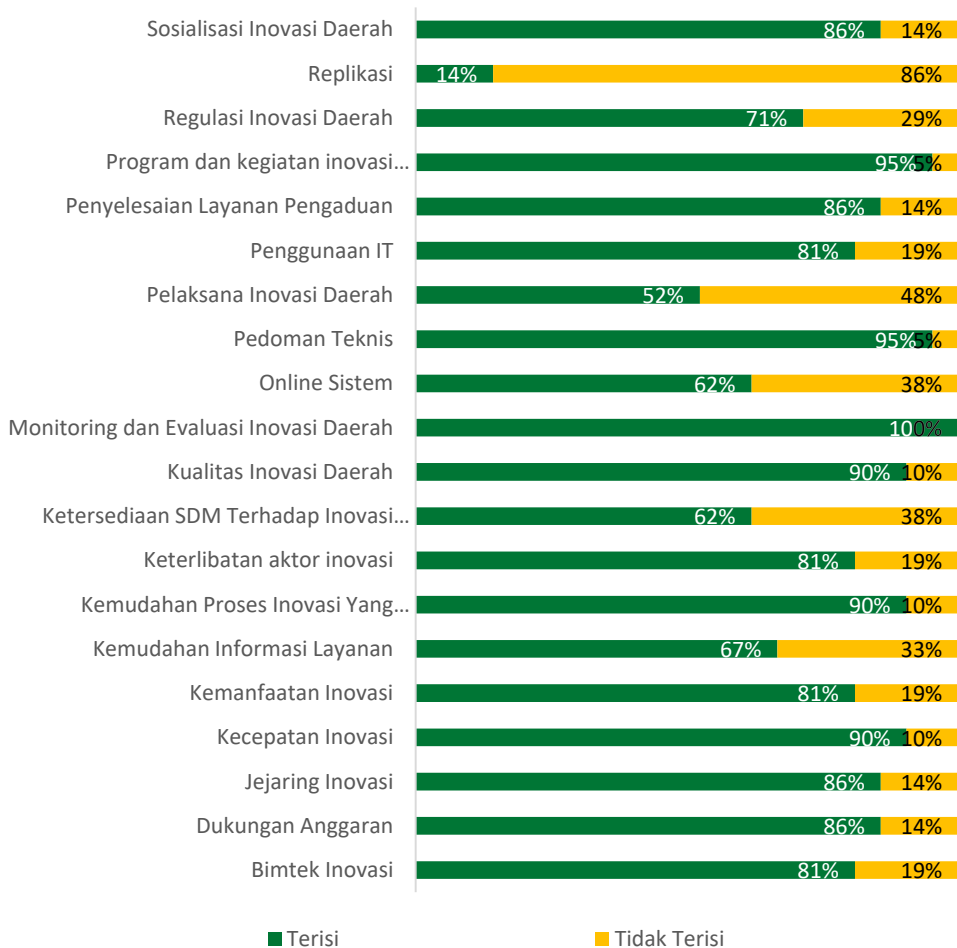


Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Banjarnegara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sejumlah 18 (85.71%) inovasi. Selain itu, terdapat 3 (14.29%) inovasi hanya mencapai skor kematangan rendah dan tidak

terdapat inovasi yang memiliki skor tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

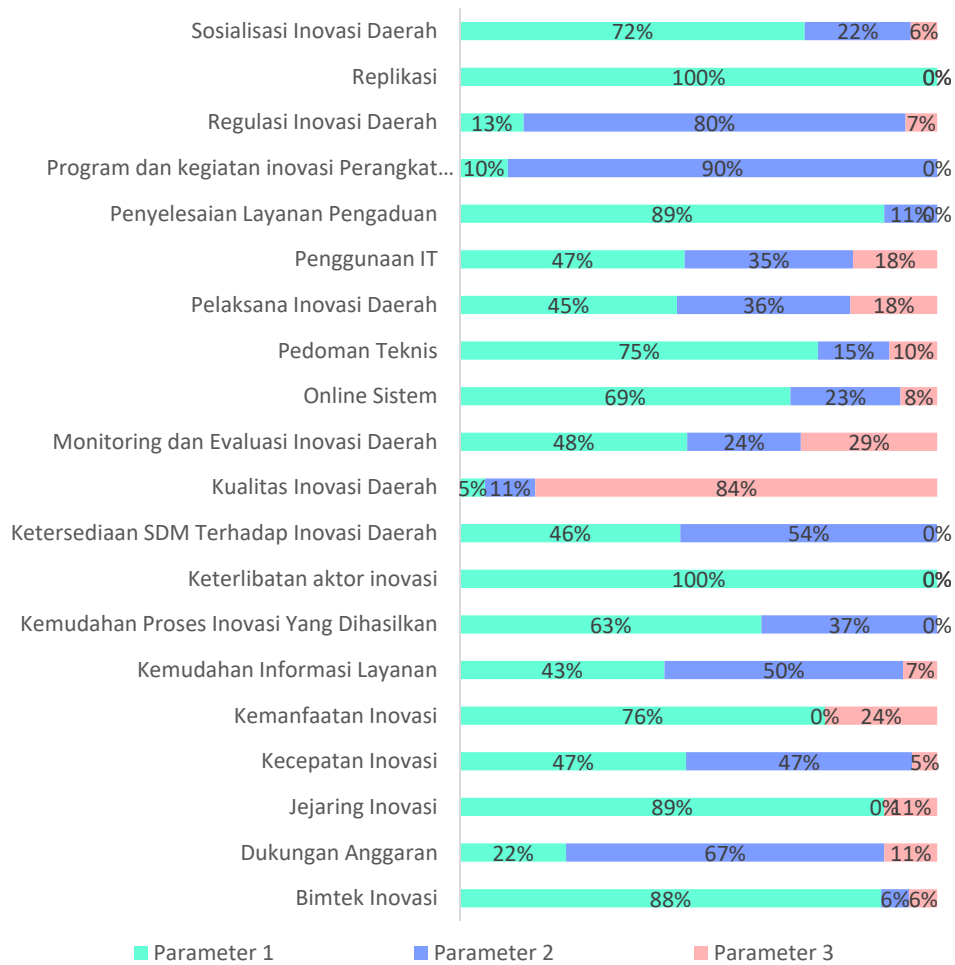
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara

Indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya, yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Banjarnegara telah terisi data pendukung pada indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 14% artinya hanya 14% inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar II. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

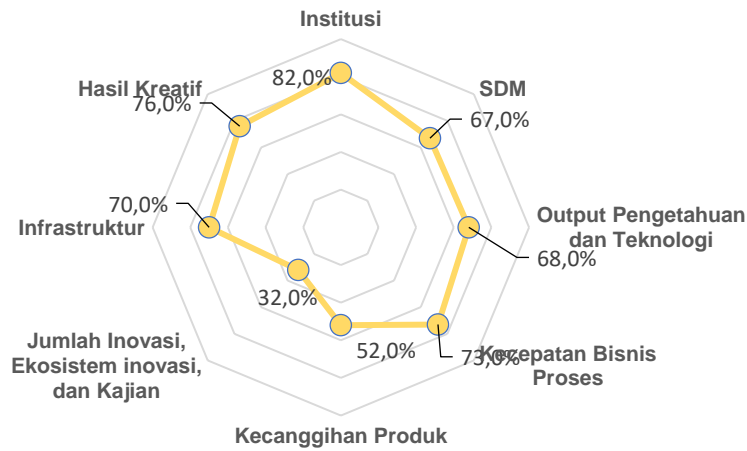
Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah sebesar 84%, artinya 84% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD sebesar 90% artinya 90% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Banjarnegara beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Banjarnegara beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|------------------------|
| ANNA LASMANAH MENYAPA | 49 |
| S-PUTER (Sistem Pelaporan dan Pengaduan Terpadu) | 58 |
| OCe OKe (One Client One Kader) Siasat Keren Cegah 3 Terlambat Dengan 4 Pantauan, | 78 |
| MELATI HARUM (Memanfaatkan Lahan Tidur dan Halaman Rumah) | 88 |
| Birokrat Merdeka Bersama SAJAMISABU (Satu Amanah Jabatan ASN (Jadi Apapun) Minimal Menghasilkan Satu Karya Buku Baru) | 34 |
| PAPA PUAS (Pemerataan Anggaran Perencanaan Antar wilayah Penyemangat Untuk Ajang muSyawarah) | 72 |
| Papa Lo Gannas (Pengembangan Pangan Lokal Pengganti Nasi) | 58 |
| SIDAKONBANTER (Sistem Informasi Database KONI Banjarnegara Terpadu) | 95 |
| AKSELERASI MENCEGAH KETERLAMBATAN PENANGANAN RUJUKAN PERSALINAN DENGAN "HALLO MAMA" | 74 |
| "BOKOR SIKIDANG" (BOardwalk Keren nan tersohOR, di kawah SIKIDANG) | 58 |
| Web Layanan {Durenmas Online (Dindukcapil Banjarnegara Ora Leren Melayani Masyarakat dan bisa Online)} | 78 |
| LAHIR SEHAT, TRISULA KUDAPAT, ORA RAGAT | 76 |
| ANALASKO ONLINE | 75 |
| GERAI JAMU YU DARMI | 66 |
| KUNGTI MATENG (KAKUNG UTI BERSAMA DALAM 5 NG) | 73 |
| Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMWAS) online dalam tata kelola pengawasan intern | 68 |
| Penyediaan Layanan "Consulting Center" di Kantor Inspektorat | 65 |
| KERANJANG TAKAKURA DAN PAVING BLOCK PLASTIK UNTUK MENGATASI MASALAH SAMPAH DI SMP N 1 WANAYASA | 80 |
| AJA MAGIZ (Aksi Jitu Atasi MASalah GIZi) | 74 |
| ELEKTRONIK SETORAN PENDAPATAN DAERAH ONLINE (ESEPELE) | 43 |
| SERASGIA (SEHAT WARAS BAHAGIA) | 57 |

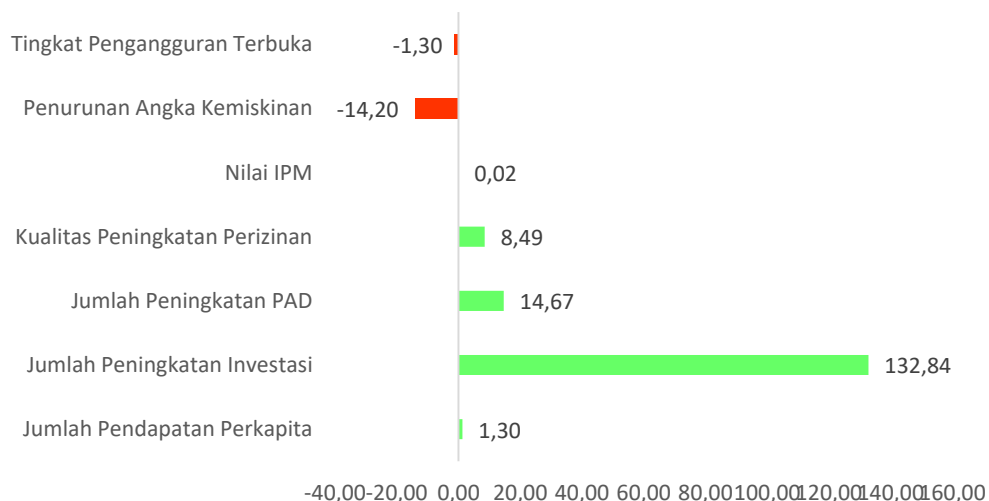
B. KABUPATEN BANYUMAS



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Banyumas

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Banyumas memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 82.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu hanya 32.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



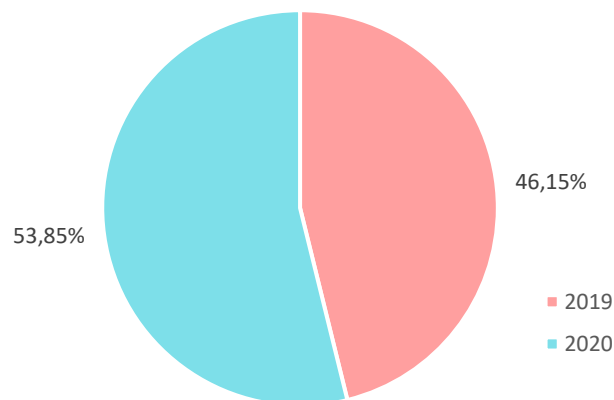
Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banyumas

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Banyumas. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada hampir semua indikator. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu 132.84%. Selanjutnya, indikator Nilai IPM meningkat 0.02%, Kualitas Peningkatan Perizinan meningkat 8.49%, Jumlah Peningkatan PAD meningkat 14.67% serta Jumlah Pendapatan Perkapita meningkat 1.30%.

Sementara itu, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 1.30% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan sebesar 1.30% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 14.20%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas meningkat 14.20% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

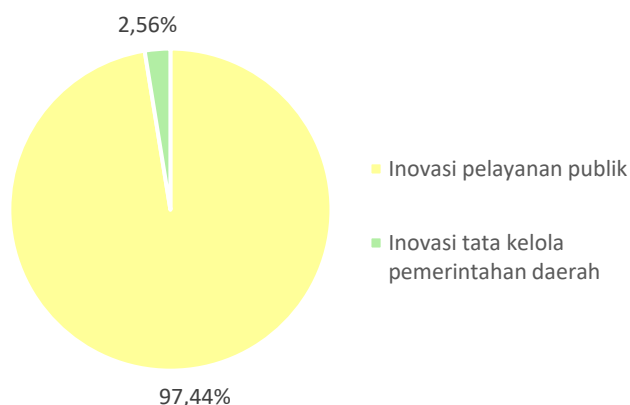
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Banyumas

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Banyumas telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 21 (53.85%) inovasi dari 39 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 18 (46.15%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2019.

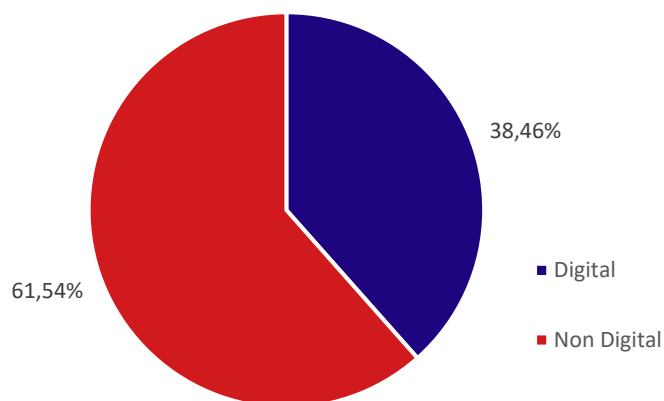
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Banyumas

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Banyumas, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintah daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum dilaporkan. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 38 (97.44%) inovasi dan 1 (2.56%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

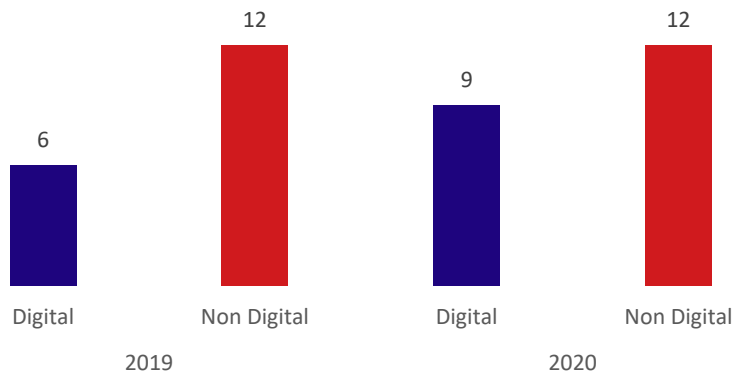
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Banyumas

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 24 (61.54%) dari 39 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Banyumas merupakan inovasi non digital dan 15 (38.46%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

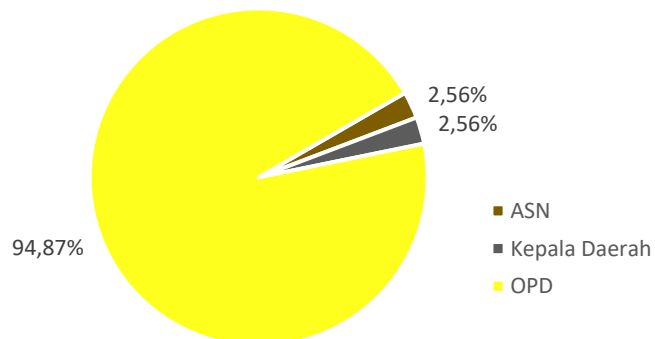
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Banyumas

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya inovasi digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 6 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 9 inovasi. Sementara jumlah inovasi non digital pada tahun 2019 dan 2020 masih tetap, yaitu 12 inovasi digital.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Banyumas

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 37 (94.87%) inovasi. Kemudian terdapat 1 (2.56%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 1 (2.56%) inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN.

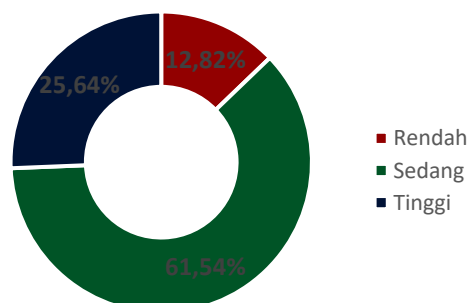
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Banyumas

Inovasi daerah pada Kabupaten Banyumas tersebar pada 20 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan pendidikan yaitu 19 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Banyumas, terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 8 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1 inovasi, urusan pendidikan 19 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 2 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 7 inovasi serta urusan kesehatan 13 inovasi.

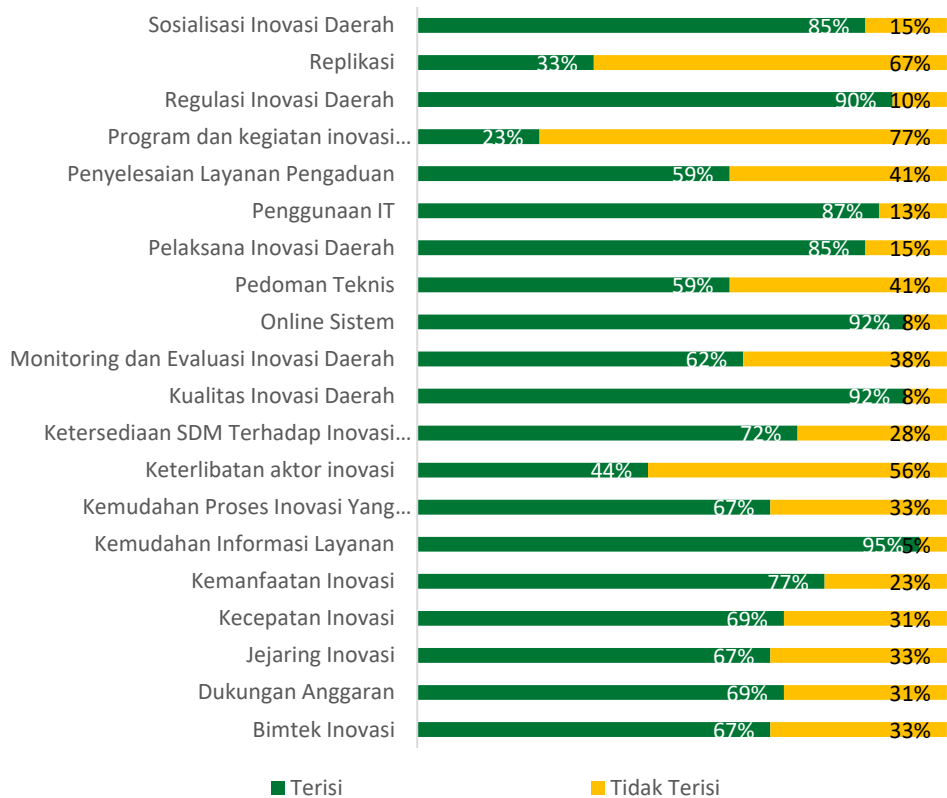
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Banyumas

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu 24 (61.54%) inovasi. Terdapat 10 (25.64%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi dan 5 (12.82%) inovasi lainnya masih mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

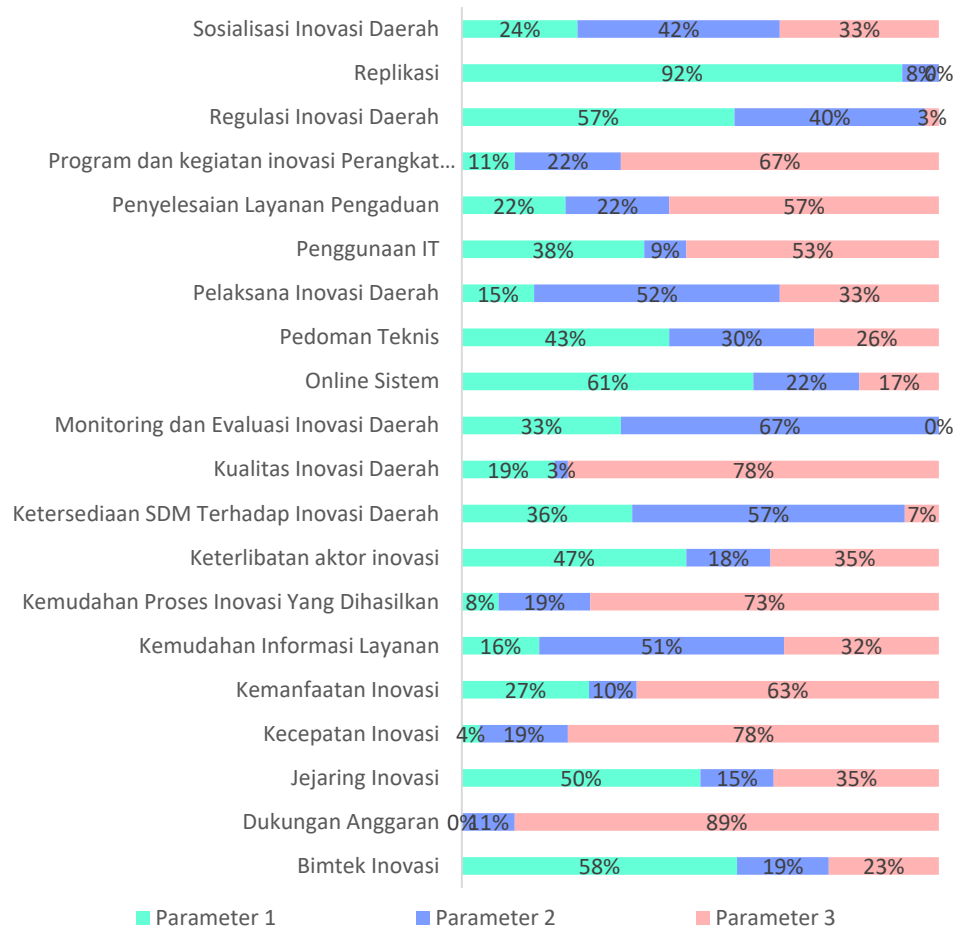
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas

Indikator Monitoring dan Kemudahan Informasi Layanan merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 95% artinya hampir seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Banyumas telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD yaitu sebesar 23% artinya hanya 23% inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter di atas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 89%, artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 67% artinya 67% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 92% artinya hampir seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

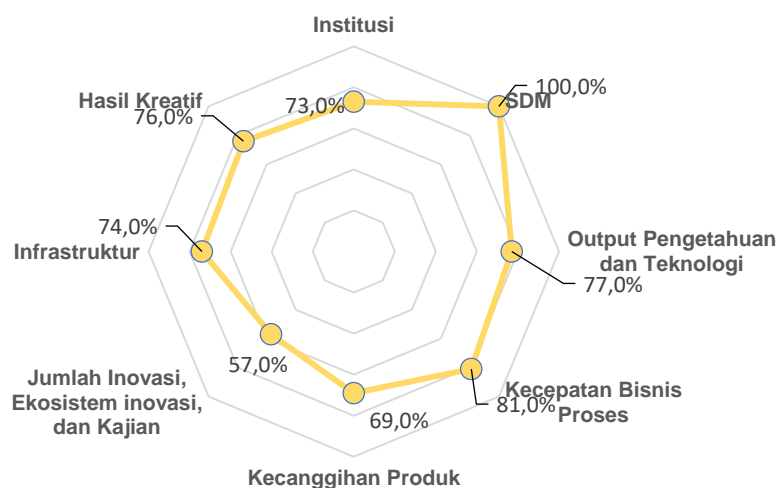
j. Daftar Inovasi Kabupaten Banyumas beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Banyumas beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| MAMA GERCAB (Mama/Kader: Gerakan Cari TB) – Puskesmas Sumpiuh II | 73 |
| Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Melalui Aplikasi SALINMAS (Sampah Online Banyumas) – DLH Kab. Banyumas | 67 |
| PUSTAKA SANTUN LANSIA | 49 |
| Rinjing Pustaka – Dinarpusda Banyumas | 77 |
| SATE BEBEK (Periksa Terpadu Bersama Ibu Hamil Keliling Desa) | 76 |
| SI MAS LAWANG (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Jatilawang Integrasi Pendaftaran Online) | 81 |
| SIMANTAP SLTP (Sistem Informasi Manajemen Data Perpustakaan Silang Layang Terpadu) | 86 |
| Banyumas My Darling (Banyumas melayani dengan kendaraan keliling) – DPMPSTP Kab. Banyumas | 83 |
| SIGAIB (Sistem Informasi Galeri Investasi Banyumas) | 111 |
| “Mas YARIZIAN ngePOS” Banyumas Melayani Perizinan dengan Perjanjian dan Pengiriman melalui Kantor Pos | 78 |
| SIAP CERIA (Sistem Informasi Antrian Pasien Cepat Efisiensi Ramah Ikhlas Aman) | 75 |
| APLIKASI E-BPHTB DI KABUPATEN BANYUMAS | 41 |
| JOB CAFE | 41 |
| KEMRANJEN PEDULI (JEDUL) | 73 |
| KECAMATAN RAMAH ANAK TERINTEGRASI LAYANAN OUTDOOR (KERAK TELOR) – Kecamatan kembaran | 64 |
| APEL MELISA (Anak Peduli Lingkungan dengan Memanfaatkan Limbah Sampah) | 53 |
| DUTA KREASI LINGKUNGAN | 78 |
| GAZAK PROSAKU SEBAGAI UPAYA PEMBETUKAN KARAKTER SISWA SMP NEGERI 8 PURWOKERTO | 65 |
| Program GERMAS SABUK dan GEDEBUK | 109 |
| GESIT (GERAKAN JEMPUT SERVIS MOTOR DI TEMPAT) | 72 |
| GUA CLBK | 61 |
| GASIKGICUAN (Gerakan Sikat Gigi Cuci Tangan) | 46 |
| KAMPEL (Kelompok Aktif Melaksanakan Penyehatan Lingkungan) – Puskesmas 1 Cilongok | 0 |
| JAKA SEMBUNG (JAaringan KAmi SELalu tersAMBUNG) SPENZAWA | 57 |
| LAPARE SEBAGAI KUNCI PRESTASI | 64 |
| GERDU NAKITA (Gerakan Terpadu Sayangi Anak Kita) – Puskesmas 1 Kemranjen | 69 |
| PERDUKESIMA (Pemeriksaan Terpadu Kesehatan Siswa Mandiri) – Pukesmas Cilongok I | 101 |
| MENDOAN ANGET (Masyarakat Emut 1000 HPK Neng | 101 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Posyandu Aja Ngasih Anak Bantet) - Puskesmas Gumelar | |
| TEMANMU KEREN (Sistem Informasi dan Manajemen Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor) - Dinas Perhubungan | 101 |
| WIROSABLENG (Wifi esempe loRO SARana Belajar E-learning) | 110 |
| MY DIARY (MY Digital LibRARY) SMP Telkom Purwokerto | 109 |
| SI BEJA MAMPIR SIH (Sistem Beli Jajan Mandiri Piring Bersih) | 100 |
| GERCEP MANDOR (Gerak Cepat Pemantauan Lansia Door to Door) - Puskesmas Baturraden II | 82 |
| Bunda Rumah Tangga Siaga Bencana - BPBD | 115 |
| SAWA SAPOGA (satu siswa satu pohon naga) | 98 |
| LASBUDU (Kelas Ibu Hamil Terpadu) - Puskesmas Kembaran II | 90 |
| "Sipus Meong" (Otomasi Perpustakaan Menuju Optimalisasi Gemilang) SMP N 6 Purwokerto | 89 |
| GENDIS (GERBANG PENYANDANG DISABILITAS SUKSES) - Dinsospermasdes | 101 |
| Petik (Peta Infrastruktur Kecamatan Baturraden - Kecamatan Baturraden | 98 |

C. KABUPATEN BATANG

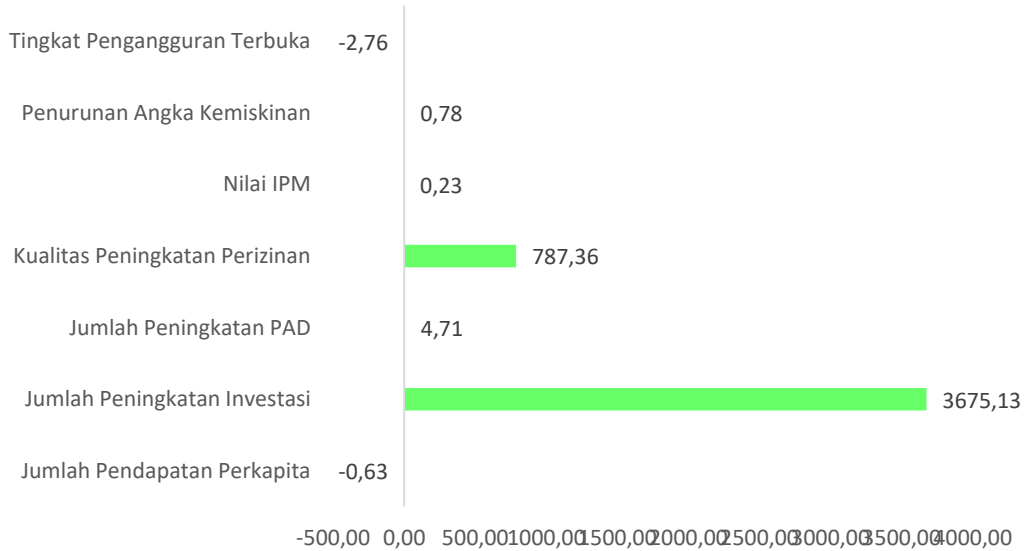


Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Batang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Batang memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu 100.0%. Artinya seluruh indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan variabel dengan skor paling

rendah (57.0%). Namun secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup baik, yaitu termasuk dalam parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



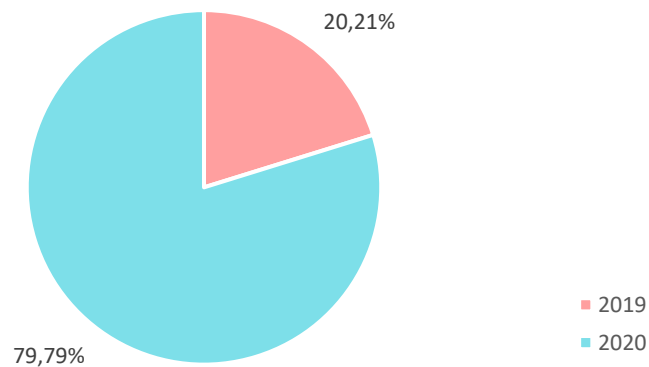
Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Batang

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Batang. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada hampir semua indikator. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu 3675%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan peningkatan sebesar 0.78%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Batang berkurang sebesar 0.78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya, Nilai IPM meningkat 0.23%, Kualitas Peningkatan Perizinan meningkat 787.36% dan Jumlah PAD meningkat 4.71%.

Sementara itu, terdapat dua indikator yang tidak mengalami perbaikan. Tingkat Pendapatan Perkapita menurun 0.63%, namun penurunan tersebut masih lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun 1.85%. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 2.76% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Batang mengalami peningkatan sebesar 2.76% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

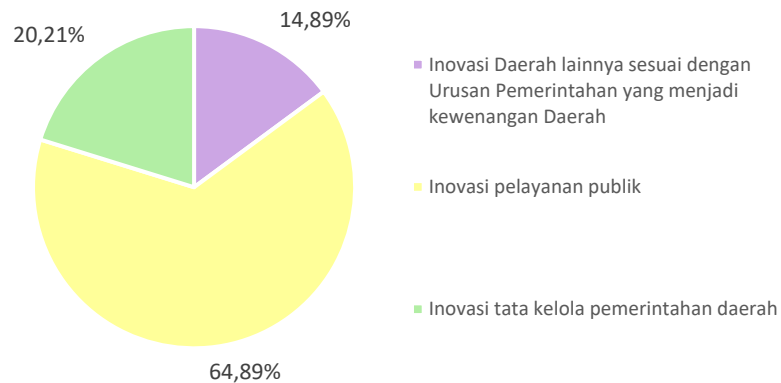
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Batang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Batang telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 75 (79.79%) inovasi dari 94 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 19 (23.81%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

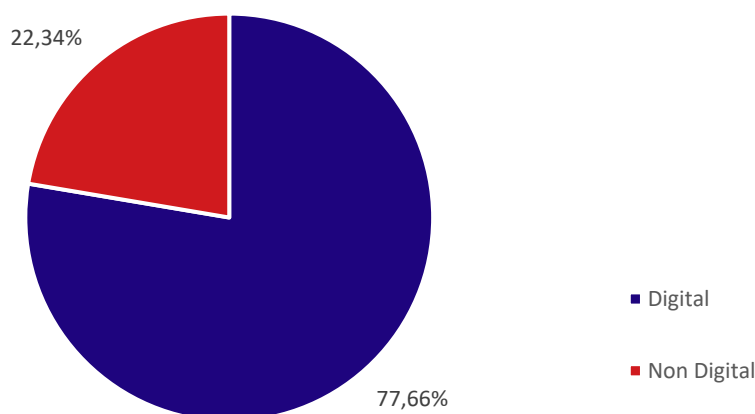
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Batang

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 61 (64.89%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 19 (20.21%) inovasi dengan bentuk tata kelola pemerintahan daerah, sementara 14 (14.89%) inovasi adalah inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

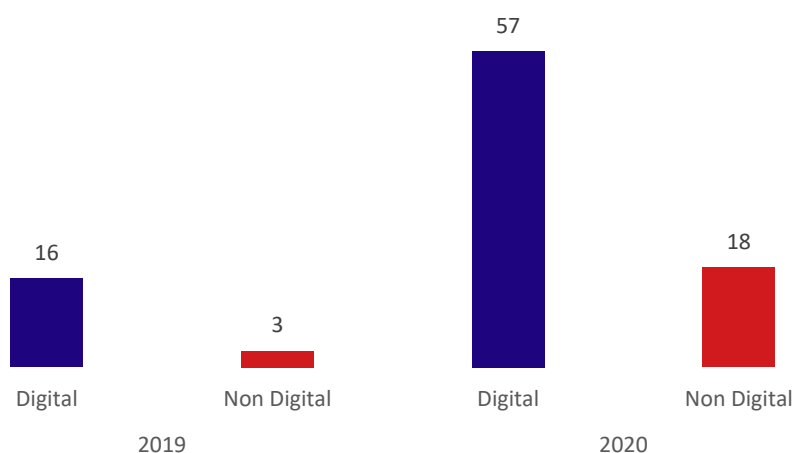
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Batang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 73 (77.66%) dari 21 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Batang merupakan inovasi digital dan 21 (22.34%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

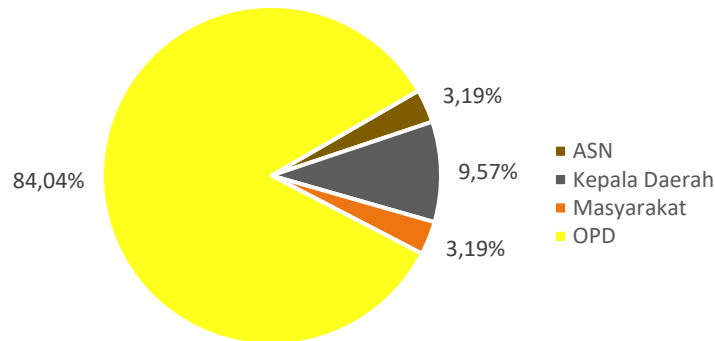
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Batang

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 18 inovasi. Demikian pula dengan inovasi digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 terdapat 16 inovasi digital yang dilaporkan lalu pada tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 57 inovasi digital.

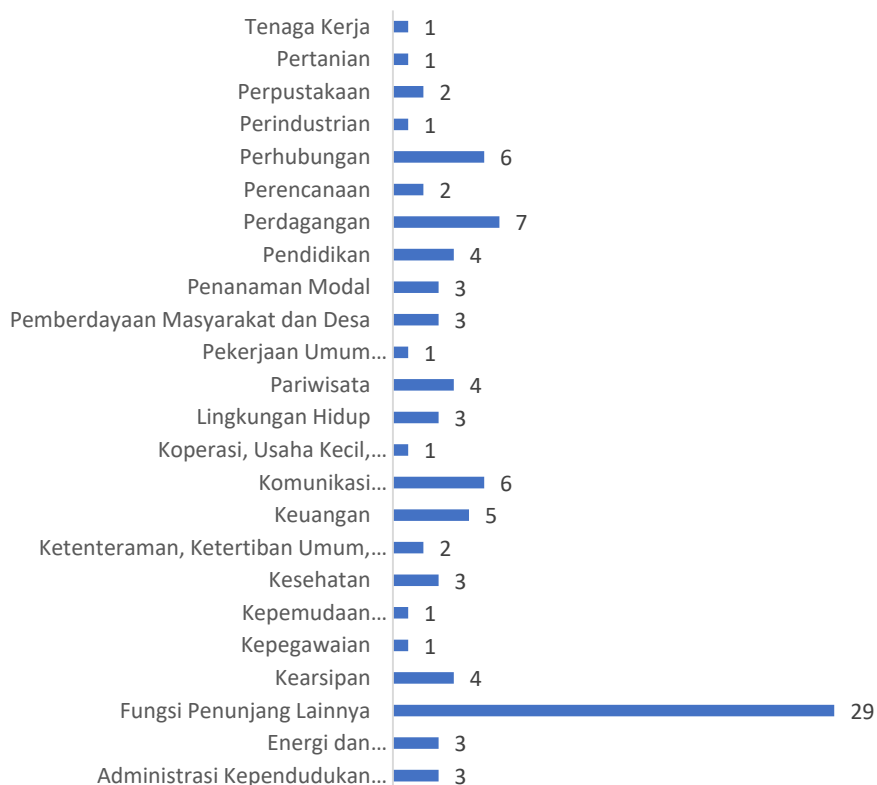
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Batang

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Batang pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 79 (84.04%) inovasi. Kemudian terdapat 3 (3.19%) inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat, 9 (9.57%) inovasi diisiasi oleh Kepala Daerah dan 3 (3.19%) inovasi diinisiasi oleh ASN.

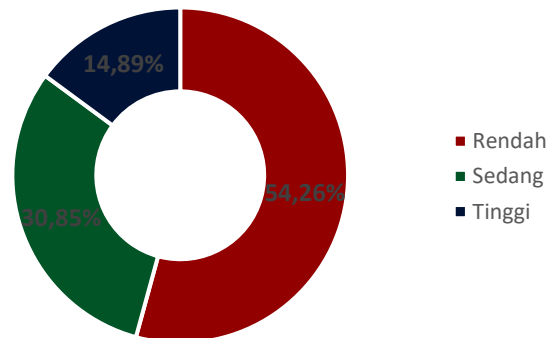
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Batang

Inovasi daerah pada Kabupaten Batang tersebar pada 24 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan penunjang lainnya yaitu 29 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Batang, terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan 4 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 1 inovasi, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 2 inovasi, serta urusan kesehatan 3 inovasi.

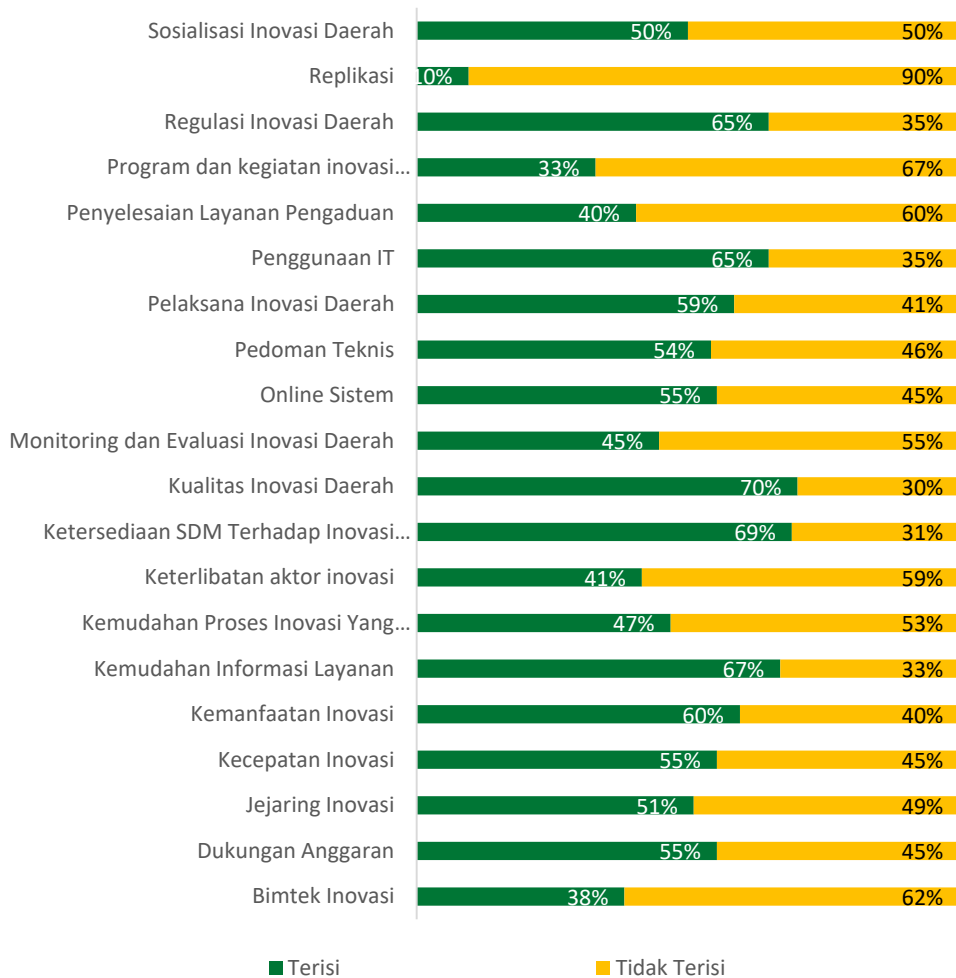
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Batang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Batang masih memiliki skor kematangan yang rendah. Terdapat 51 (54.26%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan rendah, 29 (30.85%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 14 (14.89%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

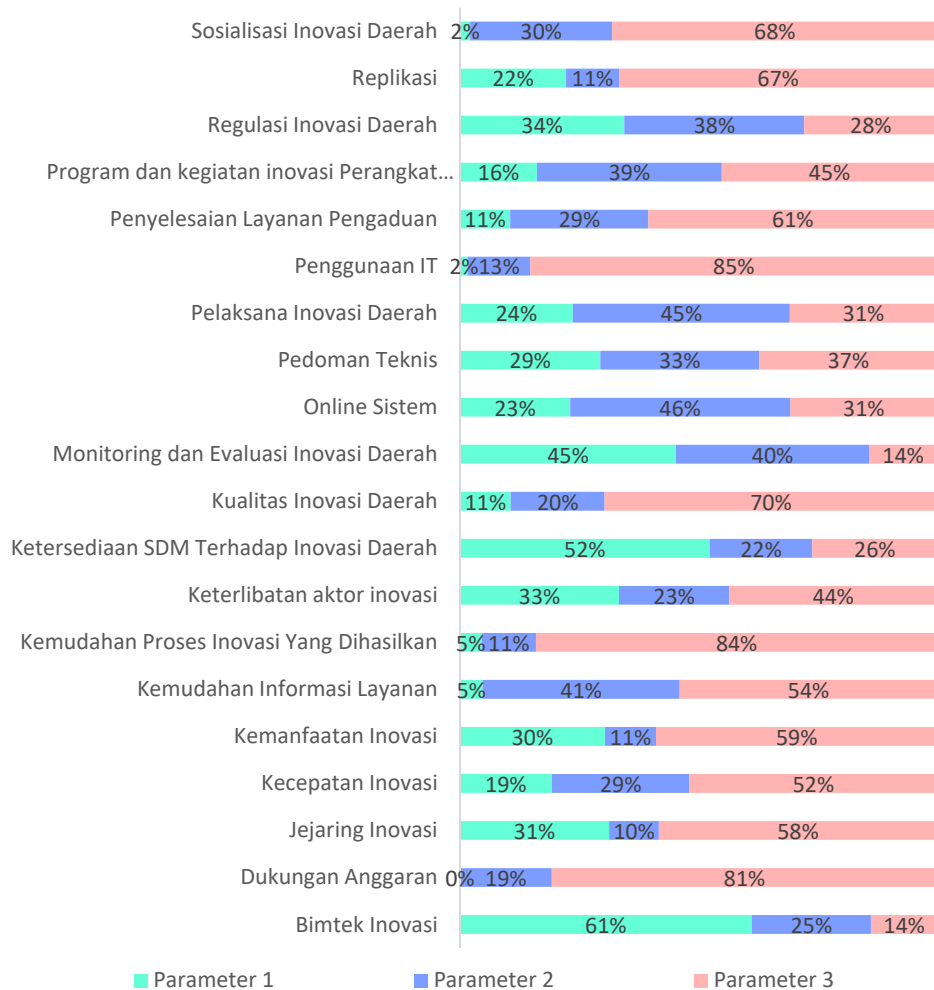
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Batang

Indikator Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 70% artinya 70% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Batang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 10% artinya hanya 10% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter di atas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT yaitu sebesar 85%, artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Penggunaan IT masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem sebesar 45% artinya 45% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Online Sistem termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 61% artinya 61% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Bimtek Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Batang beserta Skor Kematangannya

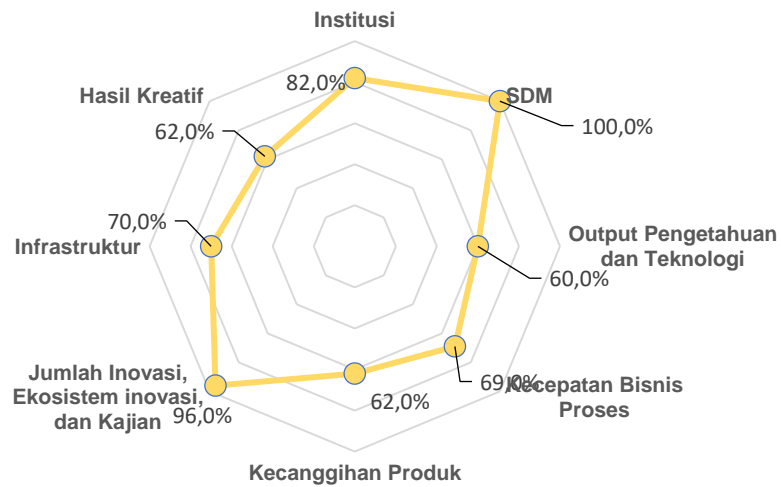
Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Batang beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional | 15 |
| Inovasi Daerah Pecegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern | 15 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum | 15 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel | 15 |
| SiMARDi 7.0 (Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis) | 21 |
| SIMBAKE PETAN | 0 |
| STRATEGI BIDIK NORMAL JURUS COFIT | 104 |
| KLINIK PENGADAAN | 78 |
| Alat Perekam Data Elektronik (TAPPING BOX) | 70 |
| SIMPEG Plus Pelayanan Kepegawaian Online | 125 |
| Batang Smart Spasial Sistem (BS3) | 88 |
| JDIH DPRD Batang Terintegrasi | 112 |
| DIKASI KADO (Diskusi dan penyampaian Aspirasi melalui aplikasi SLI.DO) | 102 |
| E-Jadwal dan E-Surat DPRD | 59 |
| Digital Library DPRD | 78 |
| E-Aspirasi DPRD | 45 |
| KLINIS BISNIS | 123 |
| INOVASI PENGOREKSIAN PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH SECARA ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI WHATSAPP | 16 |
| SIMPELBANG | 49 |
| Klinik Pengadaan Barang/Jasa | 38 |
| STRATEGI BIDIK NORMAL JURUS COVID | 81 |
| GERAK PESAT (Gerakan Serentak Pesan Sehat) | 14 |
| Menik Mandi (Dokumen Elektronik Mandiri) | 111 |
| PPDB ONLINE JENJANG SMP | 55 |
| Mesin Cetak Mandiri (MCM) Desa/Kelurahan | 118 |
| Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) | 6 |
| e-Perpus Batang | 6 |
| E-PBB | 89 |
| SINAWAS (Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan) | 24 |
| lakon-e (lapor dan konsultasi elektronik) | 90 |
| PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | 12 |
| Pengisian Perangkat Desa berbasis CAT | 32 |
| Si Emping RSUD Limpung | 89 |
| "TERPANA" Kecamatan Bawang | 43 |
| E-LOGIS | 31 |

| | |
|---|-----|
| Silinmas Online | 61 |
| PENGLOLAAN BANK SAMPAH | 0 |
| Aplikasi Pasar Online DOTUKURA | 95 |
| E-Absensi Rapat Paripurna DPRD | 25 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP | 15 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata | 0 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Restoran | 0 |
| SIMPELPAKORA | 0 |
| SIKOHAR | 12 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel | 0 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum | 52 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern | 15 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional | 15 |
| PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS CHAT/DIGITAL | 93 |
| Penyelenggaraan Integrasi Layanan Panggilan Darurat 112 di Wilayah Kabupaten Batang | 128 |
| PEMBENTUKAN PASUKAN GOT | 0 |
| E Jurnal | 96 |
| Bu Camad Tamasya | 13 |
| Aplikasi Pelayanan Pelanggan, Bernama BANYU | 100 |
| Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja Kabupaten Batang Berbasis Website (Batang Career) | 115 |
| SIMPKB DAN SMART CARD SEBAGAI BLUE | 86 |
| Lomba Menulis Esai tentang JDII Kabupaten Batang Tahun 2020 | 69 |
| E-SAKIP | 8 |
| Lomba Pengelolaan JDII Pemerintah Desa Tahun 2020 | 69 |
| Website JDII Kabupaten Batang (Upgrade) | 116 |
| MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATANG | 81 |
| SiMARDi (Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis) | 52 |
| JIKD (Jaringan Informasi Kearsipan Daerah) | 32 |
| Sistem Informasi Pengawasan Ormas Parpol dan Orang Asing | 103 |
| e-Perpus Batang | 41 |
| Sistem Integrasi Data Operasional Perusahaan Berbasis Teknologi, Bernama SIKOMPAK | 34 |
| E-Monev Perencanaan Pembangunan | 115 |
| PERPUSTAKAAN ONLINE JDII KABUPATEN BATANG | 91 |
| WEBSITE SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (WEBGIS) JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN BATANG | 64 |
| e-BPHTB | 54 |
| Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor di Masa Pandemi Covid-19 | 0 |

| | |
|--|-----|
| E-Budgeting | 49 |
| Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kantor di Masa Pandemi Covid-19 | 27 |
| Penelitian Pupuk Organik | 23 |
| Penerapan Sistem Perkantoran Elektronik (e-Office) | 79 |
| Pengembangan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif | 76 |
| Ayo Belajar Via Radio | 91 |
| TRAFFIC CAMERA | 86 |
| AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) | 55 |
| SP2D Online | 45 |
| PERCEPATAN PELAYANAN SIM DRIVE THRU PERPANJANGAN SIM A & C DI MAL PELAYANAN PUBLIK KAB BATANG | 26 |
| GEBYAR PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN" SERENTAK (Gelupak Bumba) | 0 |
| "ARSIP DINDING" (Pak Karding) | 0 |
| PROGRAM "PATEN Reban" | 0 |
| Klinik Hukum Online (Legal Care Online) | 28 |
| KATALOG PRODUK HUKUM DAERAH | 8 |
| Kerjasama Bag Perekonomian&SDA Kab. Batang dengan Pihak ketiga UNS Surakarta dalam pelaksanaan UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) Aneka Usaha Batang | 30 |
| Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 39 |
| APLIKASI PRESENSI TAMU ELEKTRONIK | 25 |
| PPID Android | 114 |
| AREA RESEPSIONIS PENGUNJUNG JDIH | 16 |
| SISTEM INFORMASI PELANGGAN BARU (SIMPB) | 52 |
| Aplikasi Slip Gaji Sekretariat dan DPRD Kabupaten Batang | 25 |
| KEDAI HUKUM | 16 |

D. KABUPATEN BLORA



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Blora

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Blora memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu 100.0%. Artinya seluruh indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Output Pengetahuan dan Teknologi merupakan variabel dengan skor paling rendah (60.0%). Namun secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup baik, yaitu termasuk dalam parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



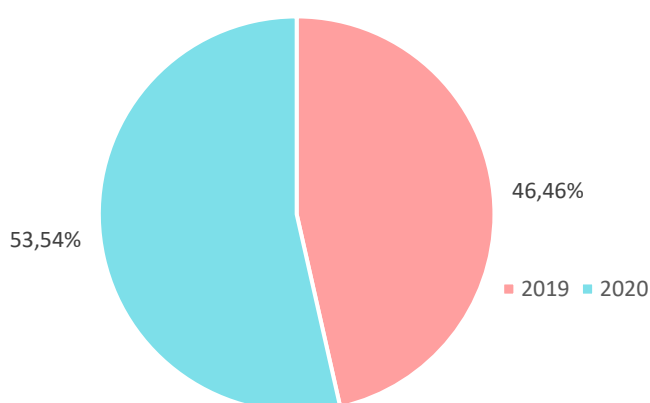
Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Blora

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Blora. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator. Indikator Jumlah Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu 1040%. Selanjutnya, indikator nilai IPM meningkat 0.19%, indikator Jumlah Peningkatan PAD meningkat 21.40% serta indikator Jumlah Pendapatan Perkapita meningkat 5.44%.

Sementara itu, terdapat tiga indikator yang tidak mengalami perbaikan. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi menurun 8.77%. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 1.00% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Blora mengalami peningkatan sebesar 1.00% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.64%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Blora meningkat 0.64% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

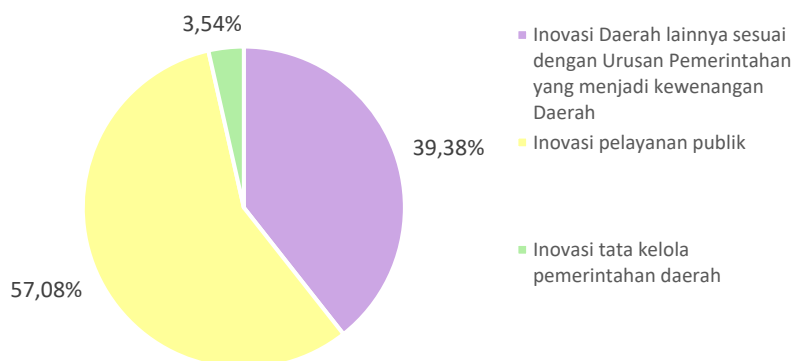
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Blora

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Blora telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 121 (53.54%) inovasi dari 226 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 105 (46.46%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2019.

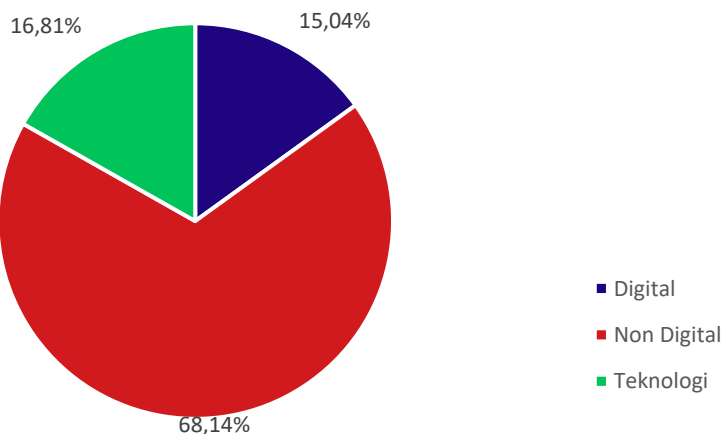
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Blora

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 129 (57.08%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 8 (3.54%) inovasi dengan bentuk tata kelola pemerintahan daerah, sementara 89 (39.38%) inovasi adalah inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

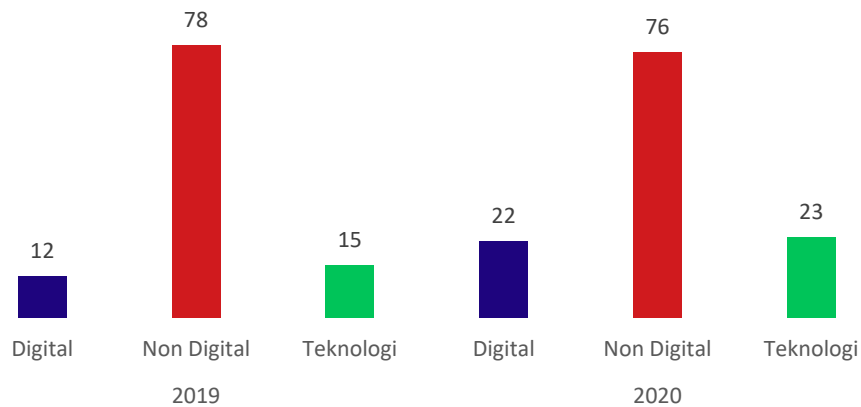
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Blora

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 154 (68.14%) dari total inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Blora merupakan inovasi non digital. Terdapat pula 34 (15.04%) inovasi yang merupakan inovasi digital dan 38 (16.81%) inovasi teknologi.

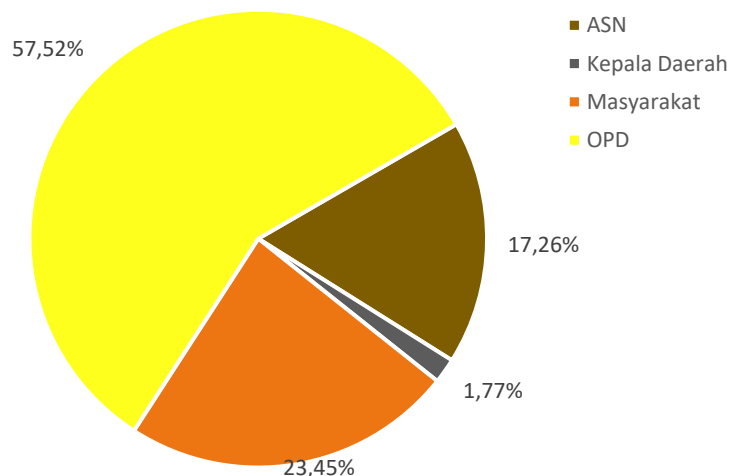
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Blora

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya inovasi digital dan inovasi teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 12 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 22 inovasi. Demikian pula dengan inovasi teknologi mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 terdapat 15 inovasi teknologi yang dilaporkan lalu pada tahun 2020 menjadi 23 inovasi digital. Sementara itu, inovasi non digital mengalami sedikit penurunan yang mana pada tahun 2019 terdapat 78 inovasi non digital namun pada tahun 2020 hanya terdapat 76 inovasi non digital.

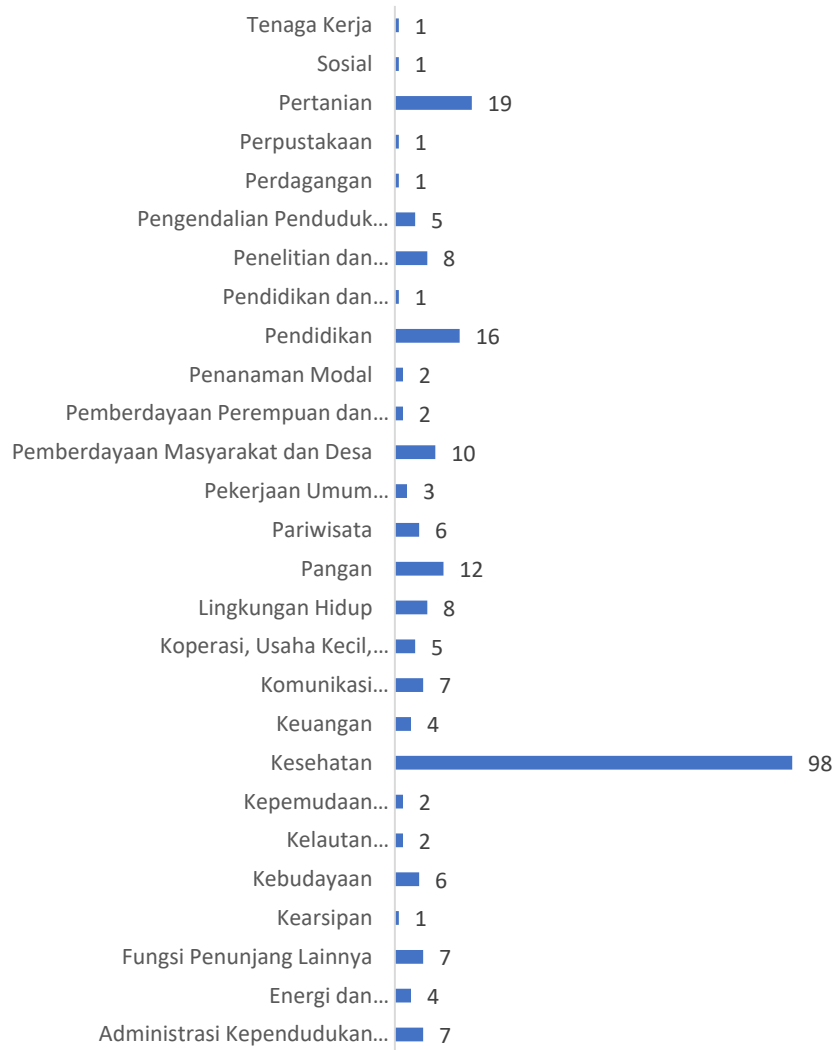
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Blora

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Blora pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 130 (57.52%) inovasi. Kemudian terdapat 53 (23.45%) inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat, 4 (1.77%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah serta 39 (17.26%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

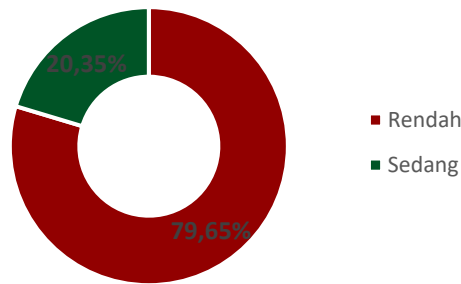
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Blora

Inovasi daerah pada Kabupaten Blora tersebar pada 27 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada kesehatan yaitu 98 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Blora, terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 1 inovasi, urusan pendidikan 16 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 3 inovasi, serta urusan kesehatan 98 inovasi.

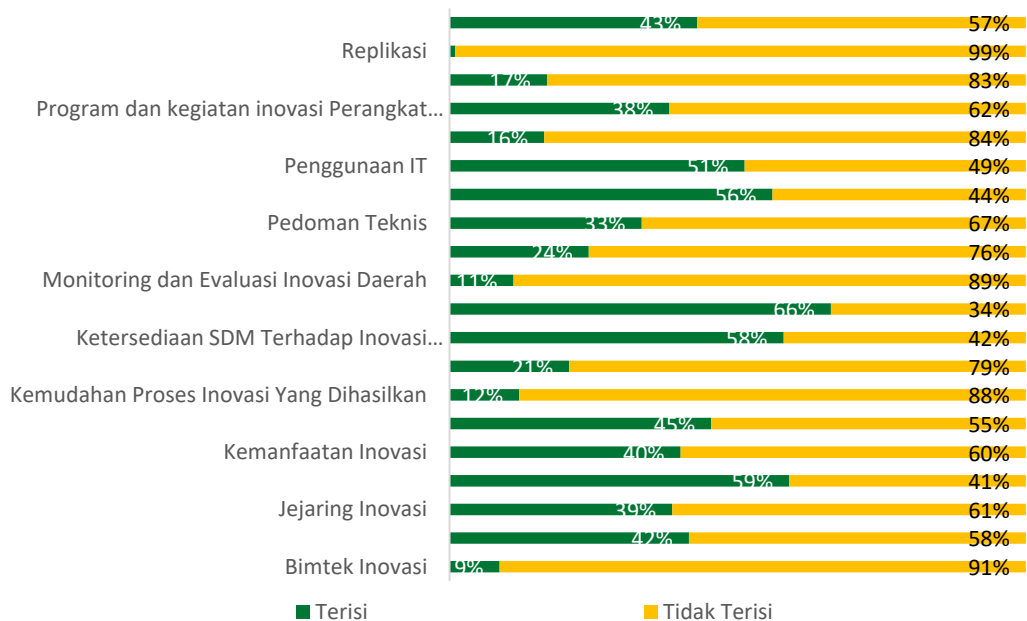
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Blora

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Blora masih memiliki skor kematangan yang rendah dan sedang. Terdapat 180 (79.65%) inovasi yang termasuk kategori skor kematangan rendah dan 46 (20.35%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

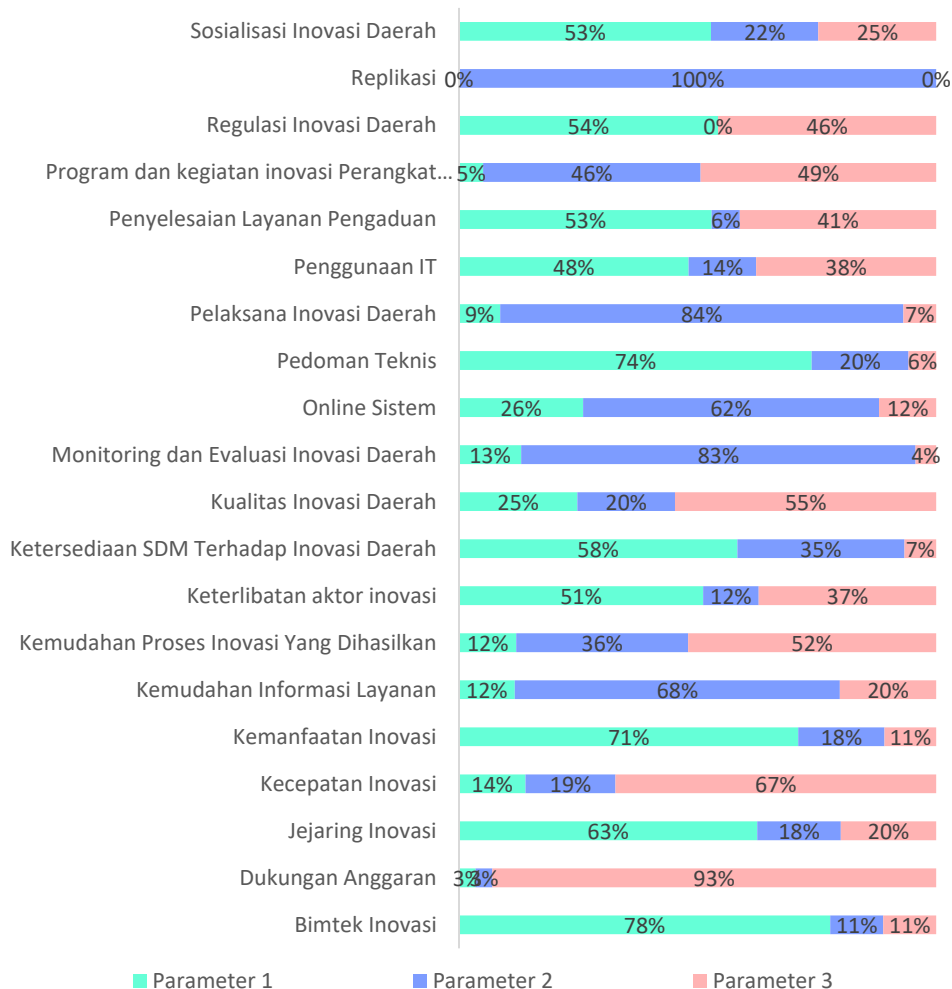
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blora

Indikator Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 66%, artinya 66% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Blora telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 1% artinya hanya 1% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 93%, artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Dukungan Anggara masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Replikasi termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator

dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 78%, artinya 78% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Bimtek Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Blora beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Blora beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| PARIWISATA BLORA AMAN DARI CORONA | 34 |
| BLORA SMART CITY | 45 |
| SOLAR MOVING AERATOR (AERATOR GERAK UNTUK BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR TENAGA SURYA) | 53 |
| POSBINDUKu AMByar | 24 |
| KAPOK MAKSIA T PODO TOBAT (KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI TBC) | 12 |
| PENTING DEKET BU GIMAH (PENCEGAHAN STUNTING DENGAN PEMBUATAN KEBUN GIZI TIAP RUMAH) | 19 |
| POKESMONSAS (POLI KESEHATAN MANULA ONE STEP SERVICE) | 12 |
| PROLANIS MANTAP JIWA (Pemeriksaan Penyakit Kronis Satu Atap Jasmani dan Rohani) | 12 |
| GERBEK IGUANA (GERAKAN BEKALI ILMU GIZI IBU DAN ANAK) | 12 |
| KONTRAKSI BETIS | 12 |
| KONTRAKSI HATI | 12 |
| PEN PERTAMAKS | 12 |
| PENYU MUSLIM (PENYULUHAN PENYAKIT DI MUSLIMATAN) | 12 |
| SKRINING BAYI BARU LAHIR | 12 |
| BAGAS (BARANG BEKAS JADI WARAS) | 12 |
| BATU CETHING | 12 |
| DEDI PETILAT (DETEKSI DINI PENAKIT TIDAK MENULAR) | 12 |
| MEGURU ILMU PENTING (MENDEN GUYUP RUKUN IKUT LIBATKAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN STUNTING) | 15 |
| PANTES BUATAMU (PROGRAM PEMANTAUAN TENSI DAN DIABETES MELITUS BUAT PASIEN UMUM) | 28 |
| SPUTJEK (SPUNTUM OBJEK) | 23 |
| KAK ARIF MUTER UTUBE (KADER AKTIF PENEMU TERDUGA TUBERCULOSIS) | 30 |
| KONSELOR SEBAYA | 12 |
| PAPI MAMI OKE (PENDAMPINGAN SENAM IBU HAMIL OLEH KELUARGA) | 6 |
| SAYANG KAMU (SCREENING IVA DATANG KE DESAMU) | 12 |
| PETIR SALIN (PEndampingan Terpadu Ibu Hamil Resti Bersama Linsek) | 45 |
| PIS-PK REDI (PIS PK Terintegrasi dengan Rekam Medis) | 12 |
| Penambahan Parameter Uji Kualitas Air dan Udara Ambien | 12 |
| Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 | 19 |

| | |
|--|----|
| LAKON LKPM (LAYANAN KONSULTASI LKPM) | 74 |
| LATIVA (Layanan Implant dan IVA) | 56 |
| NISA KOLBU (NILA SALIN KOLA BULAT) | 45 |
| SIRAMBO | 88 |
| UNGKER BLORA (UPAYA NILAI GANGGUAN KEJIWAAN REMAJA BLORA) | 43 |
| Penurunan Kasus Stunting Desa Sumberejo Melalui Gerakan KELUPAS (Keluarga Peduli Anak Stunting) | 44 |
| SI PETARUNG (Sistem Informasi Penataan Ruang) | 53 |
| GENDHIS MANIS (Gerakan Hidup Sehat Setiap Kamis, Masyarakat Todanan Bersama PROLANIS) | 41 |
| UPPKSAI | 40 |
| i-Fogponic: Solusi efisiensi dan efektifitas pertanian berbasis Internet of Things | 82 |
| AMFEEBI Automatic Feeder with Bibis System | 16 |
| KERJASAMA SALING MENGUNTUNGGAN IKAN LELE, KUTU AIR, CACING SUTRA | 16 |
| KERIPIK JAMUR JANGGEL | 42 |
| Aplikasi dan Budidaya Cynobacter Sebagai Pengganti Pupuk Urea Secara Berkelanjutan Pada Lahan Persawahan Khususnya Padi. | 40 |
| BLORAKULTUR Sebagai media pembelajaran sederhana berbasis android | 57 |
| LI.TANI (Literasi dan Pertanian) | 46 |
| PUPUK ORGANIK PADAT ARANG PENGASAPAN LIMBAH TOP | 52 |
| INVENSI KUKIS DAUN PEPAYA: TIDAK PAHIT, CRUNCHY DAN MELANCARKAN ASI | 47 |
| RANCANG BANGUN ALAT PERAGA INDUKSI ELEKTROMAGNETIK | 47 |
| Pengembangan Microbubble Generator sebagai Teknologi Pengolah Limbah Domestik Grey Water yang Ramah Lingkungan | 28 |
| KERAJINAN BLANGKON DARI PELEPAH PISANG | 33 |
| "GARDU PENTING" Gerakan Terpadu Penanganan Stunting. | 78 |
| BLORA.ART: MEDIA KREATIF ANAK MUDA DAN REMAJA DI BLORA | 50 |
| PEMANFAATAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA UNTUK RAK HELM | 43 |
| SEPEDA LISTRIK BERTENAGA BATERAI LAPTOP BEKAS | 47 |
| Mesin Irat Bambu Anyaman | 60 |
| PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN | 24 |
| RANCANG BANGUN PALANG PINTU GERBANG MENGGUNAKAN TENAGA SURYA | 27 |
| MESIN PENCACAH BOTOL PLASTIK | 27 |
| RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN MENGGUNAKAN TURBIN ANGIN SPIRAL ARCHIMEDES (ASWT) | 27 |
| ALAT DETEKSI STUNTING | 27 |
| DC KOMTRIK | 27 |
| Superfood Combination: Snack Sehat Berbasis Belalang dan Daun Kelor Guna Peningkatan Gizi di Kabupaten Blora | 56 |

| | |
|--|----|
| PEMANFAATAN LAHAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTANIAN TERPADU TERBARUKAN "SAPTA" | 30 |
| "EUTIK" INOVASI KRISTIK MASA KINI | 33 |
| PEMBERIAN KUE SELEDRI (KUDRI) PADA BALITA SEBAGAI ALTERNATIF PMT | 30 |
| Alat musik petik dari bambu | 27 |
| PENGAIRAN KEBUN OTOMATIS | 18 |
| BY-LEPPIS (Biskuit Pelepah Pisang) | 27 |
| LOW PREWAFE (Low Pressure Water Filter) | 55 |
| Es Krim Lempuyang Gajah | 41 |
| KUMA (kukis moringa) Solusi gizi buruk | 39 |
| AUTOMATIC WATERING SYSTEM (Sistem Penyiraman Otomatis Untuk Perawatan Tanaman Efektif dan Efisien) | 31 |
| Implementasi Warna Batik Dengan Ekstrak Daun Jati Sebagai Identitas dan Parameter Orisinalitas Batik Blora | 31 |
| ECO-FRIENDLY BIOPORE COMPOSTER BINS | 37 |
| PENETAS TELUR UNGGAS BERBASIS PANAS MATAHARI | 35 |
| Kerajinan bunga dari kulit kwaci dan pelepah pisang | 39 |
| Peningkatan Peniris Minyak | 30 |
| PEMBERDAYAAN BELAJAR KOMPUTER BERSAMA | 12 |
| KETAWA (KELOLA DAN TERAPI JIWA) | 19 |
| AKIh Wanita | 47 |
| E-SKM (Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat) | 26 |
| Bank Sampah Online Melinda Karangboyo | 18 |
| Kesehatan, Obat obatan dan Kosmetika (Sabun Antiseptik Herbal) | 39 |
| SIODAH (SIAGA OEJK DAHAK) | 47 |
| Selintas, sehai bersalin Akta Lahir Tuntas | 36 |
| PENTOL (PENDAFTARAN ONLINE) | 24 |
| KELORANIS | 57 |
| THERA (Aplikasi Permainan Edukatif tentang Legenda Blora) | 72 |
| SEKAYU (Good Wood Good Mood) | 71 |
| PEMANFAATAN LIMBAH PALET KAYU JATI BELANDA MENJADI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN BERNILAI JUAL | 71 |
| SIAP KANG | 4 |
| PEMBANGUNAN TALUT JAMBETELU KEC. BOGOREJO | 37 |
| Pembangunan Jaringan Fiber Optik (FO) | 29 |
| PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR USAHA MIKRO BATIK DENGAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KOMUNAL | 28 |
| Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/KP | 35 |
| Landa Lewa (Layanan Daring lewat Whatsapp) | 31 |
| Deklarasi Damai Pelaksanaan Pilkades | 36 |
| Demplot budidaya Jambu kristal | 27 |
| ZASKIA dengan Buku KIA "Sedinten Selembar" | 32 |
| NGOMEL BOOK | 20 |

| | |
|---|----|
| KEJI BELING ASSEK MAS (KEsehatan Jiwa BErsama LINTas keluarGa lintAS SEKtoral dan MASyarakat) | 33 |
| "TARIK SES" | 50 |
| Pengolahan Pascapanen Mete | 45 |
| Bimtek bagi tenaga teknis dan masyarakat desa | 31 |
| Gerakan Institusi Bangkit (GESIT) | 12 |
| PANDEMI (Pendaftaran dan Konsultasi Online dengan Menggunakan Aplikasi) | 0 |
| Belanja On-Line (integrasi Aplikasi E-Finance dengan CMS bank Jateng) | 30 |
| Pengendalian OPT Wangwung pada Tanaman Kelapa dengan menggunakan jamur Metharizium | 0 |
| Pasar Tani | 0 |
| Host to host bppkad BPN | 0 |
| Peremajaan Kelapa dengan Varietas Genjah | 45 |
| ANTISIPASI ANAK STUNTING (ANTANGIN) | 67 |
| SI PETARUNG (Sistem Informasi Penataan Ruang) | 58 |
| Deklarasi Damai Pelaksanaan Pilkades | 44 |
| L000 KAE ADA IBU HAMIL (Halooo Kader Pendamping Ibu Hamil) | 50 |
| PANDEMI (Pendaftaran dan Konsultasi Online dengan Menggunakan Aplikasi) | 56 |
| PELANGI MIRSANI KB (Pelayanan Penuh Empati dengan Deteksi pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan KB" | 54 |
| Alat Pemotong Ceriping Ketela di Desa Bacem, Kecamatan Banjarejo | 42 |
| SICABE (Sistim Informasi Capaian KB) | 26 |
| PENINGKATAN MINAT BACA SISWA KELAS 1 DI SD NEGERI 2 NGILEN KECAMATAN KUNDURAN | 0 |
| APLIKASI WARUNG PAKDE (WARGA BERUNTUNG PELAYANAN ADMINISTRASI BERHENTI DI DESA) | 27 |
| LIGA-SPH (Lingkaran Gizi Antropometri SuPriHatin) | 68 |
| GARDU WANGI (GERAKAN TERPADU PEMANTAUAN WANITA HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS DENGAN BERDASARKAN APLIKASI PELANGI) | 43 |
| GARDU KIAKB | 31 |
| GEMES TB (Gerakan Menemukan Suspect TB) | 35 |
| ISMAN (ISOLASI MANDIRI) DAN CINTA | 79 |
| MEDIA INFORMASI MELALUI VIDEO E-TUTORIAL PENGISIAN APLIKASI SIPKD DI DPPKB | 42 |
| Aplikasi E-PAKSI (Elektronik Penilaian Aset Kinerja Sistem Irigasi) | 38 |
| PEMERIKSAAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM SECARA TES INSPEKSI VISUAL DENGAN ASAM ASETAT (IVA) | 59 |
| TP PKK KABUPATEN PEDULI | 44 |
| Blora Agriculture Festival 2019 | 30 |
| Gelontoran Air dari Bengawan Solo | 12 |
| NADA CINTA DARI DIA (Bentuk Perhatian dari Kader pada penderita Darah Tinggi & Diabetes dengan telf seluler) | 43 |
| Sistem Manajemen One Stop Service Layanan Penyakit Tidak | 62 |

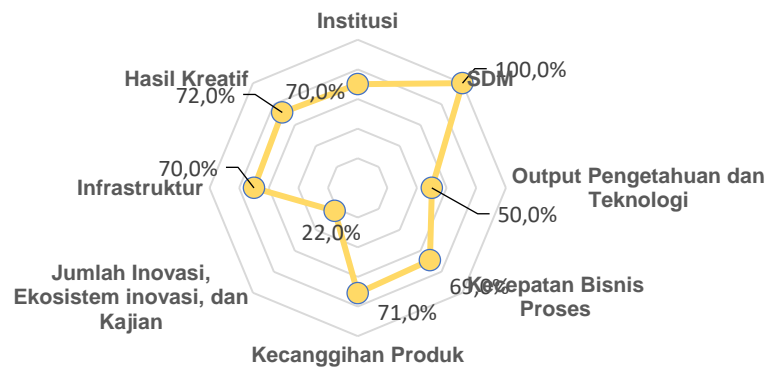
| | |
|--|----|
| Menular (SI MOONSAY PTM) adalah sebuah sistem informasi registrasi dan monitoring Penyakit Tidak Menular | |
| RAMPUNG GASIK (Bareng Sekampung Gerakan Resik) | 39 |
| i Blora | 52 |
| BUNGKUS KERTAS (Bungkar Kakus Kerjasama Lintas Sektor) | 49 |
| Paguyuban Prio Sing Utomo | 36 |
| PENYU SABAR (Pentingnya Menyusu dengan Sabar dan Benar) | 47 |
| "LASKAR PEMIMPI" SISWA KELAS VI SDN 2 BITING KABUPATEN BLORA | 25 |
| MUSTIKA (Melayani Utamakan Selamat Dengan Tanpa Antrian Untuk Kesehatan Warga) | 74 |
| BERLIAN CANTEK (Bareng-bareng wujudkan remaja, catin, bumil tanpa KEK) | 65 |
| BLORA MISTIK (Blora Minim Sampah Plastik) | 33 |
| KAMIS TERPENDEKS (Rekam medis terintegrasi dengan pendekatan keluarga sehat) | 50 |
| SIKAT MAS COVID (Skrining Tepat Mengatasi Covid-19) | 38 |
| Fasilitasi Sosialisasi Pembentukan Posyantekdes | 22 |
| PENDAPA JIWA | 49 |
| IVA SADANIS MOBILE (Pemeriksaan Payudara dan IVA di desa) | 55 |
| I - KEPOMPONG | 61 |
| Sosialisasi dan Pembentukan Posyantekdes | 33 |
| OPTIMALISASI MINAT BELAJAR SISWA KELAS IV SDN 1 KETRINGAN KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA | 23 |
| Pembangunan Obor Pangan Lestari (OPAL) TA 2019 | 25 |
| UPAYA PENANAMAN NILAI – NILAI ANTI KORUPSI SEJAK DINI DI KELAS V SD NEGERI GEMBOL KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA | 17 |
| GERTAK BERSATU (Gerakan Serentak Balita Datang ke Posyandu) | 34 |
| Sistem Informasi Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT) | 32 |
| SAMAWA (Sehat Bersama Gangguan Jiwa) | 29 |
| PIALA DUNIA | 73 |
| Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Harmoni | 43 |
| Pendaftaran varietas tanaman TA 2019 | 33 |
| RATOE ANDIN (Remaja Todanan Anti Pernikahan Dini) | 43 |
| Penanganan Pasca Panen Tembakau | 28 |
| Festival buah TA 2019 | 41 |
| Pembangunan bangsal pasca panen hortikultura TA 2019 | 22 |
| LANSIA SELAMAT (Lansia Sehat, Lansia Beriman dan Tangguh) | 22 |
| SERBUG RAGAMU (SEHAT BUGAR OLAHRAGA DAN MINUM JAMU) | 29 |
| BINTANG KEJORA (Bareng-bareng hilangkan keluh kesehatan dengan olahraga) | 50 |
| PAK KOS (Pelayanan Kontrasepsi Serentak) | 42 |
| POSBINDU SEMARAK (POSBINDU Sehat, Mantap dengan Aktif Olahraga dan Terpantau Kesehatannya) | 41 |

| | |
|--|----|
| Budidaya Kapas Tumpangsari dengan Jagung | 35 |
| Budidaya Kapas Tumpangsari dengan Jagung | 35 |
| GERUTU (Gerakan menemukan TB Paru bersama organisasi-organisasi kemasyarakatan) | 37 |
| RATOE KECE (Remaja Todanan Cegah Anemia dengan Minum Fe) | 41 |
| PENGAWAL (Pengkajian Awal) | 39 |
| CESPLENG (Customer Service senyum ramah, empati dengan semangat pelayanan) | 49 |
| DELIMA MERAH (Dokumen Terkendali Melalui Mutu Agar Terarah) | 66 |
| simandiKB | 52 |
| Pembinaan BUM Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata Banyu Geni | 27 |
| EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PASIEN MELALUI SIMRS, LIS DAN INFORMASI TEKNOLOGI DI RSUD Dr.R. SOETIJONO BLORA | 49 |
| PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA TEMA UDARA BERSIH BAGI KESEHATAN MELALUI Model Snowball Throwing | 14 |
| PENINGKATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SISWA KELAS II SDN 3 BLEBOH KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA | 28 |
| PENINGKATAN PENDIDIKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR PADA SISWA KELAS V SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANGOAN KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA | 19 |
| OPTIMALISASI TATALAKSANA LUKA TERBUKA TRAUMATIK AKUT DI UPTD PUSKESMAS JEPON KABUPATEN BLORA | 20 |
| Dedi Petilar (Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular)/ Stand PTM (Penyakit Tidak Menular) | 60 |
| GEMASIX (Gerakan Masyarakat Cinta ASI Eksklusif) | 26 |
| "LARASS BU" (LAYanan RAMah lanSia diSabilitas & iBU hamil) | 67 |
| PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENANGGULANGAN STUNTING KECAMATAN BLORA | 34 |
| Jasmid (Advokasi KIE kepada CaTin bersama Mitra Kerja) | 16 |
| BULU ANGSA (Bumdes Luminta Membangun Desa) | 22 |
| JEMPOLIS (Jemput Bola Layanan Kesehatan Mobil Siaga) | 25 |
| Percepatan pensertifikatan Tanah Milik PEMKAB | 27 |
| Digitalisasi Desa Sonokidul oleh BUM Desa dengan Layanan Loker Desa Terpadu | 18 |
| Free Wifi | 13 |
| WASIAT KECAMATAN NGAWEN | 55 |
| Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Bangsri (Kampung Pelangi dan Mina Padi) | 25 |
| Pengembangan Desa Wista " Segitiga Wisata Samin" (Eks TPK Klopoduwur, Pendopo Samin, Embung Kedung Sambi) | 20 |
| INOVASI "PANDAWA LIMA" | 28 |
| PENING MINTA SISWA | 18 |
| Jaringan Informasi Pariwisata | 51 |
| TANGGAP DARURAT PSC 119 | 55 |
| Budidaya Jamur Janggol di Dukuh Mojokulon, Desa Banjarejo, | 28 |

| | |
|---|----|
| Kecamatan Banjarejo | |
| SLA (Siapa Layani Aku) & Absensi Online Perangkat Desa | 57 |
| CEMPAKA (Cegah Penyakit Kanker) | 42 |
| TERCURAH DOA (Terupdate Cukup Dari Rumah Data Objek Administrasi Kependudukan) | 10 |
| PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA TEMA UDARA BERSH BAGI KESEHATAN MELALUI MODEL SNOW BALL THRAWING | 30 |
| Upaya Peningkatan Mutu Rekam Medis Terhadap Kelengkapan Pengisian Catatan Rekam Medis Pasien Rawat Inap Di UPTD Puskesmas Jajah Kabupaten Blora | 30 |
| Aplikasi E-Surat | 72 |
| E-Retribsi Pasar | 70 |
| PENINGKATAN PELAYANAN PASIEN HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS DENGAN PEMBERIAN BUKU KONTROL DI UPTD PUSKESMAS JAJAH KABUPATEN BLORA | 13 |
| UPAYA PENINGKATAN KONTROL PEMBERIAN OBAT ORAL (MELALUI MULUT) PADA PASIEN RAWAT INAP DI UPTD PUSKESMAS JAJAH | 0 |
| OPTIMALISASI KEGIATAN PEMANTAPAN MUTU INTERNAL LABORATORIUM DI UPTD PUSKESMAS JAJAH KABUPATEN BLORA | 8 |
| Desa Wisata | 5 |
| Pelem Balado (Pemeriksaan Lengkap Bayi Baru Lahir oleh Dokter) | 38 |
| Perubahan Otomatis Status Setelah Menikah (POSSENİK) Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora | 34 |
| RANCANG BANGUN ALAT PEMIPIL JAGUNG SKALA RUMAH TANGGA | 41 |
| UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS (KEK) TERHADAP STUNTING DENGAN KONSULTASI TENTANG 1000 HARI KEHIDUPAN PERTAMA (HPK) DI PUSKESMAS JAJAH KABUPATEN BLORA | 21 |
| USAHA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) DENGAN SIMULATOR IRENE DONUT SEBAGAI UPAYA PENURUNAN RISIKO KARIES GIGI ANAK DI UPTD PUSKESMAS JAJAH | 32 |
| Pengembangan jambu madu deli TA 2020 | 21 |
| TALI DEMO (Taman Literasi Desa Mojorembun) sebagai Solusi Masalah Pendidikan Akibat Pandemi | 39 |
| Pendampingan Desa Wisata | 38 |
| KECAMATAN SAYANG IBU DAN BAYI(KSIB) / GERAKAN SAYANG IBU DAN BAYI (GSIB) | 22 |
| Inovasi Pemanfaatan Koleksi Benda Cagar Budaya Secara Terpadu di Rumah Artefak | 33 |
| AYO BAYAR PBB | 31 |
| Percepatan Pelunasan Pembayaran PBB P2 melalui Penataan Tim Intensifikasi PBB P2 Desa di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora | 41 |
| DOLIPAJI (Doplang Peduli Pasien Jiwa) | 69 |
| USAHA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) DENGAN SIMULATOR IRENE DONUT SEBAGAI UPAYA PENURUNAN RISIKO KARIES GIGI ANAK DI UPTD PUSKESMAS JAJAH | 39 |

| | |
|---|----|
| WES 2500 | 40 |
| TOMBO ATI (Temukan Orang Batuk Obati) | 31 |
| UPAYA PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI OBAT PADA PASIEN RAWAT INAP MELALUI VISITE BERSAMA ANTARA APOTEKER DAN DOKTER DI UPTD PUSKESMAS JAPAH | 44 |

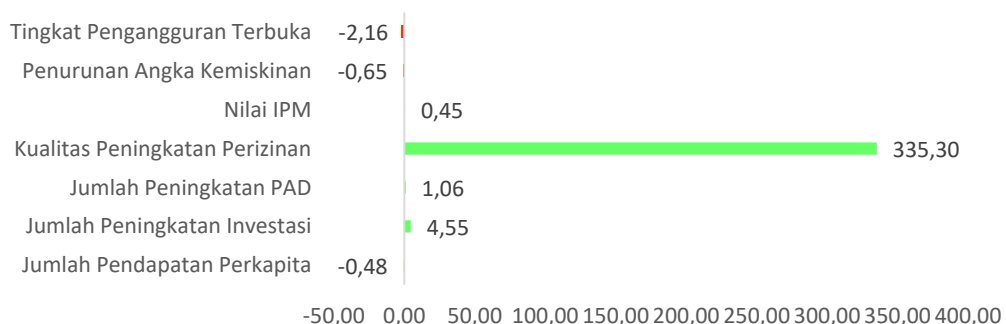
E. KABUPATEN BOYOLALI



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Boyolali

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, capaian Kabupaten Boyolali secara umum sudah cukup baik. Variabel Sumber Daya Alam (SDM) merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 100%. Artinya seluruh indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 22.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih relatif rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



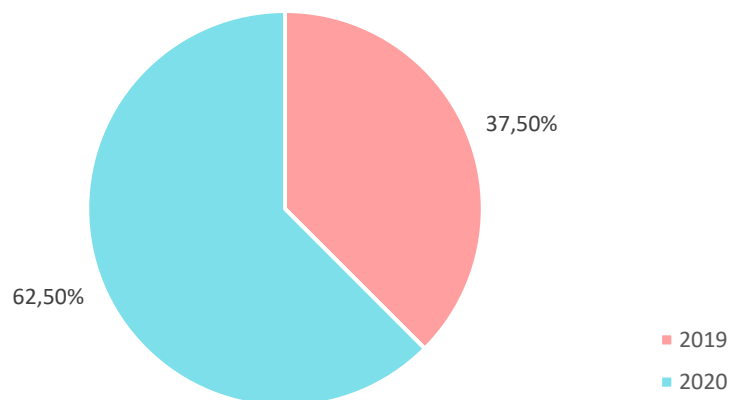
Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Boyolali

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Boyolali. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator. Indikator Jumlah Peningkatan Perizinan mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu 335.30%. Selanjutnya, indikator nilai IPM meningkat 0.45% dan indikator Jumlah Peningkatan Investasi meningkat 4.55%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD juga meningkat 1.06% namun peningkatan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya meningkat sebesar 8%.

Sementara itu, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 2.16% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan sebesar 2.16% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.65%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali meningkat 0.65% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami penurunan sebesar 0.48%, namun penurunan tersebut masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

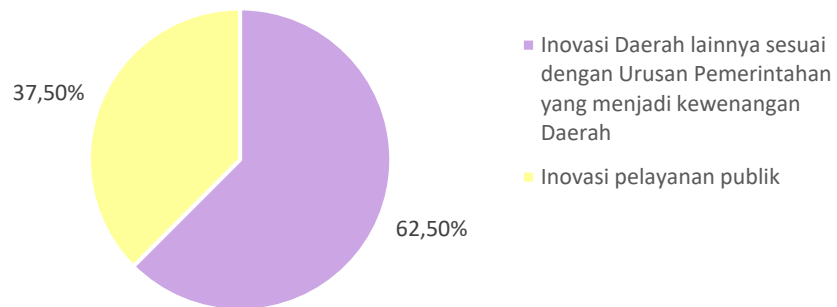
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Boyolali

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Boyolali telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 5 (62.5%) inovasi dari 8 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 3 (37.5%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2019.

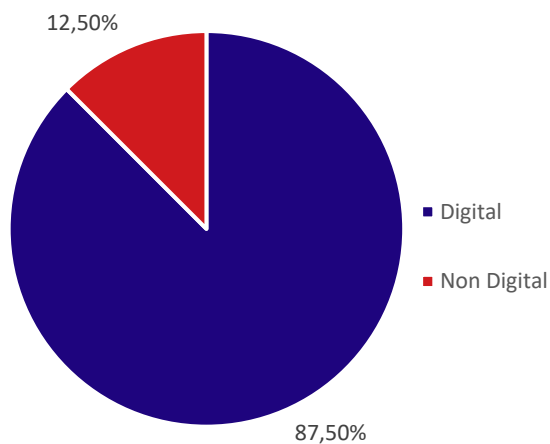
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Boyolali

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu sejumlah 5 (62.5%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 3 (37.5%) inovasi dengan bentuk pelayanan publik sementara inovasi tata kelola pemerintahan belum dilaporkan.

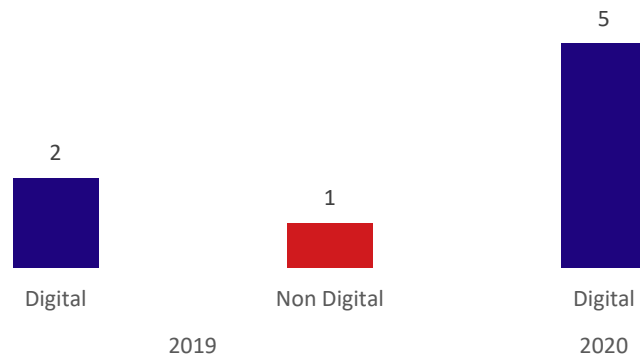
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Boyolali

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 7 (87.5%) dari total inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Boyolali merupakan inovasi digital dan terdapat 1 (12.5%) inovasi yang merupakan inovasi non digital.

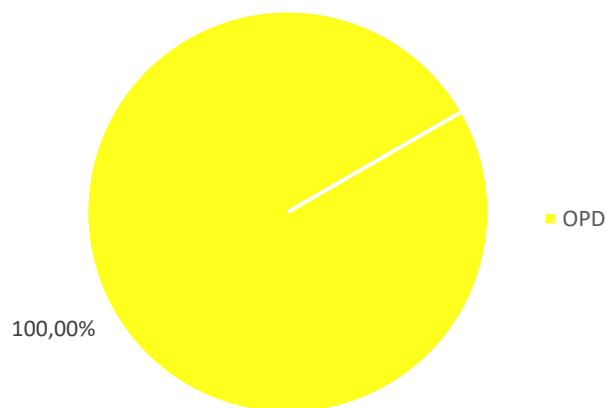
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Boyolali

Berdasarkan grafik diatas, jumlah inovasi digital mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sedangkan inovasi non digital mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 5 inovasi. Namun dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 terdapat 1 inovasi digital yang dilaporkan lalu pada tahun 2020 menjadi tidak ada inovasi non digital.

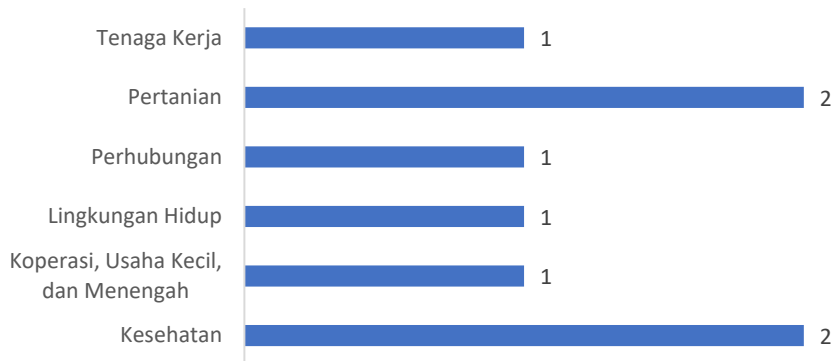
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Boyolali

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah.

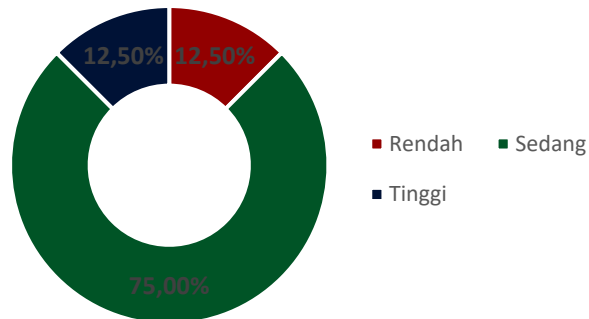
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Boyolali

Inovasi daerah pada Kabupaten Boyolali tersebar pada 6 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan pertanian dan kesehatan yaitu 2 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Boyolali, hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 2 inovasi.

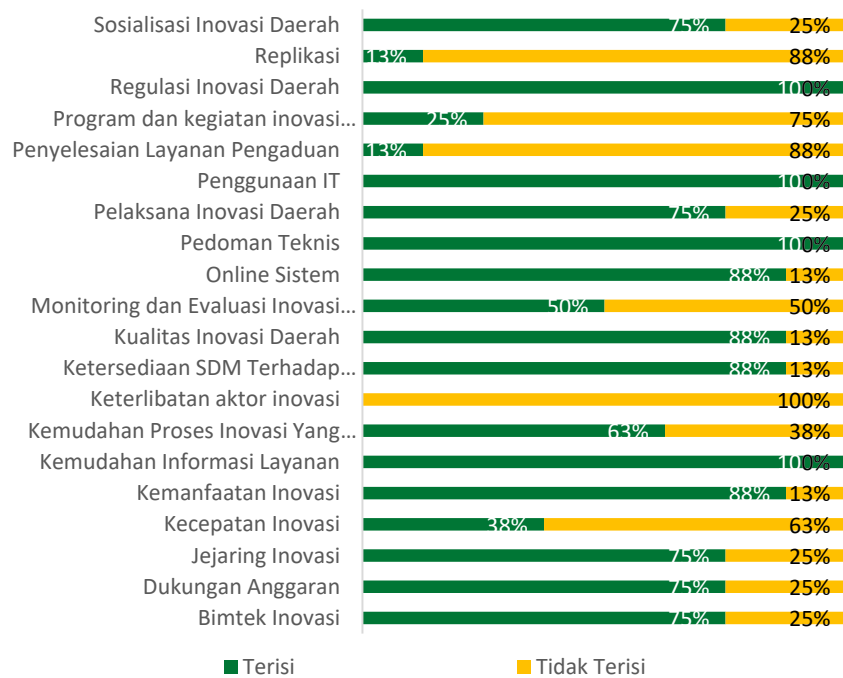
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Boyolali

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Boyolali memiliki skor kematangan sedang. Hanya 1 (12.50%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan tinggi sementara 6 (75.00%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 1 (12.50%) inovasi lainnya termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

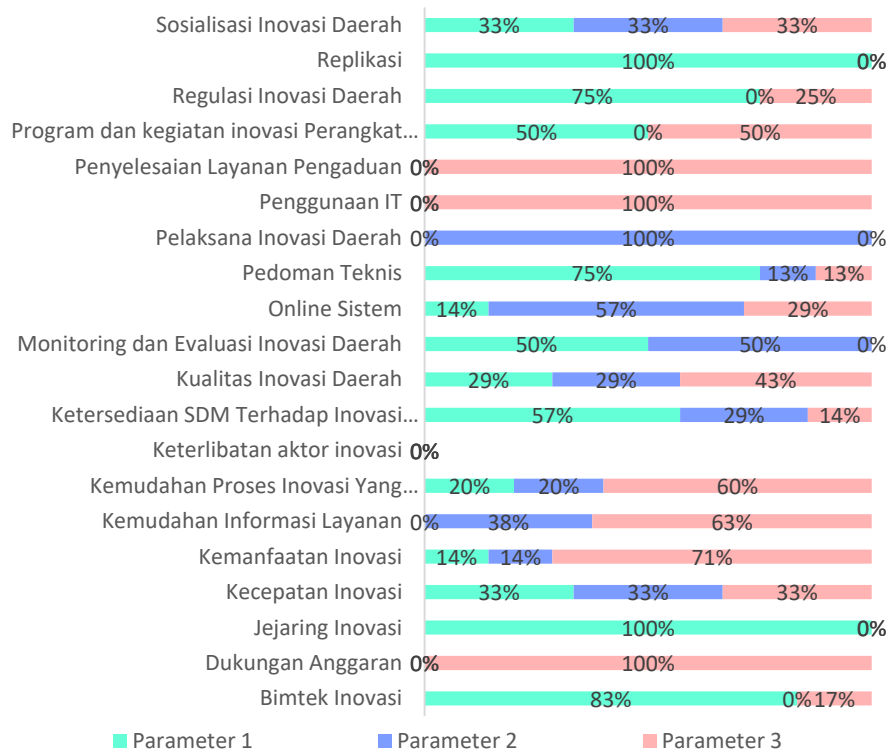
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali

Terdapat beberapa indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu Regulasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Pedoman Teknis dan Kemudahan Informasi Layanan dengan skor 100%. Artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Boyolali telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang terisi data pendukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT dan Dukungan Anggaran yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Jejaring Inovasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi dan Jejaring Inovasi.

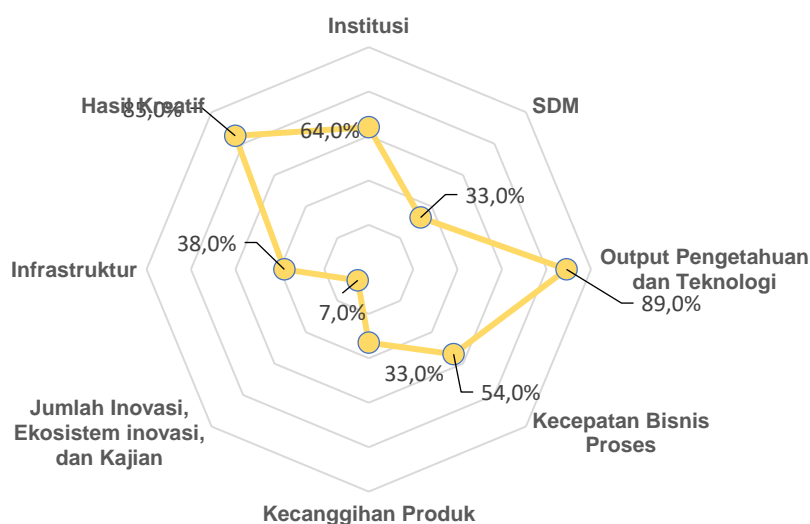
j. Daftar Inovasi Kabupaten Boyolali beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Boyolali beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| APLIKASI BAPER (BOOKING ANTRIAN PERIKSA) | 72 |
| ATCS (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) | 48 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| SI TERI LAPAR (Sistem Terintegrasi Layanan Administrasi Pasien Rawat Jalan) | 86 |
| Aplikasi Sikombun | 78 |
| Aplikasi Alsintan | 58 |
| Aplikasi Pelaporan COVID Tenaga Kerja (PEVITA) | 81 |
| MISTER KRIB (Membangun Sarana Edukasi dan Rekreasi Kebun Raya Indrokilo Boyolali) | 104 |
| Elektronik Sistem UMKM (ESEMU) | 68 |

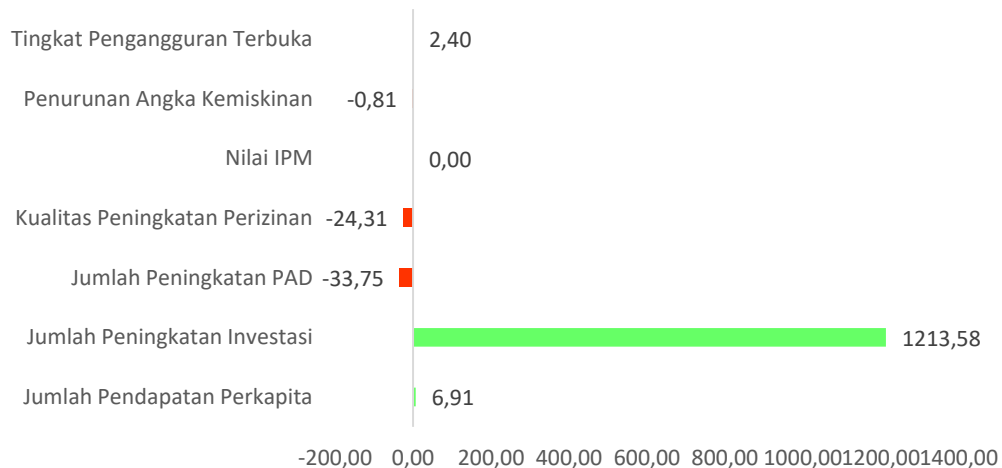
F. KABUPATEN BREBES



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Brebes

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, capaian Kabupaten Brebes secara umum masih berada pada kategori menengah dimana skor variabel dengan tertinggi adalah 89%, yaitu variabel Output Pengetahuan dan Teknologi. Secara umum indikator – indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3), namun skor pada variabel – variabel lain masih relatif rendah. Variabel dengan skor terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian, yaitu 7.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih relatif rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



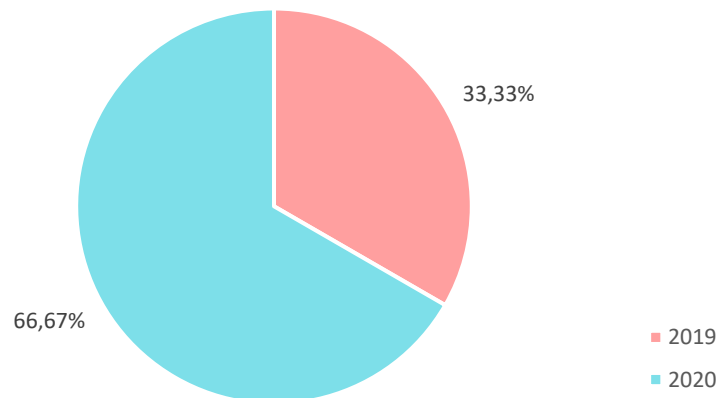
Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Brebes

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Brebes. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan yang paling tinggi hingga mencapai 1213%. Selanjutnya, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita meningkat sebesar 6.91%. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan peningkatan sebesar 2.40% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes mengalami penurunan sebesar 2.40% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Sementara itu, indikator – indikator lainnya mengalami penurunan dimana indikator Kualitas Peningkatan Perizinan menurun 24.31% dan Jumlah Peningkatan PAD menurun 33.75%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan penurunan sebesar 0.81%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes meningkat 0.81% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

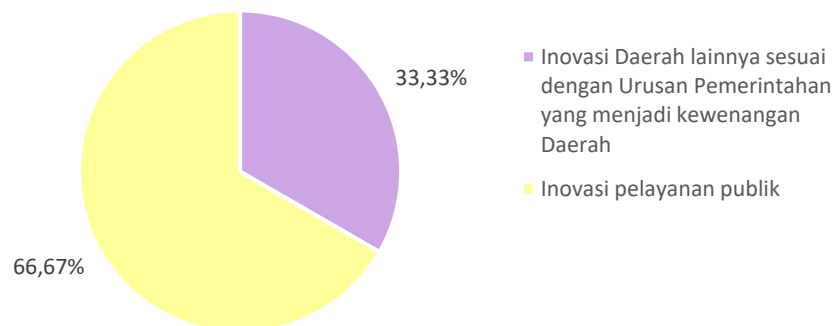
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Brebes

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Brebes diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 2 (66.67%) inovasi dari total inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 1 (33.33%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

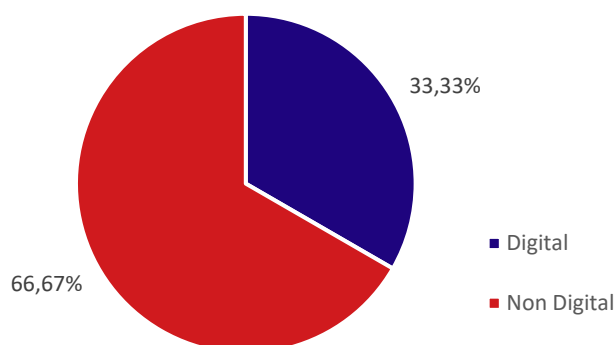
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Brebes

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 2 (66.67%) inovasi, sementara 1 (33.33%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

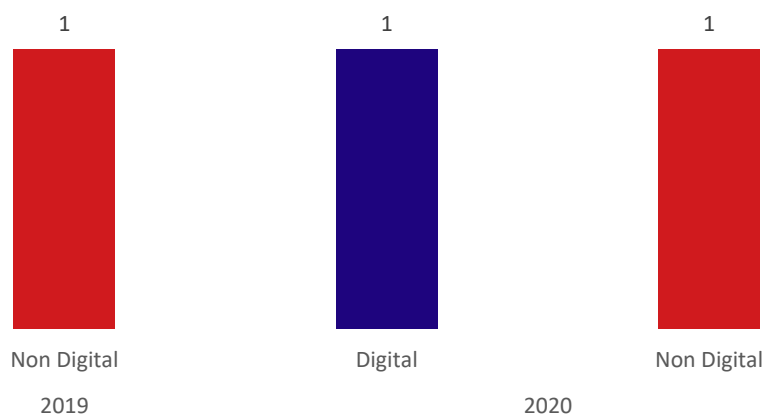
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Brebes

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (66.67%) dari total inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Brebes merupakan inovasi non digital dan terdapat 1 (33.33%) inovasi yang merupakan inovasi digital.

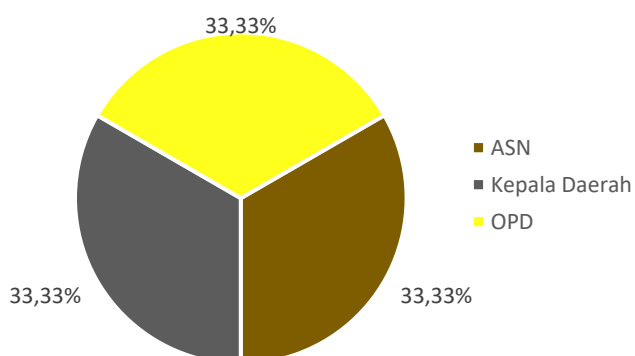
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Brebes

Secara umum jumlah inovasi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa non inovasi digital tidak meningkat dimana pada tahun 2019 dan 2020 inovasi yang diterapkan tetap 1 inovasi. Sementara untuk inovasi digital, pada tahun 2019 tidak terdapat inovasi yang diterapkan lalu pada tahun 2020 bertambah menjadi 1 inovasi digital.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Brebes

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, kepala daerah dan ASN yaitu masing-masing sejumlah 1 (33.33%) inovasi.

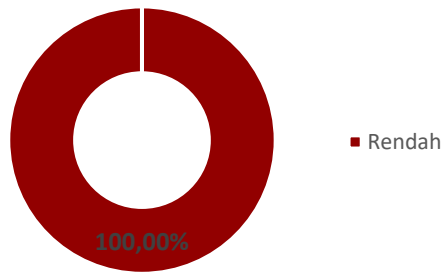
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Brebes

Inovasi daerah pada Kabupaten Brebes tersebar pada 3 urusan pemerintah, yaitu urusan perhubungan, pendidikan dan penanaman modal. Dari 3 urusan inovasi daerah tersebut, terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan sejumlah 1 inovasi, sementara urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum terlaporkan.

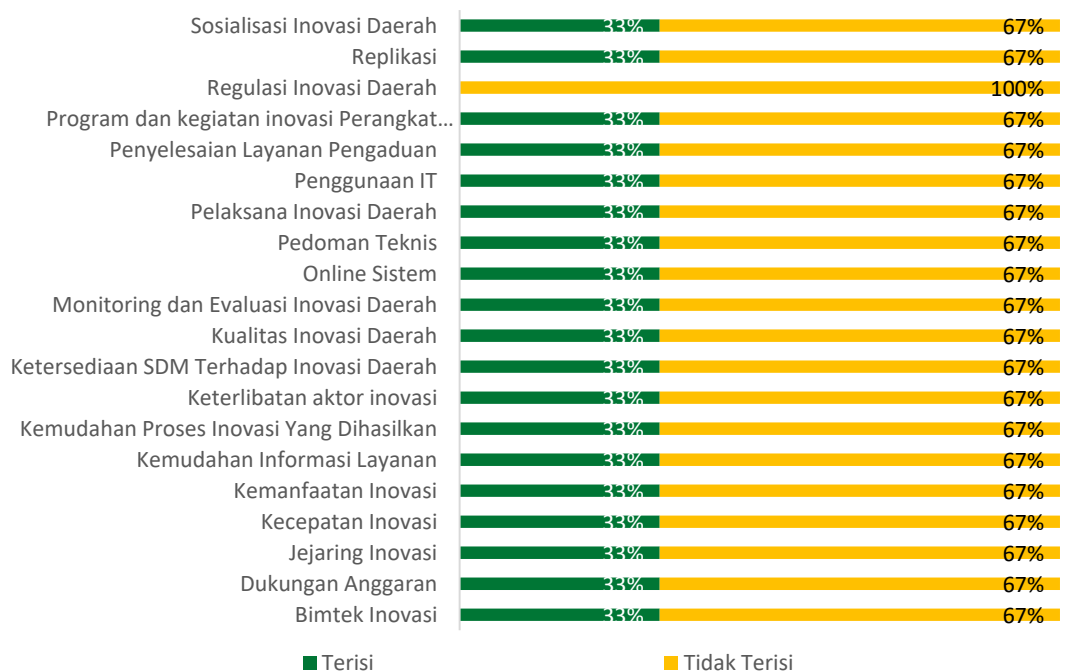
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Brebes

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Brebes memiliki skor kematangan yang masih rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

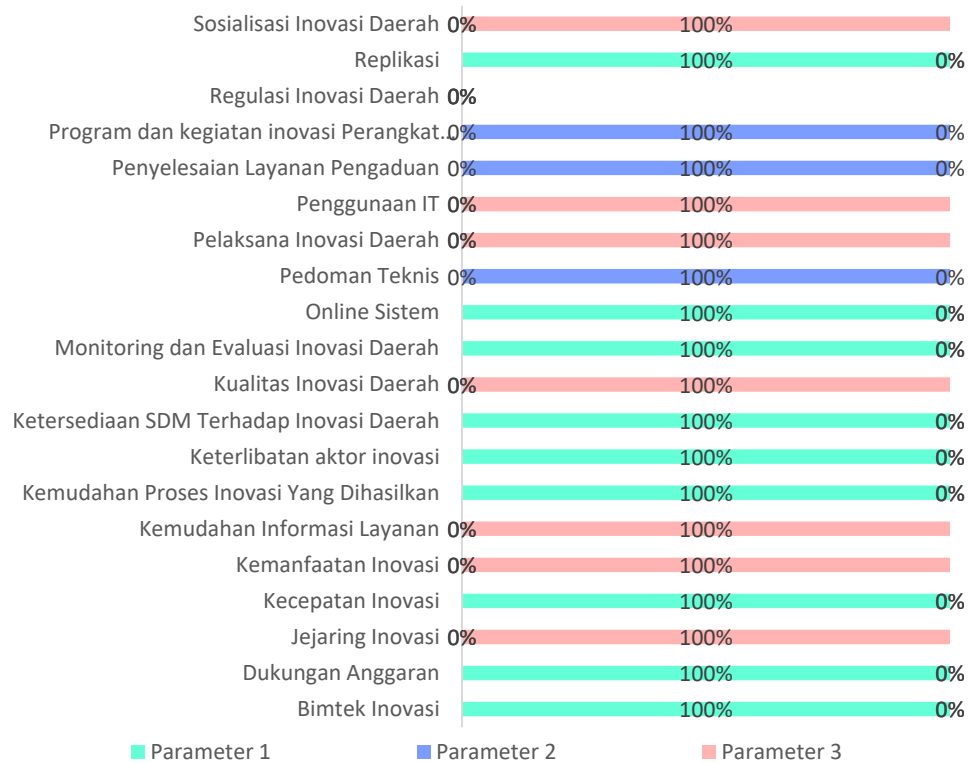
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes

Berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung diatas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh indikator memiliki skor keterisian yang sama yaitu 33%, artinya 33% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Brebes telah terisi data pendukung pada indikator – indikator indeks inovasi daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

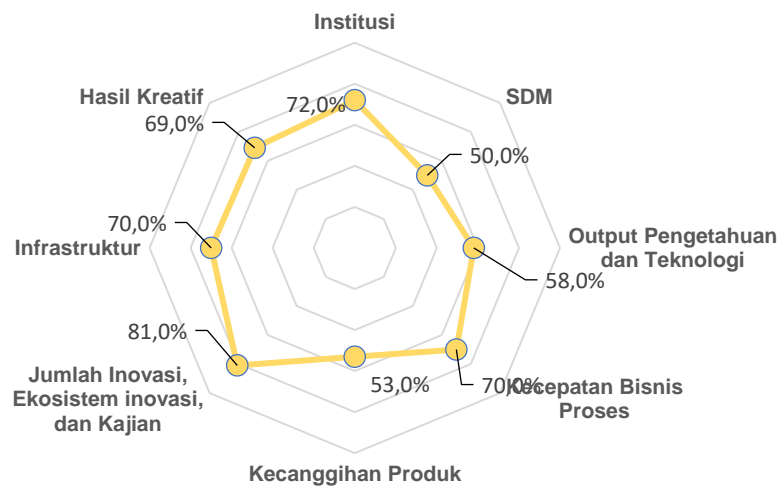
Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa terdapat tujuh indikator yang memiliki skor 100% untuk parameter 3, diantaranya adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, dan seterusnya. Artinya, seluruh inovasi yang mengisi data dukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, terdapat tiga indikator yang memiliki skor 100% untuk parameter 2, yaitu indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Pedoman Teknis, yang artinya seluruh inovasi yang mengisi data dukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter kedua. Sedangkan data dukung pada indikator lain yang belum disebutkan masuk dalam kategori parameter 1.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Brebes beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Brebes beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Pelaksanaan uji kendaraan dengan penerapan protokol covid 19 menuju tatanan normal baru | 19 |
| Transaksi Restribusi Non Tunai | 0 |
| Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) | 0 |

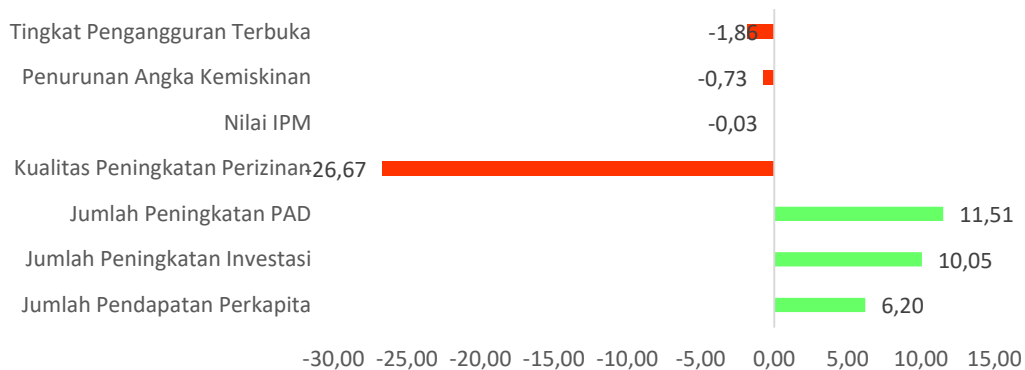
G. KABUPATEN CILACAP



Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Cilacap

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, capaian Kabupaten Cilacap secara umum sudah cukup baik. Variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 81.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Sumber Daya Sendiri (SDM) merupakan variabel dengan skor paling rendah (50.0%). Namun secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup baik, yaitu termasuk dalam parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



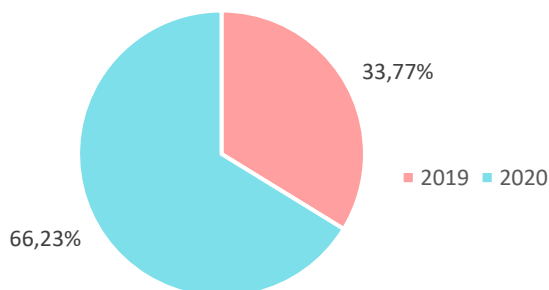
Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Cilacap

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Cilacap. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator, yaitu indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 11.51%, indikator Jumlah Peningkatan Investasi sebesar 10.05%, serta indikator Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 6.20%.

Sementara itu, indikator – indikator lainnya mengalami penurunan, dimana nilai IPM menurun 0.03% serta Kualitas Peningkatan Perizinan menurun 26.67%. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka juga menunjukkan penurunan sebesar 1.85% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan sebesar 1.85% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.73%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap meningkat 0.73% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

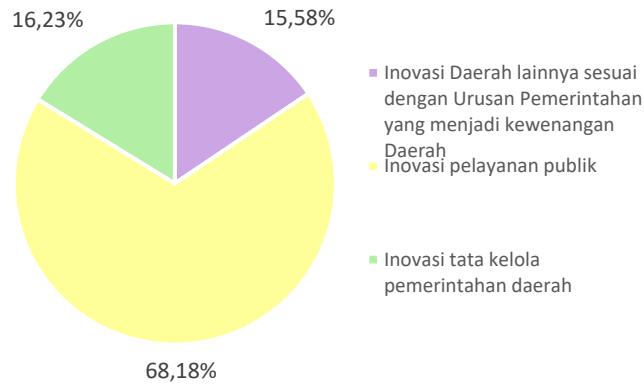
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Cilacap

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Cilacap diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 102 (66.23%) inovasi dari total inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 52 (33.77%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

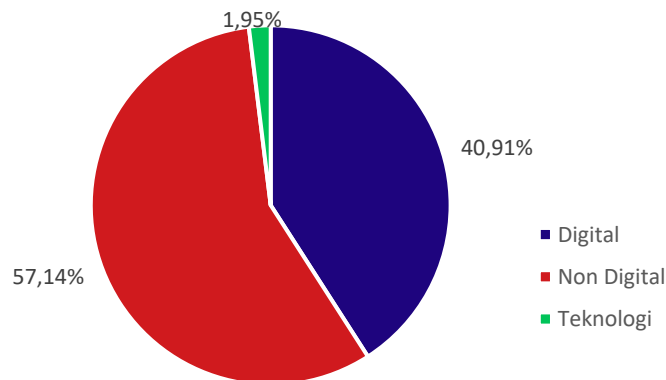
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Cilacap

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 105 (68.18%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 25 (16.23%) inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 24 (15.58%) inovasi dengan bentuk inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

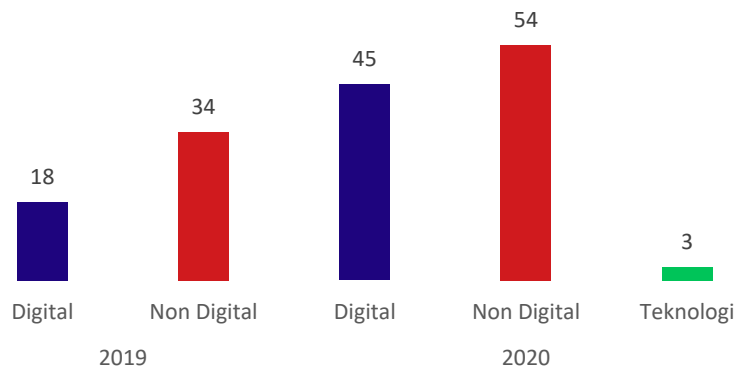
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Cilacap

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 88 (57.14%) dari total inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Cilacap merupakan inovasi non digital. Kemudian, terdapat 63 (40.91%) inovasi inovasi digital dan 3 (1.95%) inovasi teknologi.

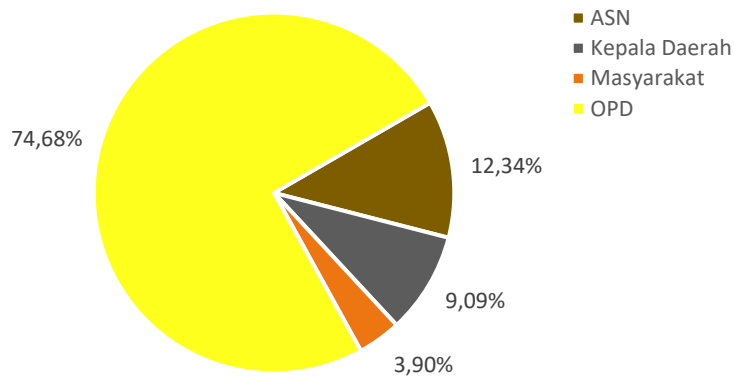
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Cilacap

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 18 inovasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 45 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital, pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 34 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 54 inovasi. Terdapat pula inovasi teknologi pada tahun 2020 sejumlah 3 inovasi.

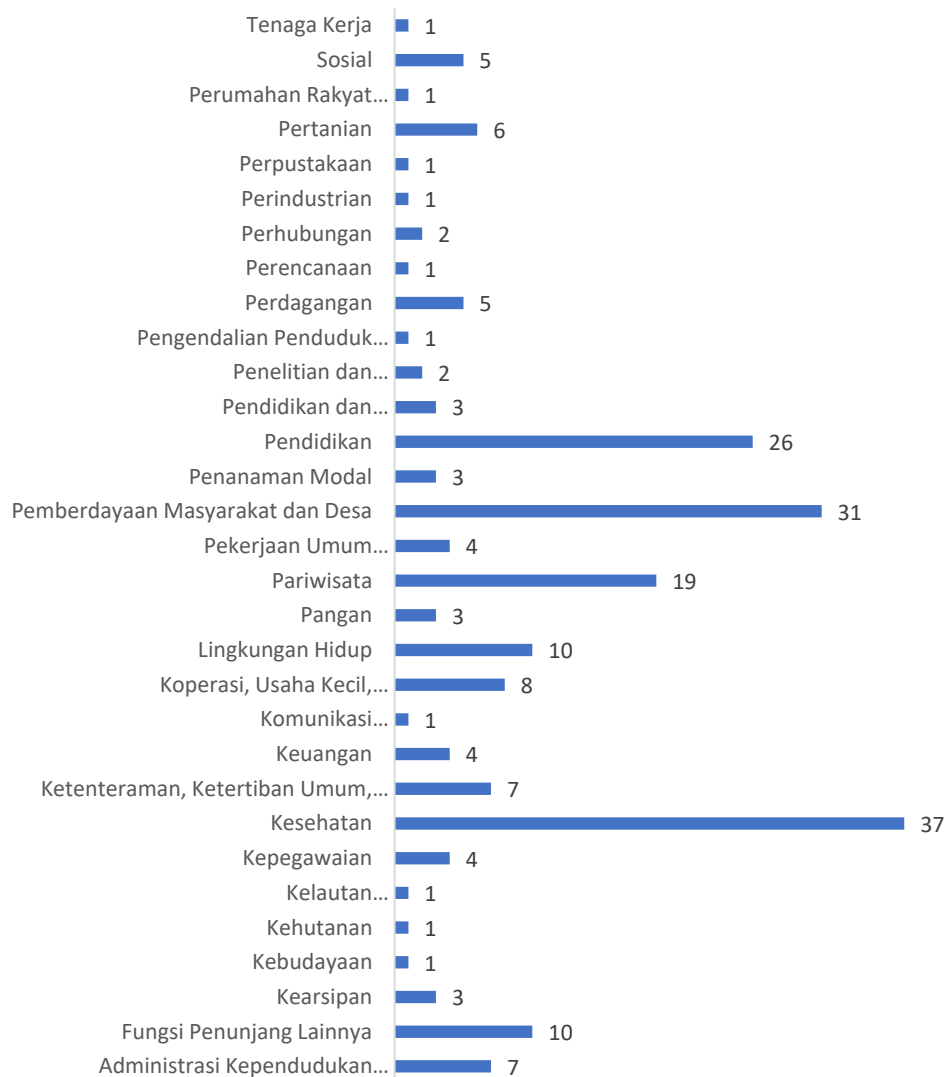
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Cilacap

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 115 (74.68%) inovasi. Kemudian terdapat 6 (3.90%) inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat, 14 (9.09%) inovasi yang diinisiasi oleh kepala daerah dan 19 (12.34%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

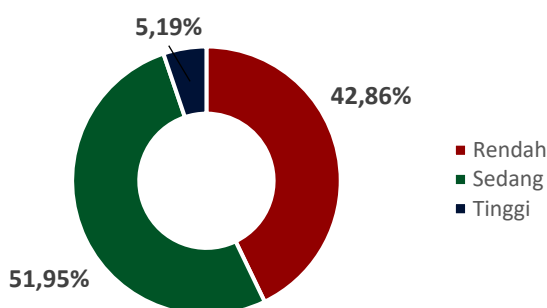
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Cilacap

Inovasi daerah pada Kabupaten Cilacap tersebar pada 31 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan kesehatan yaitu 37 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Cilacap, terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 5 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1 inovasi, urusan pendidikan 26 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 4 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 7 inovasi serta urusan kesehatan 37 inovasi.

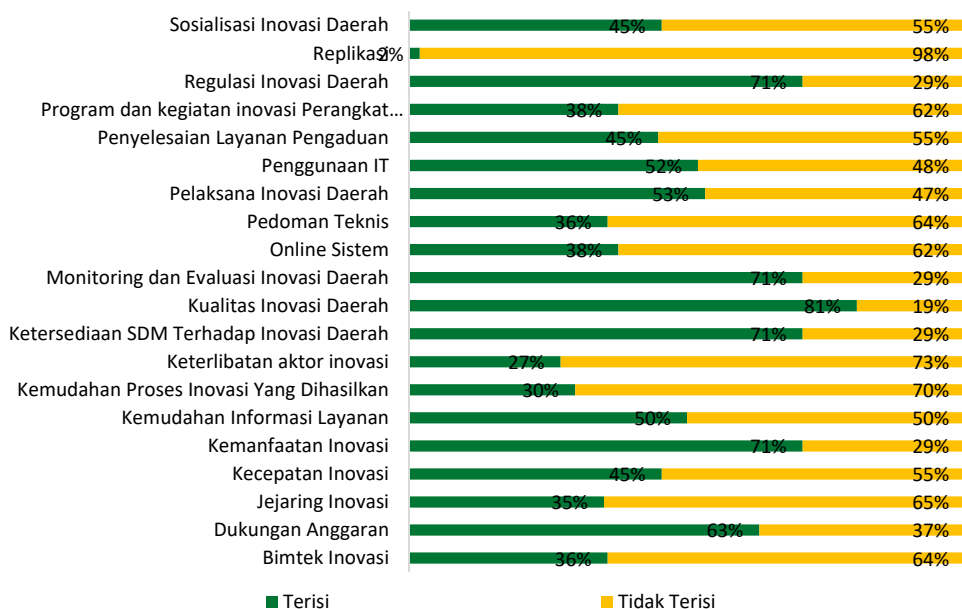
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Cilacap

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Cilacap memiliki skor kematangan yang sedang. Terdapat 80 (51.95%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan sedang, 66 (42.86%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan hanya 8 (5.19%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

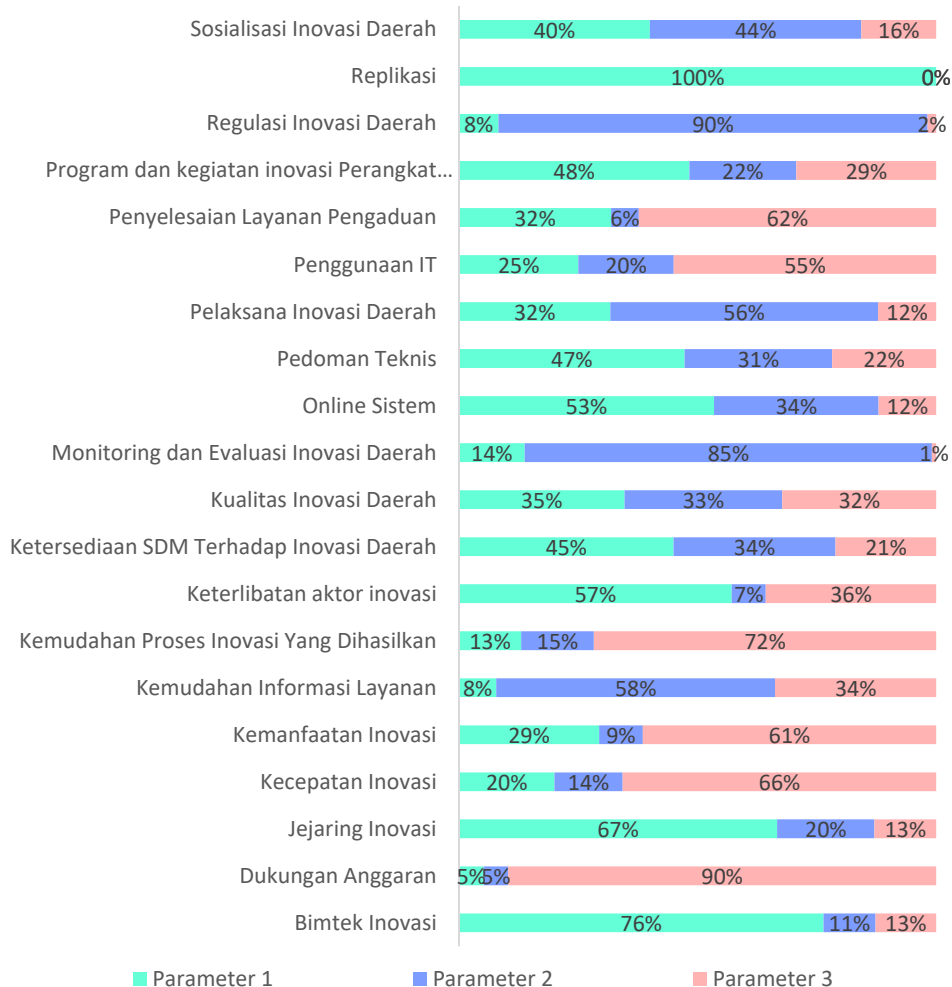
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap

Indikator Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 81% artinya 81% inovasi pada Kabupaten Cilacap yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 2% artinya hanya 2% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 90%, artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Dukungan Anggaran masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 90% artinya 90% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter

kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Cilacap beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Cilacap beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| "SMART SHOPPING AND STAY HEALTHY" (Cara Cerdas Berbelanja dan Tetap Sehat pada Pasar Modern di Kabupaten Cilacap) | 59 |
| Belanja Sehat dan Aman di Pasar Rakyat Kabupaten Cilacap. (JASMAN DIPAKANCIL) | 59 |
| Menu nDeso, sehat, aman dari Covid 19 | 59 |
| Nginep Nyaman, Aman dari Covid-19 | 59 |
| Wisata Ceria Terhindar dari Covid-19 | 59 |
| Mengurus Izin Usaha Cukup Online Dari Rumah | 57 |
| Numpak Kepenak, Tetep Sehat Nang Awak | 59 |
| OPERASI SADAR KEREN (Optimalisasi Peran Santri Husada terhadap Kesehatan Pesantren) | 81 |
| Usia Boleh Senja tapi semangat masih membara | 66 |
| SITI DI PN CILACAP (Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negerai Cilacap) | 51 |
| KASUR DABAL (Kader Surveilans Diare Balita) | 0 |
| KEJAR MEDALI CSR S2J (Kegiatan Jamban Rumah Melalui Dana CSR PT WBI Sebulan 2 Jamban) | 88 |
| ASN BRAPI DAN AKU BUAS | 67 |
| LAYAR SUREKO MAWA RATASTIS | 103 |
| PINISI (Pijat Nikmat Sehat Alami) | 26 |
| MAS VIO KON TOBAT (FARMASI VIA ONLINE KONSULTASI OBAT) | 31 |
| PELAYANAN TERPADU JEMPUT BOLA LANTING CAKEP SATSET | 102 |
| SIPON (Sistem Informasi Pelayanan Ora Ngresula) | 44 |
| GERAKAN NASI ATI SEBLAK (ANAK DISIPLIN MENYIKAT GIGI SEBELUM TIDUR DAN SESUDAH MAKAN) | 52 |
| AGAR AJA (Ayo Bugar dengan Akupresur dan Jamu) | 46 |
| SARAN KI PETROK (SASARAN KINERJA PEGAWAI ELEKTRONIK) / e-KINERJA | 0 |
| PERISAI DB (PEMBERANTASAN SARANG AEDES PENYEBAB DBD) | 15 |
| OSSELA (One Stop Servis Lanjut Usia) | 108 |
| RISDA " RUANG INFORMASI SUMBER DAYA AIR" | 52 |
| Sistem Informasi Perijinan Melalui Pelayanan Online (Sijempol) | 65 |
| LAPAK PETANI "Panenane Dhewek, Adol Dhewek, Regane Murah, Kabeh Bungah" | 76 |
| LANSIA SEJAHTERA SEHAT IDAMAN | 85 |
| PATRIOT SEJATI (Pendaftaran Antrian Online Terpadu Semua Jadi Mudah Tanpa Antri) | 61 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| BERAS GORO BERBUNGA | 17 |
| Desa Wisata KUWIKUT | 9 |
| PELELANGAN IKAN MELAYANI WAKTU SIANG MALAM ("MakSiMal") DI PANSELA KABUPATEN CILACAP | 19 |
| PENGUATAN BANK SAMPAH SAMPAH JADI SEMBAKO | 15 |
| Tumpas Balebat | 45 |
| MBA" LILA SMS (Lima Langkah Satu Menit Selesai) " Kecamatan Cilacap Selatan | 14 |
| SISUKMA (Sistem Survey Kepuasan Masyarakat) | 107 |
| GETUK LINDRI (Gerakan Temukan Batuk Mulai Dari Diri Sendiri) | 38 |
| RAPOR GIATKU (Gigi Anak Sehatku) | 36 |
| JUMALA BUDE JAMU (Jum'at Senam Lansia Bugar Dengan Jamu) | 37 |
| SISTEM INFORMASI PENGEDANLIAN OPERASIONAL KEGIATAN KAB. CILACAP | 23 |
| APLIKASI SURAT ONLINE KABUPATEN CILACAP (ASOKA) | 38 |
| GIAT GESIT (Gerakan Ibu Anak Sehat dengan Eliminasi Aids Sifilis dan Hepatitis) | 33 |
| Karsa Merindu (Karyawan Sehat Melalui Posbindu) | 53 |
| SIAP PAKDE (SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN PASCA DIKLAT) | 117 |
| Layanan Pengelolaan Arsip In Aktif melalui Wisata Edukasi Kearsipan | 89 |
| OPEN GIGIMU BU (Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil) | 0 |
| Smartkir berbasis e-payment | 128 |
| DEWI ASRAMA (Destinasi Wisata Arsip Ramah Anak) | 99 |
| "BUYALOR BUKAN CETING" (BUDI DAYA KELOR BUAT MAKANAN CEGAH STUNTING) | 99 |
| Pemanfaatan limbah air wudlu untuk budidaya ikan nila | 7 |
| Penggunaan aplikasi Slims pada perpustakaan sekolah | 0 |
| Gemma Kesuma (Bergerak Menyapa Masyarakat Kesugihan Untuk Melayani) | 62 |
| AGEN PEMBAHARUAN BANK SAMPAH ENTASKAN MASALAH DENGAN PIAWAI DALAM UPAYA KENAL- LUASKAN AKSES INFORMASI (APEM BS EMPUK AI) | 0 |
| GENZI (Generasi Peduli Gizi) | 90 |
| "POPOK EMAS" (Posbindu dan Posyandu Lansia Keliling Desa di Kecamatan Sidareja) | 71 |
| SOBAT PENGENDARA (Solusi Bersama Cepat Atasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) | 91 |
| PENYU JALAN PAGI MAS (Penyuluhan Rawat Jalan Setiap Pagi dilanjutkan GERMAS) | 84 |
| Inovasi Pemanfaatan ecoenzym pada tanaman hias hidroponik dari sisa organik dan non organik di SMPN 3 Nusawungu kabupaten Cilacap. | 75 |
| INOVASI PEMANFAATAN LIMBAH DAUN KERSEN (MUNTINGIA CALABURA) AROMA LEMON SEBAGAI HAND SANITIZER KERLING | 77 |

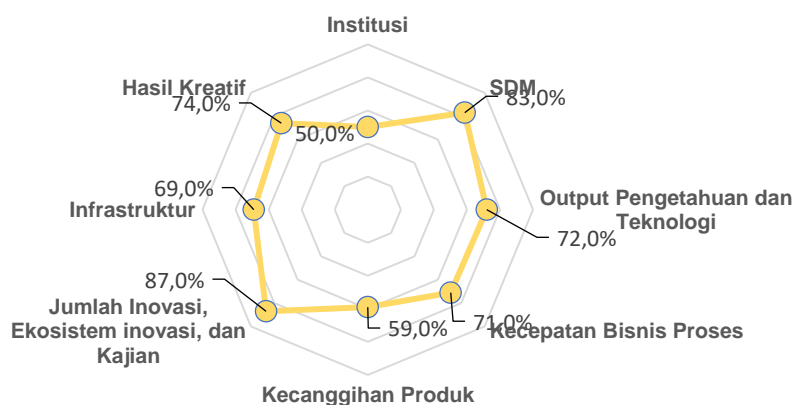
| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| AGEN PEMBAHARUAN BANK SAMPAH ENTASKAN MASALAH DENGAN PIAWAI DALAM UPAYA KENAL- LUASKAN AKSES INFORMASI (APEM BS EMPUK AI) | 0 |
| SiRenja | 86 |
| "LINTAS KANCIL" (LINMAS INTI KECAMATAN TANPA BATAS KABUPATEN CILACAP) | 81 |
| RESOLUSI (Rumah Kreatif Promosi konsultasi dan Edukasi) UMKM Berdaya | 64 |
| PINTER MELANTUN (PILAR TERINTEGRASI MELAYANI DENGAN SOPAN DAN SANTUN) | 69 |
| DENI CENI PENI (Deteksi Dini Cegah Dini Penanggulangan Dini) Di Kelurahan Lomanis | 67 |
| Lebah Madu Bambu Betung | 28 |
| PENERAPAN APLIKASI ONLINE PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021 SMP NEGERI 1 BINANGUN | 87 |
| Smart Library SMP Negeri 2 Jeruklegi | 66 |
| Membuat Eco Enzyme Cairan Organik Kaya Manfaat Ramah Lingkungan | 87 |
| Pelayanan Paten Tanpa CoCa CoLa (Covid-19, Calo, Coin, Lama) di Kecamatan Cilacap Tengah | 81 |
| Sistem Informasi Pasar Kabupaten Cilacap (PASARKU) | 85 |
| PENARI BUJANG UNTUK KERJA (Penerapan Materi Buku Penunjang Untuk Membentuk Karakter Remaja) | 90 |
| BOS PLASTIK AYO SELAMI (Boikot Sampah Plastik Ayo Selamatkan Bumi) | 91 |
| Wani Perih (Program pembinaan Sepakbola) | 81 |
| SAMBANGKU SAYANG | 81 |
| PEMANFAATAN FANPAGE SEBAGAI MEDIA LITERASI DIGITAL DI SMP NEGERI 6 CILACAP | 97 |
| BEAT PLASTIC POLLUTION | 75 |
| Sistem Informasi Mutasi Siswa Elektronik (EMUT) | 105 |
| SELERA MATAKU (SEkolah LEwat RADio heMAT TANpa KUota) | 76 |
| NOVI SIPELAYAN CERIA (Inovasi Sistem Pelayanan Cekatan Elegan Ramah Indah dan Aman) dengan SIMPEL KASIR (Sistem Informasi Pelayanan Kasir) | 87 |
| Gerakan Lansia Sehat dengan Skrining Kesehatan "GELAS KRISTAN" | 82 |
| POSDARA (POSYANDU UDARA) | 104 |
| Peningkatan Hasil Belajar Pada Materi Hukum Tajwid Menggunakan Educandy Game Melalui Google Classroom Bagi Peserta Didik Kelas VII B Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 SMP Negeri 1 Adipala | 66 |
| SAJANI NGANTER | 44 |
| PPDB Online | 46 |
| LANPU RANGKA BISO (PELAYANAN PUBLIK KARANGPUCUNG BERBASIS ISO) | 54 |
| Pengembangan "SIBAKUL" (Sistem Informasi Bakul) dalam | 74 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| rangka pemberdayaan BUMDesa di Kecamatan Majenang | |
| DESA PINGGIRAN MENUJU DESA DUNIA (DESA SINDANGBARANG KECAMATAN KARANGPUCUNG) | 50 |
| REMATRI REHAT (REMAJA PUTRI DENGAN RECEH SEHAT) | 55 |
| PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN (PKHP) INOVASI PEMBUATAN WEDANG REMPAH | 46 |
| LIPAT (Desktop Layanan si Cemplon Disdukcapil bagi Masyarakat) | 55 |
| PERPUSTAKAAN DIGITAL DENGAN PEMANFAATAN WEBSITE NOL RUPIAH | 71 |
| OPTIMALISASI PENDIDIKAN KETERAMPILAN SESUAI DENGAN KONSEP LIFE SKILLS SISWA SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU | 77 |
| DESA WISATA SALAM SARI | 47 |
| Pembelajaran daring | 35 |
| PEMANFAATAN TONGKAT PRAMUKA (BAMBU BEKAS) SEBAGAI POT HIAS KELAS DI SMP NEGERI 1 BINANGUN | 44 |
| SINERGI CILACAP | 91 |
| SIPETANI | 62 |
| M-DURO COVID-19 (ROBOT PENDETEKSI SUHU TUBUH DILENGKAPI HAND SANITIZER OTOMATIS YANG DIKENDALIKAN REMOT KONTROL) | 62 |
| E-Litbang | 76 |
| Desa Wisata Agro Wisata Cibinuang | 31 |
| Desa Wisata Cimendaway Indah | 31 |
| LKBM PEKA SIPEKAR (LAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS MELALUI PENGUATAN ETOS KERJA APARATUR DAN SIPEKAR PADA UPTD PUSKESMAS KESUGIHAN II) | 13 |
| Desa Wisata Cipari | 36 |
| SISTEM INFORMASI SEMUA ADA DISINI (SI SANI) | 33 |
| SIAPLAH (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERSEKOLAHAN) SMP NEGERI 6 KROYA | 37 |
| Display Program Beras PNS Pada Toko Tani Indonesia Center Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, sebagai Upaya Serapan Hasil Pertanian Masyarakat | 0 |
| Desa Wisata Lewih Manggu | 43 |
| Desa Wisata Pesona Serayu Kesugihan Kidul | 48 |
| Desa Wisata Bojong Tirta Indah | 38 |
| Desa Wisata Samudera mandiri Sejahtera | 38 |
| Sistem Informasi Monitoring Bebas Temuan (SIMON BETE) Mempercepat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cilacap | 44 |
| Digitalisasi Pengarsipan Laporan Hasil Pemeriksaan | 19 |
| Desa Wisata Gentawisata Gentasari Kecamatan Kroya | 38 |
| Desa Wisata Wagir Indah welahan wetan | 38 |
| Desa Wisata Kumandang Wisata, Kutawaru | 33 |
| Desa Wisata Talabunsa Desa Pamulihan, karang pucung | 33 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Desa Wisata Alam Lestari Sumpinghayu | 38 |
| Desa Wisata Curug Tonjong Panto Cinagara Desa Sadhayu | 33 |
| Desa Wisata Kamulyan, Desa Kamulyan | 38 |
| Desa Wisata Jambusari, Desa Jambusari | 33 |
| MBANGUN DESA MELALUI SINERGI PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN KADER BELA NEGARA DI KABUPATEN CILACAP | 0 |
| OPTIMALISASI PERSIAPAN INSTRUMEN KEGIATAN PENGAWASAN BULANAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP | 63 |
| Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Keuangan | 61 |
| BERGASS | 91 |
| SIVERA | 75 |
| OPTIMALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP | 63 |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN WEBSITE SEBAGAI SUMBER INFORMASI PERENCANAAN PENANGANAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KABUPATEN CILACAP | 60 |
| SI APIC (APLIKASI POTENSI INVESTASI KABUPATEN CILACAP) OPTIMALKAN LAYANAN PENANAMAN MODAL | 56 |
| Sistem Informasi Data Aparatur Pemerintah Desa (SIDA PEDES) | 71 |
| KLINIK BUMDesa, MITRA BAGI DESA DAN BUMDesa | 32 |
| MEWUJUDKAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TEPAT WAKTU MELALUI WARKOP (WARUNG KONSULTASI PROPOSAL) PADA DISPERMADES KABUPATEN CILACAP | 35 |
| PIKTORCINTA (PENETAPAN INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KEGIATAN) | 33 |
| Peran dan Sinergitas Kelompok Sadar (Pokdar) dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap | 20 |
| Optimalisasi Pengarsipan Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Inspektorat Kabupaten Cilacap | 39 |
| MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG KOMPATIBEL MELALUI "PIKUL GARDA" (POJOK INFORMASI DAN KONSULTASI PENGANGGARAN DAERAH) PADA BPPKAD KABUPATEN CILACAP | 41 |
| SAGITA PRAYA (STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PASAR RAKYAT) KABUPATEN CILACAP | 47 |
| Membangun Karakter | 43 |
| MEWUJUDKAN SASARAN KINERJA PEGAWAI YANG SISTEMATIS MELALUI SISTEM INFORMASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SKP (SIPP SKP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP | 42 |
| SISTEM INFORMASI MUTASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH (SI IMUT) SEBAGAI OPTIMALISASI LAYANAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN CILACAP | 54 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Pelepasan Virtual Siswa Kelas IX 'Berkreasi di Era Pandemi' | 75 |
| STASIUN PEMADAM KEBAKARAN TERPADU (SATKAR TARU) | 36 |
| UKS SEHAT LAWAN COVID-19 | 70 |
| SISTEM INFORMASI RUANG TERBUKA HIJAU (SI RUBAH) SEBAGAI PENDUKUNG BASIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BAPPEDA KABUPATEN CILACAP | 61 |
| BRIGADE ALSINTAN | 65 |
| KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PENDAPATAN (SIMOELTAN) MENINGKATKAN SINERGITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP | 57 |
| SI CEMPLON (Sistem Cepat Murah Pendaftaran Lewat Online) | 98 |
| "Paket Three in one (3 in 1) " Strategi Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap | 96 |
| SISTEM INFORMASI PENDATAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL BERBASIS WEB DI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP | 93 |
| Kemit KaKaBe (Kemitraan Klinik Keluarga Berencana) | 45 |
| Aplikasi Sipproklimkancil | 93 |
| ZEROKAN ZONA MERAH MU | 68 |
| PODORAMAS (Pokdar Donan Ramah Masyarakat) | 47 |
| MEWUJUDKAN KONDISI JALAN MANTAP MELALUI WEBGIS DI DPUPR KABUPATEN CILACAP | 66 |
| Kampoeng Sehati (Sehat Anak dan Ibu Tercinta) Menuju Kampung Hijau dan Sehat | 41 |

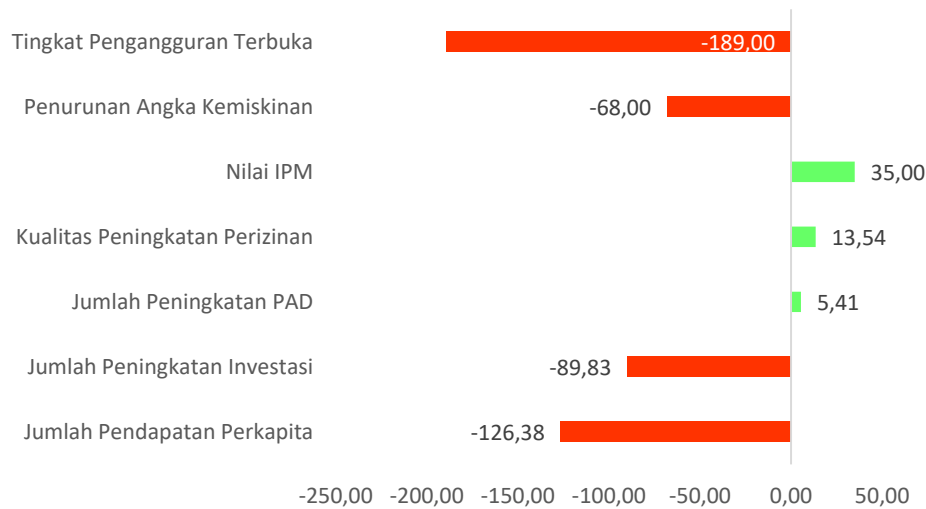
H. KABUPATEN DEMAK



Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Demak

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 87.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Institusi merupakan variabel dengan skor paling rendah (50.0%). Namun secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel Institusi masih cukup baik, yaitu termasuk dalam parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

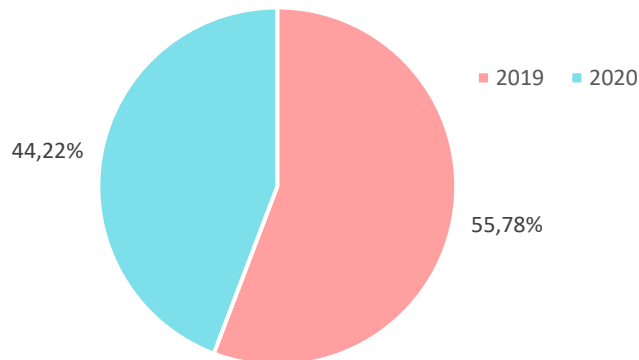


Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Demak

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Demak. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator, yaitu indikator Nilai IPM sebesar 35.0% dan indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 13.54%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD juga meningkat sebesar 5.41% namun peningkatan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan standar nasional parameter Indeks Inovasi Daerah yang seharusnya meningkat 8%. Sementara itu, indikator – indikator lainnya mengalami penurunan, dimana indikator Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan penurunan sebesar 68.00%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Demak meningkat 68.00% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan Investasi menurun 89.83% dan Jumlah Pendapatan Perkapita menurun 126.38%. Untuk Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tidak dapat didefinisikan lebih lanjut karena Kabupaten Demak tidak menginput data tingkat pengangguran terbuka yang sesuai.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

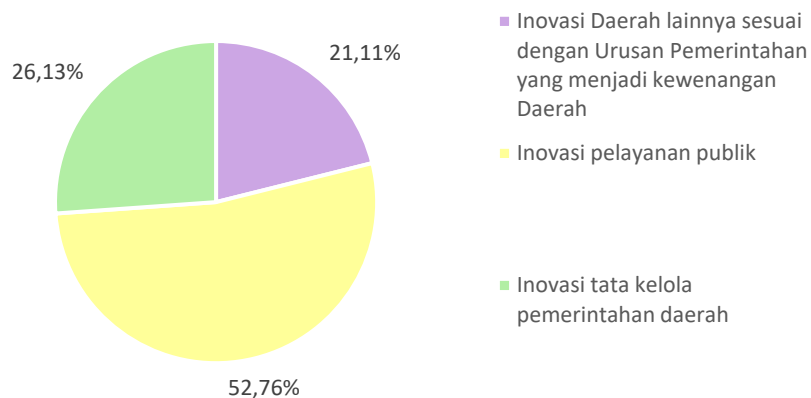
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Demak

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Demak diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 111 (55.78%) inovasi dari total inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 88 (44.22%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

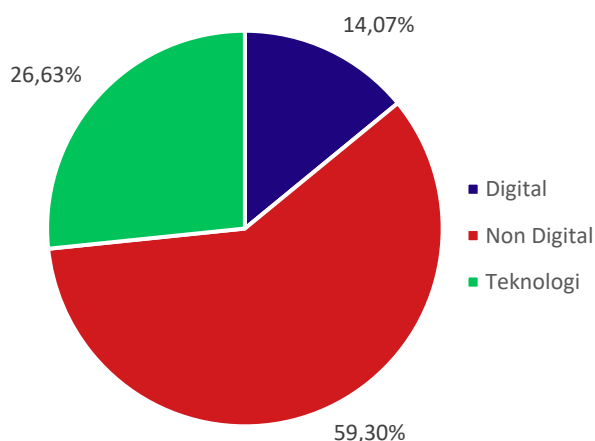
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Demak

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 105 (52.76%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 52 (26.13%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 42 (21.11%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

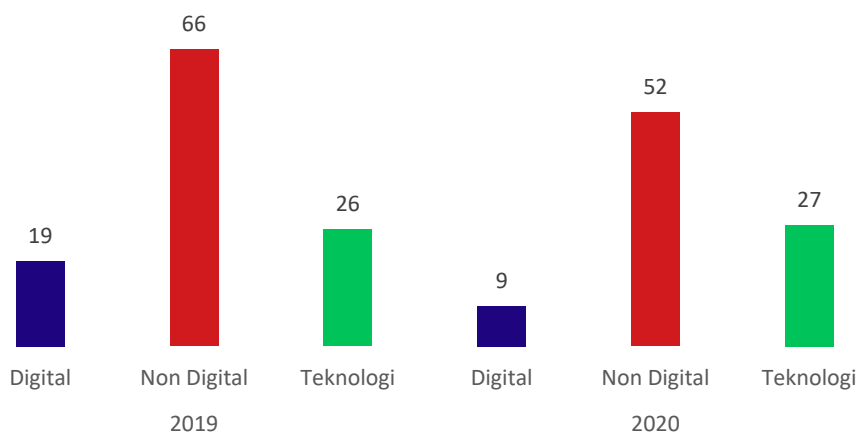
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Demak

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 118 (59.30%) dari total inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Demak merupakan inovasi non digital. Selain itu, terdapat pula 28 (14.07%) inovasi yang merupakan inovasi digital serta 53 (26.63%) inovasi teknologi.

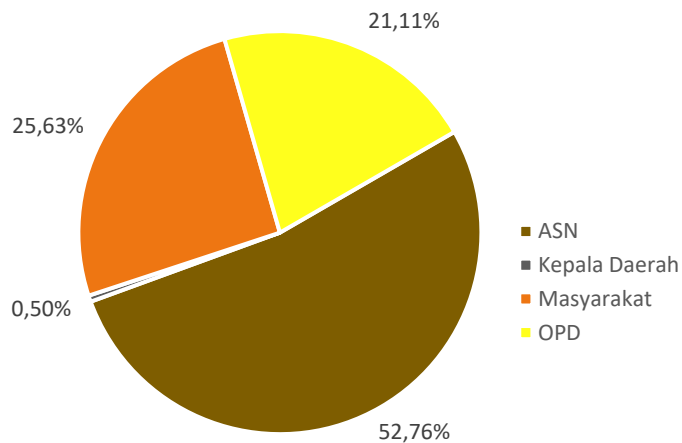
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Demak

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 19 inovasi dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 9 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital, pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 66 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 52 inovasi. Sementara inovasi teknologi mengalami sedikit peningkatan, yaitu 26 inovasi pada tahun 2019 kemudian bertambah menjadi 27 inovasi pada tahun 2020.

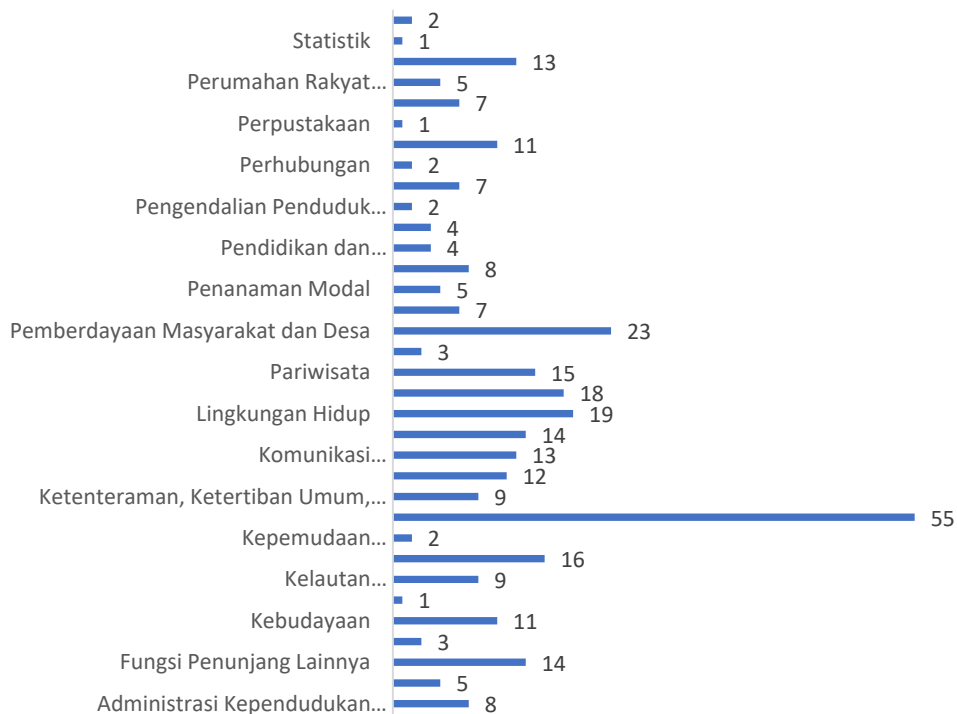
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Demak

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Demak pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 105 (52.76%) inovasi. Kemudian terdapat 51 (25.63%) inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat, 42 (21.11%) inovasi yang diinisiasi oleh OPD dan 1 (0,5%) inovasi yang diinisiasi oleh kepala daerah.

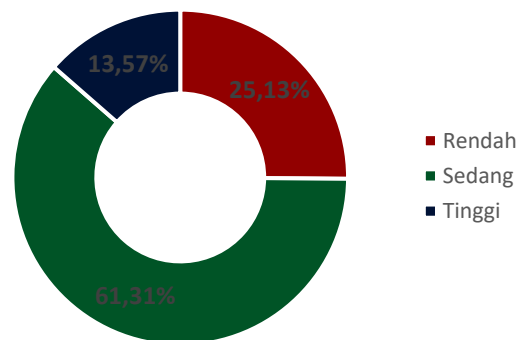
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Demak

Inovasi daerah pada Kabupaten Demak tersebar pada 34 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan kesehatan yaitu 55 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Demak, terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 13 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 5 inovasi, urusan pendidikan 8 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 3 inovasi, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 9 inovasi serta urusan kesehatan 55 inovasi.

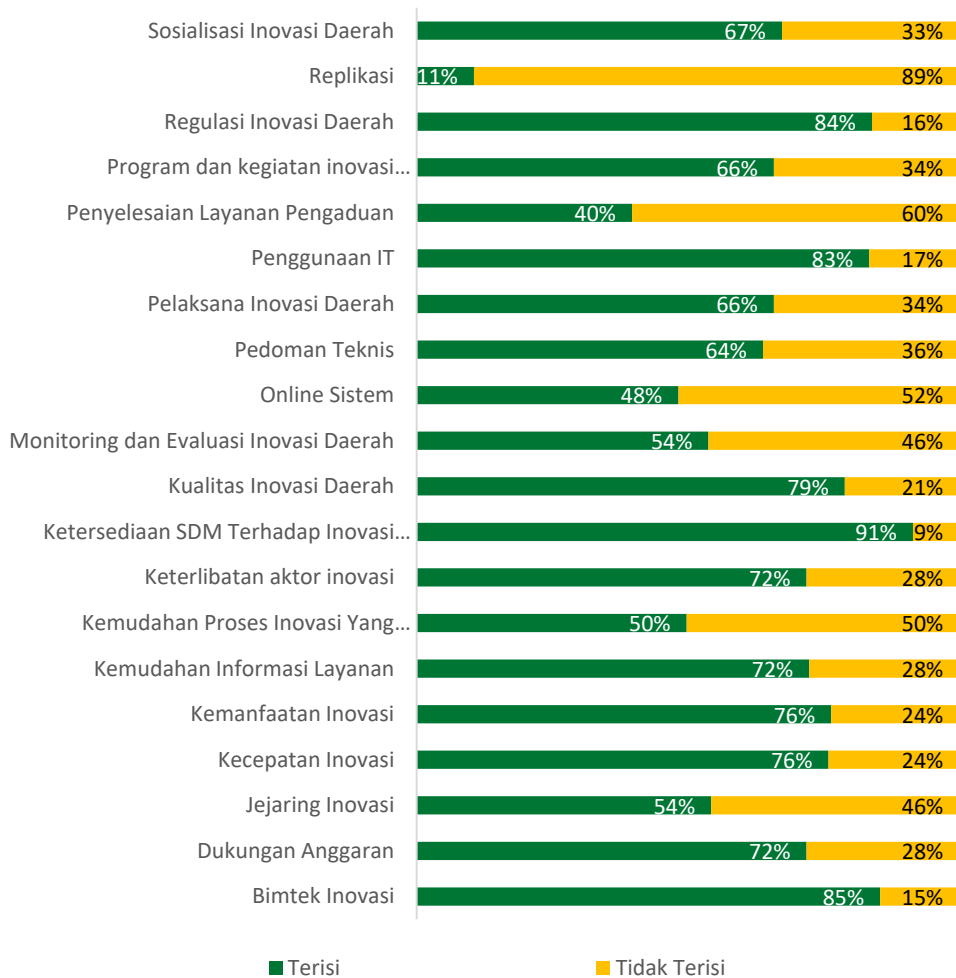
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Demak

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Demak memiliki skor kematangan yang sedang. Terdapat 122 (61.31%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan sedang, 50 (25.13%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan 27 (13.57%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

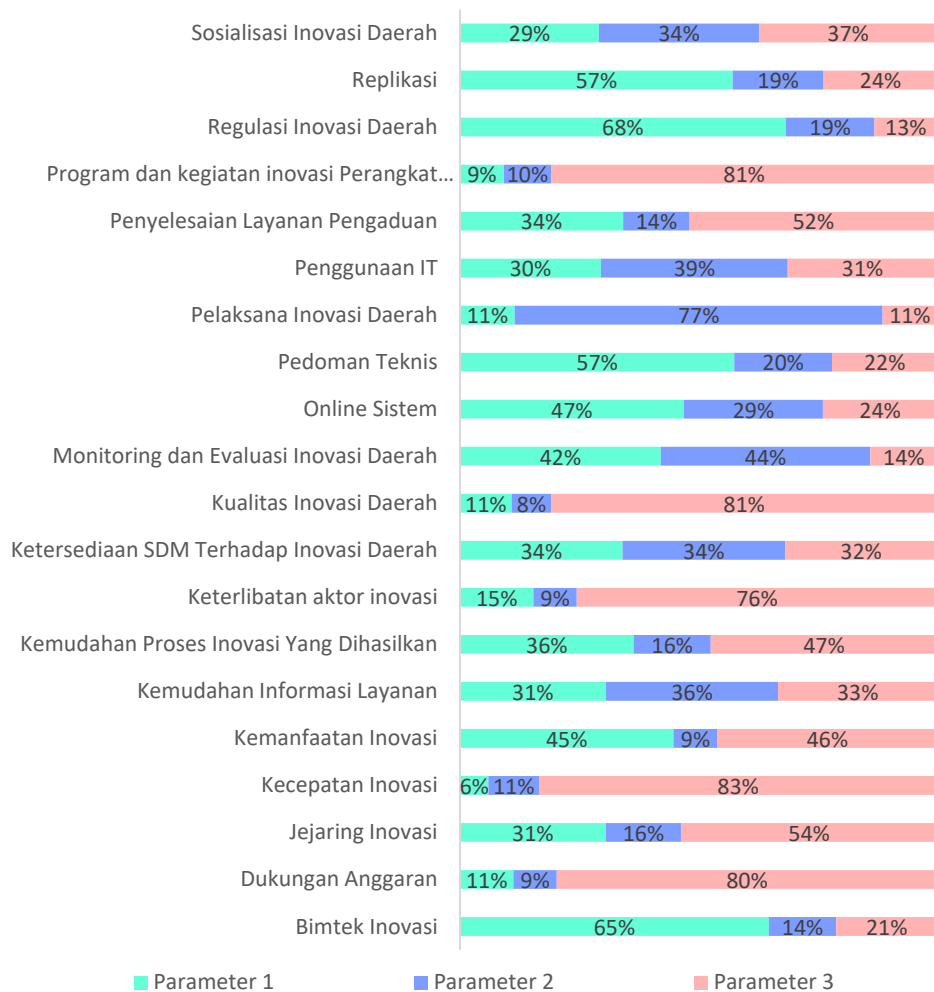
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Demak

Secara umum, tingkat keterisian pada indikator inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pasaman sudah cukup baik. Indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian bukti dukung tertinggi adalah Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi, yaitu 91%. Artinya hampir seluruh inovasi pada Kabupaten Demak telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 11% artinya hanya 11% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter di atas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi yaitu sebesar 83%, artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kecepatan Inovasi masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 77% artinya 77% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 68%, artinya 68% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Demak beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Boyolali beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| TERATAI KUNING, Pusk Gajah II | 92 |
| GARDA DEPAN KOTA WALI, Pusk Gajah II | 87 |
| Ping mi baby (PUSKESMAS DEMPET) | 111 |
| SAMBEL TERASI Kecamatan Mijen | 86 |
| SAGITA Puskesmas Guntur I | 100 |
| GAS (GERAKAN ANTI STUNTING) PKM MIJEN 2 | 51 |
| KARTU ASEPTOR SEHAT (KAS) MKJP DARI PUSKESMAS DEMAK III | 85 |
| Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Kabupaten Demak (Si Nadin) | 82 |
| BUNTING (BUNDA PEDULI STUNTING) MELALUI PANDUAN METODE PENENTUAN STUNTING DI PUSKESMAS DEMAK III | 51 |
| PPID/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pelayanan Publik Informasi Daerah) DINKOMINFO | 120 |
| TGC (TIM GERAK CEPAT) Dinas Kesehatan | 30 |
| GISELA (GIGI SEHAT LANSIA) PKM KEBONAGUNG | 67 |
| SEHATI PKM KEBONAGUNG | 88 |
| PAYUNG PENTING PKM KEBONAGUNG | 68 |
| KONSER DMHIT (Konsultasi dan Olahraga Penderita DM dan Hipertensi) Puskesmas Mranggen II | 53 |
| OJEK DAHAK (PKM KARANGTENGAH) | 67 |
| BAJIGUR (Berantas HIV-AIDS DENGAN JIWA JUJUR) PUSKESMAS KEBONAGUNG | 74 |
| DILH-ON (DINAS LINGKUNGAN HIDUP) | 42 |
| JEBOL MODUS LING LING (DINDUKCAPIL) | 97 |
| "SIAP OM" (Sistem Aplikasi Online Mandiri) DINDUKCAPIL | 108 |
| DODI RAMAH (DOKUMEN JADI DIANTAR KE RUMAH) DINDUKCAPIL | 93 |
| VIRAL YOUTUBE (Video Informasi Dan Tutorial Di Channel Youtube) DINDUKCAPIL DEMAK | 91 |
| Hallo Demak (Dinkominfo) | 51 |
| KRENOVA DEMAK (Bappeda Litbang) | 108 |
| FRESHOUW (MX. AGUS HARIYANTO) | 78 |
| MANISAN JAMBU COKELAT (ISTIANAH) | 78 |
| DAUN KELOR MEMBANTU PEMBERDAYAAN LANSIA DI DESA BATURSARI (POSYANTEK DESA BATURSARI) | 58 |
| MANISAN BELIMBING COKELAT (ISTIANAH) | 66 |
| PEMANFAATAN DAUN JAMBU MERAH DELIMA MENJADI TEH LEMPUYANG (AHMAD ULIL ALBAB) | 74 |
| SIRUP BELIMBING DEMAK (ISTIANAH) | 40 |
| EGG ROLL GUMILA (INA IZATUL MUNA) | 42 |
| PEMBUATAN APLIKASI PENCARI MENU MASAKAN DENGAN ACUAN BAHAN UTAMA MASAKAN YANG ADA DI RUMAH (CYNTYA WAHYU & APRILYANTO SETIYAWAN) | 42 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| PEMANFAATAN GENTRIKS SEBAGAI UPAYA DIVERSIFIKASI ENERGI LISTRIK NASIONAL YANG RAMAH LINGKUNGAN (AJI SUKMA, MUKHAMAD TAUFIQ, NAUFAL IZZUL) | 64 |
| TANUR KARBON BIO ENERGI SOLUSI SATU HARI SAMPAH HABIS TANPA SOLUSI (BANU RIYOWIDHARDO & TIM) | 55 |
| RING PLASMA UPAYA MENGURANGI POLUSI UDARA (LUTFI ANDI & TIM PERTAMAK) | 55 |
| SENSOR PISA SEBAGAI ALAT PENDETEKSI KEBAKARAN PADA PETERNAKAN AYAM BERBASIS SMS GATEWAY MENGGUNAKAN ARDUINO UNO (BHIMA MAHANDIKA & YUNI YULIASARI) | 42 |
| TEKNIK PENGOLAHAN AIR ROB MENJADI AIR MINUM MENGGUNAKAN TEKNOLOGI FILDEST DENGAN MEMANFAATKAN ENERGI PANAS MATAHARI (BHIMA MAHANDIKA & YUNI YULIASARI) | 59 |
| MESIN PENGOLAH BAWANG 3 IN 1 (BANU RIYOWIDHARDO) | 55 |
| OLAHAN BAHAN DASAR IKAN LELE (SRI RAHAYU) | 48 |
| TEKNOLOGI BUDIDAYA IKAN BERBASIS SMARTPHONE (QUMMAS NAZIQ) | 56 |
| SI JAIM "MEJA IMAJINASI" (MX AGUS HARIYANTO) | 60 |
| ALAT PENANAM BIJI BENIH MULTIFUNGSI (MAF ULIN & TIM PERTAMAK) | 46 |
| BIOPATRACELL (Biopori Penerangan Tenaga Air Garam dan Solar Sel) "Putra anas ashari" | 61 |
| PUMPA ELEKTRIK PENYIRAM TANAMAN BAWANG MERAH (ALI RINDHO) | 46 |
| Official Akun Sosmed Ayo Dolan Demak (Dinas Pariwisata) | 39 |
| PUPUK CAIR (BUDIYONO) | 59 |
| Caping Sakti Penyiram Bawang Merah Bertenaga Surya "Andre" | 55 |
| Branding Taman Kali Tuntang (Dinas Pariwisata) | 19 |
| Minuman Vitamin Jambu Khas Demak "Istianah" | 57 |
| PEMBUATAN KALENG PIROLISIS (KALPIR) SEBAGAI ALAT UNTUK MENGOLAH SAMPAH KANTONG PLASTIK (KRESEK) DAN BOTOL PLASTIK MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK ALTERNATIF "Muhammad Baharudin" | 46 |
| Pemanfaatan Kacang Hijau Sebagai Varian Rasa Dalam Produk Kue Kering Rangin "Lailatul Fitriyani" | 55 |
| DESA WISATA BOYOLALI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 71 |
| DESA WISATA JATIROGO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 69 |
| DESA WISATA MORODEMAK KECAMATAN BONAG KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 73 |
| DESA WISATA BUNGO KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 73 |
| DESA WISATA TLOGOWERU KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 71 |
| DESA WISATA CANDISARI KECAMATAN MRANGGEN | 73 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | |
| DESA WISATA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 69 |
| DESA WISATA KARANGMLATI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 23 |
| DESA WISATA TAMBAKBULUSAN KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 71 |
| DESA WISATA WONOSARI KECAMATAN BONAG KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 71 |
| DESA WISATA JRAGUNG KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 73 |
| DESA WISATA BERMI KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK (DINPARTA) | 73 |
| Oke WA Mas (Obati Kesehatan Jiwa Masyarakat) (Puskesmas Wonosalam II) | 94 |
| Sirup Klobot dan Janggal Jagung (Sri Rahayu) | 38 |
| CHATING STBM (Cegah Stunting dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Puskesmas Wonosalam I | 39 |
| TIPSS (Tips Smart Solution) Untuk Ibu Hamil di Puskesmas Demak I | 74 |
| BELA TERATAI KUNING (PUSKESMAS GAJAH II) | 107 |
| JEMBATAN SAYUNG (JEMPUT PENGOBATAN SAMPAI RAMPUNG) PUSKESMAS SAYUNG 1 DEMAK | 49 |
| SI EVA (Sistem Informasi Evaluasi Jabatan) BAGIAN ORGANISASI SETDA | 93 |
| GAYATRI (PUSKESMAS KARANGANYAR I) | 45 |
| SATU DATA DEMAK (DINKOMINFO) | 123 |
| SIAP OM (SISTEM APLIKASI ONLINE MANDIRI) DINDUKCAPIL DEMAK | 88 |
| SAHAK (Sayembara Dahak) Puskesmas Mranggen II | 50 |
| Sistem Informasi Tata kelola Naskah Dinas (Si Nadin) Kabupaten Demak (DINPMPTSP) | 99 |
| BAJIGUR (BERANTAS HIV/AIDS DENGAN JIWA JUJUR) PKM KEBONAGUNG | 81 |
| BAWANG KATING (Bantu Kewaspadaan Penanganan Gizi oleh Kader Stunting) PUSKESMAS BONANG I | 66 |
| MARISAHAK (MARI PERIKSA DAHAK) PUSKESMAS MRANGGEN III | 53 |
| SAKTI (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi) BKPP | 113 |
| SEPTI (Sistem Presensi Terintegrasi) BKPP | 119 |
| IRMA (Informasi Manajemen ASN) BKPP | 118 |
| PADI PETIK (Pelayanan Administrasi Digital Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan) | 36 |
| SAPA TERPADU (SISTEM APLIKASI PERSEDIAAN DAN ASET) SEKRETARIAT DPRD KAB DEMAK | 94 |
| SI PERI BUNGA (SISTEM INFORMASI PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL) BKPP KABUPATEN DEMAK | 76 |
| KANDANG SIBARA (KANDANG EDUKASI KERBAU RAKYAT) DI | 96 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| KABUPATEN DEMAK | |
| SI SEPEDA ANGGA (SISTEM INFORMASI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK (BPKPAD) | 87 |
| SI RUKYAH (Sinergitas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Demak | 47 |
| PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI GUNA Mendukung Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Kebonagung Kabupateen Demak | 44 |
| Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan Melalui "Jempol Paten" Jemput bola pelayanan terpadu kecamatan | 77 |
| SIDIA (SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG) BOS DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK | 104 |
| "SITAA TEGAS" SISTEM AKSES DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN DEMAK | 89 |
| PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK | 79 |
| AKSELERASI PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH MELALUI DATA BASE TERINTEGRASI (SIDABIT) | 85 |
| PENDAFTARAN MANDIRI PASIEN BOOKING SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PELAYANAN RAWAT JALAN DI RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK | 105 |
| INTEGRASI DATA PELAPORAN DALAM SISTEM INFORMASI PELAPORAN YANG SELARAS DI BAPPEDA LITBANG KAB DEMAK. | 12 |
| IJIN WAKTU KULIAH DAN UPDATE DATA MANDIRI MELALUI SISTEM APLIKASI KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI | 27 |
| "GETAR HATI UNTU TKI " GERAKAN TERPADU SEHATKAN IBU UNTUK TURUNKAN KEMATIAN IBU DI KABUPATEN DEMAK | 31 |
| TANDUK BANTING (PENGUATAN PERAN POSYANDU UNTUK BANTU CEGAH STUNTING) DI KELURAHAN MANGUNJIWAN KECAMATAN DEMAK | 110 |
| TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN/CSR YANG INTEGRATIF DAN SINERGIS UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK | 70 |
| PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYEDIAAN FASILITAS UMUM YANG MEMADAI DI KECAMATAN MRANGGEN | 2 |
| PENERAPAN "ONE HEALTH" LEPTOSPIROSIS AMBLAS DI KABUPATEN DEMAK | 61 |
| INTEGRASI STANDAR ANALISIS BELANJA DENGAN STANDAR SATUAN HARGA UNTUK EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN DI KABUPATEN DEMAK | 67 |
| SISTEM INFORMASI LAYANAN PENGADUAN KEPEGAWAIAN MENUJU EXCELLENT SERVICE PADA BADAN KEPEGAWAIAN, | 85 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN DEMAK | |
| BUMI TANI MAKMUR SEJAHTERA MENUJU DEMAK MAKMUR SEJAHTERA | 103 |
| INTEGRASI PEMBINAAN OLAH RAGA PELAJAR UNGGULAN MENUJU DEMAK BERPRESTASI | 41 |
| SATPOL PP KABUPATEN DEMAK PEDULI PARIWISATA | 42 |
| "PIJARMAS" PUSAT INFORMASI DAN JARINGAN PEMASARAN DI KABUPATEN DEMAK | 82 |
| PUGAR DENGAN PAGAR (PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT DENGAN PARIWISATA GARAM) | 82 |
| INTEGRASI DAN STRATEGI PENDATAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MENUJU DEMAK SMART CITY | 94 |
| MEMBANGUN "SPA" (SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN) DALAM PEMETAAN RENCANA ANGGARAN STANDART PELAYANAN MINIMAL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK | 64 |
| PROGRAM " PANAS SARI" PAJAK LUNAS SATU HARI DALAM RANGKA Mendukung AKSELERASI PENERIMAAN PAJAK DAN BANGUNAN KEC. KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK | 79 |
| SISTEM INFORMASI INVESTASI DAERAH ON-LINE KABUPATEN DEMAK (SI INVEST OKE) | 113 |
| SI DANI MONCER (SISTEM KENDALI AJUAN INTERNAL DAN MONITORING CAPAIAN KINERJA) GUNA MEWUJUDKAN DEMAK YANG LEBIH AKUNTABEL | 89 |
| PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN KOPERASI UNTUK PATUH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK | 81 |
| E-ARSIP KEPEGAWAIAN GUNA TERTIB ADMINISTRASI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK | 74 |
| SI BAKUL KUMIS (SISTEM BANTUAN KONSULTASI HUKUM MASYARAKAT GRATIS) SEBAGAI MEDIA PELAYANAN KONSULTASI HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK | 137 |
| "Si Keren" MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN KARANGAWEN | 79 |
| SINTA LAN DESA 'SINERGITAS TATA KELOLA KEUANGAN DESA' BAGI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK | 34 |
| PEMBANGUNAN DATABASE PAJAK DAERAH MELALUI "SIMPEL" SISTEM INTEGRASI DATABASE PAJAK DAERAH MELALUI PEMETAAN DIGITAL (BPKPAD KAB. DEMAK) | 105 |
| TATA KELOLA PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 52 |
| INTEGRASI SISTEM LAYANAN DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK | 85 |
| PELAYANAN SAMBEL TERASI (SABTU MASUK PELAYANAN TETAP TERATASI) DI KECAMATAN MIJEN | 91 |
| PROGRAM RUMAH SAKIT "SUKA PENYA" GUNA MEWUJUDKAN RUMAH SAKIT RAMAH ANAK DI KABUPATEN DEMAK | 79 |
| PUSPA RANA (PUSAT PELAYANAN RAMAH ANAK) DALAM Mendukung PELAYANAN PATENT DI KEC. KARANGANYAR | 70 |

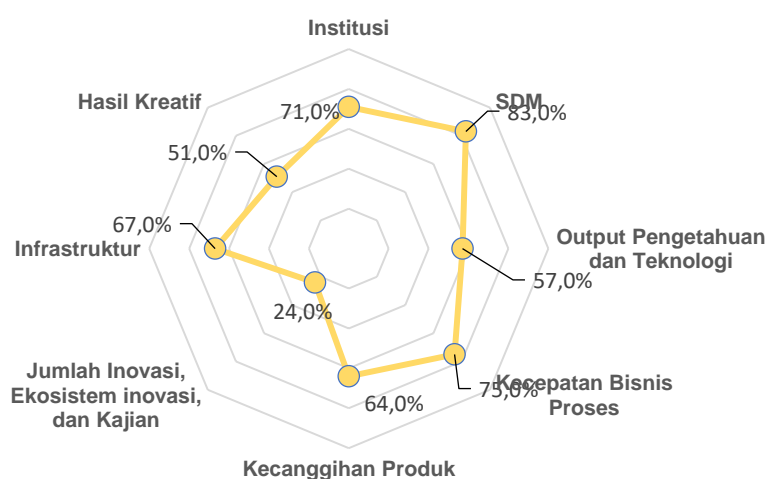
| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| KABUPATEN DEMAK | |
| DEMAK BLAK-BLAKAN, MENUJU DEMAK KABUPATEN INFORMATIF | 119 |
| EFEKTIVITAS CAKUPAN PENGAWASAN INSPEKTORAT ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PROBITY REQUIREMENT (SI-TYREQ) | 60 |
| SISTEM PEMANTAUAN SASARAN KERJA SECARA REALTIME BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH MENGGUNAKAN e-TRABAS DI KABUPATEN DEMAK | 34 |
| PERCEPATAN CAPAIAN AKSES AIR MINUM MELALUI PERENCANAAN YANG BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK DENGAN APLIKASI SI-PAM (SISTEM INFORMASI PENYEDIAAN AIR MINUM) | 71 |
| PENJARINGAN CALON PESERTA KELUARGA BERENCANA METODE T-MAL MELALUI PEMBERDAYAAN PESERTA KELUARGA BERENCANA METODE OPERASI DI KABUPATEN DEMAK | 33 |
| SATU LANGKAH MENGUNGKIT KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK MELALUI PENYELARASAN PERENCANAAN SEKRETARIAT DPRD (LARAS PAKDE) DI KABUPATEN DEMAK | 43 |
| PENGEMBANGAN SI EDIK UNTUK PENDATAAN PENDIDIK PAUD DI KABUPATEN DEMAK | 51 |
| PEMANFAATAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN LAYAK ANAK WILAYAH KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN DEMAK | 56 |
| PEMBENTUKAN PUSAT KONSELING DIANA (DISIPLIN, INTEGRITAS, DAN AMANAH) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DEMAK | 85 |
| REKOMENDASI MELALUI "SiniLu" SISTEM INFORMASI IZIN LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK | 56 |
| GERAKAN PEDULI LANSIA MENUJU LANSIA SEHAT TRAMPIL DI KABUPATEN DEMAK | 84 |
| MEWUJUDKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung DESTINASI WISATA DI KAMPUNG PECAON KABUPATEN DEMAK | 68 |
| SYSTEM INFORMASI PENGADUAN (SIP) PELAYANAN SYSTEM INFORMASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN | 38 |
| PENARI BAGUS (PELAYANAN PRIMA BPHTB DAN PBB-P2 SEKALIGUS) DALAM UPAYA INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) DI KABUPATEN DEMAK (BPKPAD KAB. DEMAK) | 42 |
| PENTAS PAKAIAN ADAT " PELAYANAN TUNTAS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN ADMINISTRASI Daring terintegrasi di kabupaten demak | 61 |
| "MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN YANG SMART DI UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK" | 126 |
| INTEGRASI SISTEM PELAYANAN PASIEN DI RSUD SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK | 10 |
| INTEGRASI RUMAH DATA DESA DI WILAYAH KECAMATAN | 103 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| WEDUNG KABUPATEN DEMAK | |
| "SISTEM INFORMASI KEMITRAAN DAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA (SI MITRA SAPROL) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENGELOLAAN DATA PELAKU OLAHRAGA DAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA DI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK" | 114 |
| ONLINE PAYMENT SYSTEM TERINTEGRASI (OPS GAS) YANG CEPAT, MUDAH DAN AKUNTABEL MENUJU DEMAK KOTA WALI RAMAH INVESTASI | 32 |
| "AKSELERASI DAN SINKRONISASI PRODUK HUKUM DESA DI KABUPATEN DEMAK (AKSI PROKUMDES)" | 70 |
| "AKSELERASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN DEMAK (ABANG KASAN)" | 50 |
| Pengamanan ASet Tersinergi antara KEjaksanaan, PemeRintah KabupatEn, dan BPN "PASTI KEREN" | 107 |
| PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT MELALUI GERAKAN BANK SAMPAH | 85 |
| TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA MELALUI GELAR PENGAWASAN DESA WASKITA TERINTEGRASI "GELAS DEWA" | 87 |
| SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI SEBAGAI DASAR MENENTUKAN ANGGARAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL DI KAB. DEMAK | 10 |
| INTEGRASI SISTEM PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK | 103 |
| ROTAN JAWA NAN ELOK "PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERAWAT DENGAN E-LOGBOOK" DI RSUD SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK | 101 |
| AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DENGAN APLIKASI SISTEM MONITORING BKK (Si-MONIK) DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK | 142 |
| PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI APLIKASI E-LEARNING DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH (APLIKASI DEMAK SEMBODO) | 23 |
| SINGLE DATABASE PERUMAHAN MENUJU DEMAK TUNTAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERBASIS APLIKASI E-RUKYAH DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK | 95 |
| "ANJANI PELAYAN DISABLE" ANJUNGAN DOKUMEN MINI UNTUK PELAYANAN DI DESA BERBASIS ELEKTRONIK | 91 |
| SENTRAL PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA (SEPEDA) DEMI TERWUJUDNYA SATPOL PP YANG HUMANIS, EDUKATIF DAN MELAYANI DI KABUPATEN DEMAK | 58 |
| Layanan Konsultasi Online Melalui "Psy Care Mata Gajah" sebagai Upaya Menekan Permasalahan Psikologis di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak | 85 |
| SIKAJI ONLINE SISTEM PELAYANAN KENDARAAN WAJIB UJI | 91 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN DEMAK | |
| PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS DATABASE ELEKTRONIK (SIDAB IKM) DI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK | 28 |
| PEMBENTUKAN PUSAT DATA DAN PENGENDALIAN OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN DEMAK TANGGUH BENCANA | 89 |
| PENATAUSAHAAN KEUANGAN YANG CEPAT, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN SP2D ON LINE DI KABUPATEN DEMAK (BPKPAD) | 78 |
| SINONA JAHRA (Wisata Nonton Arsip Film Sejarah) DINPERPUSAR KAB. DEMAK | 58 |
| PEMBAYARAN TPP BERBASIS KINERJA MELALUI E KINERJA (BAGIAN ORGANISASI SETDA) | 74 |
| INTEGRASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN DEMAK | 70 |
| One Map Policy Kabupaten Demak | 82 |
| Rumantik satu rumah satu petugas Jumantik (PUSKESMAS GAJAH I) | 72 |
| PENDAMPINGAN PENYUSUNAN APBDES MODEL MOBILE DESA DI KECAMATAN KARANGANYAR | 91 |
| SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN INTERNAL TERPADU BERBASIS WEB | 70 |
| MEMBANGUN BUDAYA DISIPLIN KANTOR KECAMATAN DEMPET | 73 |
| CME (Cengkraman Mata Elang) PUSKESMAS BONANG 2 | 143 |
| RANTING CEMARA (Berantas Stunting dengan Cerdas Bersama Masyarakat dan Keluarga) PUSKESMAS GAJAH I | 73 |
| DUREN WANGI (Posyandu Remaja Ing Wayah Wengi) Puskesmas Guntur II | 25 |
| KA'SAMIL (KERANGKA ACUAN KEGIATAN KADER SAHABAT IBU HAMIL) Puskesmas Mijen I | 67 |
| GETUK TELO (GREBEK BATUK TBC LUNGO) Puskesmas Mijen I | 67 |
| JOGO GIGI SI Beries PUSKESMAS KARANGAWEN I | 10 |
| Toss Iwak Cetul (Temukan Obati Sampai sembuh inisiatif warga dan kader cegah tuberculosis) Puskesmas Mranggen I | 41 |
| MATA LENTIK (Masyarakat Tanggap Melihat Jentik) Puskesmas Wedung II | 17 |
| LANDAK GESIT (Lansia Nikmat Dalam Kehidupan Gesit Setiap Langkah) PUSKESMAS KARANGANYAR II | 36 |
| BERHIAS CANTIK (Berantas HIV AIDS dengan cara simpatik) Puskesmas Mranggen I | 29 |
| MAS PUJI (Masyarakat Peduli Jiwa) Puskesmas Demak II | 38 |
| TENSI SITI GESIT MANDIRI (PUSKESMAS KARANGAWEN I) | 34 |
| TERATAI KUNING (STRATEGI ATASI KURANG GIZI DAN STUNTING) | 69 |
| Ngemil Camilan Puskesmas Wedung I | 71 |
| HAJI MANTEP (Puskesmas Bonang 2) | 36 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| KISAH CINTA REMAJA DI PUSKESMAS (PUSKESMAS BONANG II) | 113 |
| PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYEDIAAN FASILITAS UMUM YANG MEMADAI DI KECAMATAN MRANGGEN | 39 |
| BOLU BLIMBING KHAS KOTA WALI | 60 |
| PEMANFAATAN SERAT PELAPAH PISANG SEBAGAI BAHAN DASAR KERTAS (NABIL ZUHRI) | 56 |
| LAMPU HIAS DARI LIMBAH PERALON (BUSTAMI) | 66 |
| TOBE MIE (RIZA, DIANA, DIAN & KUNCORONING) | 64 |
| SITIKAM (ISI TINTA SEKAM) SEBAGAI INOVASI TERBARU UNTUK PENINGKATAN FINANCIAL MASYARAKAT (RISA, KAIRINA DAN EVA) | 62 |
| OMAH SAYUGO dan Batik Revolusi Mental (Khoirul, Defi dan Sa'adah) | 62 |
| PABRIK PAKAN TERNAK SKALA MIKRO SOLUSI PAKAN MANDIRI PADA BUDIDAYA PERIKANAN DAN PETERNAKAN (MESIN PELET 4 IN 1) | 58 |
| KREASI DIBALIK BENCANA ABRASI (BUDI DAYA KERANG DARAH SISTEM TANGGUL WARING) (KUMAI DI) | 62 |
| TANUR HIDRO KARBON MINI MESIN PEMBAKAR SAMPAH RENDAH POLUSI SOLUSI AKHIR PENYELESAIAN SAMPAH DI PEMUKIMAN KECIL (BANU RIYOWIDHARDO) | 42 |
| KANGKUNGKU KHAS JALI (MUHAMMAD NASIR) | 32 |
| KONCO (Kunci Motor Anti Colong) Hakam Yustisiadi | 42 |
| e-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) Daerah Irigasi Wilayah Kewenangan Kabupaten Demak | 90 |

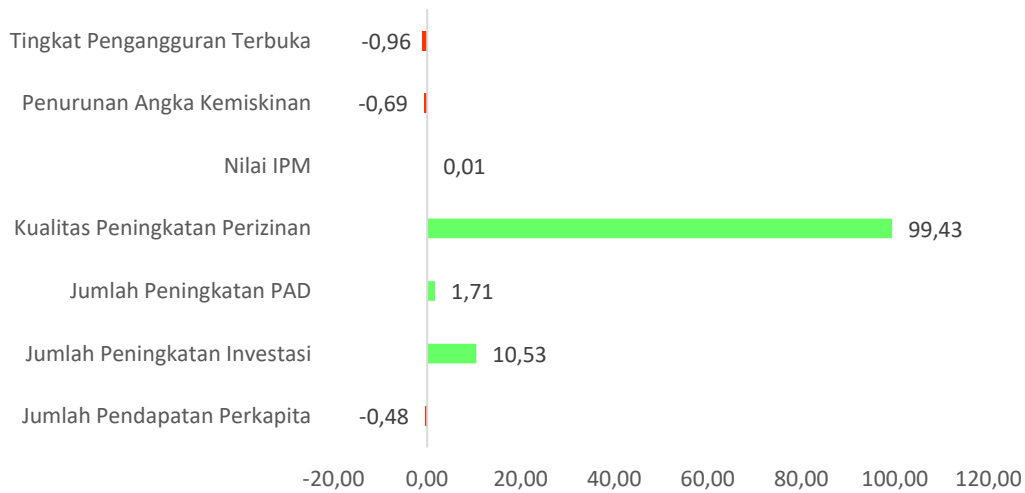
I. KABUPATEN GROBOGAN



Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Grobogan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan variabel dengan skor paling rendah (24.0%) dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



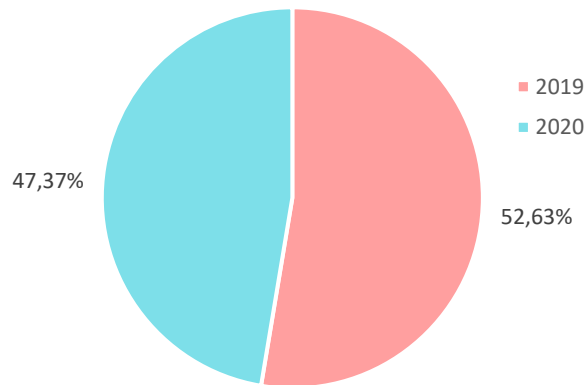
Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Grobogan

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Grobogan. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator, yaitu indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.01%, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 99.43%, serta indikator Jumlah Peningkatan Investasi sebesar 10.53%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD juga meningkat sebesar 1.71% namun peningkatan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan standar nasional parameter Indeks Inovasi Daerah yang seharusnya meningkat 8%.

Sementara itu, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 0.96% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan sebesar 0.96% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.69%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan meningkat 0.69% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indikator Jumlah pendapatan perkapita juga mengalami penurunan sebesar 0.48%, namun peningkatan tersebut masih relatif lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

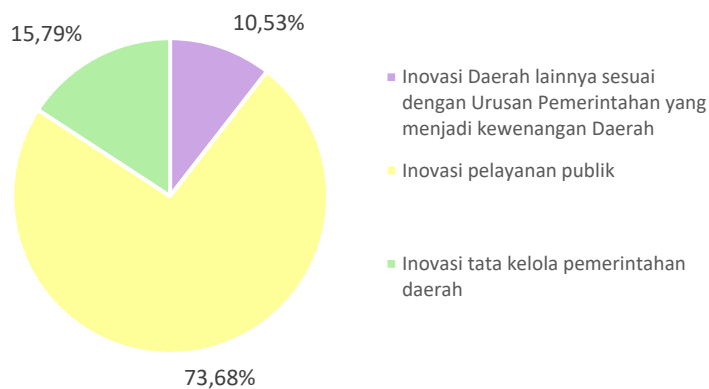
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Grobogan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Grobogan diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 10 (52.63%) inovasi dari total inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 9 (47.37%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

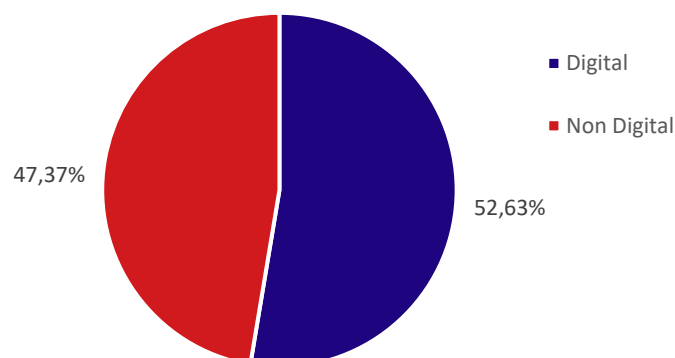
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Grobogan

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 14 (73.68%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 3 (15.79%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 2 (10.53%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

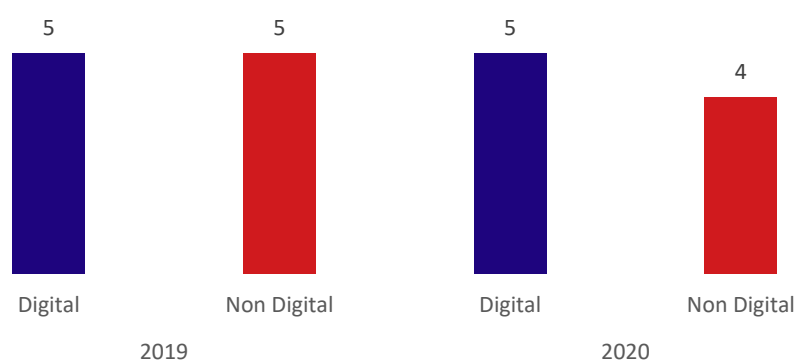
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Grobogan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Grobogan merupakan inovasi digital, yaitu sejumlah 10 (52.63%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 9 (47.37%) inovasi yang merupakan inovasi non digital.

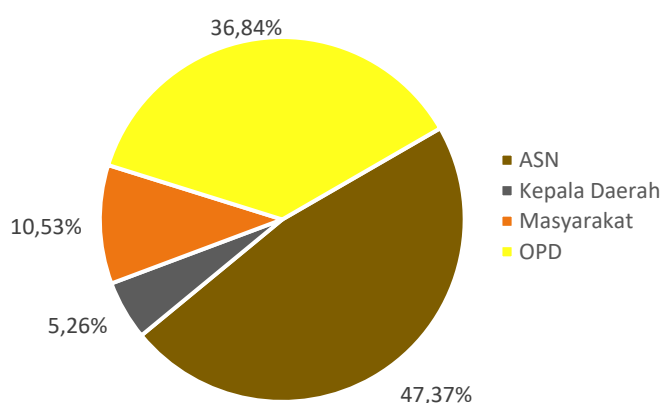
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Grobogan

Secara umum jumlah inovasi cenderung statis dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya inovasi digital. Dapat dilihat bahwa jumlah inovasi digital pada tahun 2019 dan 2020 tidak berubah, yaitu 5 inovasi digital. Sementara inovasi non digital mengalami sedikit penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 5 inovasi non digital lalu pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi non digital.

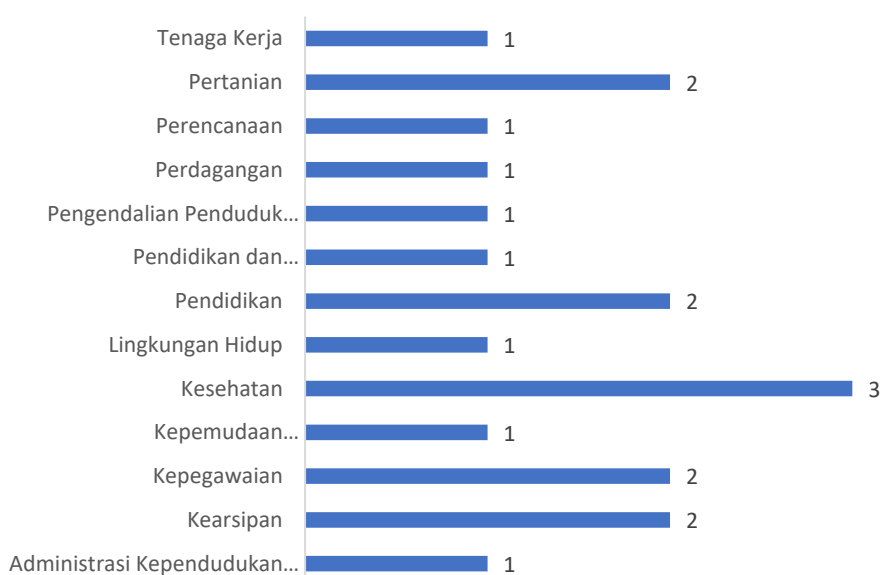
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Grobogan

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 9 (47.37%) inovasi. Kemudian terdapat 7 (36.84%) inovasi yang diinisiasi oleh OPD, 1 (5.26%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 2 (11.53%) inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat.

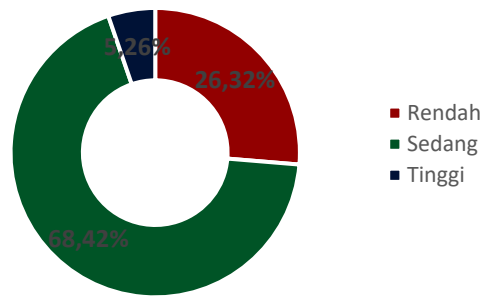
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Grobogan

Inovasi daerah pada Kabupaten Grobogan tersebar pada 13 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan kesehatan yaitu 3 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Grobogan, hanya terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan 2 inovasi dan urusan kesehatan 3 inovasi. Sedangkan urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum terlaporkan.

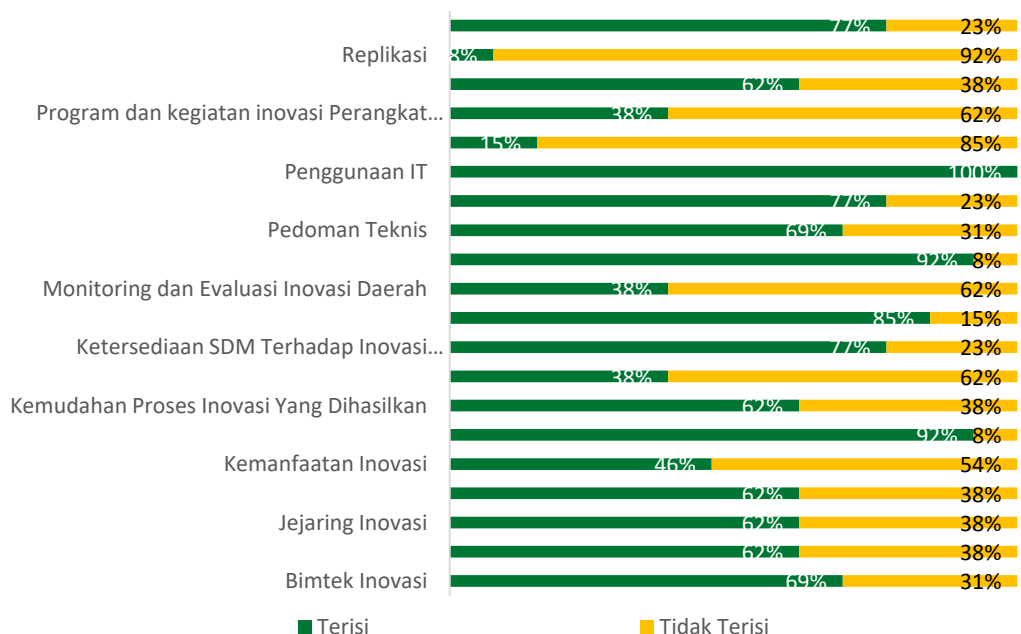
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Grobogan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Grobogan memiliki skor kematangan sedang. Terdapat 13 (68.42%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan sedang, 5 (26.32%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan 1 (5.26%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

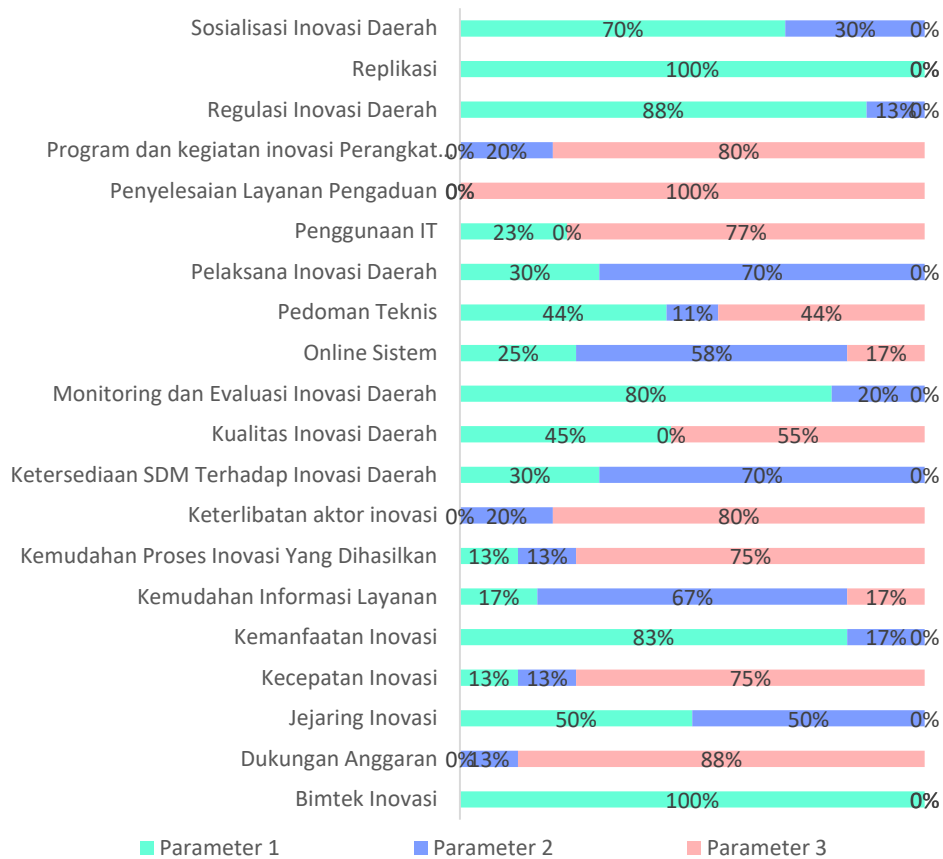
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Grobogan

Indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian bukti dukung tertinggi adalah Penggunaan IT dengan skor 100%. Artinya seluruh inovasi pada Kabupaten Grobogan telah terisi data pendukung pada indikator Penggunaan IT. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 8% artinya hanya 7% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

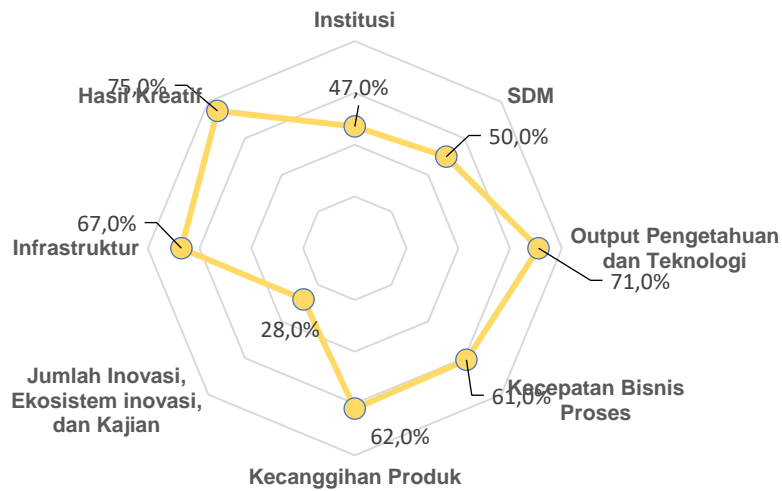
Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan yaitu sebesar 100%, artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kecepatan Inovasi masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah dan Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah sebesar 70% artinya 70% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Bimtek Inovasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk kedua indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Grobogan beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Grobogan beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT BAGI PENYELENGGARA KEGIATAN PERDAGANGAN (PASAR TRADISIONAL) BERBASIS PEMBERDAYAAN PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR | 38 |
| PUPIK ORGANIK CAIR MANDIRI (POCMAN) DAN MAXIMUM ORGANIK HEWANI (MOH) | 48 |
| INSTALASI BIOGAS | 66 |
| SMART BANK SAMPAH | 20 |
| PEMBUATAN WEBSITE BLK KABUPATEN GROBOGAN | 91 |
| SIMINFRA (SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR) | 116 |
| SIMBAH SUPER (SISTEM INFORMASI PERUBAHAN STATUS PEKERJAAN BAGI PNS, TNI, DAN POLRI) | 71 |
| GERAKAN KELUARGA PEDULI ARSIP DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN DESA SMART (SADAR, MANDIRI, RAWAT, DAN TERTIB) ARSIP DI KABUPATEN GROBOGAN | 59 |
| E-PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK UPPKS KABUPATEN GROBOGAN | 53 |
| PEMBUATAN SISTEM INFORMASI OLAHRAGA REKREASI (SIMOLEK) DI KABUPATEN GROBOGAN | 61 |
| BESTIK DAGING ESPENA (BELAJAR SENANG DAN TETAP ASYIK DENGAN E-LEARNING DI SMP N 6 PURWODADI) | 82 |
| SISTABELA (SISTEM PELAPORAN DATA BENCANA ALAM) BPBD KABUPATEN GROBOGAN | 66 |
| LAYANAN SI CESA (RESTORASI ARSIP BUKU LETTER C DESA) | 26 |
| PELAYANAN ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN KEPEGAWAIAN (IJIN BELAJAR DAN IJIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK) BERBASIS DIGITAL PADA BKPPD KAB. GROBOGAN | 93 |
| PELAYANAN BERSAHABAT (BERSIH, SANTUN, HANDAL, BERTANGGUNG JAWAB, CEPAT, DAN TEPAT) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KENYAMANAN PASIEN RAWAT JALAN DI RSUD DR. R. SOEDJATI PURWODADI | 67 |
| IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INOS (INFEKSI NOSOKOMIAL) BAGI PETUGAS DAN PENGUNJUNG DI RSUD DR. R. SOEDJATI PURWODADI | 65 |
| BERSAMA SAPEN CERIA MENJAGA KARAKTER ANAK MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN TRANSFORMATIF | 33 |
| SIGADAR IBA (SATUAN TUGAS SIAGA GAWAT DARURAT IBU DAN BAYI) SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI PUSKESMAS KARANGRAYUNG II | 57 |
| PEMANFAATAN WEBSITE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN | 95 |

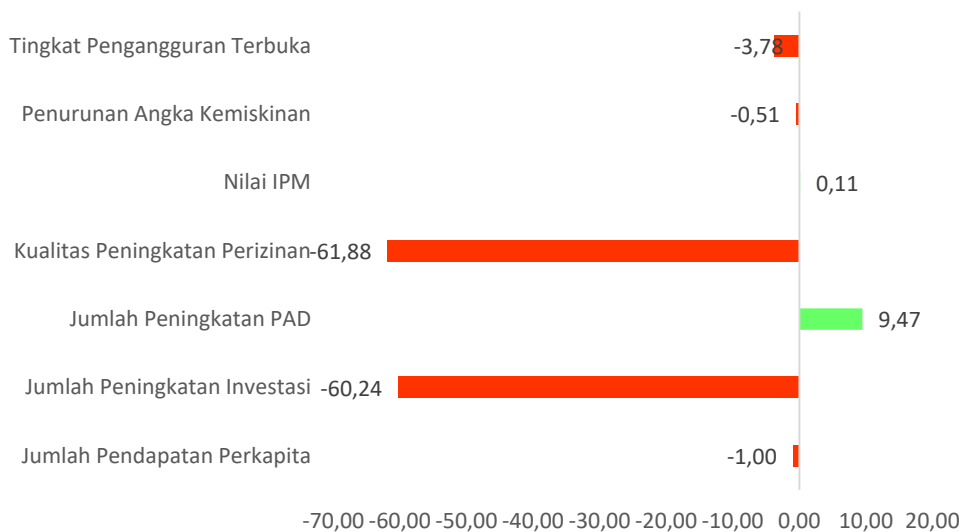
J. KABUPATEN JEPARA



Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Jepara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Hasil Kreatif merupakan variabel – variabel dengan skor tertinggi, yaitu 75.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel – variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 28.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih relatif rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



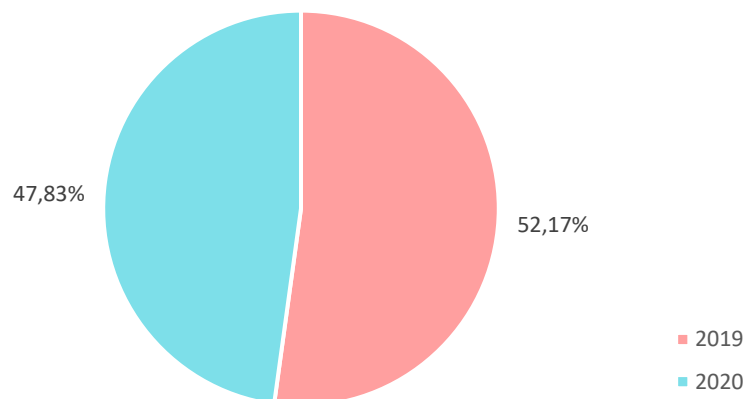
Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Jepara

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Jepara. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perbaikan hanya terjadi pada dua indikator, yaitu indikator Nilai IPM sebesar 0.11% dan indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 9.47%.

Sementara itu, indikator – indikator lainnya mengalami penurunan, dimana indikator Kualitas Peningkatan Perizinan menurun 61.88% dan indikator Jumlah Peningkatan Investasi menurun 60.24%. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 3.78% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan sebesar 3.78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.51%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Jepara meningkat 0.51% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami penurunan 1.00% namun penurunan tersebut masih relatif lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

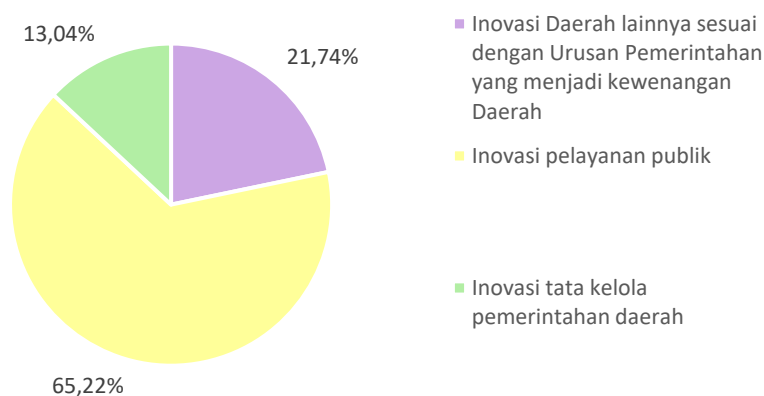
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Jepara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jepara diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 12 (62.17%) inovasi dari 23 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 11 (47.83%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

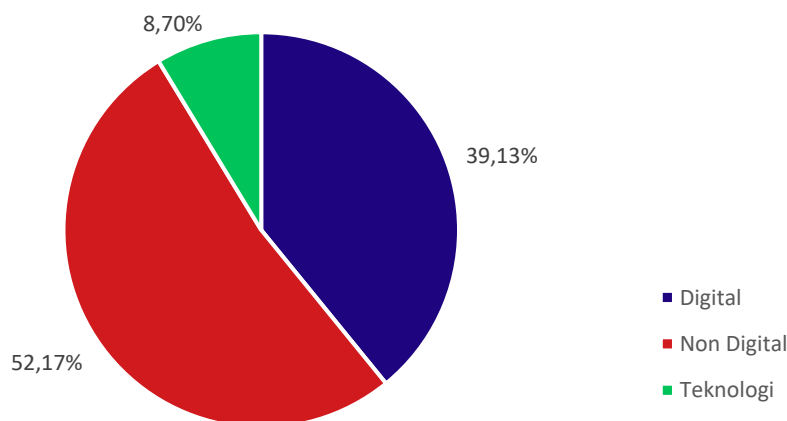
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Jepara

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 15 (65.22%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 3 (13.04%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 5 (21.74%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

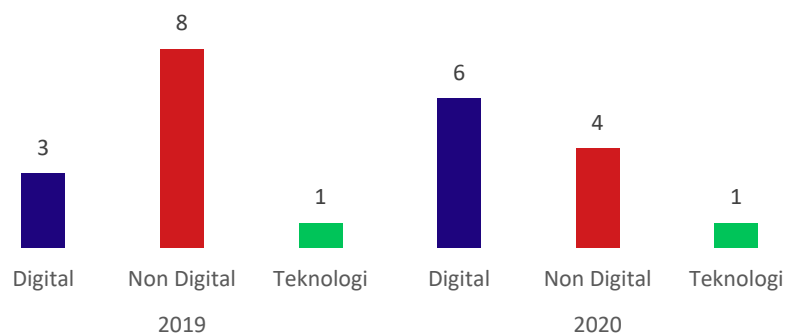
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Jepara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Jepara merupakan inovasi non digital, yaitu sejumlah 12 (52.17%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 9 (39.13%) inovasi yang merupakan inovasi digital serta 2 (8.70%) inovasi teknologi.

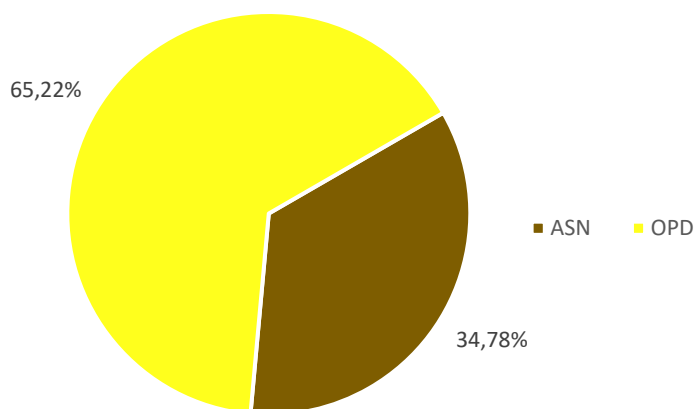
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Jepara

Jumlah inovasi digital mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 namun inovasi non digital mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 6 inovasi. Inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2019 sejumlah 8 inovasi non digital lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi non digital. Sementara inovasi teknologi yang diterapkan pada tahun 2019 dan 2020 berjumlah 1 inovasi.

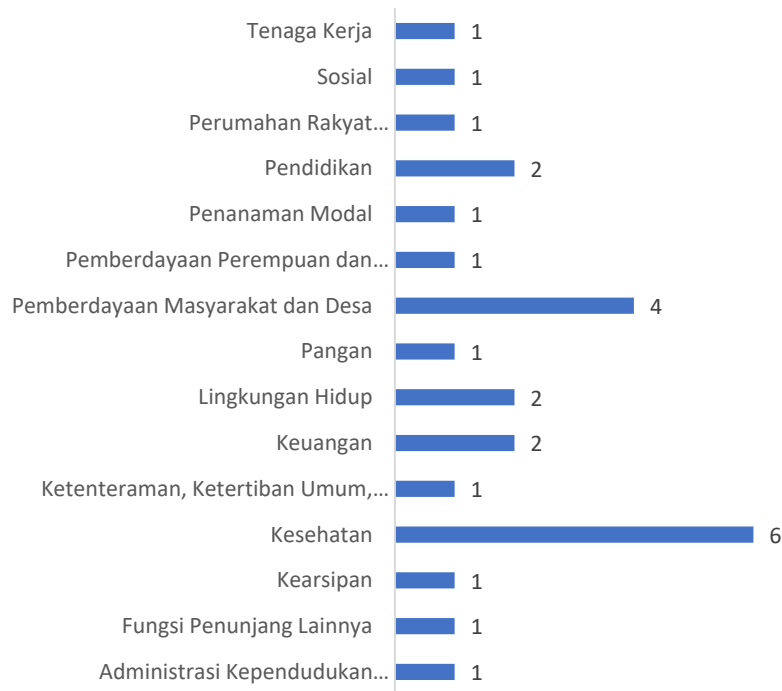
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Jepara

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Jepara pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 15 (65.22%) inovasi. Kemudian terdapat 8 (11.11%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

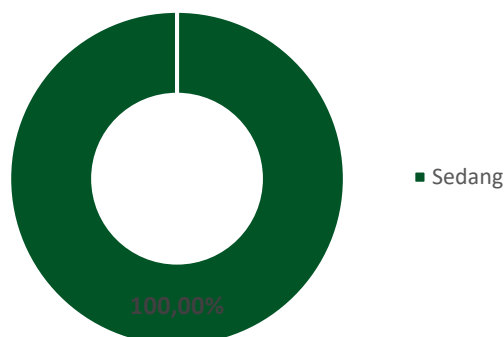
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Jepara

Inovasi daerah pada Kabupaten Jepara tersebar pada 15 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan kesehatan yaitu 6 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Jepara, terdapat 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 1 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1 inovasi, urusan pendidikan 2 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1 inovasi, serta urusan kesehatan 6 inovasi.

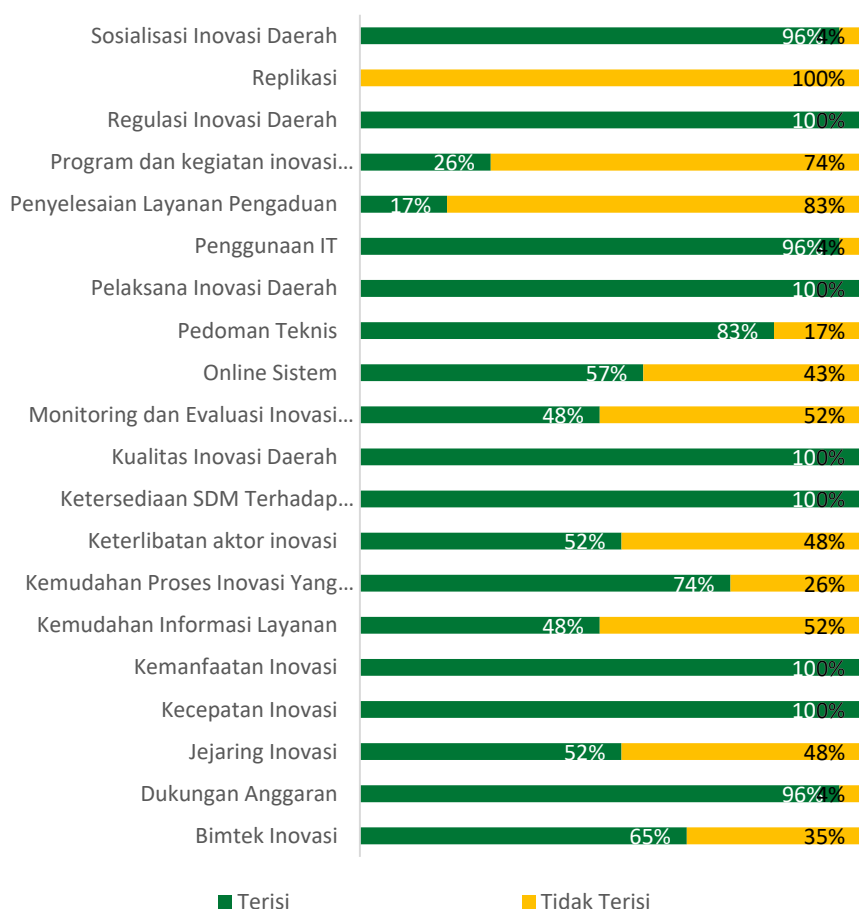
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Jepara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Jepara memiliki skor kematangan yang sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

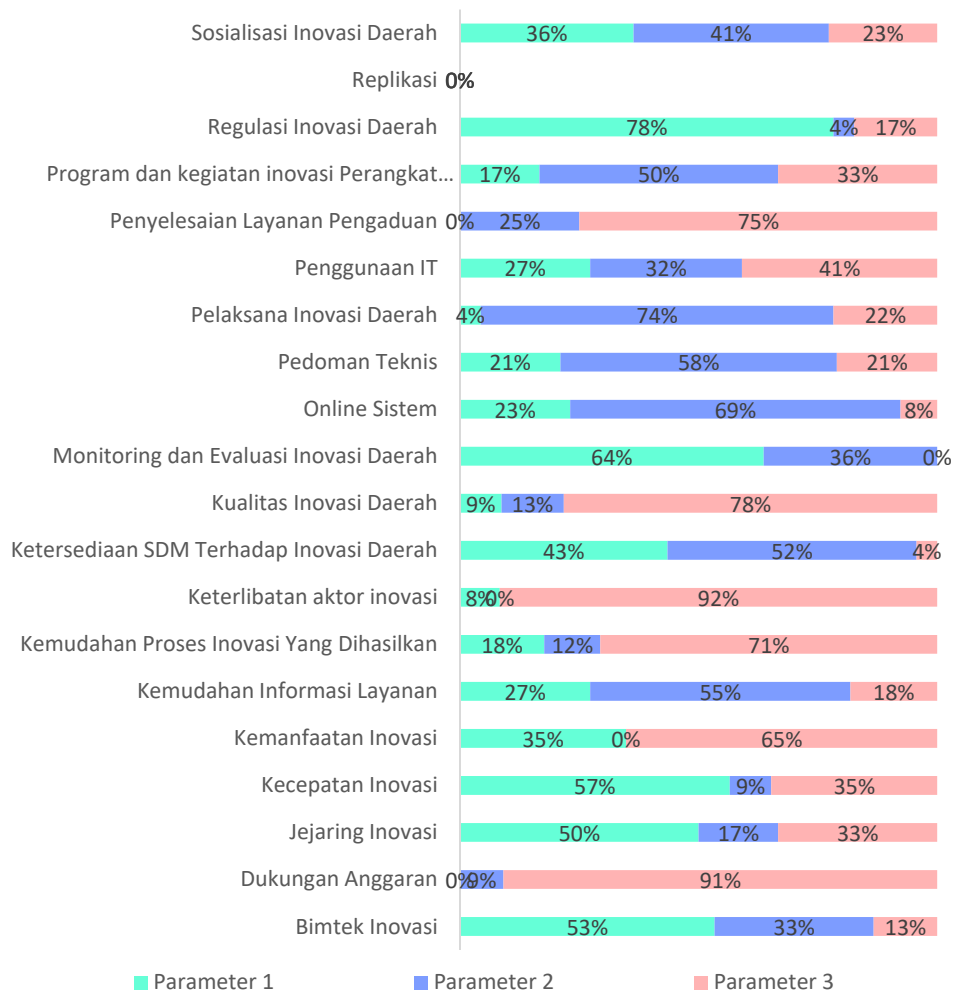
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jepara

Terdapat beberapa indikator yang memiliki tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya dengan skor 100%, yaitu Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi dan Kecepatan Inovasi. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu 0% artinya tidak terdapat inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

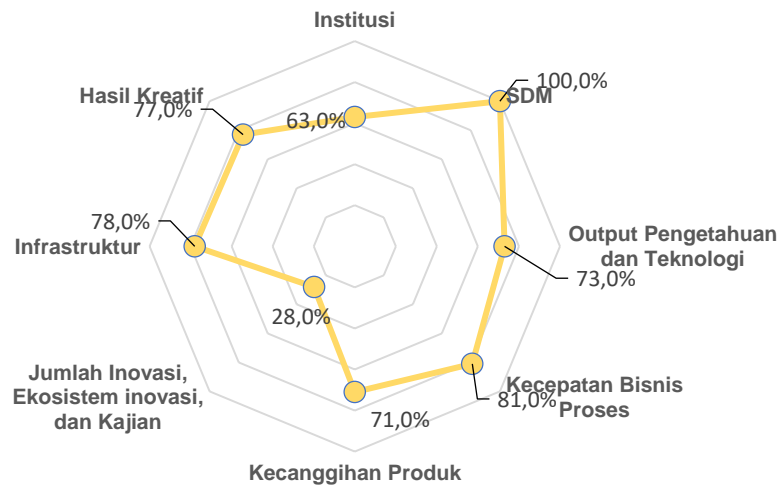
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi, yaitu sebesar 92%, artinya hampir seluruh inovasi yang mengisi data dukung pada indikator Keterlibatan Aktor Inovasi masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 74% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 78%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Jepara beserta Skor Kematangannya

Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Jepara beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| SIKUMISKU DI DESA (Aplikasi Mutasi Kependudukan di Desa) - (Disdukcapil) | 87 |
| MAL PELAYANAN PUBLIK JEPARA - (DPMPTSP) | 99 |
| SIMANIS (Sistem Informasi Rekomendasi Kemiskinan) - (Dinsospermasdes) | 73 |
| TANTE ROSA (Tabungan Telur dari Ekobrik Smpah) - (Puskesmas Kedung II) | 74 |
| SLIRA / Sistem Inovasi Linmas Jepara (Satpol PP) | 94 |
| plat_k (Pelayanan Tanpa Kertas) / Paperless (Puskesmas Pecangaan) | 82 |
| DESA MANDIRI SAMPAH (DLH) | 97 |
| NIKAH KEREN (DP3AP2KB) | 65 |
| PAKAR TEMALI - Pengasapan Ikan Yang Murah, Mudah diterapkan dan Ramah Lingkungan (Diskan) | 58 |
| Cluster Semikat / Sesuai Minat dan Bakat (Dikpora) | 75 |
| SIMARDI / Sistem Manajemen Informasi Arsip Dinamis (Diskarpus) | 79 |
| Pelayanan antar kerja melalui Aplikasi berbasis website https://yokerjo.jepara.go.id (Nakertrans) | 88 |
| Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berbasis website https://epbb.jepara.go.id (BPKAD) | 98 |
| Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah melalui Alat Rekam Data Transaksi Usaha secara Elektronik (BPKAD) | 89 |
| SERSAN RATRI / Sehat bersama Ramuan Tradisional (Puskesmas Kedung I) | 84 |
| JUMANJI/juru pemantau jiwa (Puskesmas Batealit) | 63 |
| JUGO MANDIRI SAMPAH (Puskesmas Donorojo) | 79 |
| ZONA KM 7 (Puskesmas Welahan II) | 64 |
| ETOSS TB (Puskesmas Mayong I) | 51 |
| Kapak Sakti (Puskesmas Pakisaji) | 83 |
| SEKOLAH BANK SAMPAH (Puskesmas Keling I) | 52 |
| SIM-RTLH (Disperkim) | 97 |
| Aplikasi Berantas TB (Puskesmas Tahunan) | 79 |

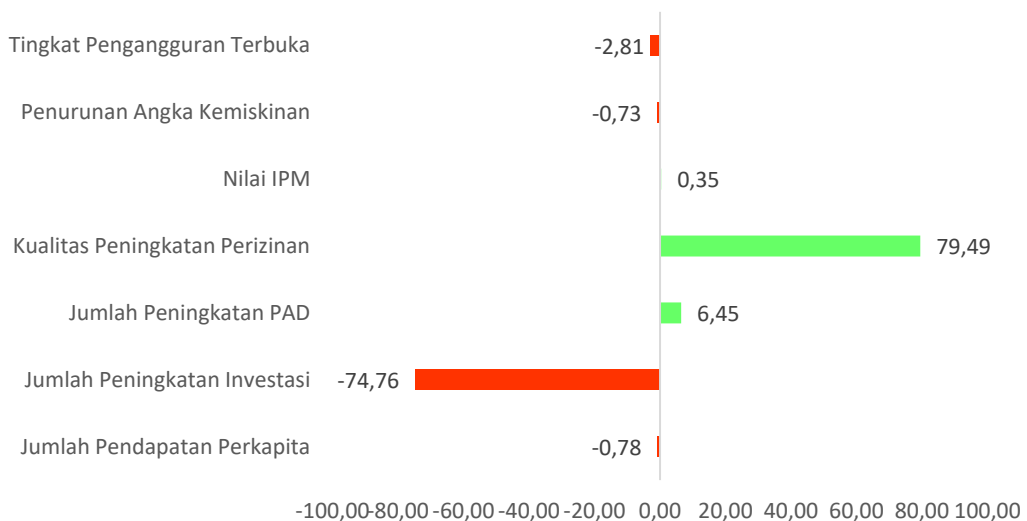
K. KABUPATEN KARANGANYAR



Gambar III. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 100.0%. Artinya seluruh indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 28.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih relatif rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



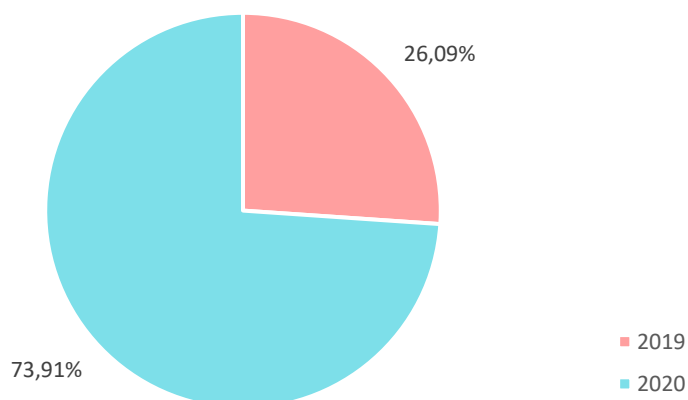
Gambar II2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Karanganyar

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Karanganyar. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator, yaitu indikator Nilai IPM sebesar 0.35%, indikator Peningkatan Perizinan sebesar 79.49% serta indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 6.45%. Namun peningkatan pada Jumlah PAD masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya mengalami peningkatan sebesar 8%.

Sementara itu, indikator – indikator lainnya mengalami penurunan. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 2.81% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan sebesar 2.81% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.73%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar meningkat 0.73% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jumlah Peningkatan Investasi menurun 74.76% dan Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita menurun 0.78% namun penurunan tersebut masih relatif lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

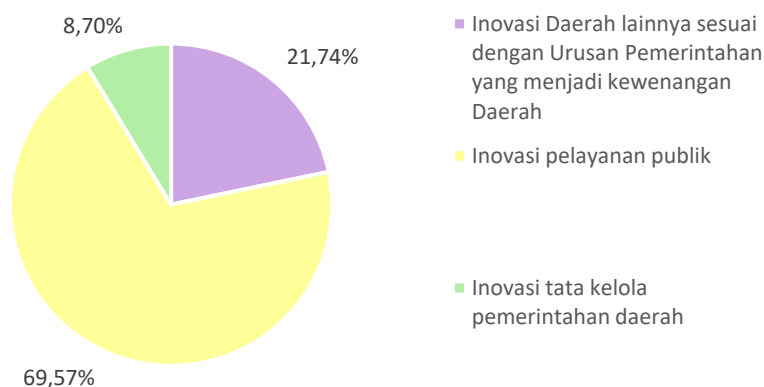
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Karanganyar

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Karanganyar diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 17 (73.91%) inovasi dari total inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan 6 (26.09%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2019.

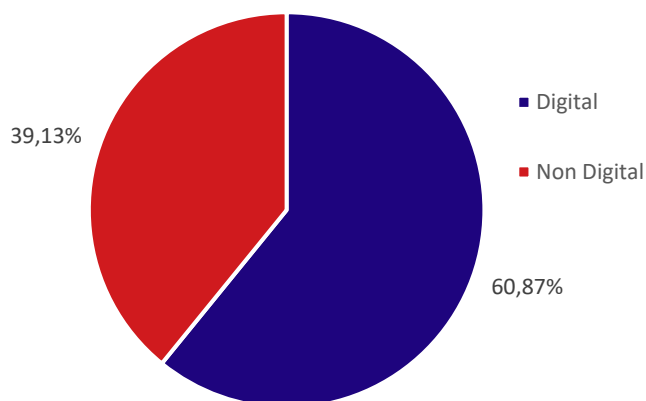
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 16 (69.57%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 2 (8.70%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 5 (21.74%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

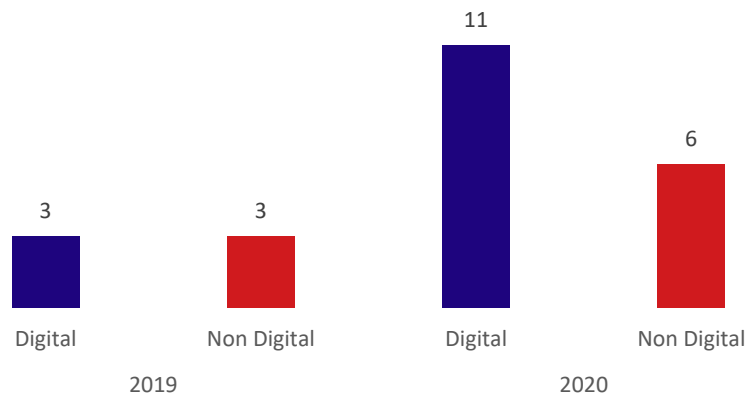
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Karanganyar

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Karanganyar merupakan inovasi digital, yaitu sejumlah 14 (60.87%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 9 (39.13%) inovasi yang merupakan inovasi non digital.

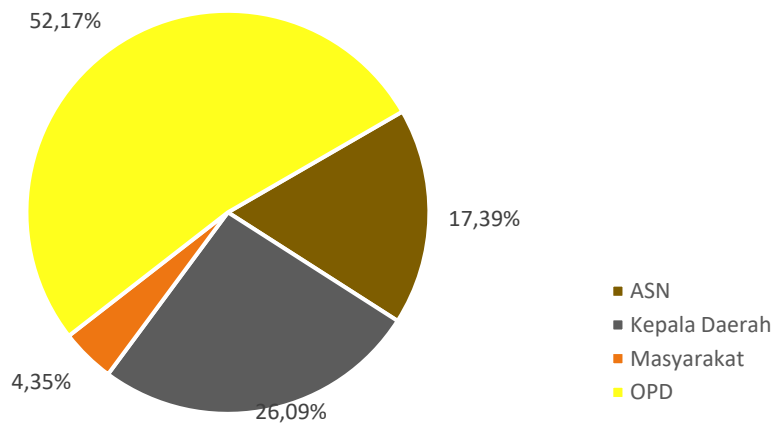
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Karanganyar

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 11 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital, pada tahun 2019 terdapat 3 inovasi non digital yang diterapkan lalu pada tahun 2020 menjadi 6 inovasi non digital.

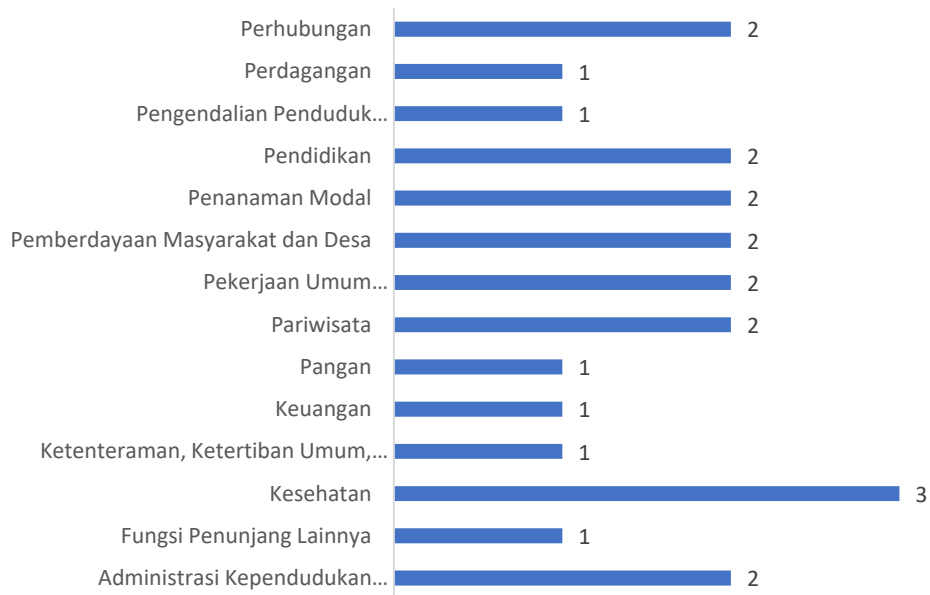
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Karanganyar

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 12 (52.17%) inovasi. Kemudian terdapat 1 (4.35%) inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat, 6 (26.09%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 4 (17.39%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

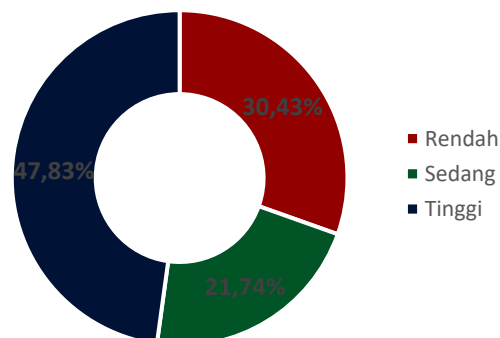
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Karanganyar

Inovasi daerah pada Kabupaten Karanganyar tersebar pada 14 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada kesehatan yaitu 3 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Karanganyar, terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan 2 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 2 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1 inovasi serta urusan kesehatan 3 inovasi.

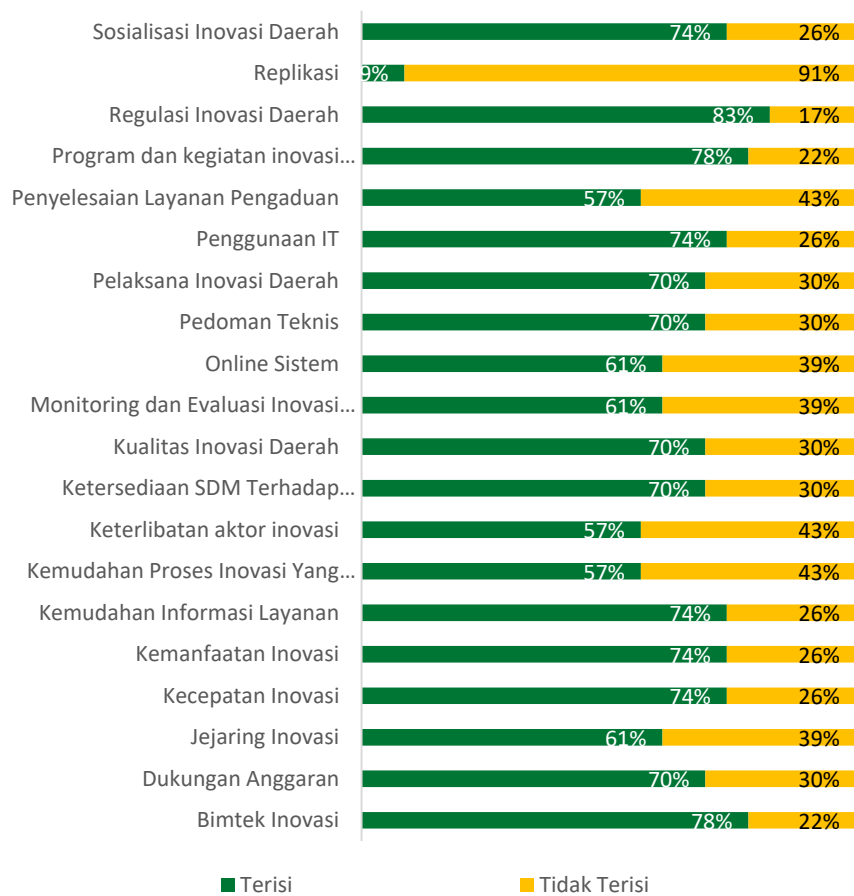
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Karanganyar

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Karanganyar memiliki skor kematangan yang tinggi. Terdapat 11 (47.83%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan tinggi, 5 (21.74%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 7 (30.43%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

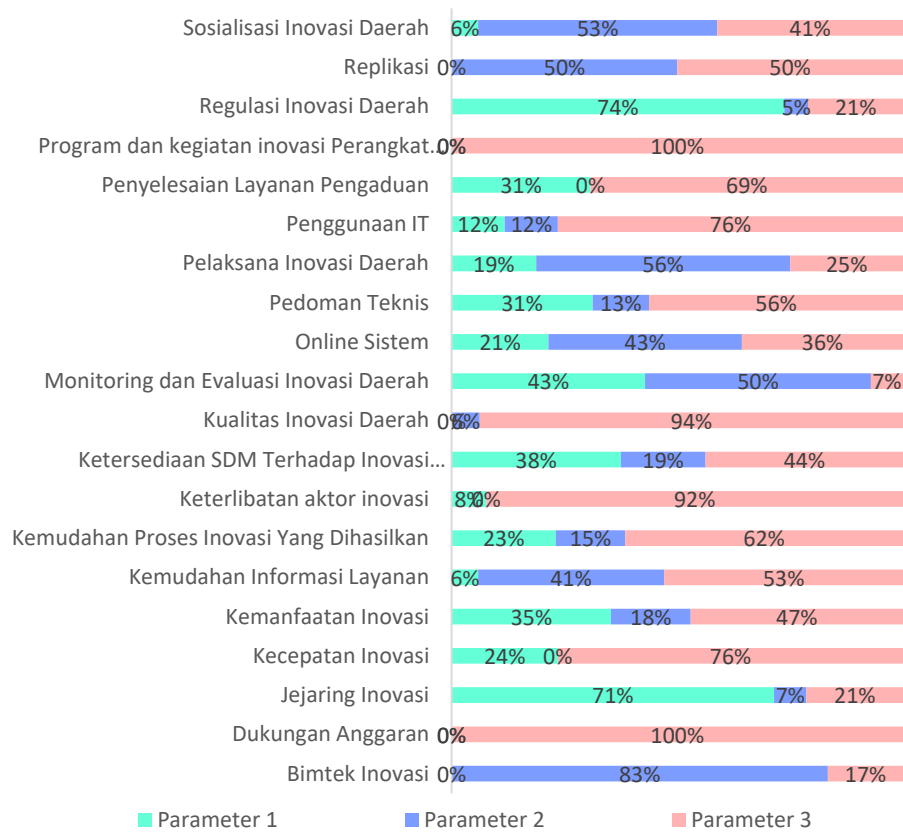


Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar

Secara umum, tingkat keterisian pada indikator inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Karanganyar cukup baik. Indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian bukti dukung tertinggi adalah Indikator Regulasi Inovasi Daerah, yaitu 83%. Artinya 83% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Karanganyar telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar

9% artinya hanya terdapat 9% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

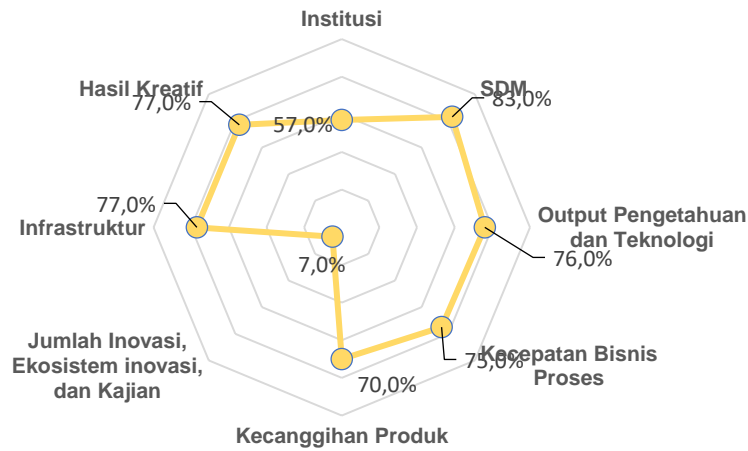
Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD dan indikator Dukungan Anggaran, yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang mengisi data dukung pada kedua indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 83% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 74%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Karanganyar beserta Skor Kematangannya

Tabel 12. Daftar Inovasi Kabupaten Karanganyar beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|------------------------|
| Adaptasi Kebiasaan Baru di Transportasi Umum Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 | 0 |
| New Normal Di Pasar Modern/Minimarket | 0 |
| Istirahat Nyaman Hati Senang di The Alana Hotel and Convention Center, Kabupaten Karanganyar | 0 |
| Pelayanan Terpadu Satu Pintu tulus melayani dalam tatanan kehidupan baru | 127 |
| SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PELAYANAN ELEKTRONIK | 120 |
| SI EMPOK | 88 |
| SIAP BOS | 103 |
| PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK) | 133 |
| PELAYANAN AKTA PERKAWINAN PITU DADI SIJI (PAK TUJI) | 131 |
| Pemberian Penghargaan Bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang masuk Perguruan Tinggi Negeri TA 2019 | 45 |
| Pemberian Penghargaan Bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang masuk Perguruan Tinggi Negeri 2020 | 47 |
| Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (APENDUKUM) | 121 |
| SAHABAT KEREN | 103 |
| e-KIR | 76 |
| LAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA PERISTIWA YANG MENIMPA, MEMBAHAYAKAN, DAN/ATAU MENGANCAM KESELAMATAN MANUSIA | 103 |
| Rekantaru | 100 |
| Jaga Hati Puskesmas Kebakkramat II | 61 |
| AMBILIN BADAR (Ambulan Ibu Hamil, Bersalin, Bencana Alam, dan Gawat Darurat) Puskesmas Tawangmangu | 66 |
| INOVASI PELAYANAN PUBLIK "SIPP PAKDE 10-in1 (Situs Portal Pelayanan Pajak Daerah 10-in1) BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 | 111 |
| SIDENOKK | 105 |
| PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH 2020 | 12 |
| PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) 2019 | 12 |
| OJEK ASI (Pilihan Cermat, Bayi Sehat) Puskesmas Kebakkramat I | 81 |

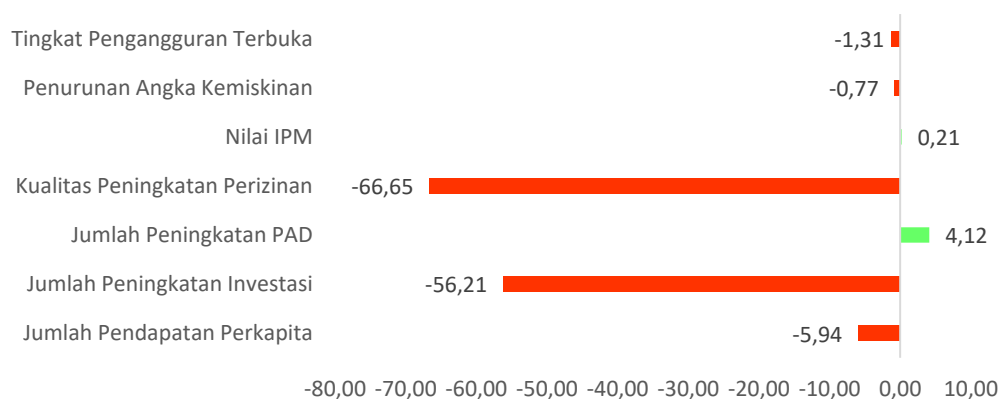
L. KABUPATEN KEBUMEN



Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kebumen

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih sangat rendah, yaitu 7.0%, dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih relatif rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 123. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah ada Kabupaten Kebumen

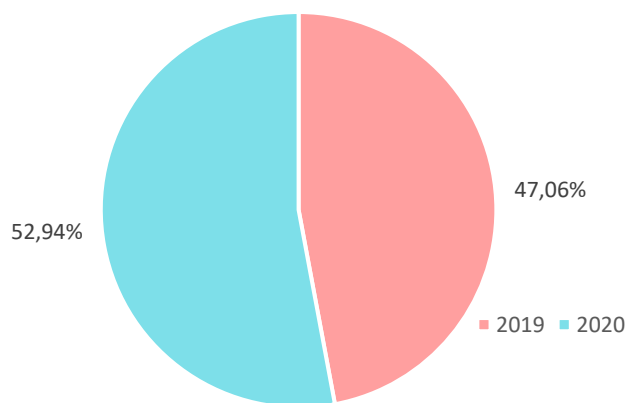
Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Kebumen. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi

daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perbaikan hanya terjadi pada dua indikator, yaitu indikator Nilai IPM sebesar 0.21% dan Indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 4.21%. Namun peningkatan pada Jumlah PAD masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya mengalami peningkatan sebesar 8%.

Sementara itu, indikator – indikator lainnya mengalami penurunan, dimana indikator Kualitas Peningkatan Perizinan menurun 66.65%, indikator Jumlah Peningkatan Investasi menurun 56.21%, serta indikator Jumlah Pendapatan Perkapita menurun 5.94%. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka juga menunjukkan penurunan sebesar 1.31% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan sebesar 1.31% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.77%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen meningkat 0.77% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

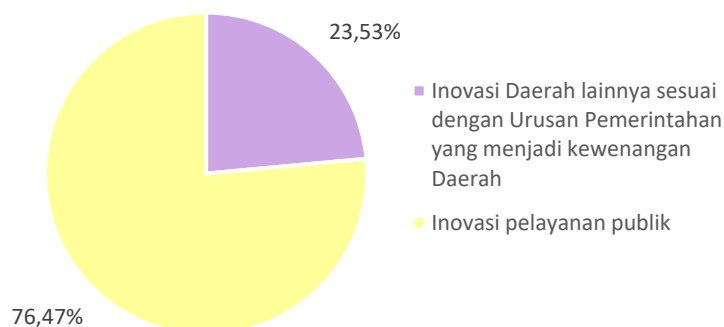
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kebumen

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kebumen diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 9 (52.94%) inovasi dari 17 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan 8 (47.06%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2019.

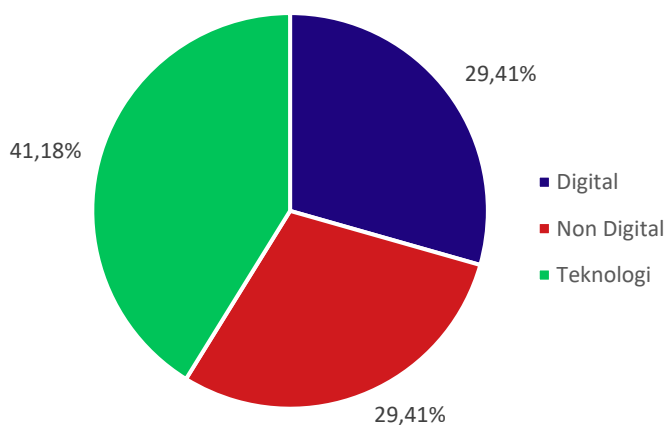
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kebumen

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 13 (76.47%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 4 (23.53%) inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

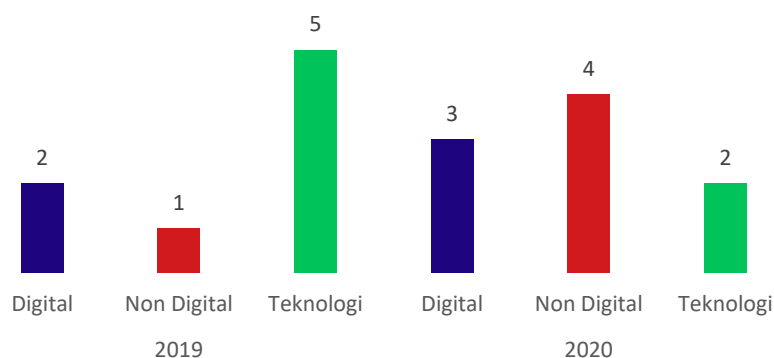
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 126. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kebumen

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Kebumen merupakan inovasi teknologi, yaitu sejumlah 7 (41.18%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 5 (29.41%) inovasi yang merupakan inovasi digital serta 5 (29.41%) inovasi non digital.

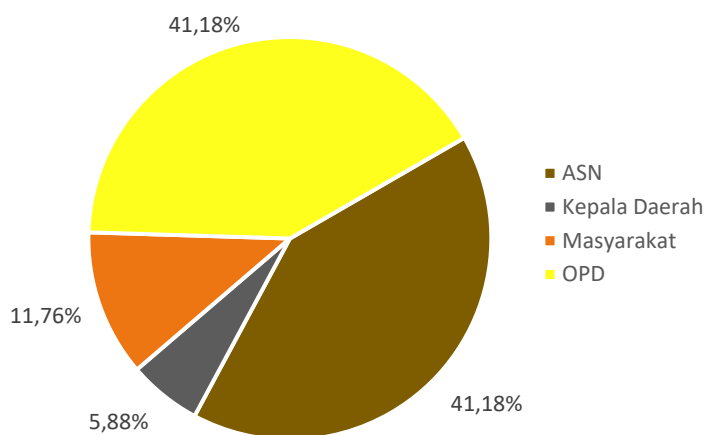
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 127. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kebumen

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya inovasi digital dan inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 3 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital, pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 1 inovasi non digital lalu pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi non digital. Sementara inovasi teknologi menurun dari 5 inovasi pada tahun 2019 menjadi 2 inovasi pada tahun 2020.

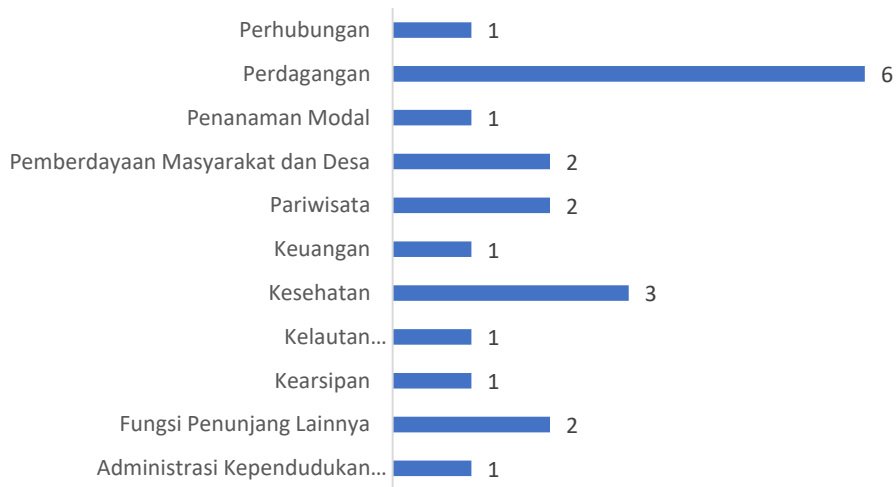
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kebumen

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah dan ASN, yaitu masing-masing sejumlah 7 (41,18%) inovasi. Kemudian terdapat 2 (2,04%) inovasi yang diinisiasi masyarakat dan 1 (5,88%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah.

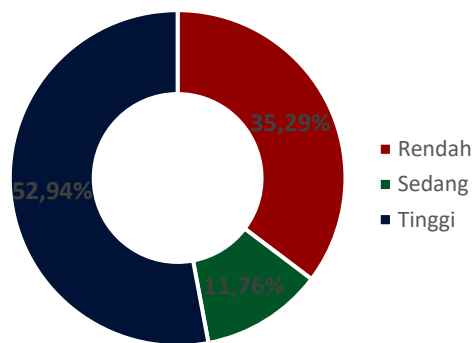
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 129. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kebumen

Inovasi daerah pada Kabupaten Kebumen tersebar pada 11 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan perdagangan yaitu 6 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Kebumen, hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan sejumlah 3 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum terlaporkan.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

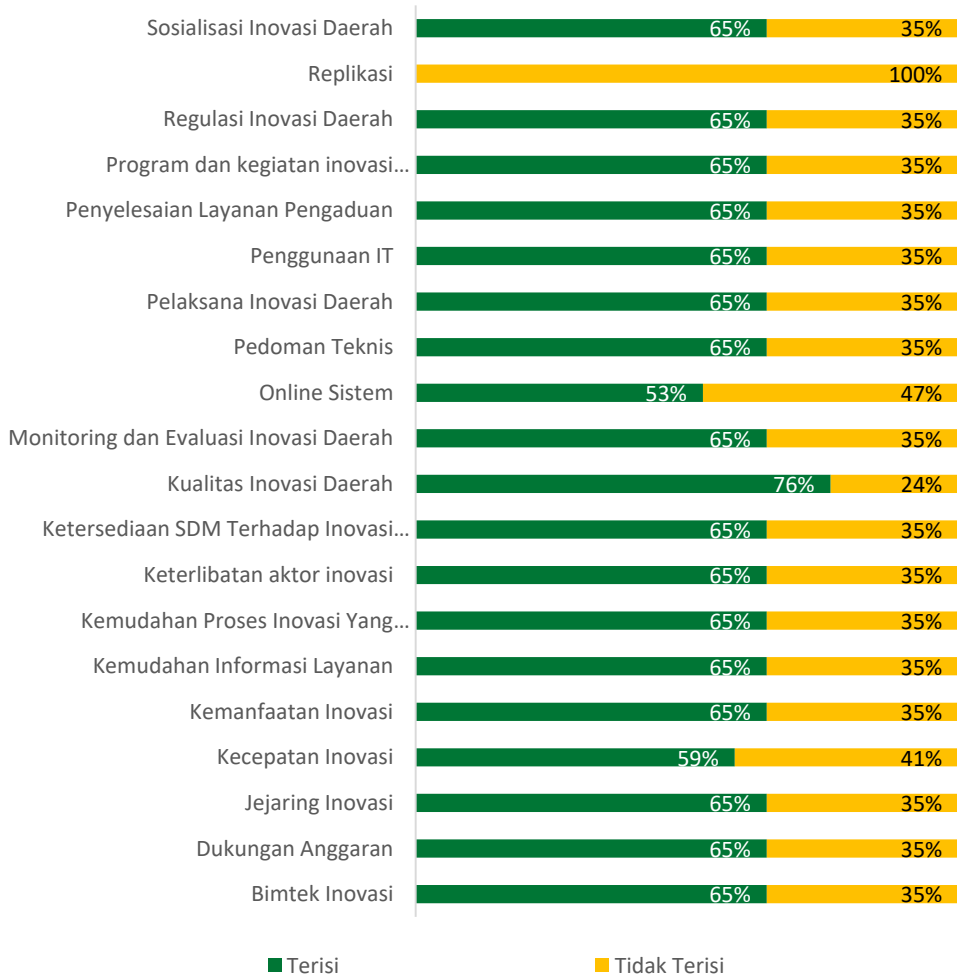


Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kebumen

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kebumen memiliki skor kematangan tinggi. Terdapat 9 (52.94%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan tinggi, 2 (11.76%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 6 (35.29%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah

inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

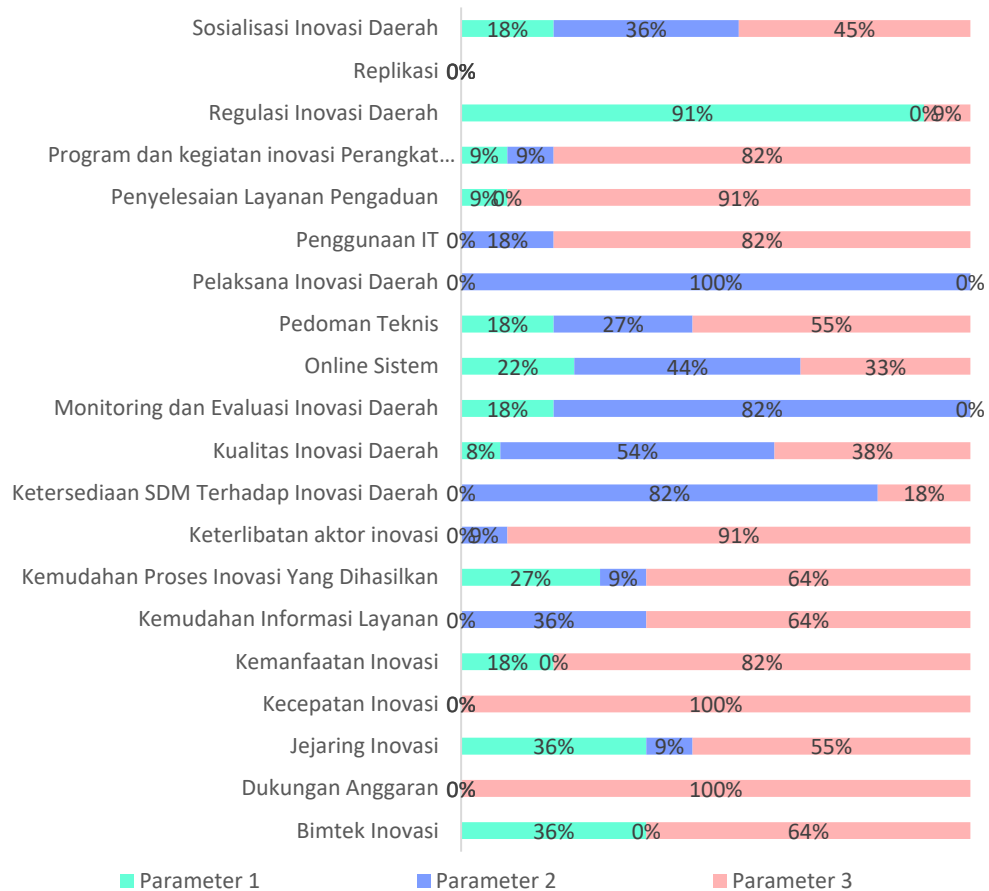
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen

Indikator Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 76% artinya 76% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kebumen telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 132. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter di atas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi dan Dukungan Anggaran, yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang mengisi data dukung pada kedua indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 100% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 91%.

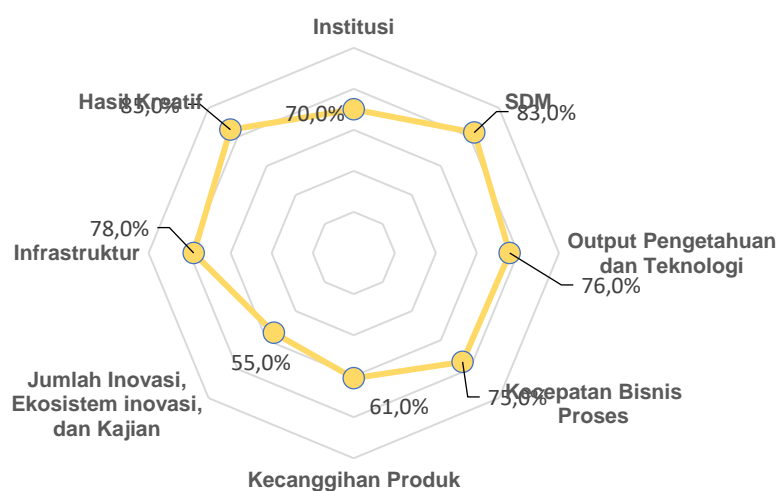
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kebumen beserta Skor Kematangannya

Tabel 13. Daftar Inovasi Kabupaten Kebumen beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| SIMBOK: Solusi Belanja Pintar Di Pasar Tradisional | 0 |
| Tatanan Baru Berniaga | 0 |
| CULINARIS (CULINER HIGIENIS) | 0 |
| E-KIR: A NEW NORM FOR SAFETY TRANSPORTATION | 15 |
| ZONASIX (ZONASI TAPI ASIX) | 0 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Jaga aturan njagani seduluran nang pasar rakyat | 15 |
| APLIKASI PETAKU DAN BANG KUMIS (PDAM) | 105 |
| INTEGRASI PENGELOLAAN KAWASAN ANYAMAN PANDAN BERSAMA AGEN "PERKASA" (PERUBAHAN KAWASAN PERDESAAN) DI KABUPATEN KEBUMEN | 99 |
| E-BPHTB (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) | 114 |
| Sibule Kolbun sebagai Upaya Peningkatan Produksi Perikanan Budiaya dan Penanggulangan Kemiskinan | 96 |
| Kader Masyarakat Tanggap Insiden (Darma Sakti) Sebagai Upaya Peningkatan Patient Safety Di RSUD Prembun Kebumen | 107 |
| PANCEN MAEN (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Online Masyarakat Kebumen) | 117 |
| SATGAS ANTIVIRUS KLIRONG | 107 |
| INOVASI "CINTA SOBAT SIRNA" (Cek dan Input Tanggal Kadaluaarsa Obat dengan Aplikasi Warna) | 123 |
| Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK) dengan Aplikasi Online untuk Mempercepat Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Kebumen | 120 |
| INOVASI MBAK SUMI TOPP (PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN ASUHAN MANDIRI TOGA DAN AKUPRESURE PIJAT) | 121 |
| SISTEM PENGELOLAAN KEARSIPAN PLUS MENUJU TERTIB ARSIP DESA SIVILIA (SISTER VILLAGE ARCHIEVE) DI KABUPATEN KEBUMEN | 122 |

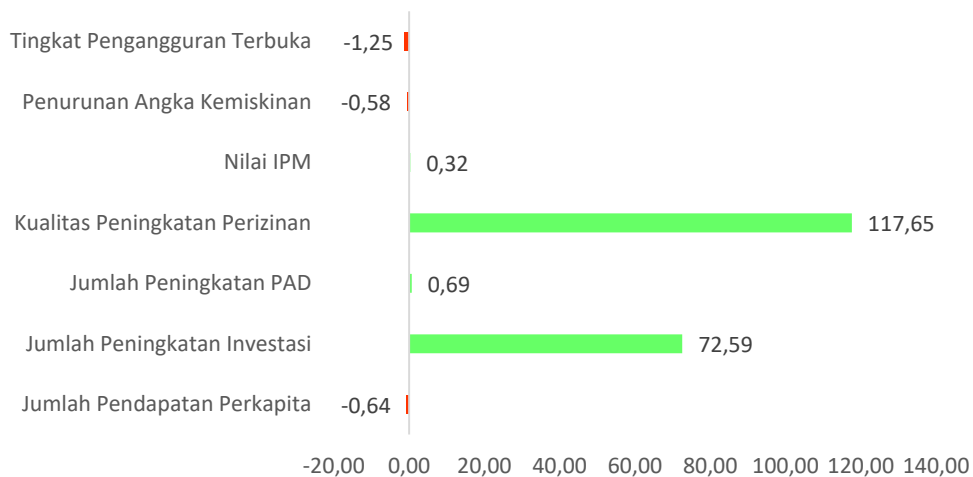
M. KABUPATEN KENDAL



Gambar 133. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kendal

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Hasil Kreatif merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 85.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan variabel dengan skor paling rendah (55.0%). Namun secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup baik, yaitu termasuk dalam parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



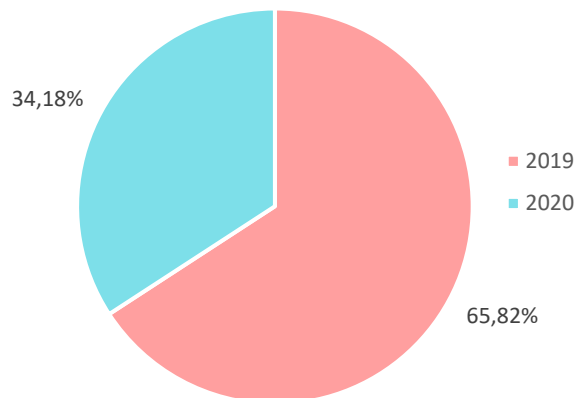
Gambar 134. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kendal

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Kendal. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.32%, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 117.65%, indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 0.69%, indikator Jumlah Peningkatan Investasi 72.59%.

Sementara itu, indikator-indikator lainnya mengalami penurunan. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 1.25% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan sebesar 1.25% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.58%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Kendal meningkat 0.58% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami menurun 0.64% namun penurunan tersebut masih lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

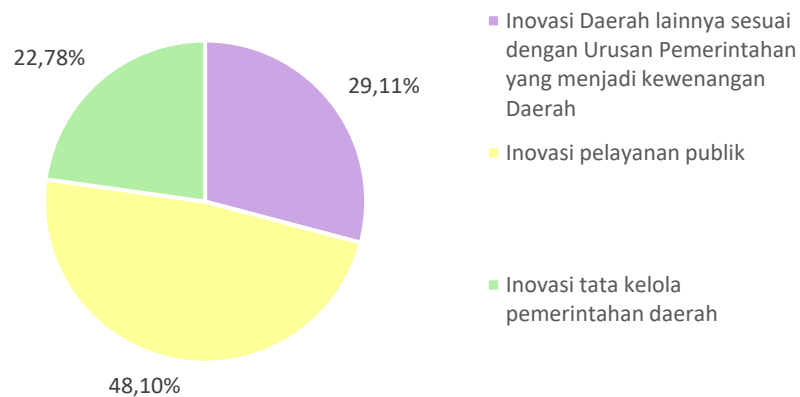
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 135. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kendal

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kendal diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 52 (65.82%) inovasi dari total inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 27 (34.18%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

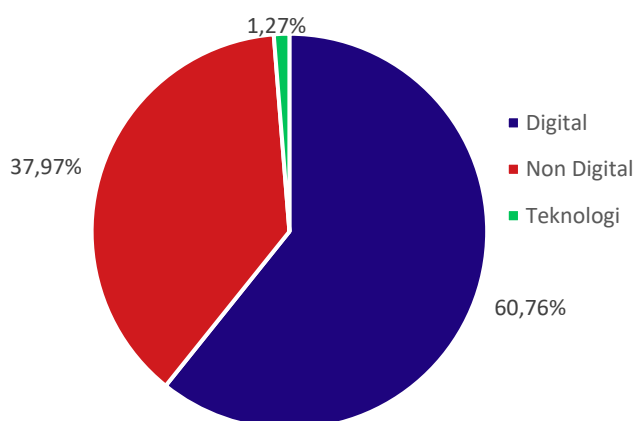
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 136. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kendal

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 38 (48.10%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 18 (22.78%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 23 (29.11%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

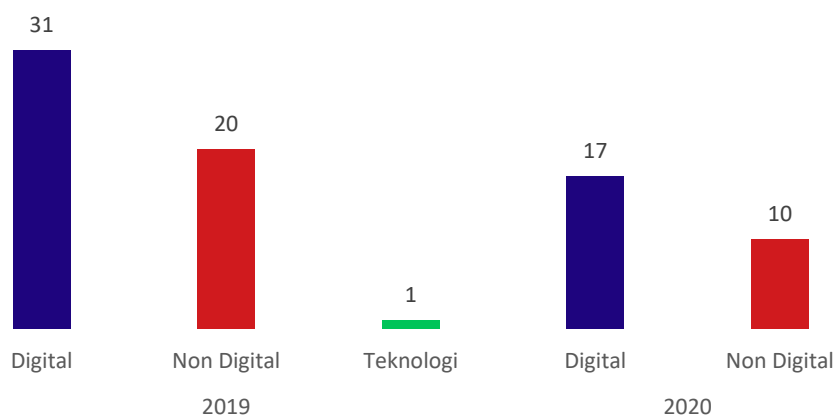
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 137. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kendal

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Kendal merupakan inovasi digital, yaitu sejumlah 48 (60.76%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 30 (37.97%) inovasi yang merupakan inovasi digital serta 1 (1.27%) inovasi teknologi.

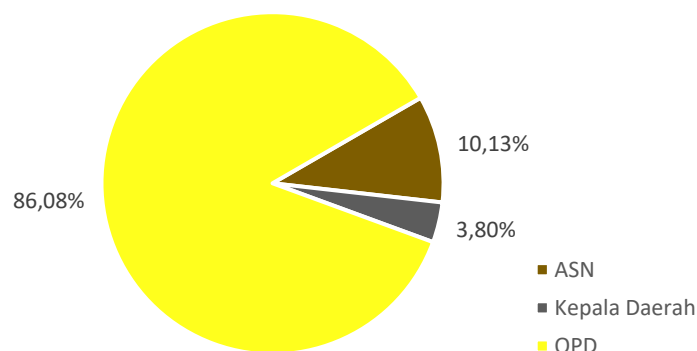
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 138. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kendal

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, inovasi non digital dan inovasi teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 31 inovasi dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 17 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital dan inovasi teknologi, pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 20 inovasi non digital dan 1 inovasi teknologi lalu pada tahun 2020 menjadi 10 inovasi non digital dan tidak ada inovasi teknologi.

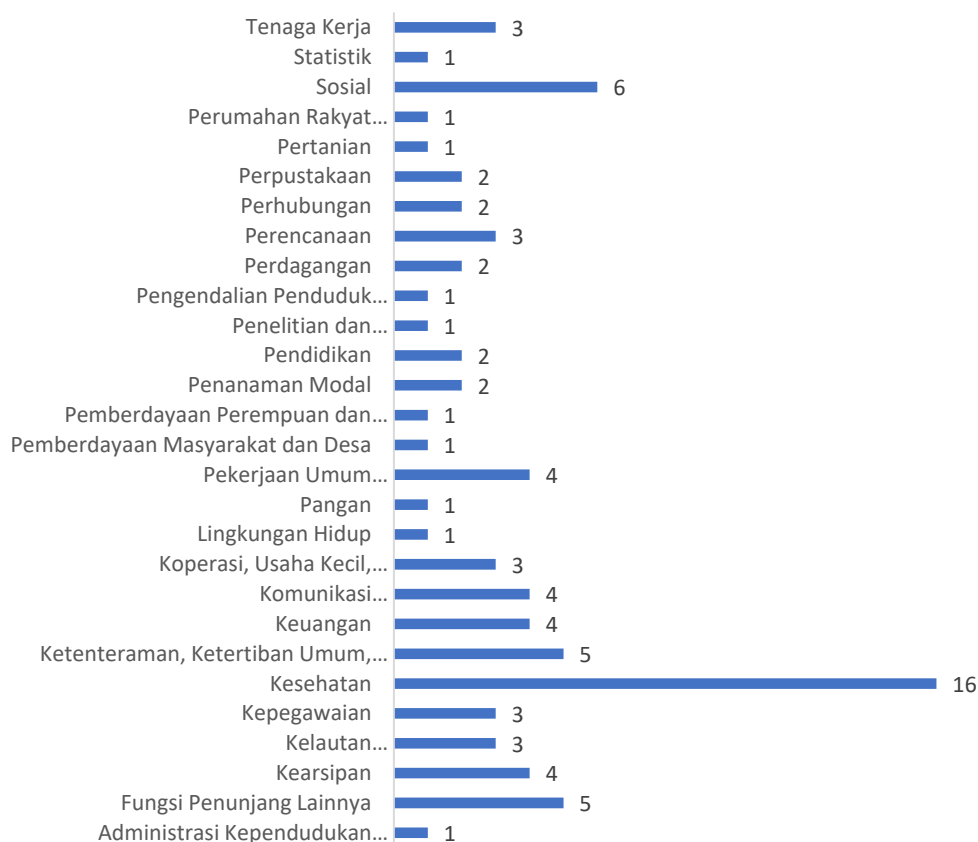
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 139. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kendal

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kendal pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 68 (86.08%) inovasi. Kemudian terdapat 8 (10.13%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 3 (3.80%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

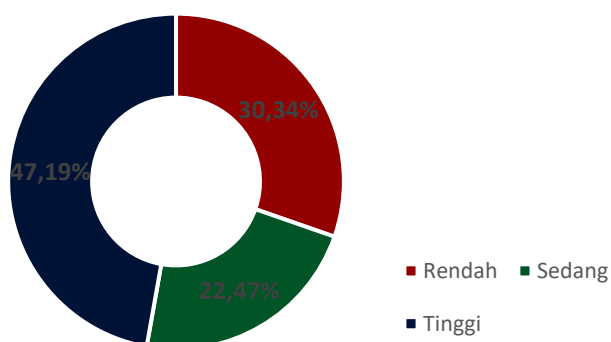
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 140. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kendal

Inovasi daerah pada Kabupaten Kendal tersebar pada 28 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan kesehatan yaitu 16 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Kendal, terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 6 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1 inovasi, urusan pendidikan 2 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 4 inovasi, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 5 inovasi, dan urusan kesehatan 16 inovasi.

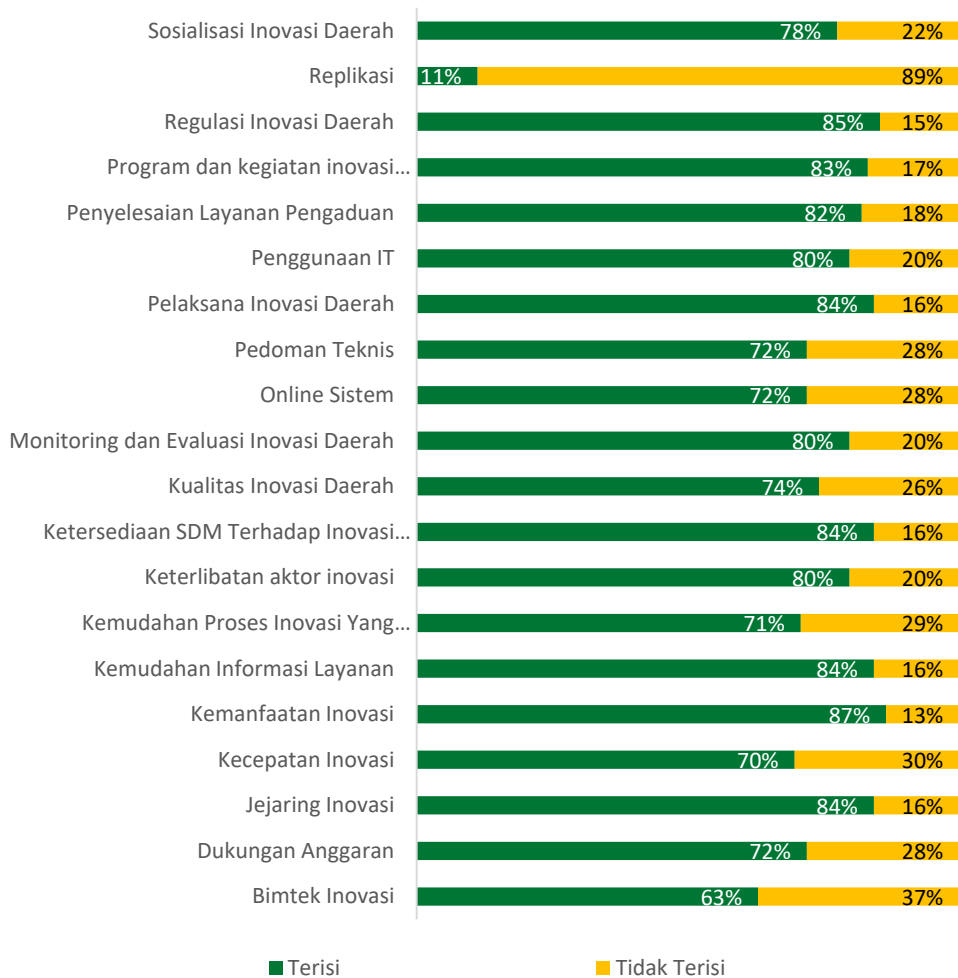
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 141. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kendal

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kendal memiliki skor kematangan yang tinggi. Terdapat 42 (47.19%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan tinggi, 20 (22.47%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 27 (30.34%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

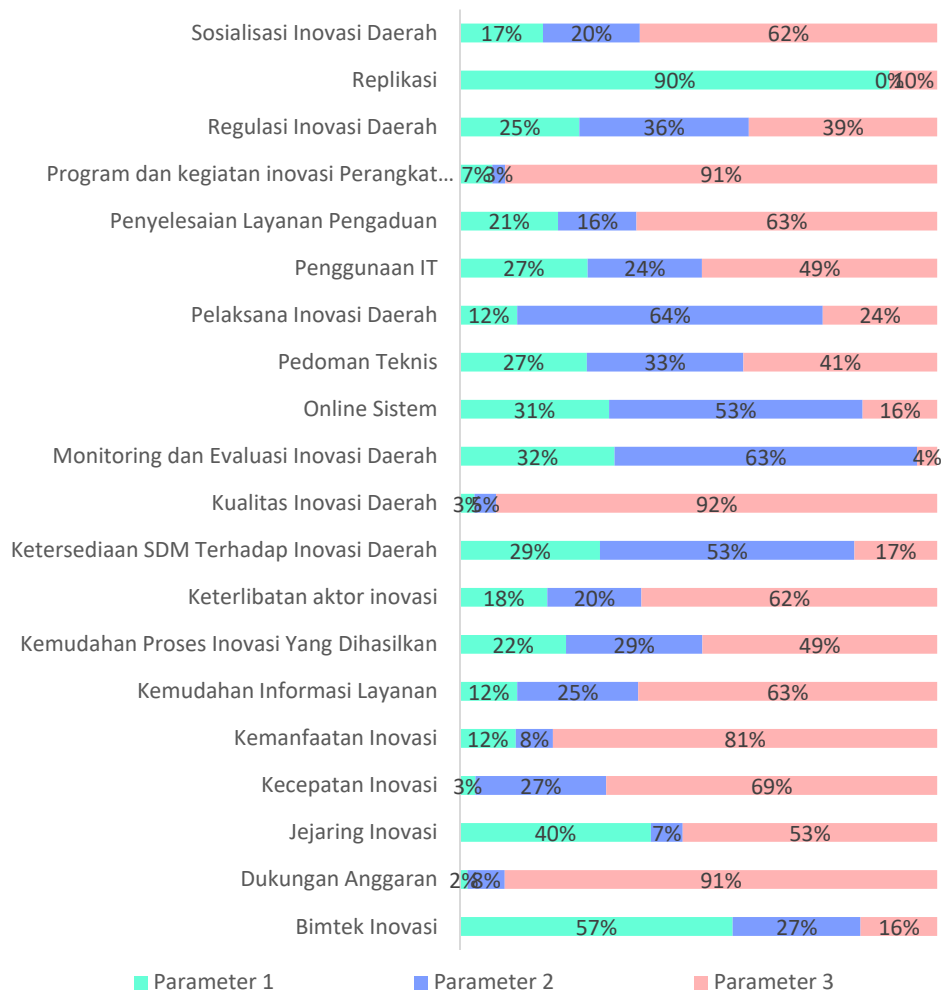
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 142. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kendal

Indikator Kemanfaatan Inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 87% artinya 87% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kendal telah terisi data pendukung pada indikator Kemanfaatan Inovasi. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 11% artinya hanya 11% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 143. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter di atas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, yaitu sebesar 92%, artinya hampir seluruh inovasi yang mengisi data dukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 64% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 90%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Kendal beserta Skor Kematangannya

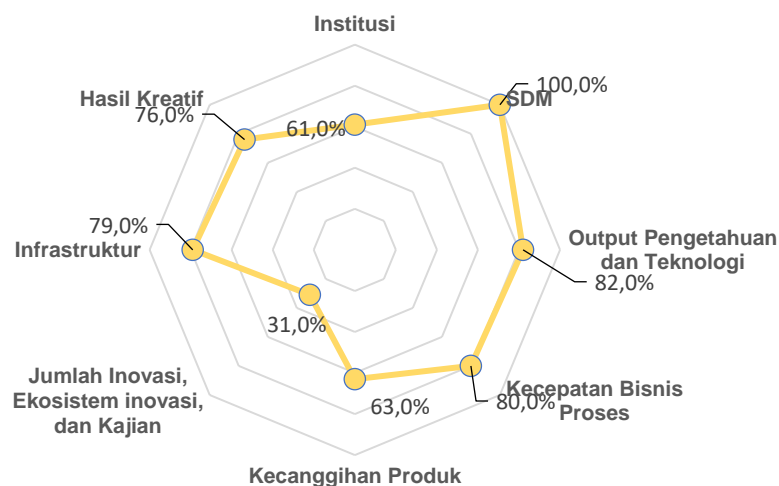
Tabel 14. Daftar Inovasi Kabupaten Kendal beserta Skor Kematangannya

| Nama Inovasi | Skor Kematangan |
|---|-----------------|
| KENDAL TERKINI_PASAR TRADISIONAL | 0 |
| KENDAL TERKINI_PASAR MODERN | 0 |
| KENDAL TERKINI_RESTORAN | 0 |
| KENDAL TERKINI_HOTEL | 0 |
| KENDAL TERKINI_PTSP | 0 |
| KENDAL TERKINI_TEMPAT WISATA | 0 |
| KENDAL TERKINI_TRANSPORTASI UMUM | 0 |
| UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) | 105 |
| Kran Air Siap Minum (KASM) | 108 |
| SIAPP (Sistem Informasi Aduan Polisi Pamong Praja) | 101 |
| KEPO-IN HUKUM | 119 |
| SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) | 120 |
| SIJELI (Sistem Informasi Ijin Penelitian) | 107 |
| GENTA DPRD (Agenda Kegiatan DPRD Online) | 98 |
| JARING ASMAR (JARING ASPIRASI MASYARAKAT) | 79 |
| SIMESRA (Sistem Informasi Manajemen Bidang Kesra) | 101 |
| PECEL SOEWONDO (Pendaftaran Cepat Online Soewondo) | 98 |
| BAPAK NE (Bayar Pajak Online) | 119 |
| KUSUKA (Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat) | 103 |
| MAYANTIKA (Prima Dalam Pelayanan Autentik Arsipnya) | 94 |
| PUTAR AUDIKA (Jemput Antar Anak Usia Dini Menjadi Pemustaka) | 85 |
| Depth Trammel Net (Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan) | 100 |
| BABE NE (Bayar BPHTB Online) | 122 |
| DOKAR (Desa Online Terintegrasi) | 123 |
| SANTRI PAK BANGUN (Sistem Pengelolaan Terintegrasi Pajak Bumi dan Bangunan) | 122 |
| INTI BARA (Infrastruktur Teknologi Informasi Blankspot Area) | 121 |
| BINA KABARET (Pembinaan Karakter Bangsa di RT/RW) | 82 |
| DEPOT AYAH (Deteksi Cepat Potensi Ancaman Wilayah) | 80 |
| GUSI KESIKAT (Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat) | 110 |
| SILAPAR (Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran Pelatihan) | 97 |
| SILAKON (Sistem Informasi Laporan Kinerja On Line) | 80 |
| DIANTER (Digital Pelayanan Terpadu) | 121 |
| BAPOKTING ONLINE | 87 |
| PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu & Konsultasi UMKM) | 91 |
| WBS (whistle Blower System) | 118 |
| E-LAPHAR (Elektronik Laporan Harian) | 128 |
| KENDAL HANDAL | 0 |
| Kode Etik Kecamatan Kaliwungu | 0 |
| Si Arek Pemdes (Sistem Informasi Aplikasi Rencana Kerja) | 0 |

| Nama Inovasi | Skor Kematangan |
|---|------------------------|
| Pemerintah Desa) | |
| E-Bapokting – Aplikasi Informasi Bahan Pokok dan Penting | 121 |
| LIPEN ABANG (Klinik Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah) | 126 |
| PAK AKIM CERIA MANJA (Pelayanan Administrasi Kependudukan Anjungan KIA Mandiri Cepat Ramah Ibu Anak Senang Lima Menit Jadi) | 114 |
| Sistem Informasi Manajemen Operasi Kegiatan (SIMPOK) | 118 |
| Sistem Informasi Data Kendali Deteksi Dini Keterlambatan Proyek (SIDALI KEPO) | 106 |
| Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Kendal | 134 |
| BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM (BMS) BERBASIS ANDROID DI KABUPATEN KENDAL | 0 |
| sistem informasi manajemen aset lampu penerangan jalan umum berbasis teknologi informasi | 92 |
| Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor | 103 |
| SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP DI KECAMATAN SINGOROJO | 0 |
| E-Lukir (Evaluasi Kinerja 360) | 120 |
| KUSUKA (Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat) | 121 |
| Inseminasi Buatan dalam SIKOMANDAN | 105 |
| Pendataan Warga Miskin Terdampak Covid-19 | 113 |
| Migrasi listrik dari sistem pasca bayar ke pra bayar (token) di UPTD Rusunawa Kabupaten Kendal | 94 |
| Posyandu KELOPAK | 0 |
| AMBULANCE CERIA | 125 |
| Aplikasi DiAnTer | 0 |
| Kelas ASI Ceria | 0 |
| Konservasi Sumber Daya Air Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri Untuk Membangun Kemandirian Masyarakat Desa | 0 |
| PLUT KUKM | 109 |
| GERDU SI MANTACO | 0 |
| KPR BUNDA (Kawal, Pantau, Rangkul Bunda) | 83 |
| E-JARING ASMARA (ASPIRASI MASYARAKAT) | 24 |
| Dakugenggam | 98 |
| TAHU BALADO PEDES (Tangkap, Hubungi Batuk Lama & Baru di Puskesmas dan Desa) | 4 |
| PENATAAN ARSIP BERBASIS DIGITAL | 90 |
| DESA SIAGA SEHAT JIWA (DSSJ) | 0 |
| NAGITA SEHAT (PEMBINAAN GIGI BALITA SEHAT) | 14 |
| Pecel soewondo | 127 |
| MAYANTIKA (Prima Dalam Pelayanan Autentik Arsipnya) | 106 |
| PUTAR AUDIKA (Jemput Antar Anak Usia Dini Menjadi Pemustaka) | 110 |
| Garuk Comunity (Kelas Gizi Buruk) | 24 |
| Gerakan Bersama Makan Ikan | 0 |

| Nama Inovasi | Skor Kematangan |
|--|-----------------|
| CINTA MILDA (CINTA KITA UNTUK IBU HAMIL KENDAL DUA) | 87 |
| GERTAK DATUK (Gerakan Tanam Dan Makan Daun Katuk) | 96 |
| SIKRENOVA (Sistem Informasi Kreativitas dan Inovasi) | 129 |
| GASPOL STBM (Gerakan Percepatan STBM Desa) | 0 |
| Sistem Informasi Rekomendasi Izin Lingkungan | 120 |
| Aplikasi Manajemen Informasi Data Bidang Kesra | 0 |
| SILAPAR (Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran Pelatihan) | 116 |
| BANGDELIMAH | 89 |
| Sistem Informasi Laporan Kinerja On Line (SILAKON) | 108 |
| Kendal Pintar Berbagi | 103 |
| INTI BARA (Infrastruktur Teknologi Informasi Blankspot Area) | 110 |
| Penggunaan Solar Cell (Tenaga Surya) dalam Penunjang Proses Budidaya Ikan Kabupaten Kendal | 95 |
| Dokar (Desa Online Kendal Terintegrasi) | 129 |
| Depth Tramell Net Pendongkrak Pendapatan Nelayan Ramah Lingkungan di Kabupaten Kendal | 108 |
| NIHIL | 0 |
| PELAYANAN KESEHATAN ONLINE 119 (YANKES 119) | 0 |

N. KABUPATEN KLATEN

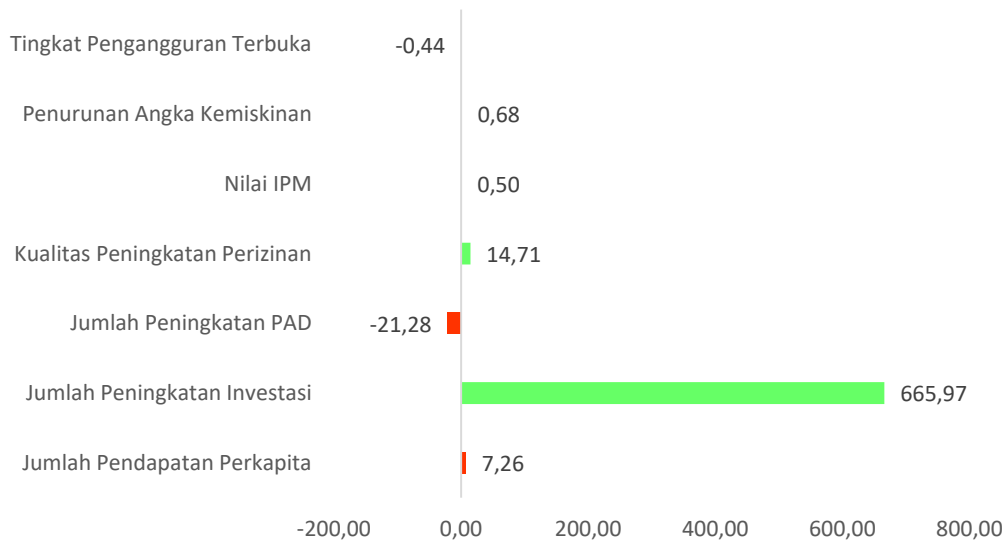


Gambar 144. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Klaten

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 100.0%. Artinya seluruh indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 31.0%

dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih relatif rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



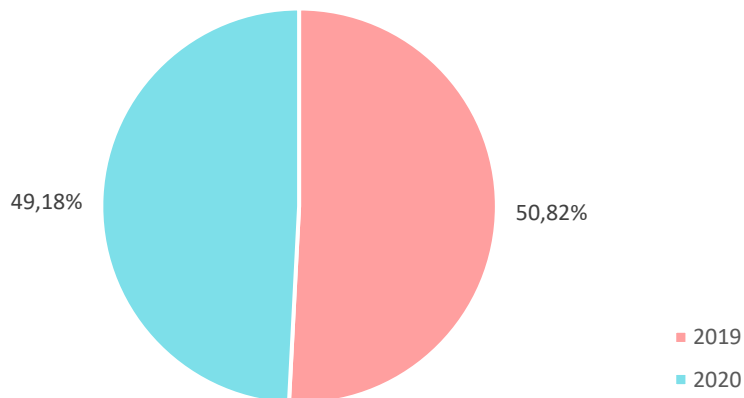
Gambar 145. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Klaten

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Klaten. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada hampir seluruh indikator, yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia meningkat 0.50%, Kualitas Peningkatan Perizinan meningkat 14.71%, Jumlah Peningkatan Investasi meningkat 665.9%, dan Jumlah Pendapatan Perkapita meningkat 7.26%. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan peningkatan sebesar 0.68% artinya angka kemiskinan di Kabupaten Klaten menurun 0.68% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Sementara itu, indikator-indikator lainnya mengalami penurunan. Indikator Jumlah Peningkatan PAD menurun 21.28% dan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 0.44% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan sebesar 0.44% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun peningkatan tersebut masih lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami peningkatan sebesar 0.92%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

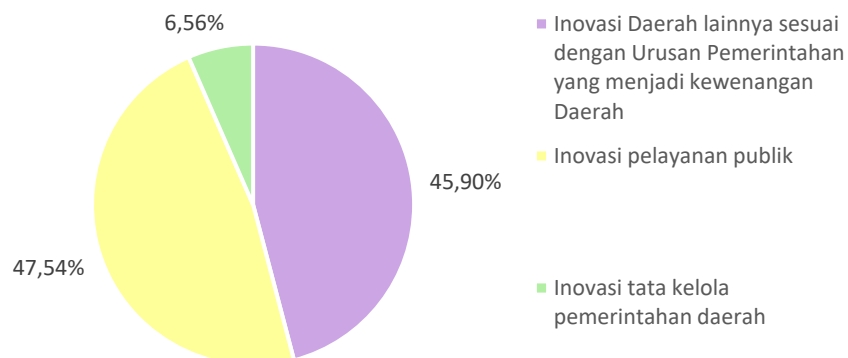
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 146. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Klaten

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, terdapat 31 (50.82%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 dan 30 (49.18%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

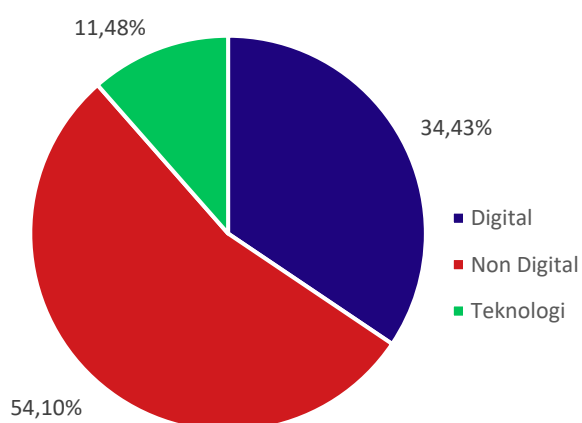
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 147. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Klaten

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 29 (47.54%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 4 (6.56%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 28 (45.90%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

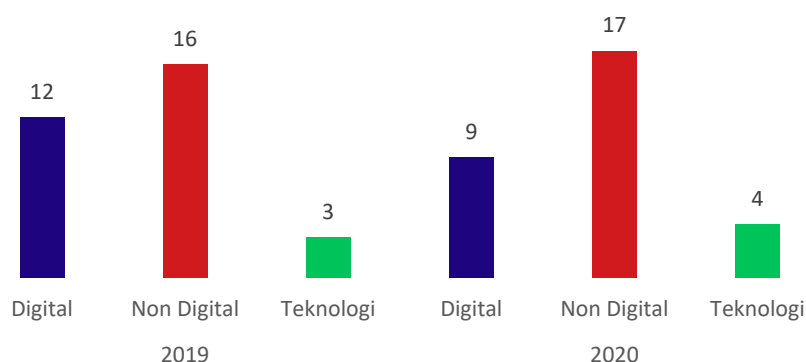
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 148. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Klaten

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Klaten merupakan inovasi non digital, yaitu sejumlah 33 (54.10%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 21 (34.43%) inovasi yang merupakan inovasi digital serta 7 (11.48%) inovasi teknologi.

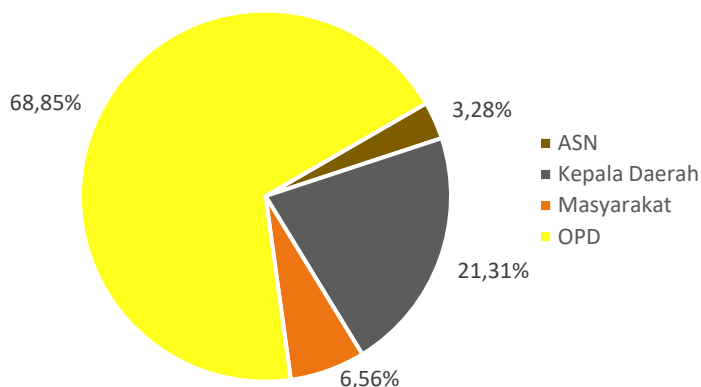
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 149. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Klaten

Dapat dilihat bahwa inovasi digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 12 inovasi dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 9 inovasi. Sementara itu, jumlah inovasi non digital dan inovasi teknologi yang diterapkan pada tahun 2019 sejumlah 16 inovasi non digital dan 3 inovasi teknologi lalu pada tahun 2020 bertambah menjadi 17 inovasi non digital dan 4 inovasi teknologi.

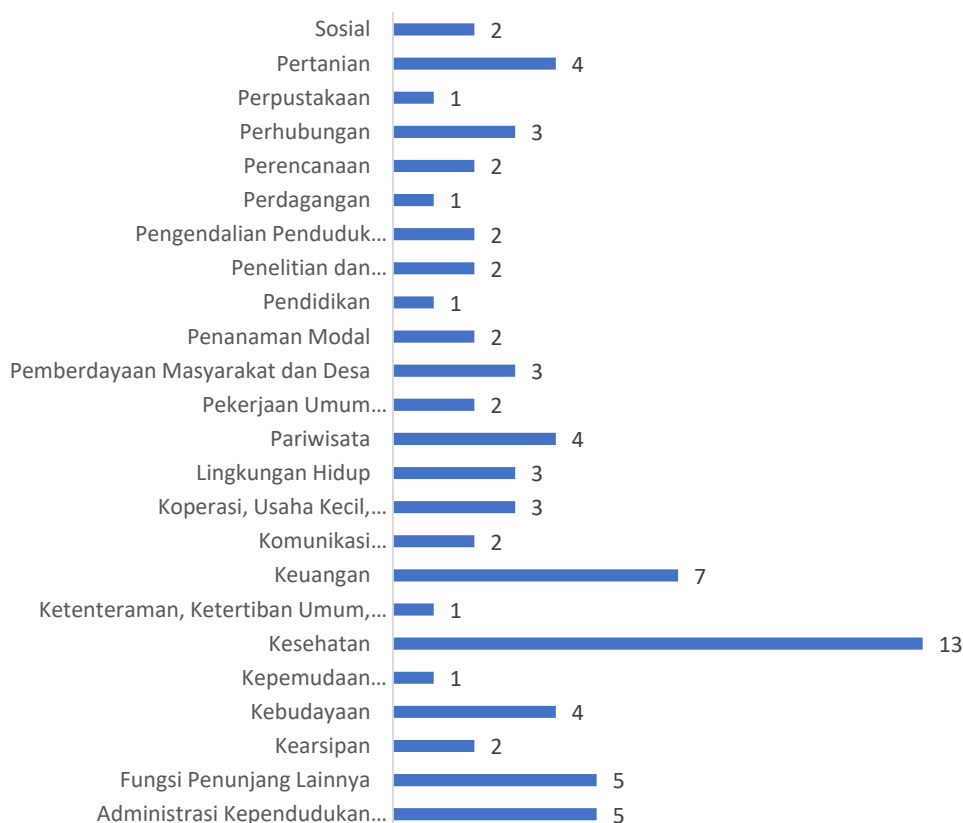
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 150. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Klaten

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Klaten pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 42 (68.85%) inovasi. Kemudian terdapat 4 (6.56%) inovasi yang diinisiasi masyarakat, 13 (21.31%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, dan 2 (3.28%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

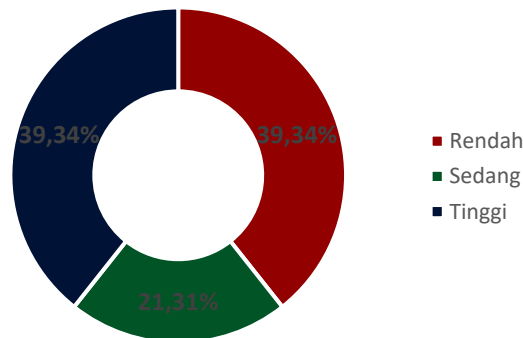
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 151. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Klaten

Inovasi daerah pada Kabupaten Klaten tersebar pada 24 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan kesehatan yaitu 13 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Klaten, terdapat 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 2 inovasi, urusan pendidikan 1 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 2 inovasi, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1 inovasi, dan urusan kesehatan 13 inovasi.

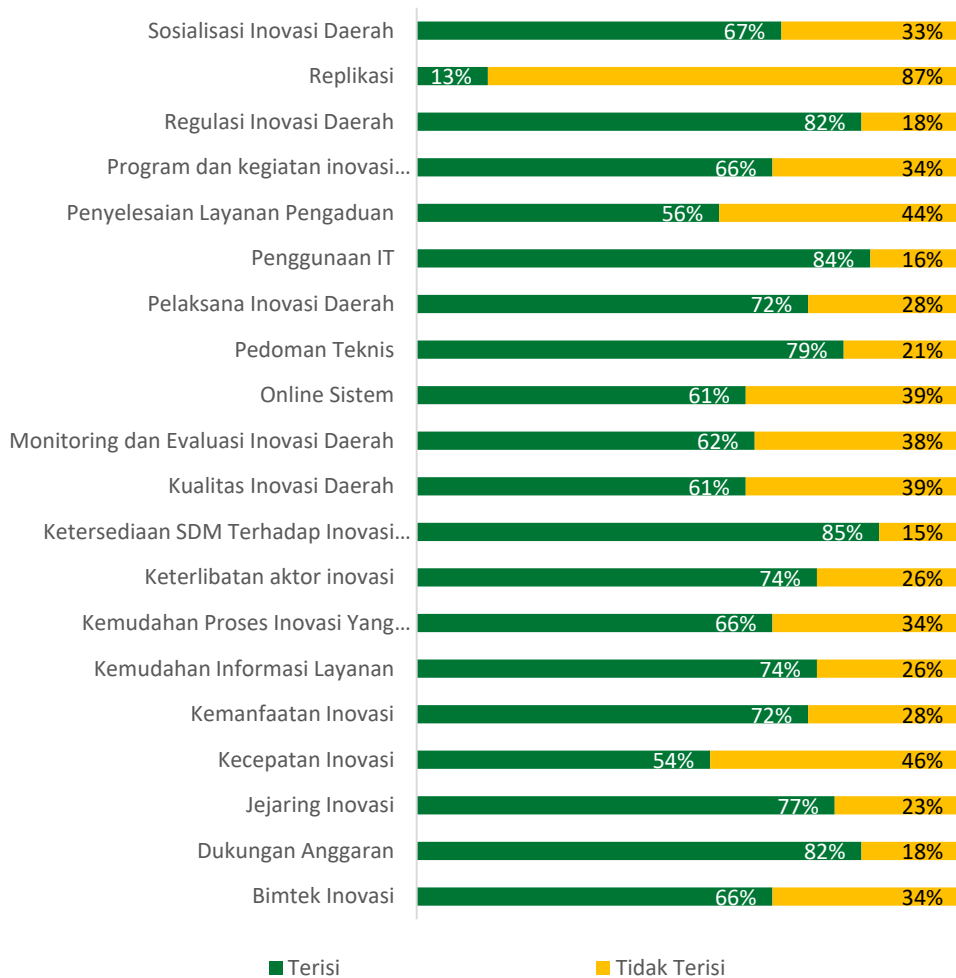
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 152. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Klaten

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Klaten memiliki skor kematangan yang tinggi dan rendah. Terdapat 24 (39.34%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan tinggi, 13 (21.31%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 24 (39.34%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

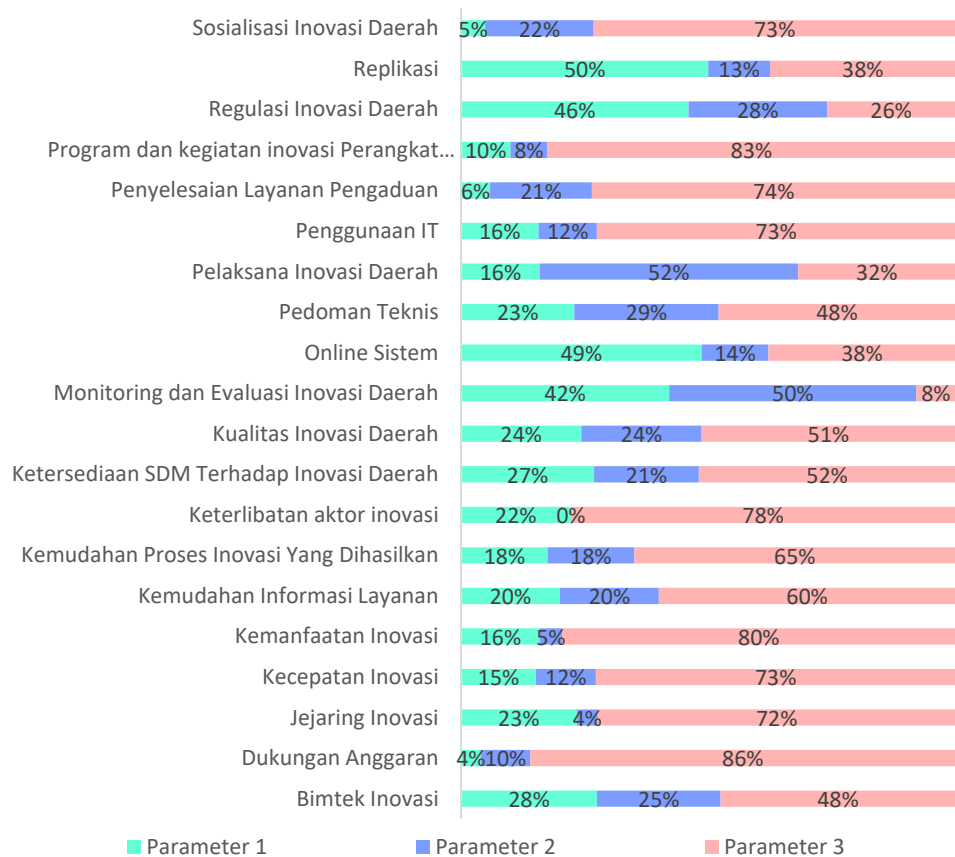
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 153. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten

Indikator Ketersediaan SDM terhadap Inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 85% artinya 85% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Klaten telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 13% artinya hanya 13% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 154. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran, yaitu sebesar 86%, artinya 86% inovasi yang mengisi data dukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 52% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 50%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Klaten beserta Skor Kematangannya

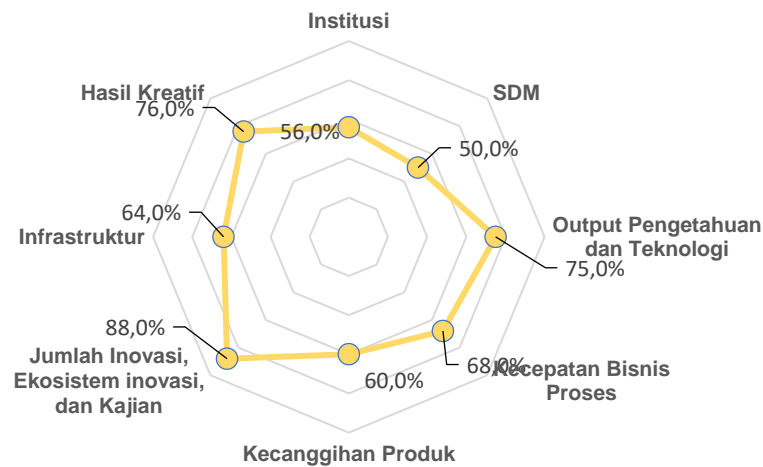
Tabel 15. Daftar Inovasi Kabupaten Klaten beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern | 47 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel | 47 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Restoran | 47 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata | 47 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Transportasi Umum | 56 |
| Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP | 76 |
| Padi Rojolele Srinar dan Srinuk | 114 |
| si Bunga Merapi (Subsidi Bunga untuk Meraih Mimpi) | 113 |
| e-BPHTB (bphtb.klatenkab.go.id) | 71 |
| e-PBB (pbb.klatenkab.go.id) | 125 |
| SIDIA | 105 |
| Aplikasi BOS | 72 |
| SISTEM ANTRIAN FARMASI | 0 |
| ANJUNGAN MANDIRI ANTRIAN POLIKLINIK | 0 |
| SI KREEASI (SISTEM KEUANGAN RUMAH SAKIT YANG EFISIEN, EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TERINTEGRASI) | 0 |
| sistaru.klatenkab.go.id | 0 |
| BIOPORI | 0 |
| BIOGAS | 0 |
| Apik (Ayo Piknik ke Klaten) | 15 |
| SIMPUS | 0 |
| TITIP BANDA KU | 95 |
| Karnival Lurik | 19 |
| TARI GAMBYONG KALOSAL | 15 |
| JOMBOR RUN 10 K | 19 |
| LOMBA LUKIS GRABAH | 21 |
| Streaming Siaran Wayang Kulit Malam Selasa Kliwon | 0 |
| Website Bagian Humas humas.klatenkab.go.id Setda Kabupaten Klaten | 0 |
| JEMPOL MANIS (Jemput Bola Pelayanan Izin Online Aman Dan Gratis) | 34 |
| WASPION (Wayang Sampah Plastik Lampion) | 115 |
| PEMANFAATAN LIMBAH KELAPA MUDA PADA WARUNG ES DHEGAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MIKRO MASYARAKAT | 115 |
| Padi Rojolele Srinar | 120 |
| Padi Rojolele Srinuk | 120 |
| E-Planning | 101 |
| SMARD | 120 |
| PELAUT BALA | 104 |
| "DISKON OJOL" (Distribusi Alokasi Melalui Ojek Online) | 119 |
| E-Budgeting | 95 |
| Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) | 132 |
| Sistem Informasi Perizinan Penelitian & Magang | 120 |
| Si Topan (Sinten tlaten open bakal panen) | 76 |
| SI PAKDE DIFA (Sistem Pembelajaran Kebencanaan Dengan e learning Bagi Difabel) | 116 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| SIMANUK (Sistem Informasi MANajemen Uji Kendaraan) / BLUE Smartcard | 102 |
| JEMPOL TB (Jemput Bola Pasien TBC) | 100 |
| Penambahan Perangkat Teknologi | 16 |
| Bejanaku (Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku) | 28 |
| Pembuatan Akun Media Sosial Kecamatan | 75 |
| Informasi COVID19 Kabupaten Klaten awasicorona.klatenkab.go.id | 109 |
| ASIKIN LKPM (ASISTENSI DAN KONSULTASI INPUT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL) | 82 |
| DUKA TAMAT | 114 |
| SEROJA | 120 |
| SIPON KEDUTEN | 126 |
| "Ndherek KB" Pendaftaran Pelayanan KB melalui Aplikasi Google Form | 112 |
| PENGOLAHAN SAMPAH PLASTIK SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN TEKNOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN NEPTUNE V 1.1 | 124 |
| POJOK KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERATURAN DESA DAN MASYARAKAT | 62 |
| Cetak biling Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 52 |
| DAMKAR GOES TO SCHOOL | 0 |
| SATPOL PP GOES TO SCHOOL | 0 |
| ATCS (AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM) | 109 |
| SUKETI (SKRINING UNTUK KEHAMILAN TERPADU IBU) | 60 |
| GERCEP (GERAK CEPAT) | 31 |
| Kuping Panas (Kumpulan Info Penting yang Lagi Panas) | 84 |

O. KABUPATEN KUDUS



Gambar 155. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kudus

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 88,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel – variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan variabel dengan skor paling rendah (50,0%). Namun secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup baik, yaitu termasuk dalam parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 156. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kudus

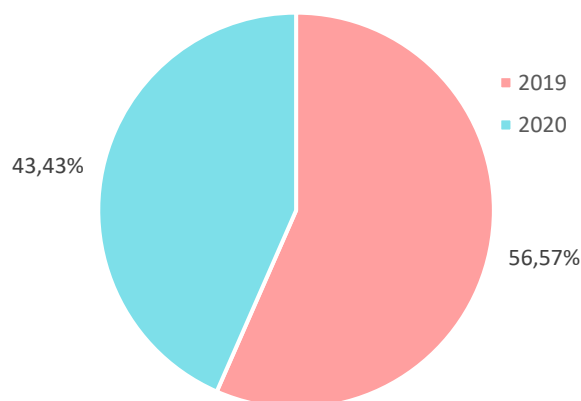
Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Kudus. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data

pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan hanya pada satu indikator, yaitu indikator Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 5.01%, sementara indikator-indikator lainnya mengalami penurunan. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan menurun 33.10%, Jumlah Peningkatan PAD menurun 14.93%, dan Jumlah Peningkatan Investasi menurun 16.54%. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.63%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Kudus meningkat 0.63% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Selanjutnya, indikator Nilai IPM tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sementara Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tidak dapat didefinisikan lebih lanjut karena Kabupaten Kudus tidak menginput data tingkat pengangguran terbuka yang sesuai.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

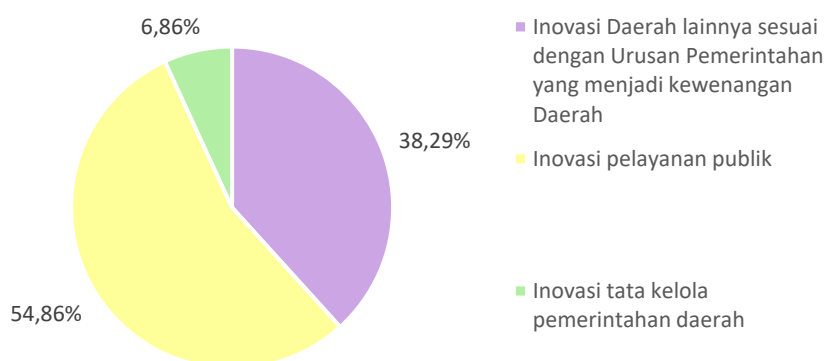
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 157. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kudus

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kudus diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 99 (56.57%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 dan 76 (43.43%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

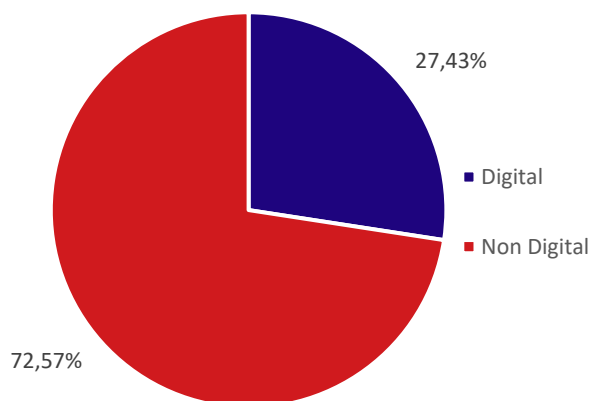
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 158. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kudus

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 96 (54.86%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 12 (6.86%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 67 (38.29%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

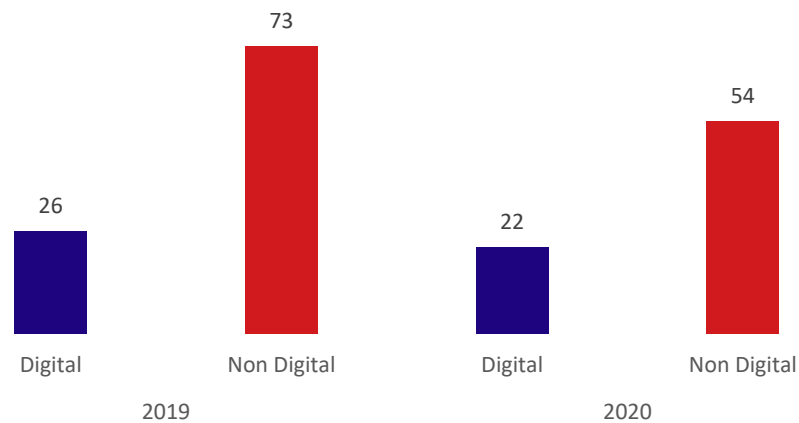
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 159. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kudus

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Kudus merupakan inovasi non digital, yaitu sejumlah 127 (72.57%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 48 (27.43%) inovasi yang merupakan inovasi digital.

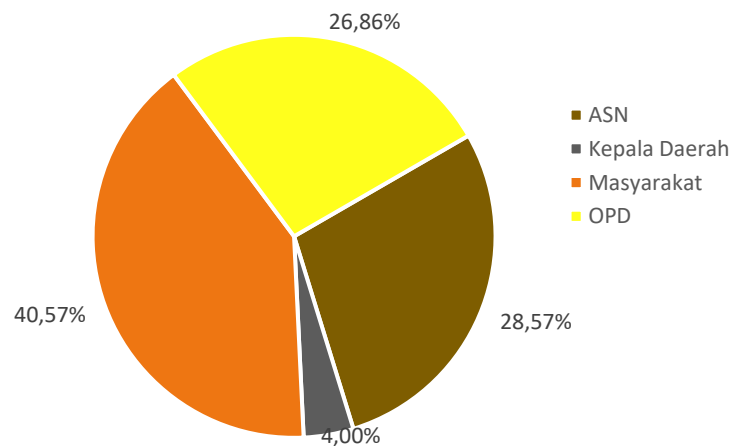
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 160. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kudus

Secara umum jumlah inovasi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 26 inovasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 22 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital, pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 73 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 54 inovasi.

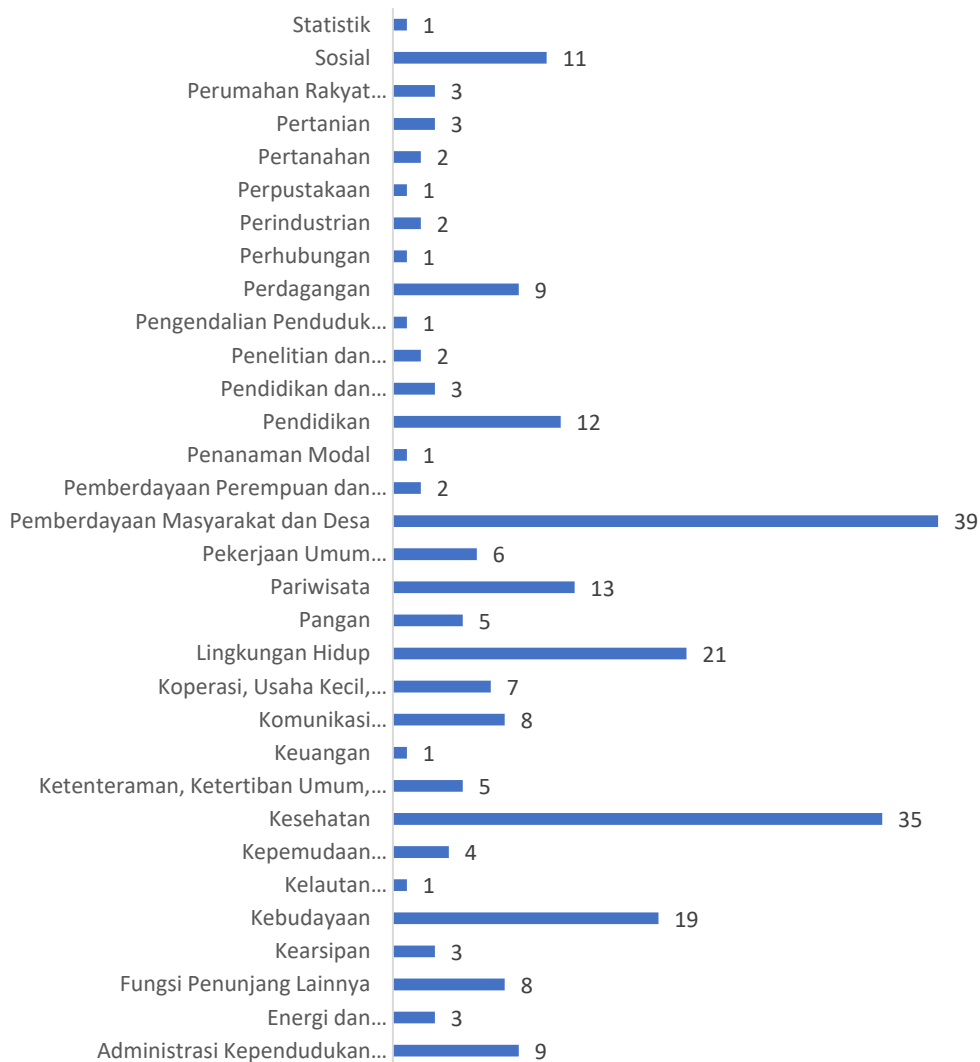
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 161. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kudus

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kudus pada tahun 2021 diinisiasi oleh masyarakat, yaitu sejumlah 71 (40.57%) inovasi. Kemudian terdapat 47 (26.86%) inovasi yang diinisiasi OPD, 7 (4.00%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 50 (28.57%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

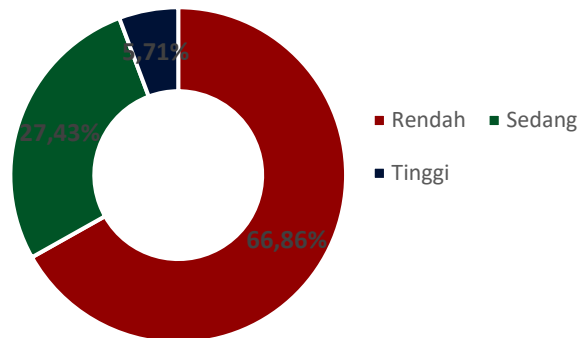
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 162. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kudus

Inovasi daerah pada Kabupaten Kudus tersebar pada 32 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu 39 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Kudus, terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 11 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 3 inovasi, urusan pendidikan 12 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 6 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 5 inovasi, serta urusan kesehatan 35 inovasi.

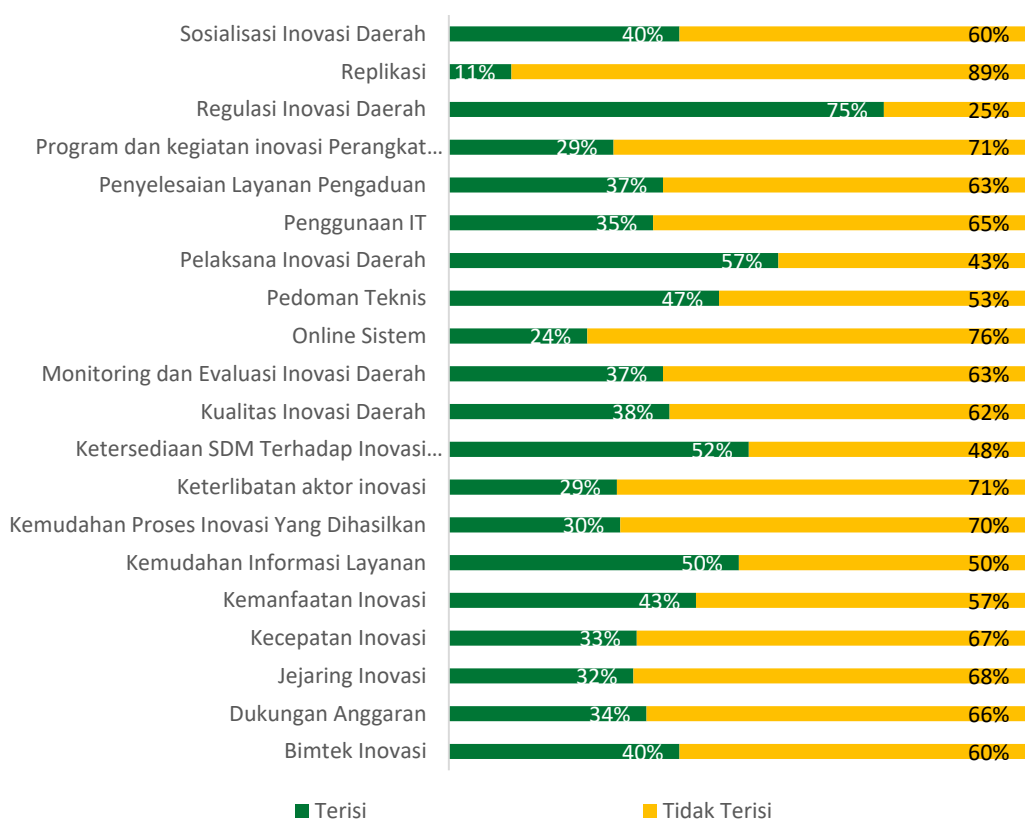
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 163. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kudus

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kudus memiliki skor kematangan yang rendah. Terdapat 117 (66.86%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan rendah, 48 (27.43%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 10 (5.71%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

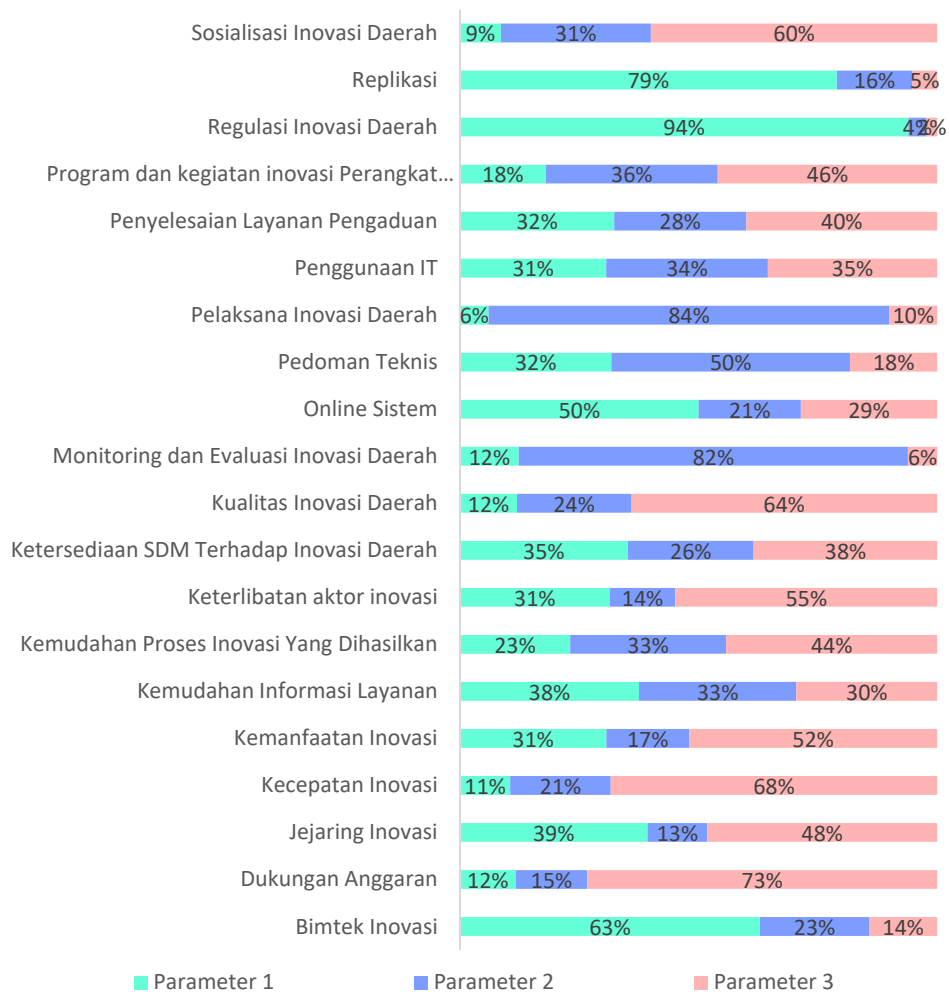
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 164. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kudus

Indikator Regulasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 75% artinya 75% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kudus telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 11% artinya hanya 11% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 165. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter di atas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran, yaitu sebesar 73%, artinya 73% inovasi yang mengisi data dukung pada indikator Dukungan Anggaran masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 84% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 94%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Kudus beserta Skor Kematangannya

Tabel 16. Daftar Inovasi Kabupaten Kudus beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kudus (Simpang Kudus) | 95 |
| inovasi Pelayanan Publik Siaga 24 jam Untuk Suket Gamis (Surat keterangan warga Miskin) | 64 |
| iKudus | 78 |
| PASTI | 28 |
| Sistem Informasi Pelayanan Jalan dan Jembatan Terintegrasi Berbasis Data Base Melalui Partisipasi Media Sosial Masyarakat | 63 |
| JARINGAN INFORMASI DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA (JARI PANTES) | 19 |
| SiEvalapor | 62 |
| SISTEM INFORMASI JALAN DESA BERBASIS DATA BASE | 24 |
| Sistem Keuangan Desa Terpadu (SiDEKAT) | 24 |
| TEKITA (Terlambat Kita Antar) | 101 |
| sabusakari | 0 |
| PAK JADUG | 98 |
| KIDs (Kesehatan Integrasi di Desa) | 99 |
| BIBIR MERAH (Bincang-bincang Remaja Menuju Masa Depan Cerah) | 95 |
| PROKLIMASARI | 56 |
| JOOS WITH U - LAB | 115 |
| SILANG DARAT | 110 |
| LEMPER PRIM | 82 |
| SI PENA HATI | 121 |
| RUSA SALING BERSALAM | 75 |
| SISTEM AGENDARIS | 93 |
| SEMAR PATRI LARAS | 98 |
| LAKONE TB MDR | 110 |
| GRAB PINTAR | 91 |
| PELUK SI MERI | 103 |
| SITUS (Sms Informasi Tuberculosis) | 6 |
| RUDANTIK (Rumah Dahak Cantik) | 6 |
| PENGLOLAAN PAUD MENARA | 8 |
| SUNGAIKU SUMBER PENGHIDUPAN 1000 WARGA | 8 |
| SIMASTANI | 0 |
| Pengolahan Krupuk Berbahan Baku Bonggol Pisang Dan Sayur Mayur | 0 |
| IMUD SIP (Ijin Mudah Surat Ijin Penelitian) | 52 |
| "INTANJAGUR PAIKEM GEMBROT" INOVASI PENINGKATAN KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN AKTIF INOVATIF KREATIF EFEKTIF MENYENANGKAN GEMBIRA DAN BERBOBOT MELALUI PEMANFAATAN APLIKASI PLICKERS BERBASIS TIK | 39 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| PENYEDIAAN DATABASE SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT TERINTEGRASI DENGAN SIPP DALAM Mendukung PERCEPATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT DI KABUPATEN KUDUS | 6 |
| SISTEM INFORMASI MONITORING ANGGARAN (SI MONITA) DALAM RANGKA MONITORING EVALUASI REALISASI ANGGARAN DAN FISIK KEGIATAN DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS | 6 |
| RUMAH PAMAN CAPIL (RUMAH PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL) | 123 |
| GULANG MENGUBAH TANAH RAWA MENJADI REKREASI | 8 |
| KAMPUNG IT MEMBUKA JENDELA DUNIA DAN MENUMBUHKAN UMKM DESA LEWAT PEMUDA" | 8 |
| KAMPUNG SAYUR (DESA TEMATIK) | 33 |
| BATIK DJANOER | 42 |
| DARI SAMPAH HASIL PANEN BERLIMPAH DAN LINGKUNGAN BERKAH | 20 |
| EMBUNG PANGURIPAN | 16 |
| FESTIVAL PATI AYAM EKSTENSIF BUDAYA | 18 |
| POSYANDU INTEGRASI (Desa Tematik) | 14 |
| GETHUK KHAS, CIPTAKAN MAKANAN UNGGULAN DESA | 16 |
| JAMU GODHOG TRADISIONAL DESA | 20 |
| KAMPUNG LOUNGSHE | 16 |
| KARYA SENI RESIN YANG MENDUNIA | 16 |
| KECIPUT IMUT | 24 |
| KELESTARIAN HUTAN EMAS | 16 |
| KERAJINAN ALAT REBANA (PEMANFAATAN KULIT HEWAN DAN KAYU) | 18 |
| KOPIKU, KOPI SIAP SEDUH | 14 |
| BUDIDAYA LOUPSTER AIR TAWAR | 24 |
| LOYALITAS "SAMIRUN" KUNCI KESUKSESAN PRESTASI POPSIVO | 20 |
| PEMUDA PELESTARI KESENIAN TRADISIONAL | 8 |
| TRADISI KEARIFAN LOKAL "REBO WEKASAN" MASJID WALI JAMI' AL MA'MUR | 34 |
| WADUKKU SAYANG, 1001 KEKAYAAN YANG MENGENANG | 51 |
| Sampahku Sumber Sehatku | 21 |
| RIVER TUBING X-JURANK | 36 |
| Kirab Budaya Desa Menawan | 31 |
| Desa Produktif Kluster Bordir dan Konveksi sebagai tujuan Wisata Belanja dengan pendekatan KSU Padurenan Jaya sebagai Managemet Kluster dan Melestarikan Budaya Religi Maulidan Jawiyyan | 23 |
| KIDUNG SEJIWA | 73 |
| Kirab Budaya Lempogan Desa Kutuk | 27 |
| PERILAKU HIDUP SEHAT "JUMANTIK" | 27 |
| Kirab Sedekah Bumi Desa Mijen | 25 |

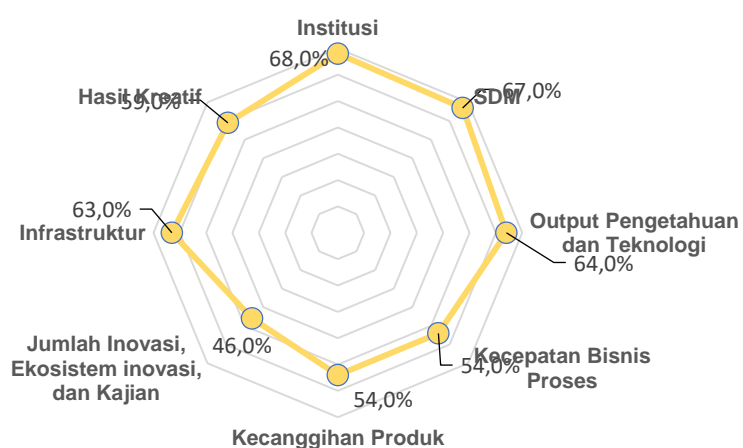
| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Penanggulangan Bencana Tingkat Desa (Sidorekso) | 29 |
| Haul Mbah Banten | 40 |
| POS HANZIB (Pos Pemulihan Gizi Balita) di Wilayah Puskesmas Mejobo | 53 |
| Pengolahan Kerupuk Berbahan Baku Bonggol Pisang dan sayur Mayur. | 4 |
| Pengolahan Sampak Organik Menjadi Pupuk Cair. | 4 |
| Website Desa. | 4 |
| Pemberian kepada masyarakat Satu Bibit Buah Untuk setiap satu Kelahiran untuk ditanam di halaman rumahnya sendiri. | 4 |
| Sedekah Bumi dengan Kirab budaya dan Gunungan aneka hasil bumi dan Seribu Apem | 4 |
| SIAP PAK (Sistem Antar Pelayanan) | 4 |
| Pengelolaan Sampah Desa Sidomulyo | 4 |
| Tong Biorganik | 35 |
| "Handycraft dari Perca" | 12 |
| penggunaan tabung komposter untuk pengolahan sampah organik serta pembuatan MOL (mikro organisme lokal) dan POC (pupuk organik cair) dalam pengelolaan limbah dapur | 27 |
| PAUD Integrasi Untuk Generasi Bangsa | 4 |
| Kirab Lentog | 10 |
| Wisata Kuliner Lentog Tanjung | 10 |
| Siaga 24 Jam untuk "SUKET GAMIS" | 4 |
| SALURAN DAN SUMUR RESAPAN MANAJEMEN AIR HUJAN MODERN DIPERKOTAAN | 16 |
| Olahan Tepung Moccaf | 12 |
| PKD Percontohan | 14 |
| Gedung Serba Guna (Desa Tematik) | 14 |
| PEMUDA PELESTARI KESENIAN TRADISIONAL | 20 |
| SIMPONI (Integrasi Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan E-Sakip) | 71 |
| PELAYANAN IMB "JEMPOL" | 76 |
| SIMAUDI (Sistem Informasi Monitoring Audit) | 67 |
| SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DESA | 95 |
| Pengelolaan Penataan Ruang Terpadu melalui Sistem Informasi Pengelolaan Tata Ruang (SIPETARUNG) di Kabupaten Kudus | 72 |
| Model Kepramusajian Era Pandemi Covid-19 | 76 |
| KIPAS (Kelas ibu Pengasuh Anak Sehat) | 110 |
| PINTER SIKATAN (Pelayanan Gigi Ibu Terpadu Atasi Kelaianan dan Kematian Neonatal) | 104 |
| FAST COM DE JURE | 83 |
| PAG KAJE (PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SANTUNAN PEMAKAMAN JENAZAH BAGI MASYARAKAT KELURAHAN MLATI KIDUL) | 65 |
| Mitigasi Bencana melalui Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kudus | 99 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| PELAYANAN MASYARAKAT 247 | 51 |
| Pelayanan Informasi dan Kajian Tata Ruang Secara Online melalui Aplikasi Sistem Informasi Kajian Tata Ruang (SISKATARU) | 87 |
| MODEL JEJARING ADUAN MASYARAKAT DENGAN APARAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM INFORMASI ADUAN MASYARAKAT PADA SATPOL PP KABUPATEN KUDUS (SIAMAT) | 63 |
| e-krenova | 10 |
| siHarmoni | 41 |
| Surat Keterangan Lurah Elektronik (E-SUKET) | 0 |
| PENDIDIKAN ANAK UNGGUL DAN ANDALAN CERDAS TERARAH (PENAK UNDAAN CERAH) KORWILCAM UNDAAN | 0 |
| PINTER BERSOLEK (PENINGKATAN PEMBELAJARAN YANG INOVATIF, INTERAKTIF, BERMAKNA, SOPAN SANTUN, LUHUR BUDI PEKERTI, EFEKTIF DAN KREATIF) | 0 |
| YANDU TANGUT | 45 |
| SISTEM INFORMASI MONITORING ANGGARAN (SI MONITA) DALAM RANGKA MONITORING EVALUASI REALISASI ANGGARAN DAN FISIK KEGIATAN DI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS | 0 |
| SIBULAN (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Unggulan) | 84 |
| PENYEDIAAN DATABASE SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT TERINTEGRASI DENGAN SIPP DALAM Mendukung PERCEPATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT DI KABUPATEN KUDUS | 0 |
| Kaderku Laskar SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak) | 71 |
| PIONKU | 0 |
| "JENANG DUKCAPIL (JEJARING PELAYANAN MENYENANGKAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)" | 129 |
| JAMBU SEGAR (MINUM JAMU dan MAKAN BUAH, TUBUH MENJADI SEHAT DAN BUGAR) | 0 |
| POSHANZIB (POS KETAHANAN GIZI BALITA) | 0 |
| SI OMA MENGADU | 0 |
| PANTUN PROMAH | 83 |
| Inovasi Pelayanan Umum Sanset Bae | 36 |
| KAMPUNG IT | 14 |
| pengelolaan sampah terintregasi | 6 |
| Kirab Budaya Desa Menawan | 96 |
| FESTIVAL AMPYANG MAULID | 96 |
| KEBUN DESAKU | 21 |
| ADAT MANTEN MUBENG | 74 |
| Wisata Kuliner Lentog Tanjung | 57 |
| Wisata Embung Panguripan | 0 |
| Pengelolaan Sampah | 0 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Kerajinan Tangan Limbah Batok Kelapa (Tempurung Kelapa) | 0 |
| Haul Cikal Bakal Desa Ngemplak | 0 |
| Haul dan Buka Luwur Pesarehan Raden Ayu Sukirah | 0 |
| GASBRO | 43 |
| BIOLITA (Bio Gas dari Limbah Tahu) | 35 |
| SALURAN DAN SUMUR RESAPAN MANAJEMEN AIR HUJAN MODERN DIPERKOTAAN | 0 |
| GMESH (Gigi Ibu Hamil Indonesia Sehat) | 0 |
| AKU PUAS (e-SKM) | 84 |
| PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN FASILITAS BERDAGANG MELALUI APLIKASI LAPAK (LAYANAN ELEKTRONIK PEDAGANG PASAR RAKYAT) PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS | 0 |
| PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK HASIL PENYAPUAN JALAN, TAMAN DAN PERIMBASAN POHON PENGHIJAUAN KERJASAMA ANTARA DINAS PKPLH DENGAN OASIS PT. DJARUM | 51 |
| PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN KERJASAMA ANTARA DINAS PKPLH DENGAN PT. DJARUM KUDUS | 42 |
| BUSADIPAH (Buang Sampah Dibayar Sampah | 65 |
| PENGURANGAN SAMPAH DENGAN PEMBUATAN ECO ENZYME SEBAGAI PENJERNIH UDARA DI MASA PANDEMI COVID-19 | 58 |
| SAMPAH MENJADI EMAS (SADIMAS) | 77 |
| TARTI SALAM (ANTAR OBAT COVID PUSKESMAS DERSALAM) | 0 |
| LABU SALAM (KELAS IBU HAMIL PUSKESMAS DERSALAM) | 0 |
| Sabusakari - Satu Ibu Hamil Satu Karyawan Puskesmas Gondosari | 38 |
| SI KELING SALAM | 0 |
| LASEGAR SALAM (LANSIA SEHAT LANSIA BUGAR PUSKESMAS DERSALAM) | 0 |
| CADAR SALAM (CEGAH PENYAKIT TIDAK MENULAR PUSKESMAS DERSALAM) | 11 |
| AKSI UTIK SALAM (ANAK SIAGA USIR JENTIK PUSKESMAS DERSALAM) | 9 |
| KAMPUNG KALKUN | 0 |
| Desa Produktif Klaster Bordir dan Konveksi sebagai tujuan Wisata Belanja dengan pendekatan KSU Padurenan Jaya sebagai Management Klaster dan Melestarikan Budaya Religi Maulidan Jawiyyan | 65 |
| Haul Mbah Demang Kinolojoyo Nyai Kinolowati | 0 |
| Wisata Jratun Seluna | 0 |
| GERBASTIK | 0 |
| PUSLIPAH (PUSKESMAS PEDULI SAMPAH) | 0 |
| DEGAN JELLY | 0 |
| Kampung GILA (Gagasan Inovasi Lingkungan Asri) | 11 |
| UKIR WAJAH 3 DIMENSI (UW 3D) DESA MEDINI KEC. UNDAAN KAB. KUDUS | 0 |
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Menara" Berbasis Muatan | 0 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Lokal Keagamaan dan Religiusitas | |
| Wayangan Suronan | 0 |
| Expo Desa Pasuruhan Lor | 0 |
| SATU KELAHIRAN SATU POHON "Setiap satu kelahiran baru diberikan satu pohon bibit buah" | 31 |
| Kirab Budaya Desa Pasuruhan Lor | 0 |
| Haul Mbah Surgi Murang Joyo | 0 |
| Rumah Gizi | 0 |
| SIAP PAK (Sistem Antar Pelayanan) yaitu kegiatan dalam rangka mempermudah dan memperlancar dalam pelayanan masyarakat untuk pengurusan Surat Kematian dan Santunan Kematian | 30 |
| LORAM EXPO DESA LORAM KULON | 74 |
| SEDEKAH BUMI DENGAN KIRAB BUDAYA DAN GUNUNGAN SERIBU APEM | 60 |
| Kirab Lentog | 52 |
| Kirab budaya resik resik Sendang | 0 |
| Tantangan Pendidikan Abad 21 | 0 |
| PENGASAPAN IKAN | 15 |
| BATIK DJANOER | 48 |
| soco | 0 |
| PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA SKALA RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI RUMAHAN | 52 |
| Sampahku Sumber Sehatku | 53 |

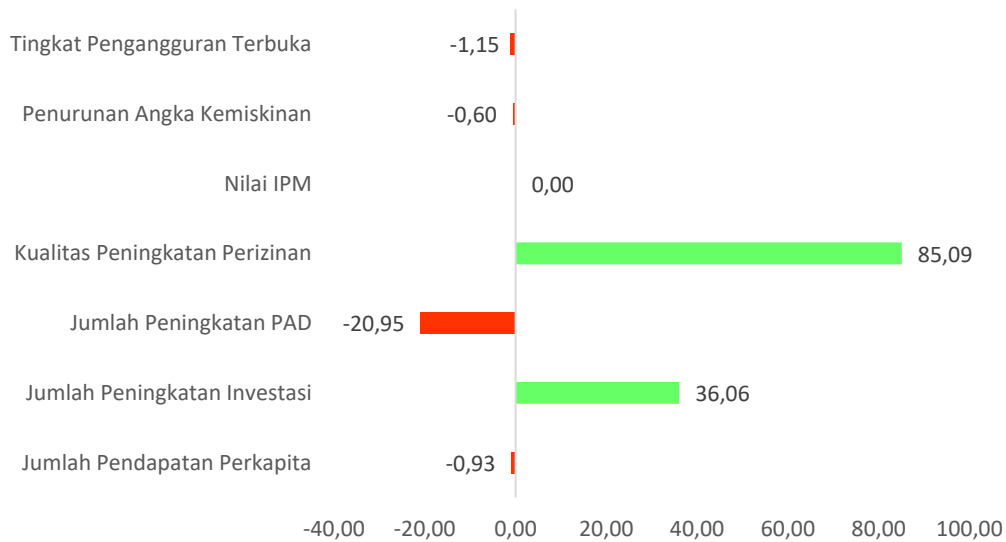
P. KABUPATEN MAGELANG



Gambar 166. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Magelang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Institusi merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 68.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan variabel dengan skor paling rendah (46.0%). Namun secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup baik, yaitu termasuk dalam parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

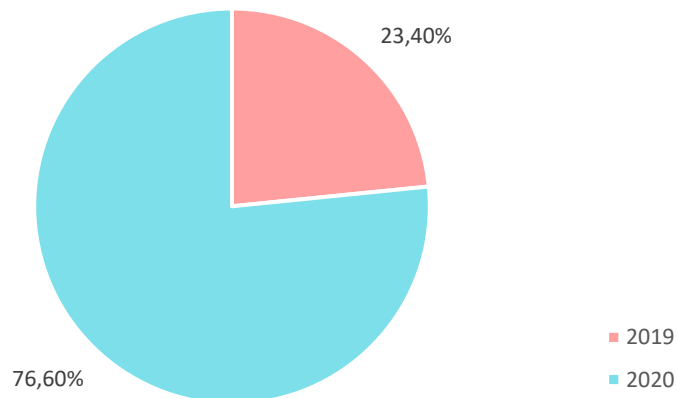


Gambar 167. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Magelang

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Magelang. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada dua indikator, yaitu indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 85.09% dan indikator Jumlah Peningkatan Investasi sebesar 36.06%, sementara indikator-indikator lainnya mengalami penurunan. Indikator Jumlah Peningkatan PAD menurun 20.95% dan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menurun sebesar 1.15% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan sebesar 1.15% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.60%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Magelang meningkat 0.60% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami penurunan 0.93% namun penurunan tersebut masih relatif lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%. Indikator Nilai IPM tidak mengalami perubahan.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

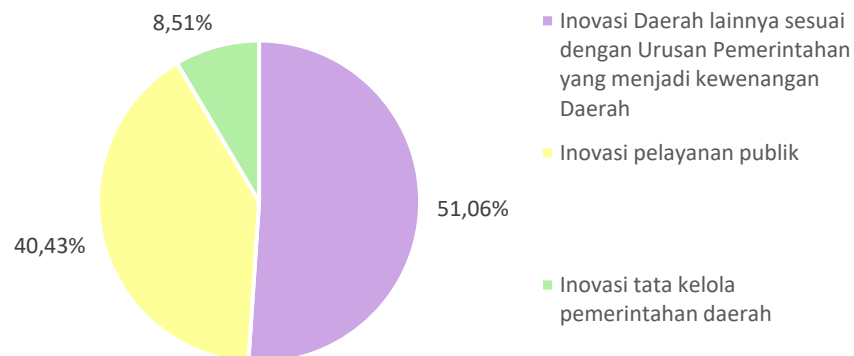
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 168. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Magelang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Magelang diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 72 (76.60%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 dan 22 (23.40%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2019.

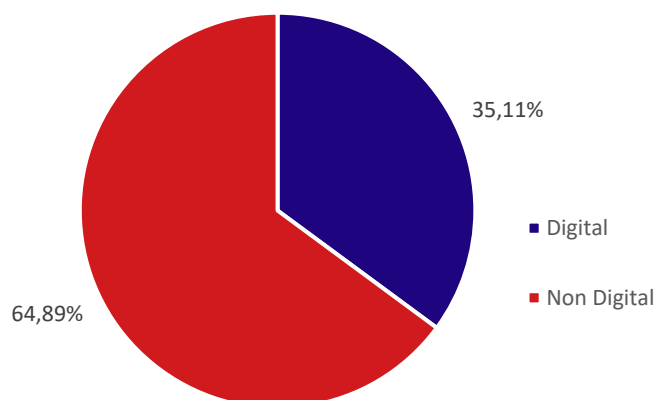
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 169. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Magelang

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu sejumlah 48 (51.06%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 38 (40.43%) inovasi bentuk pelayanan publik dan 8 (8.51%) inovasi tata kelola pemerintahan.

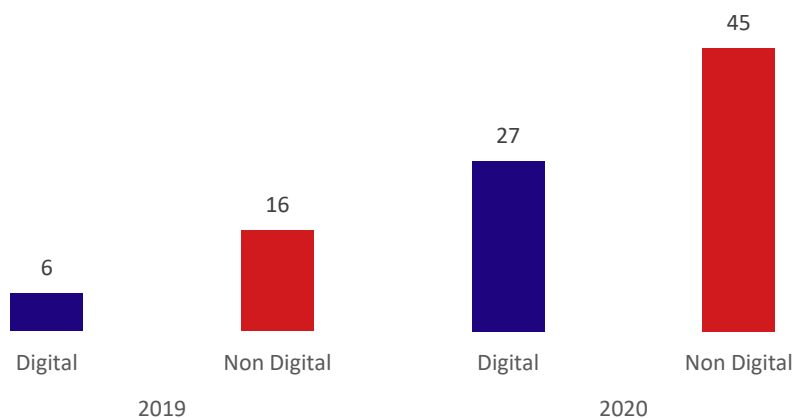
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 170. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Magelang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Magelang merupakan inovasi non digital, yaitu sejumlah 61 (64.89%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 33 (35.11%) inovasi yang merupakan inovasi digital.

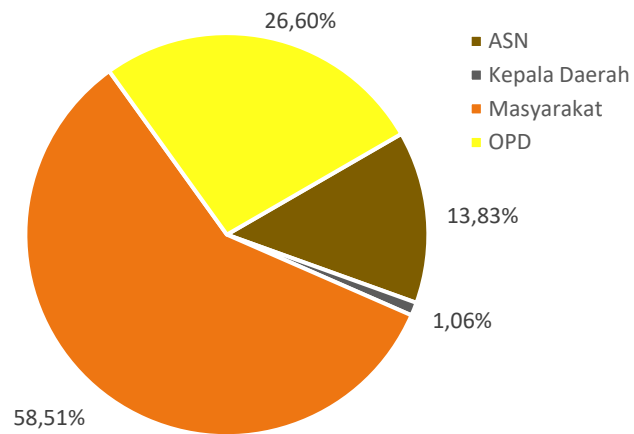
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 171. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Magelang

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 6 inovasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 27 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital, pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 16 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 45 inovasi.

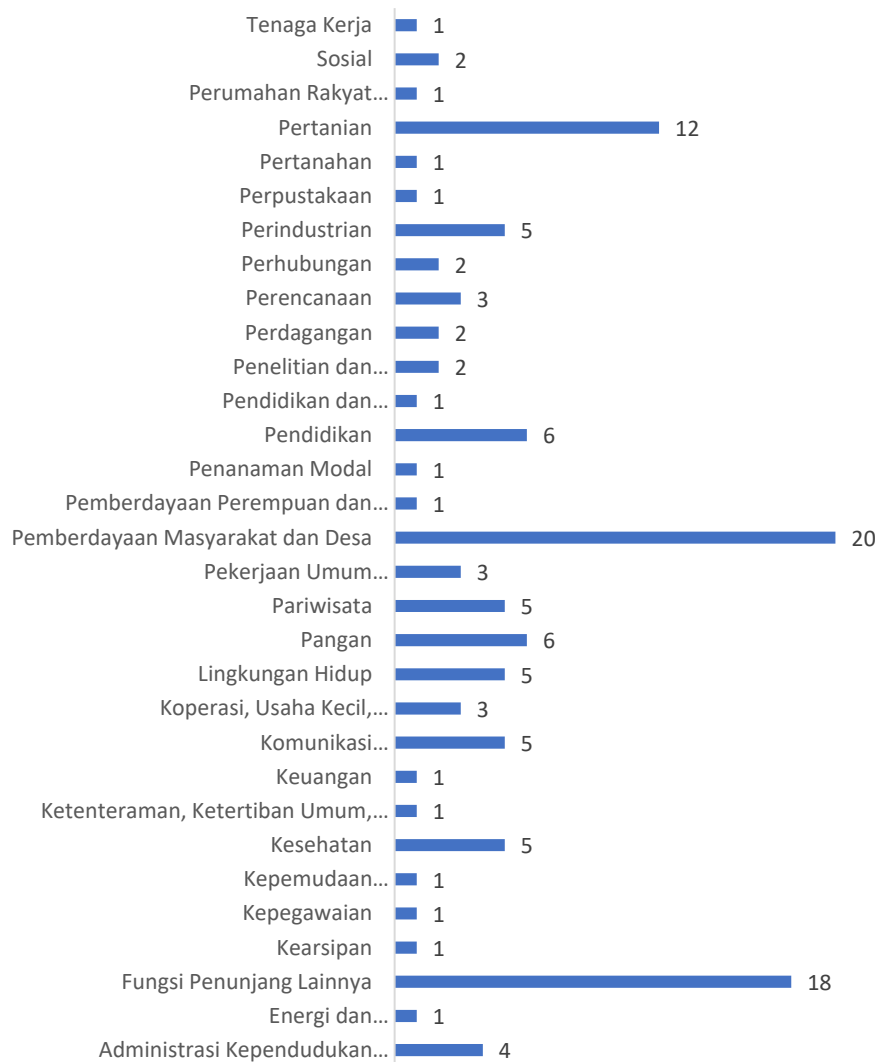
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 172. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Magelang

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Magelang pada tahun 2021 diinisiasi oleh masyarakat, yaitu sejumlah 55 (58.51%) inovasi. Kemudian terdapat 25 (26.60%) inovasi yang diisiasi OPD, 13 (13.83%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN dan 1 (1.06%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah.

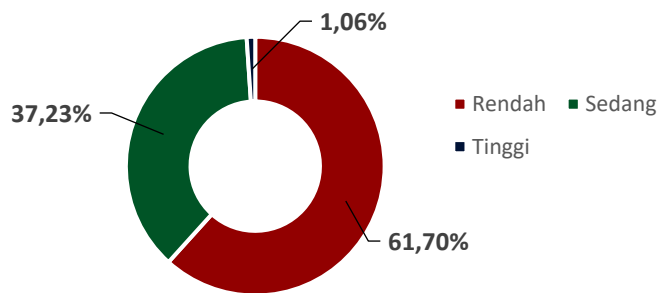
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 173. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Magelang

Inovasi daerah pada Kabupaten Magelang tersebar pada 31 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu 20 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Magelang, terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 2 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1 inovasi, urusan pendidikan 6 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 3 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1 inovasi, serta urusan kesehatan 5 inovasi.

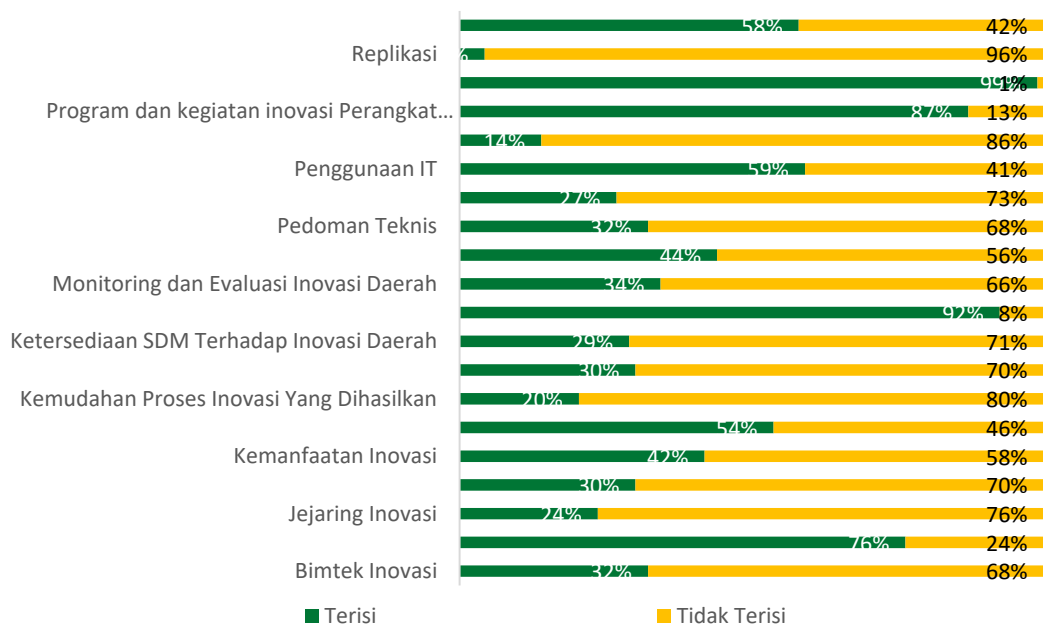
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 174. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Magelang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Magelang memiliki skor kematangan rendah. Terdapat 58 (61.70%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan rendah, 35 (37.23%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan 1 (1.06%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

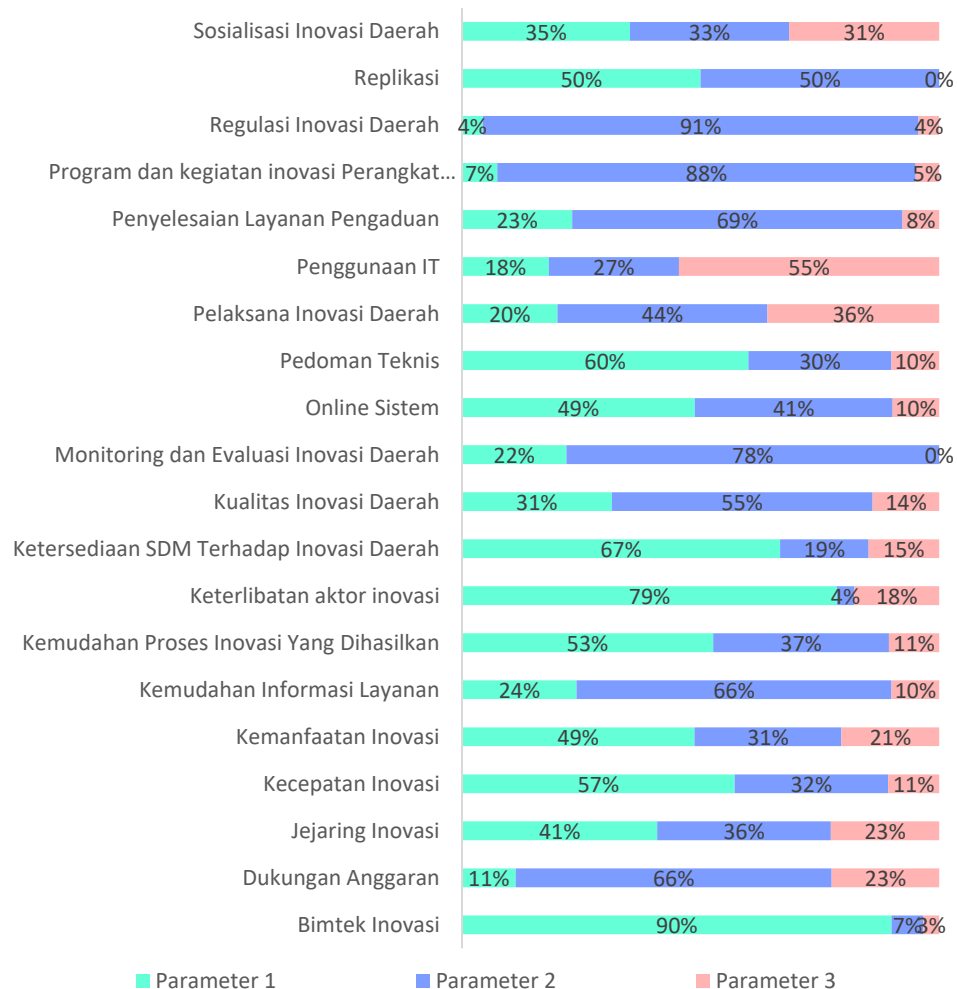
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 175. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magelang

Indikator Regulasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 99% artinya hampir seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Magelang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 4% artinya hanya 4% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 176. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT, yaitu sebesar 55%, artinya 55% inovasi yang mengisi data dukung pada indikator Penggunaan IT masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 91% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 90%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Magelang beserta Skor Kematangannya

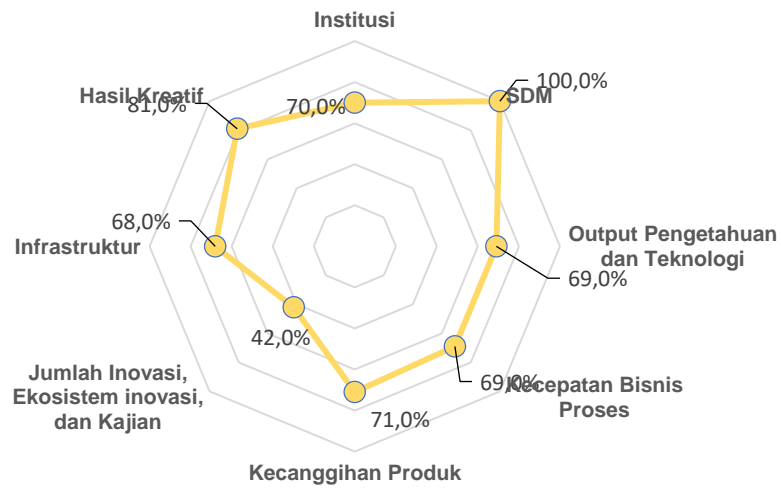
Tabel 17. Daftar Inovasi Kabupaten Magelang beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Pelayanan tanpa Hambatan dengan Protokol Kesehatan | 36 |
| APLIKASI ANDROID JDIH KABUPATEN MAGELANG | 96 |
| KLINIK HUKUM (INTEGRASI PELAYANAN HUKUM DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM BAGI PERANGKAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGELANG) | 66 |
| BANK POHON | 71 |
| U TREE FLOWER POHON WIFI DENGAN CATU DAYA MANDIRI PANEL SURYA BERGERAK MENGIKUTI MATAHARI | 48 |
| "GELORA MAGELANG BERWARNA" (Gerakan Kelompok Sadar Air Minum dan Sanitasi untuk Magelang Bersih Waras Ngangeni) | 72 |
| SIM PKP (Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman) | 61 |
| OZONIZER 3 IN 1 (Generator Ozon untuk Sterilisasi Produk Hasil Pertanian) | 32 |
| Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi | 31 |
| JELAJAH MAGELANG | 79 |
| AMONGRASA (Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa) | 78 |
| SiKDes (Sistem Informasi dan Koneksitas Desa) | 44 |
| PERBANYAKAN TANAMAN GANJA (GABUNGAN JARINGAN AKAR) | 35 |
| Surat Perintah Pencairan Dana on line (SP2D Online) | 36 |
| e- Budgeting | 40 |
| PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan) | 34 |
| Taman Wisata Lembah Sebangkong | 68 |
| GRIYA PUSTAKA PANGRIPTA | 47 |
| SIYAP (Sistem Layanan Penanggulangan Bencana) | 65 |
| PKK MILLENNIAL (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Millennial | 47 |
| MAS DESTA (Pamsimas Desa Tegalrandu) Sebuah teknologi pengolahan air sungai dengan SPL- BIOFILTER | 81 |
| SIDAK IKM (Sistem Informasi Database dan Katalog Industri Kecil Menengah Kabupaten Magelang) | 65 |
| ULTRAVINIC DESINFECTER AGROPRODUCT Mesin Desinfeksi Produk Pertanian Berbasis Ultrasonik dan Ultraviolet Sederhana | 36 |
| Optimalisasi Peran Pemuda Desa Dalam Kehidupan Bermasyarakat Untuk Indonesia Berdaya | 67 |
| BACTERIA AR CARD Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Augmented Reality | 36 |
| Bola Mamak | 39 |
| SIABA (Sistem Absensi Berbasis Android) | 106 |
| Rumah Kreatif "VVANGOON" | 57 |
| Planning on The Spot | 65 |
| Saatnya Singkong Naik Kelas (Pembuatan Brownies dari 100% | 55 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| Tepung Singkong MOCAF) | |
| BMUNNO Honey | 54 |
| BMUNNO B-Munno Coconut Nectar | 35 |
| Aplikasi Digitalisasi Buku C Desa | 50 |
| Fluffy Tonic for Cat | 43 |
| LAPAK PILAR PKK MILENIAL KECAMATAN TEMPURAN | 49 |
| GIGIBUKISMA | 25 |
| DIGIPARU | 46 |
| Teknik Pengolahan Kelapa Terpadu Sebagai Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani | 28 |
| Sistem Irigasi Tetes Metode Debit Setting Berbasis WSN Guna Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Air Serta Pemupukan Tanaman | 28 |
| Sekolah Tani Milenial | 80 |
| Rancang Bangun Teknologi Tepat Guna Pompa Kincir Tenaga Air Untuk Irigasi | 37 |
| Ibu Rumah Tangga Produktif dan Berdaya di Dunia Digital dengan Adanya Kelas Online dan Offline EET (Emak-Emak Tangguh) | 54 |
| Stickable GPS | 27 |
| APAR rasa PISANG (Pemanfaatan Kulit Pisang Kepok Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Pemadam Api Ringan) | 50 |
| Kolaborasi Belajar Untuk Anak Usia Dini Di Era Pandemi Dan Peran Serta MAsyarakat di Tengah Revolusi Industri 4.0 | 45 |
| Jamu Milenial (DEKA) | 61 |
| Cybercounseling Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa | 45 |
| Helm Laminasi Bambu Inovasi Pemanfaatan Tanaman Bambu | 25 |
| Pembuatan Sarung Tangan Getar sebagai Alat Massage pada Proses Koleksi Semen Ayam Kampung Pejantan | 30 |
| Sendok Bambu Batok Alami Sendok Untuk Makan | 30 |
| Agrowisata Banjarnegoro | 26 |
| Smart Village Desa Danurejo | 42 |
| Bu Murtiram (Budidaya Jamur Tiram), Sulap Sampah Jadi Makanan | 13 |
| Berdasi Sehari | 34 |
| KRAMAT (Kran Matik) | 30 |
| Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (Pancen A SIKK) | 85 |
| TABERMAS (Tanah Bergerak Masyarakat Siaga) | 75 |
| PengANGGURan Sukses Di Kabupaten Magelang | 24 |
| Online Legal Consultation (OLC) | 74 |
| PENAMASETDA | 30 |
| Wisata Desa Kampung Kopi Emperan Desa Krinjing | 45 |
| Revitalisasi pasar Kalegen untuk menjadi Bumdes Harapan Maju | 28 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| Taman Wisata Sleker Asri Desa Gandusari Desa Bandongan | 50 |
| BUKENZA | 76 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RAMAH LANSIA BADAN USAHA MILIK MASYARAKAT (BUMMAS) DALAM MENGGERAKAN PARA LANSIA UNTUK LEBIH PRODUKTIF DI MASA SENJA | 64 |
| Pembuatan Biogas | 40 |
| Pemupukan Salak Pondoh Lumut dengan metode Irigasi Tetes | 66 |
| GEMA MERAPI BERSAMA PERPUSTAKAAN MUDA BHAKTI DESA NGABLAK | 69 |
| Medang SiRUP (Mendampingi Pengisian SiRUP/Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | 63 |
| SUPER digi | 85 |
| PAKET | 77 |
| Si CePaT | 83 |
| LATIPA LPJU (Layanan Lapor Titik Padam Lampu Penerangan Jalan Umum) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang | 36 |
| e PIKIR Menuju Kabupaten Magelang yang Ramah Penelitian dan Pengembangan | 85 |
| OBAT LUKA (Olahan Bahan Alam / Tanaman menjadi Lapak Usaha) di Kampung KB Gagaran Desa Purwosari | 29 |
| SITAJELITA | 43 |
| UMA MIZ U Rindu (Ubi Madu Tiramizu dari Windusari) | 44 |
| HAPPY DITENGAH PANDEMI | 28 |
| UBI MADU PANGGANG WINDUSARI | 24 |
| SURGA KOPI ARABIKA | 23 |
| DESA INOVASI UMBULSARI KECAMATAN WINDUSARI | 24 |
| BIOFLOK DESA UMBULSARI KECAMATAN WINDUSARI | 24 |
| Wisata Nepal van Java | 50 |
| KELAS TEH | 41 |
| UMKM DESA BALESARI: KUE PELOK IBU AFI | 34 |
| ANTI REMEK (Antrian Otomatis Rekam Medis Kendaraan) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang | 17 |
| BANGAW PANIK - Pengembangan Kawasan Padi Organik | 44 |
| MADHANG KECEH DI KEDAI KALIWOT | 45 |
| Budidaya Jamur Tiram | 15 |
| JANOKO PENGUNGSU MAGELANG | 13 |
| BELING (BELAJAR KELILING) | 24 |
| PILAR LITERASI | 25 |
| Pesantren Kampung Qur'an Learning Center | 27 |
| Menyusuri Kondisi Erupsi Lama Merapi dan Terkini (SUSUR KONDE LAMPIR) | 46 |

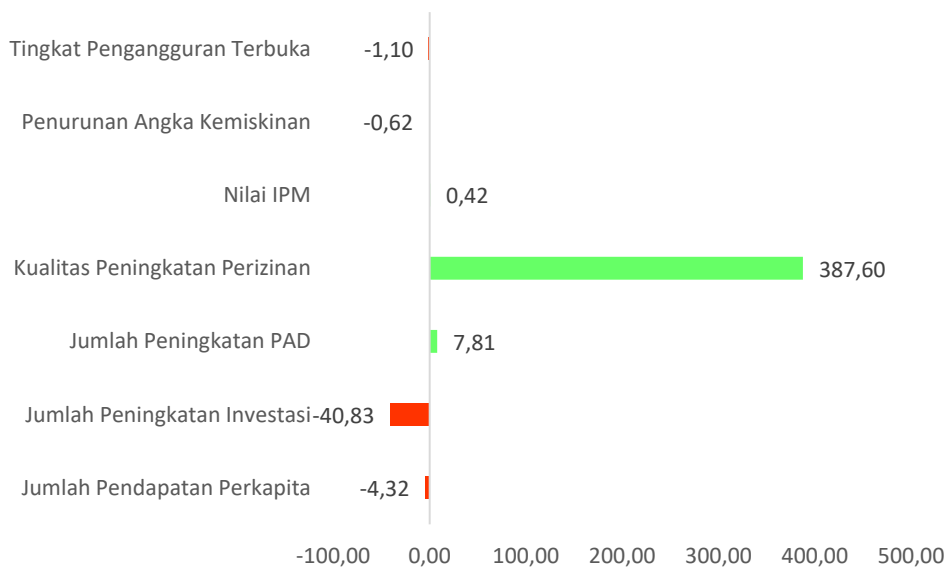
Q. KABUPATEN PATI



Gambar 177. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pati

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 100.0%. Artinya seluruh indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor maksimal (parameter 3). Kemudian variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian merupakan variabel dengan skor paling rendah (42.0%). Namun secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup baik, yaitu termasuk dalam parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



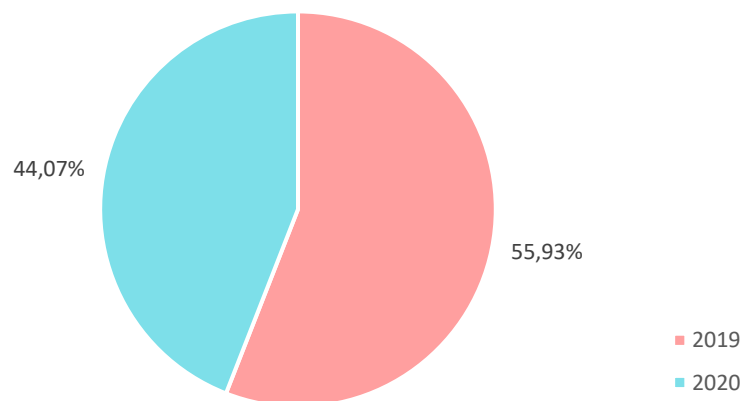
Gambar 178. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pati

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Pati. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada beberapa indikator, yaitu indikator Nilai IPM sebesar 0.42% dan Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 387.6%. Jumlah Peningkatan PAD juga meningkat sebesar 7.81%, namun peningkatan tersebut masih relatif lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami peningkatan sebesar 8.00%.

Sementara itu, indikator-indikator lainnya mengalami penurunan. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 1.10% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pati mengalami peningkatan sebesar 1.10% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Demikian pula dengan indikator Penurunan Angka Kemiskinan yang menunjukkan penurunan sebesar 0.62%, yang mana artinya angka kemiskinan di Kabupaten Pati meningkat 0.62% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan Investasi menurun 40.83% dan Jumlah Pendapatan Perkapita menurun 4.32%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

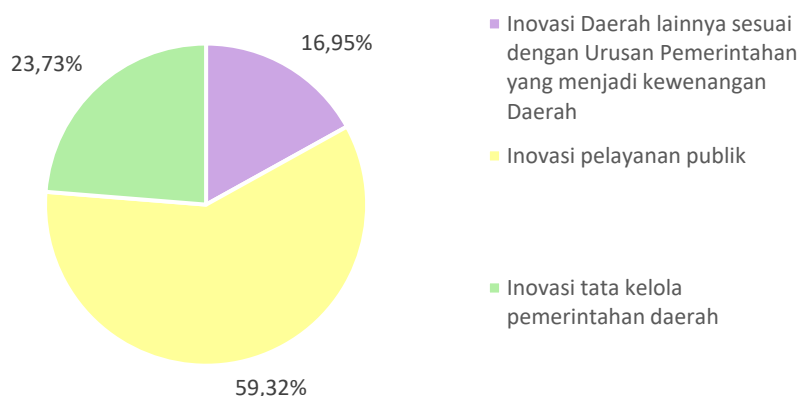
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 179. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pati

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pati diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 33 (55.93%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 dan 26 (44.07%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

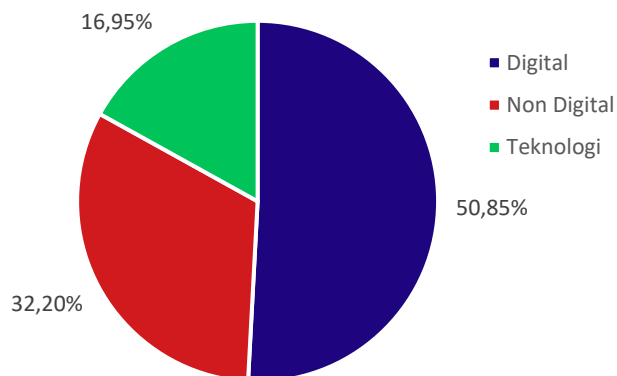
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 180. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pati

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 35 (59.32%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 14 (23.73%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 10 (16.95%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

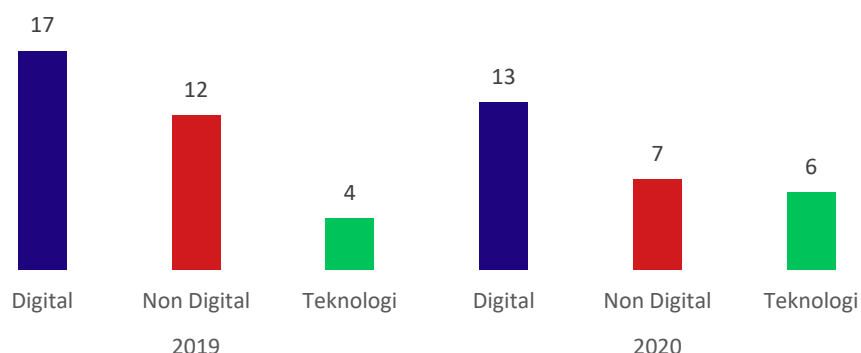
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 181. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pati

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Pati merupakan inovasi digital, yaitu sejumlah 30 (50.85%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 19 (32.20%) inovasi yang merupakan inovasi non digital serta 10 (16.95%) inovasi teknologi.

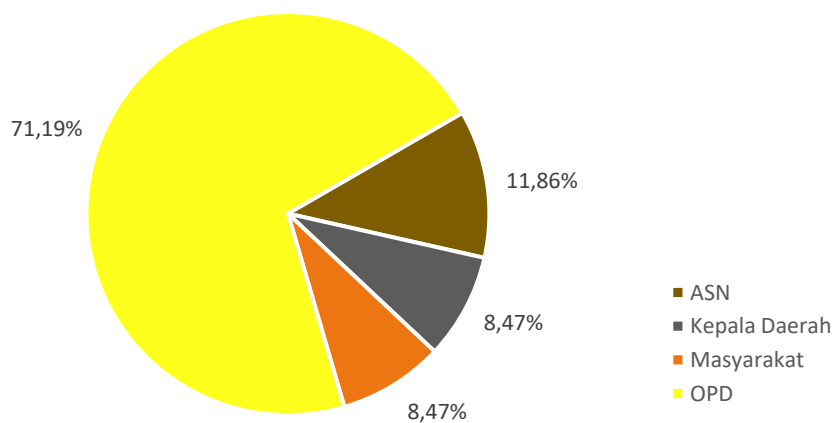
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 182. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pati

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya inovasi digital dan inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 17 inovasi dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 13 inovasi. Inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2019 adalah sejumlah 12 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 7 inovasi. Namun demikian, inovasi teknologi mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 6 inovasi

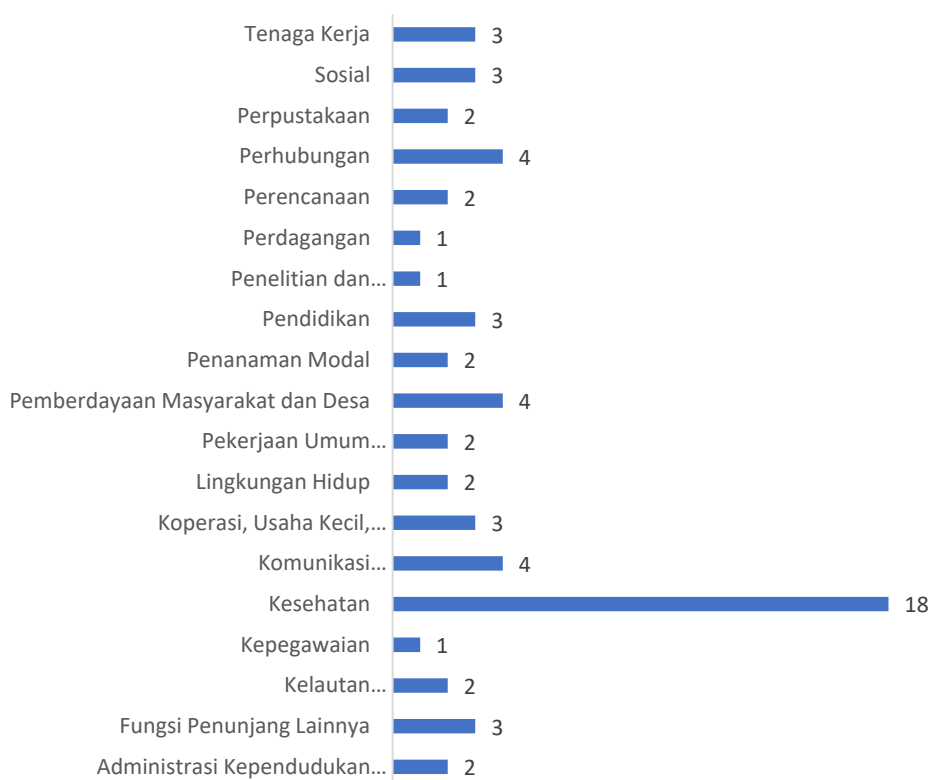
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 183. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pati

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pati pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 42 (71.19%) inovasi. Kemudian terdapat 5 (8.47%) inovasi yang diinisiasi masyarakat, 5 (8.47%) inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, dan 7 (11.86%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

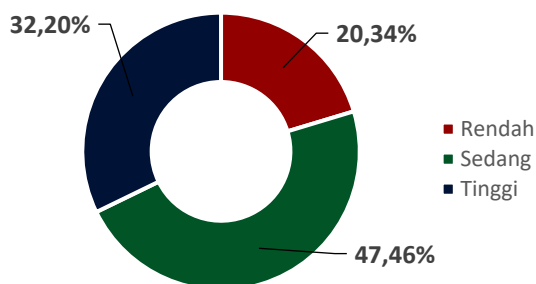
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 184. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pati

Inovasi daerah pada Kabupaten Pati tersebar pada 19 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan kesehatan yaitu 18 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Pati, terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 3 inovasi, urusan pendidikan 3 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 2 inovasi, dan urusan kesehatan 18 inovasi. Sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

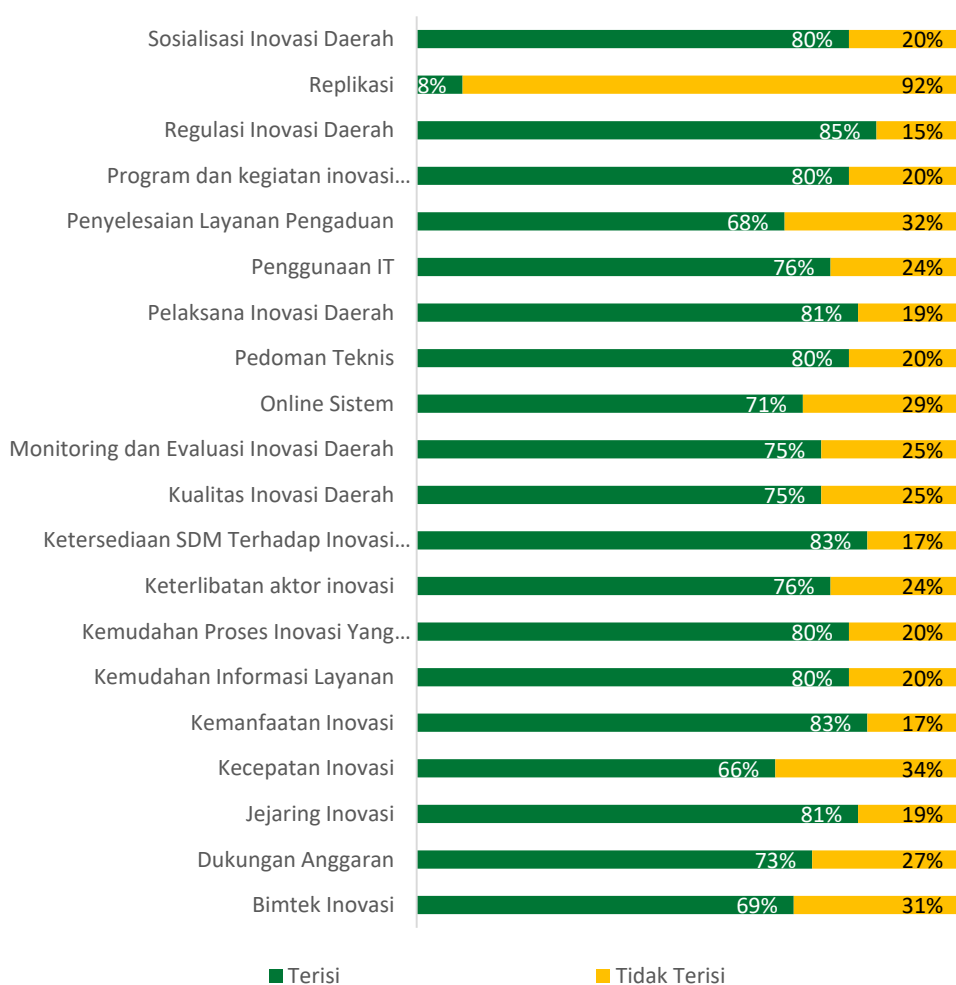
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 185. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pati

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, sebaran kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pati memiliki skor kematangan sedang. Terdapat 28 (47.46%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan sedang, 19 (32.20%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi dan 12 (20.34%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

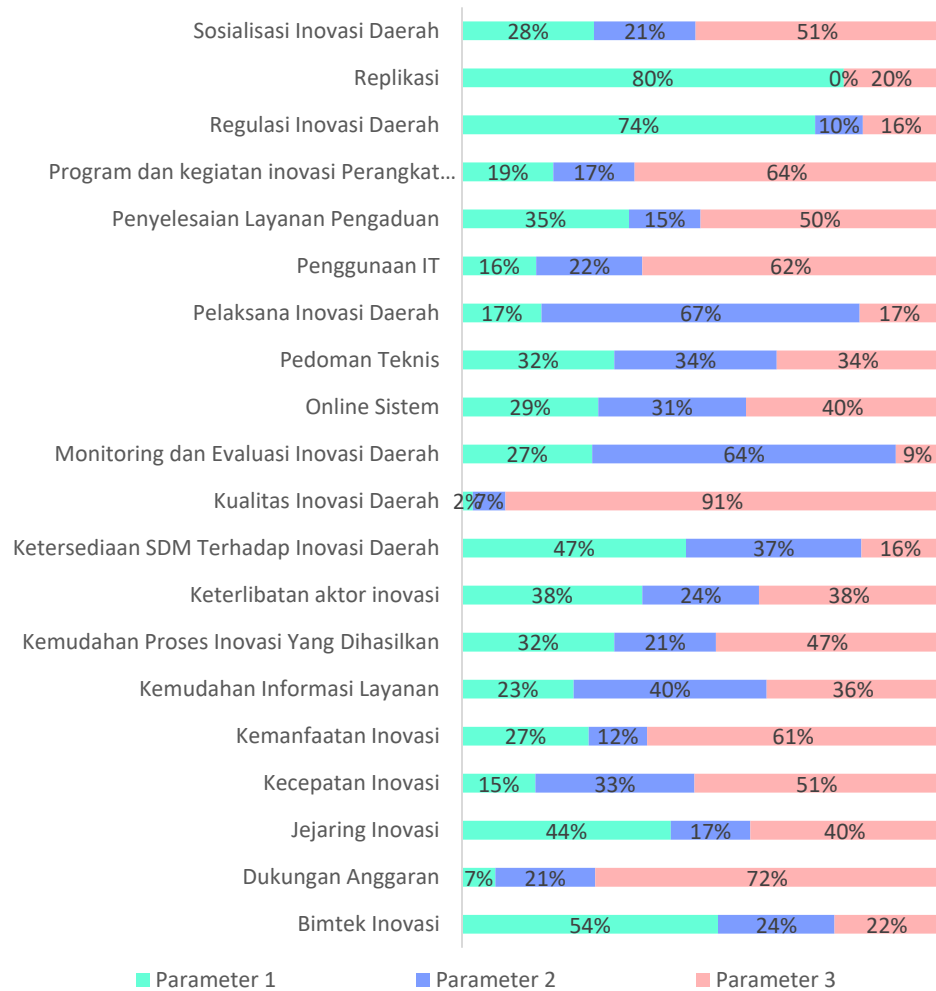


Gambar 186. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pati

Indikator Regulasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 85% artinya 85% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pati telah terisi data

pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 8% artinya hanya 8% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator Replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 187. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, yaitu sebesar 91%, artinya 91% inovasi yang mengisi data dukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 67% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 80%.

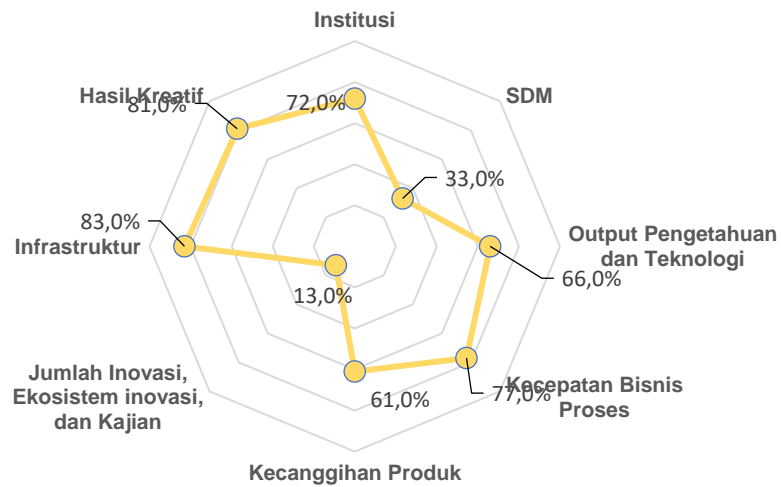
j. Daftar Inovasi Kabupaten Pati beserta Skor Kematangannya

Tabel 18. Daftar Inovasi Kabupaten Pati beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|---|-----------------|
| SISTEM INFORMASI PERIZINAN MASUK KOTA SEPULUH MENIT AJA RAMPUNG (SIP MASHAR) / E-SIGNATURE | 114 |
| APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-PLANNING / SIMRAL) | 12 |
| E-JURNAL | 110 |
| SI PIPA SISTEM INFORMASI PELELANGAN IKAN PATI Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Juwana Unit II Kabupaten Pati. | 137 |
| SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati) Untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati | 0 |
| Sinergi Infrastruktur | 85 |
| PENERAPAN E-CONSULTING DI INSPEKTORAT KABUPATEN PATI | 66 |
| BEBASKAN SUSI (SUSAH SINYAL) | 102 |
| Simpul Jaringan Data Spasial Kabupaten Pati (Si Jadi Pati) | 87 |
| PEMANFAATAN WEBSITE DALAM PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN PADA PELAYANAN DI KECAMATAN KAYEN | 98 |
| GUYUB BARENG NGINCENG JUMBLENG | 74 |
| eLayang | 54 |
| PERIZINAN VIA WHATSAPP KECAMATAN SUKOLILO | 90 |
| LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI (LTSA PTKLN) DISNAKER KAB. PATI | 120 |
| PENGARUH AKUPRESSURE BLADDER 31, 32 TERHADAP LAMA PERSALINAN KALA 1 PADA IBU BERSALIN PRIMIGRAVIDA DI PONED PUSKESMAS JUWANA | 89 |
| Sapi Perah TB (Saatnya Peduli Perangi Masalah TB) | 100 |
| ANC MOBILE | 93 |
| LOKAL EARLY MORNING SYSTEM (EWS) BANJIR (INOVASI MURAH DAN MUDAH DIREPLIKA) | 81 |
| Pemanfaatan Multi Program Controller (MUPROC) Pada Simpang Bersinyal | 21 |
| E-PUSTAKA | 101 |
| E-Ling | 98 |
| PEMANFAATAN WEBSITE DALAM PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN PADA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN DUKUHSETI | 0 |
| E-PRESENSI BKPP | 0 |
| CENDOL TALEWA PUSKESMAS JAKENAN | 0 |
| PEMANFAATAN TOGA DI PUSKESMAS TLOGOWUNGU DENGAN KEGIATAN SABTU GEMAR MINUM JAMU | 0 |
| KADAR ASETKU (KADER PINTAR ANAK SEHAT TUMBUH KEMBANG UNGGUL) | 0 |
| SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PARIWISATA KABUPATEN PATI | 0 |
| APLIKASI PAWON (PATI WISATA ONLINE) DENGAN | 0 |

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID | |
| E-BELAJAR | 0 |
| SIJADI PATI | 72 |
| SIPAPAT (Sistem Pengelolaan Potensi dan Administrasi Terpadu) | 139 |
| SPION (Sistem Pengujian Online) | 126 |
| TARJILU OKKE | 108 |
| Pembayaran Retribusi IMB Non Tunai (e Retribusi IMB) | 122 |
| INOVASI PELAYANAN SURAT PERIJINAN LEWAT WHATSAPP | 119 |
| SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Ijin Trayek Kabupaten Pati) | 72 |
| E-Consulting | 89 |
| NASI GANDUL (Nabung Sampah Investasi, Menjaga dan Melindungi Lingkungan) | 104 |
| SILAPRI GO SWAP | 104 |
| POSABALA | 92 |
| PEPALAWA (pelayanan pendaftaran melalui aplikasi WA) | 74 |
| Pembinaan Penyehat Keluarga | 91 |
| DRUPaDI (DAFTAR RICEK UMUMKAN PANTAU DATA IBU DAN ANAK) | 81 |
| SPION (Sistem Pengujian Online) | 127 |
| SI CANTIK CEGATIN | 83 |
| PINTARKU (Pelayanan Informasi Kesehatan dan Konsultasi Online) | 116 |
| LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI (LTSA PTKLN) DISNAKER KAB. PATI | 97 |
| PETOMAS (Pemanfaatan Tanaman Toga di Puskesmas) | 85 |
| PEMANFAATAN WEBSITE DALAM PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN PADA PELAYANAN DI KECAMATAN KAYEN | 83 |
| PANTES (Pelayanan Administrasi Terpadu Desa) | 88 |
| POJOK JAMU SARAPAN SEHAT DAN POJOK HERBAL | 79 |
| pasar puri online | 0 |
| Usaha Mikro Perinjinan Langsung Jadi (UMI PERSUDI) | 98 |
| DarTi Sepres | 102 |
| PAT-CULITANG | 102 |
| Aplikasi Simponi dalam Penyusunan Formasi Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Pati | 84 |
| SIMENDUT | 108 |
| Mewujudkan Organisasi yang AKuntabel Melalui e-OML (Organization Maturity Level) | 80 |
| BANK SAMPAH Puskesmas Margorejo | 52 |

R. KABUPATEN PEKALONGAN



Gambar 188. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, variabel Infrastruktur merupakan variabel dengan skor tertinggi, yaitu 83,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih sangat rendah, yaitu 13% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih relatif rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

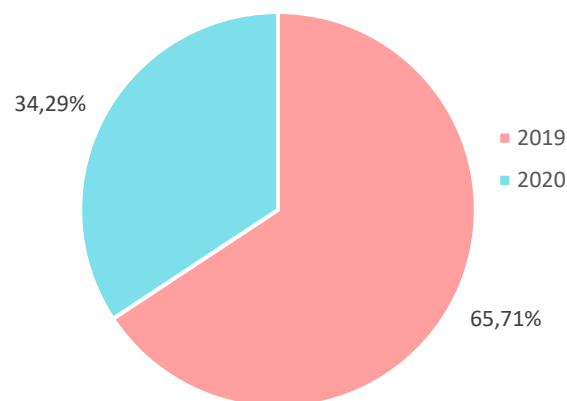


Gambar 189. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pekalongan

Grafik di atas merupakan grafik capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada Kabupaten Pekalongan. Capaian tersebut merupakan kenaikan/penurunan nilai variabel data pengukuran inovasi daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data pengukuran inovasi daerah tahun 2019. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi perbaikan pada dua indikator, yaitu indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 13.97% dan indikator Jumlah Peningkatan Investasi 3186%, sedangkan indikator-indikator lainnya mengalami penurunan. Indikator Nilai IPM menurun 0.08%, indikator Jumlah Peningkatan PAD menurun 1.67%, dan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menurun sebesar 2.54% yang artinya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan sebesar 2.54% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami penurunan 0.82% namun penurunan tersebut masih lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%, sementara indikator Penurunan Angka Kemiskinan tidak mengalami perubahan.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

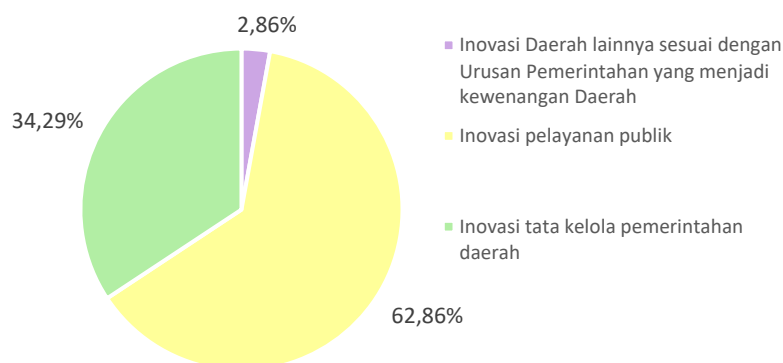
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 190. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pekalongan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pekalongan diterapkan pada tahun 2019. Terdapat 23 (65.71%) inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 dan 12 (34.29%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2019.

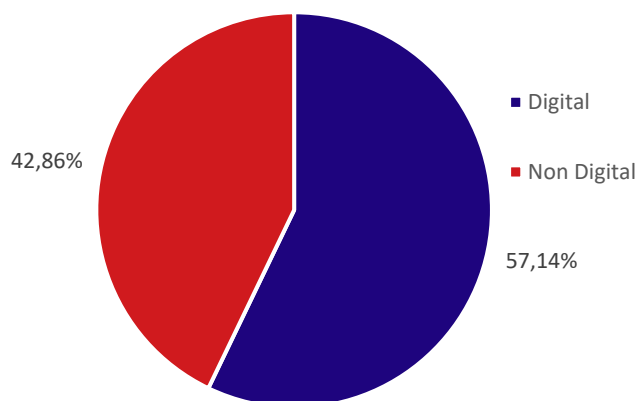
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 191. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi dengan bentuk pelayanan publik yaitu sejumlah 22 (62.86%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 1 (2.86%) inovasi dengan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan dan 12 (34.29%) inovasi merupakan inovasi daerah bentuk lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

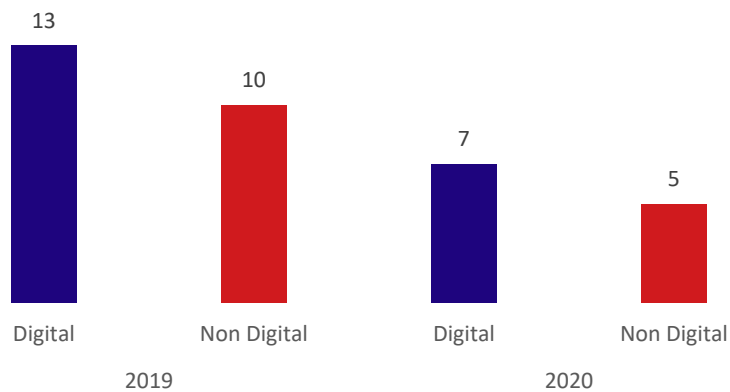
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 192. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pekalongan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan Kabupaten Pekalongan merupakan inovasi digital, yaitu sejumlah 20 (57.14%) inovasi. Selain itu, terdapat pula 15 (42.86%) inovasi yang merupakan inovasi non digital.

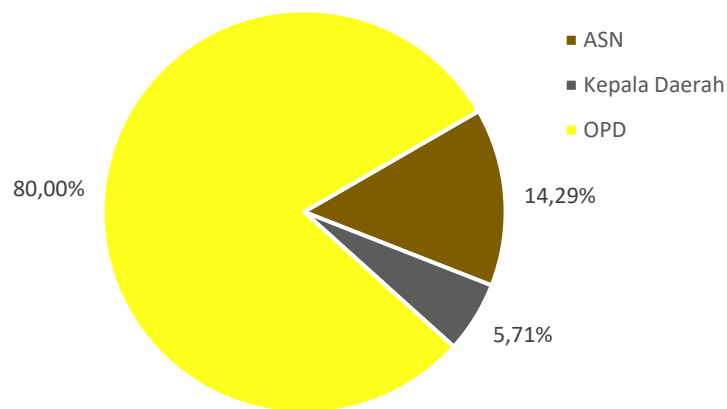
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 193. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pekalongan

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital dan inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 13 inovasi dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 7 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital, pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 10 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 5 inovasi.

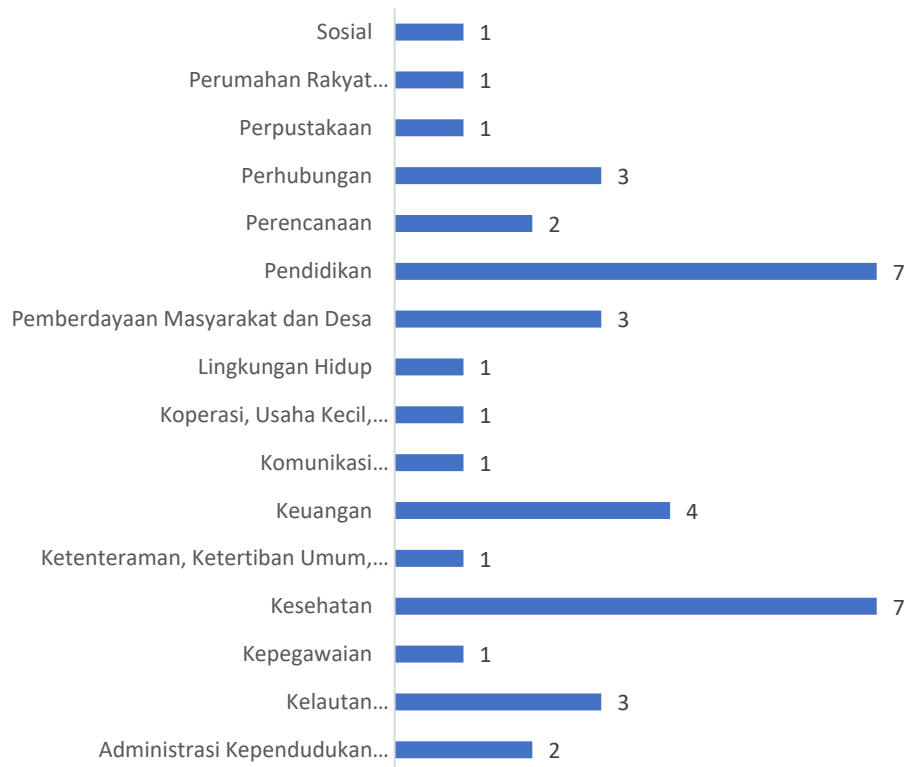
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 194. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pekalongan

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 28 (80.0%) inovasi. Kemudian terdapat 2 (5.71%) inovasi yang diisiasi Kepala Daerah dan 5 (14.29%) inovasi yang diinisiasi oleh ASN.

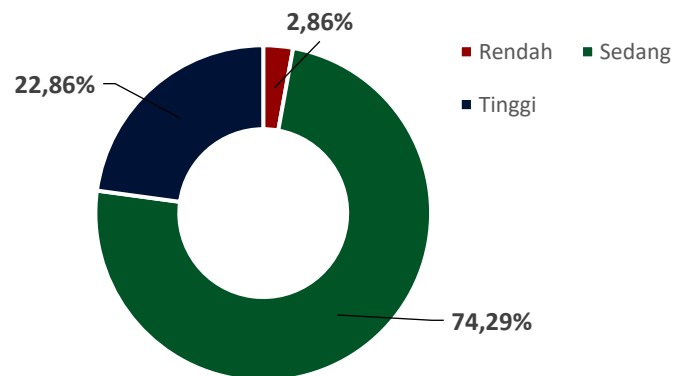
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 195. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pekalongan

Inovasi daerah pada Kabupaten Pekalongan tersebar pada 16 urusan pemerintah, dengan jumlah inovasi terbanyak berada pada urusan pendidikan dan kesehatan yaitu masing-masing 7 inovasi. Dari seluruh urusan inovasi daerah yang ada pada Kabupaten Pekalongan, terdapat 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial 1 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1 inovasi, urusan pendidikan 7 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1 inovasi, dan urusan kesehatan 7 inovasi.

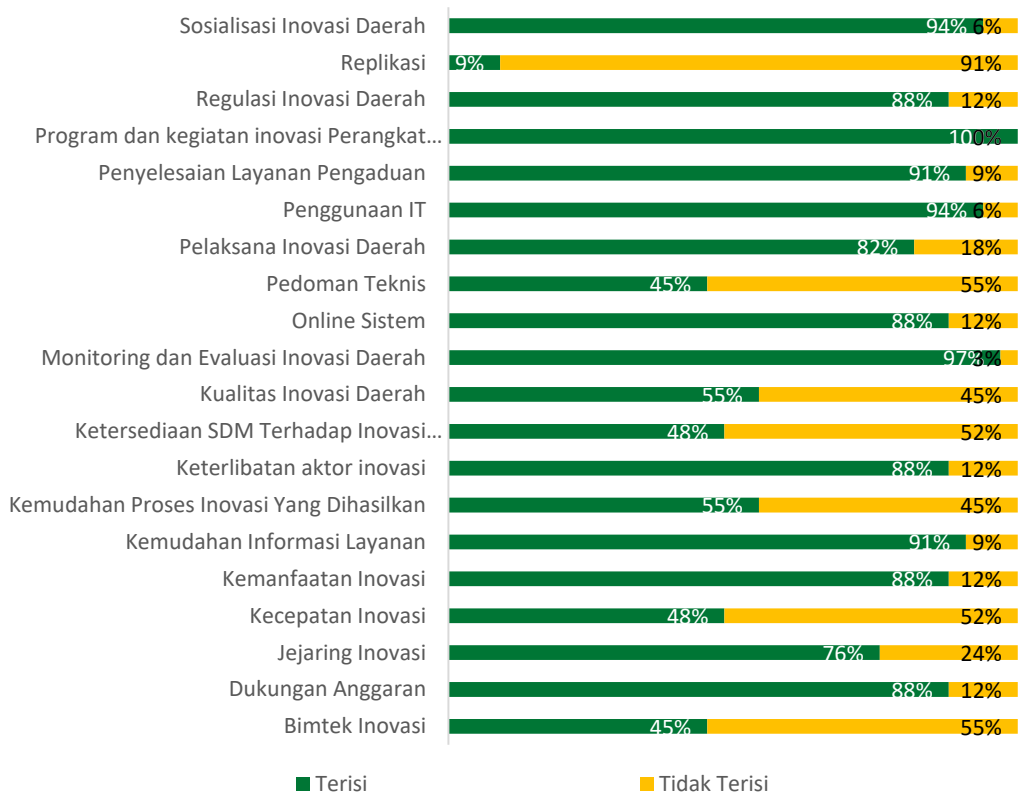
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 196. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pekalongan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasi, kebanyakan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pekalongan memiliki skor kematangan sedang. Terdapat 26 (74.29%) inovasi yang termasuk dalam kategori skor kematangan sedang, 8 (22.86%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi dan 1 (2.86%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

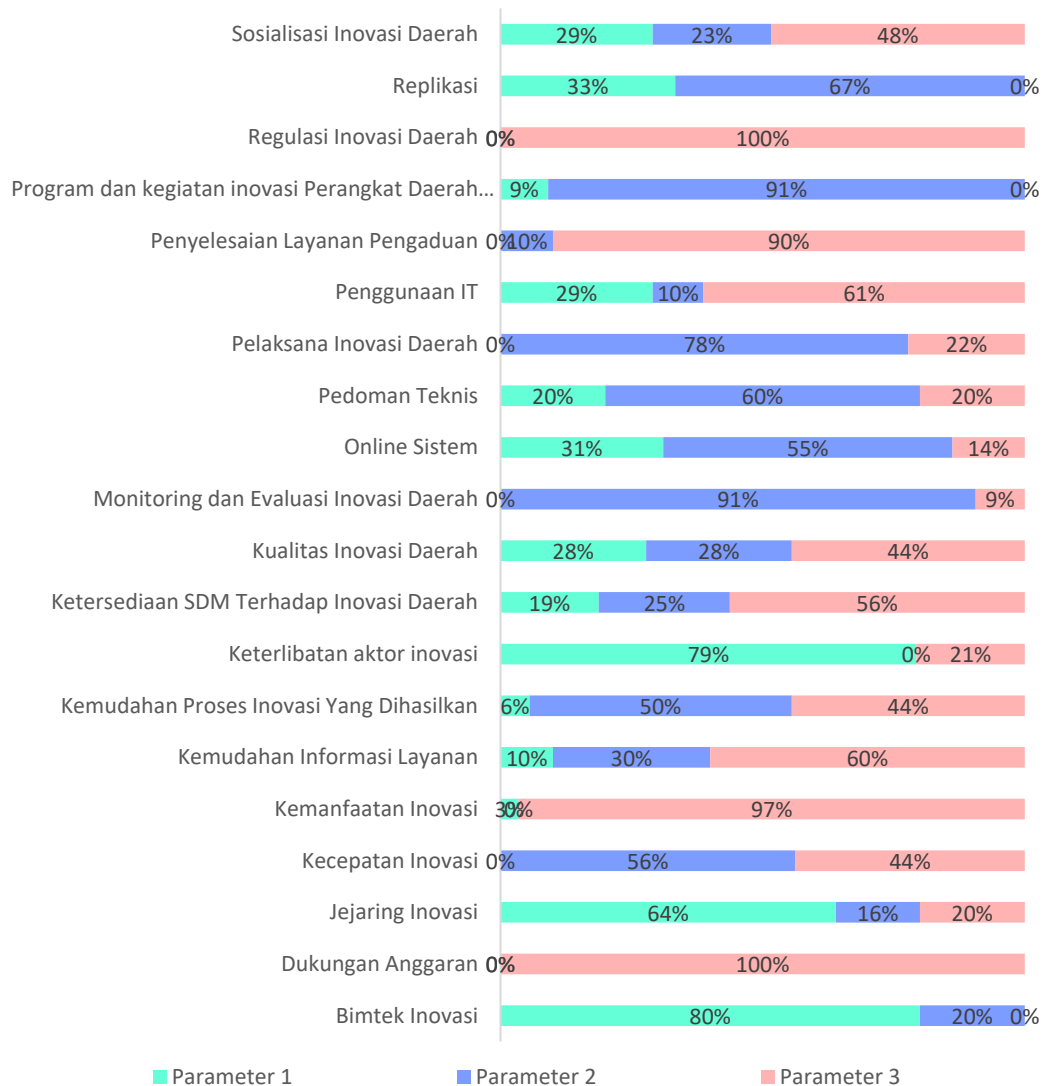
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 197. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan

Indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pekalongan telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 9% artinya hanya 9% inovasi yang terisi data pendukung pada indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 198. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari grafik tingkat keterisian parameter diatas bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Dukungan Anggaran, yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang mengisi data dukung pada kedua indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPd serta Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 91% dan indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 80%.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Pekalongan beserta Skor Kematangannya

Tabel 19. Daftar Inovasi Kabupaten Pekalongan beserta Skor Kematangannya

| NAMA INOVASI | SKOR KEMATANGAN |
|--|-----------------|
| SIMWAS (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan) | 102 |
| Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran Retibusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor secara online | 126 |
| KAWASAN LELE BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KABUPATEN PEKALONGAN | 108 |
| Sijapri | 81 |
| 3Ng (Mangkat BareNg Mayeng MayeNg Mrikso Wong MeteNg) | 67 |
| PORTAL LAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU | 80 |
| JEK-DUK | 89 |
| KLINIK MAMA (Klinik Maju Bersama Karangdadap) | 84 |
| BALIKAN DONG DINAS ARPUS | 87 |
| "SI MERAH DARAH" | 83 |
| BUKU CAKAP UNTUK LABA PAK ROBIN | 87 |
| "SINTA SAH BU" Solusi Mantap Pengusaha Sibuk | 92 |
| SISTEM INFORMASI MASYARAKAT URUN REMBUG (SIMAUREMBUG) | 93 |
| SI RANGGA (sistem penganggaran Kabupaten Pekalongan) | 93 |
| BPHTB (Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan) | 95 |
| SI JANTUNG HATI (sistem Informasi Jaringan untuk menghitung Hasil retribusi) | 93 |
| Gerakan Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (KUDU Sekolah) | 123 |
| LASMI MBAH SLAMET (KELAS SUAMI SIMBAH & SELAMETAN IBU HAMIL) | 77 |
| SAPU JAGAD (Semua Penduduk Terjamin dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan) | 100 |
| RODO (Zero Drop Out) | 87 |
| SIPROKOL (Aplikasi Program Sekolah) | 80 |
| e KGB (Kenaikan Gaji Berkala Dinas Pendidikan) | 81 |
| Aplikasi manajemen surat dindik | 84 |
| Aplikasi Si Dol rumah sakit RSUD Kajen | 95 |
| Aplikasi e PKPNS (Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil secara Online) | 96 |
| Aplikasi e PPID di lingkungan Dindikbud | 82 |
| Aplikasi e SPTPD (SPT Pajak Daerah badan pengelolaan Keuangan Daerah) | 34 |
| SIPEDU (Sistem Pelaporan Terpadu) | 83 |
| e KIR Dinas Perhubungan | 103 |
| SIBAHUMAS (sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat) | 109 |
| SIRAM ONLINE RSUD KRATON | 95 |
| SIMONWEB (sistem Informasi Dashboard Kabupaten Pekalongan) | 115 |
| JALA SAMPAH (Jaringan Kelola Sanitasi Masyarakat Mari Pilah) | 92 |
| PIVA JEBOL (PEMERIKSAAN IVA JEMPUT BOLA) | 87 |
| SIMDASA (APLIKASI DATA DESA PADA PEMERINTAH DESA) | 96 |

BAB III

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Fokus pembahasan pada bagian ini akan dibatasi pada hal-hal yang menjadi kekurangan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Bagian 1 pada variabel-variabel dan indikator satuan Inovasi daerah dan perumusan rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Ini dikarenakan variabel dan indikator tersebut merupakan indikator input dan proses pendorong inovasi, sementara variabel dan indikator pada satuan pemerintah daerah adalah indikator makro pemerintah daerah yang ditempatkan sebagai indikator output makro pada pemerintah daerah.

A. KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Banjarnegara mendapat skor 41.91 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 1 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 30%. Namun optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel – variabel yang memiliki skor dibawah 60%, yaitu variabel infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, serta output pengetahuan dan teknologi. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 20. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|----------------------|--|---|
| Infrastruktur | Regulasi inovasi daerah | Menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah berupa: a. Peraturan Daerah, untuk inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah b. Peraturan Kepala Daerah, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah |
| | Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah | Mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi |
| | Dukungan anggaran | Koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran |
| | Penggunaan IT | Penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi |
| | Bimtek inovasi | Melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi |

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|---|--|--|
| | Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | Koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran |
| Kecanggihan Produk | Online sistem | Mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE |
| | Replikasi | Aktif mendiseminasikan inovasi – inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain |
| | Kecepatan penciptaan inovasi | Mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi |
| Kecepatan Bisnis Proses | Pedoman teknis | Menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses |
| | Kemudahan informasi layanan | Memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat |
| | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan | Mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan |
| | Penyelesaian layanan pengaduan | Menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjutnya sebagai bahan perbaikan layanan |
| Output Pengetahuan dan Teknologi | Keterlibatan aktor inovasi | Melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah |
| | Pelaksana inovasi daerah | Membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada |
| | Jejaring inovasi | Bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi |
| | Sosialisasi Inovasi Daerah | Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses |

Berdasarkan gambar 8 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Banjarnegara tersebar di 9 (sembilan) urusan. Hanya terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan kesehatan dan urusan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum dilaporkan, yaitu urusan sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,

mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 9 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh gambar 10 dan gambar 11 tentang persentase tingkat keterisian data dukung serta kategori parameter pada indikator – indikator satuan inovasi daerah. Meskipun secara rata-rata lebih dari 70% inovasi telah mempunyai bukti dukung, namun bukti dukung tersebut masih berada pada kategori parameter 1 sehingga optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 21. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Banjarnegara

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---------------------------------|---|
| 1. Replikasi | 1. Kemanfaatan Inovasi |
| | 2. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| | 4. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 5. Dukungan Anggaran |
| | 6. Penggunaan IT |
| | 7. Bimtek Inovasi |
| | 8. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| | 9. Replikasi |
| | 10. Online Sistem |
| | 11. Kecepatan Inovasi |
| | 12. Pedoman Teknis |
| | 13. Kemudahan Informasi Layanan |
| | 14. Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| | 15. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan |
| | 16. Jejaring Inovasi |
| | 17. Pelaksana Inovasi Daerah |
| | 18. Keterlibatan aktor inovasi |
| | 19. Sosialisasi Inovasi Daerah |

Adapun indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% adalah indikator replikasi. Sementara itu, seluruh indikator masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, kecuali indikator kualitas inovasi daerah. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 3 tentang

jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Banjarnegara, terdapat 9 atau 43% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi dan menciptakan novum baru sebagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banjarnegara.

B. KABUPATEN BANYUMAS

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Banyumas mendapat skor 53.94 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 12 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 30%. Namun optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel – variabel yang memiliki skor dibawah 60%, yaitu variabel kecanggihan produk. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Banyumas berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 22. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Kecanggihan Produk | Online sistem | Mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE |
| | Replikasi | Aktif mendiseminasikan inovasi – inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain |
| | Kecepatan penciptaan inovasi | Mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi |

Berdasarkan gambar 19 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Banyumas tersebar di 19 (sembilan) urusan. Terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini perlu dipertahankan dan dapat lebih ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Berdasarkan gambar 20 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang dan tinggi. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh gambar 21 dan gambar 22 tentang persentase tingkat keterisian data dukung serta kategori parameter pada indikator – indikator satuan inovasi daerah. Secara rata – rata lebih dari 60% inovasi telah mempunyai bukti dukung dan beberapa indikator telah berada pada kategori parameter 3, namun optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 23. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Banyumas

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|--|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 2. Replikasi |
| 3. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Pedoman Teknis | 4. Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| 5. Keterlibatan aktor inovasi | 5. Penggunaan IT |
| | 6. Pelaksana Inovasi Daerah |
| | 7. Pedoman Teknis |
| | 8. Online Sistem |
| | 9. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 10. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 11. Keterlibatan aktor inovasi |
| | 12. Kemudahan Informasi Layanan |
| | 13. Jejaring Inovasi |
| | 14. Bimtek Inovasi |
| | 15. Sosialisasi Inovasi Daerah |

Tabel di atas merupakan daftar indikator yang masih bisa dioptimalkan oleh Kabupaten Banyumas. Dari total 20 indikator satuan inovasi daerah, terdapat 5 indikator yang memiliki persentase keterisian bukti dukung dibawah 60% dan 15 indikator yang memiliki persentase kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan juga *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 14 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Banyumas, terdapat 18 atau 46% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

C. KABUPATEN BATANG

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Batang mendapat skor 46.84 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 23 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 30 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Batang tersebar di 24 urusan. Terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Batang perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum dilaporkan, yaitu urusan sosial serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi,

Berdasarkan gambar 31 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh gambar 32 dan gambar 33 tentang persentase tingkat keterisian data dukung serta kategori parameter pada indikator – indikator satuan inovasi daerah. Secara rata-rata hanya 50% inovasi yang telah mempunyai bukti dukung meskipun mayoritas bukti dukung tersebut masih berada pada kategori parameter 3. Namun optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 24. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Batang

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|---|
| 1. Replikasi | 1. Regulasi Inovasi Daerah |
| 2. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 2. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| 3. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 3. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 4. Pelaksana Inovasi Daerah | 4. Pedoman Teknis |
| 5. Pedoman Teknis | 5. Online Sistem |
| 6. Online Sistem | 6. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| 7. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 7. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| 8. Keterlibatan aktor inovasi | 8. Keterlibatan aktor inovasi |
| 9. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | 9. Kemudahan Informasi Layanan |
| 10. Kecepatan Inovasi | 10. Kemanfaatan Inovasi |
| 11. Jejaring Inovasi | 11. Kecepatan Inovasi |
| 12. Dukungan Anggaran | 12. Jejaring Inovasi |
| 13. Bimtek Inovasi | 13. Bimtek Inovasi |

Tabel di atas merupakan daftar indikator yang masih bisa dioptimalkan oleh Kabupaten Batang. Dari total 20 indikator satuan inovasi daerah, terdapat 13 indikator yang memiliki persentase keterisian bukti dukung dibawah 60% dan 13 indikator yang memiliki persentase kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan gambar 23 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Banyumas, terdapat 75 atau 20% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Jumlah tersebut cukup besar sehingga inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya untuk dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

D. KABUPATEN BLORA

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Blora mendapat skor 51.36 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 34 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 41 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, inovasi di Kabupaten Blora tersebar di 27 urusan. Penyebaran inovasi berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Blora sudah cukup baik namun Pemerintah Kabupaten Blora masih bisa mengoptimalkan inovasi di setiap urusan, khususnya urusan wajib pelayanan dasar yang belum melaporkan. Terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang sudah melaporkan, yaitu urusan sosial, urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan kesehatan sementara urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat belum melaporkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi,

Berdasarkan gambar 42 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh gambar 43 dan gambar 44 tentang persentase tingkat keterisian data dukung serta kategori parameter pada indikator – indikator satuan inovasi daerah. Secara rata-rata hanya 34% inovasi yang telah mempunyai bukti dukung dan mayoritas bukti dukung tersebut masih berada pada kategori parameter 1. Skor Indeks inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh nilai kematangan per inovasi yang diinput. Untuk meningkatkan nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Blora, diperlukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 25. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Blora

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|---|
| 1. Sosialisasi Inovasi Daerah | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Replikasi | 2. Replikasi |
| 3. Regulasi Inovasi Daerah | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 4. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| 5. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 5. Penyelesaian Layanan Pengaduan |

| | |
|--|--|
| 6. Penggunaan IT | 6. Penggunaan IT |
| 7. Pelaksana Inovasi Daerah | 7. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 8. Pedoman Teknis | 8. Pedoman Teknis |
| 9. Online Sistem | 9. Online Sistem |
| 10. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 10. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| 11. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah | 11. Kualitas Inovasi Daerah |
| 12. Keterlibatan aktor inovasi | 12. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| 13. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | 13. Keterlibatan aktor inovasi |
| 14. Kemudahan Informasi Layanan | 14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan |
| 15. Kemanfaatan Inovasi | 15. Kemudahan Informasi Layanan |
| 16. Kecepatan Inovasi | 16. Kemanfaatan Inovasi |
| 17. Jejaring Inovasi | 17. Jejaring Inovasi |
| 18. Dukungan Anggaran | 18. Bimtek Inovasi |
| 19. Bimtek Inovasi | |

Tabel di atas merupakan daftar indikator yang masih bisa dioptimalkan oleh Kabupaten Blora. Dari total 20 indikator satuan inovasi daerah, terdapat 19 indikator yang memiliki persentase keterisian bukti dukung dibawah 60% dan 18 indikator yang memiliki persentase kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan gambar 36 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Banyumas, terdapat 105 atau 46% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Jumlah tersebut cukup besar sehingga inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya untuk dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

E. KABUPATEN BOYOLALI

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Boyolali mendapat skor 48.99 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 45 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 30%. Namun optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel – variabel yang memiliki skor dibawah 60%, yaitu variabel output pengetahuan dan teknologi. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Boyolali berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 26. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|---|----------------------------|---|
| Output Pengetahuan dan Teknologi | Keterlibatan aktor inovasi | Melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah |
| | Pelaksana inovasi daerah | Membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada |
| | Jejaring inovasi | Bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi |
| | Sosialisasi Inovasi Daerah | Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses |

Berdasarkan gambar 52 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Boyolali tersebar di 6 (enam) urusan. Hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 53 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh gambar 54 menunjukkan bahwa kebanyakan dari indikator telah diisi dan mempunyai bukti dukung. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 55 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada pada parameter 3. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 27. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Boyolali

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|---|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 2. Replikasi |
| 3. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 4. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| 5. Keterlibatan aktor inovasi | 5. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 6. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | 6. Pedoman Teknis |
| 7. Kecepatan Inovasi | 7. Online Sistem |
| | 8. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 9. Kualitas Inovasi Daerah |
| | 10. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi |

| | |
|--|--------------------------------|
| | Daerah |
| | 11. Keterlibatan aktor inovasi |
| | 12. Kecepatan Inovasi |
| | 13. Jejaring Inovasi |
| | 14. Bimtek Inovasi |

Terdapat 7 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 14 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 47 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Boyolali, terdapat 3 atau 37% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

F. KABUPATEN BREBES

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Brebes mendapat skor 16.37 dan masuk pada kategori kurang inovatif. Berdasarkan gambar 56 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 30%. Namun optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel – variabel yang memiliki skor dibawah 60%, yaitu variabel infrastruktur, kecanggihan produk, dan kecepatan bisnis proses. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Brebes berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 28. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Brebes Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|----------------------|-------------------------|---|
| Infrastruktur | Regulasi inovasi daerah | Menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah, untuk inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah b. Peraturan Kepala Daerah, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada |

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|--------------------------------|--|--|
| | | anggaran pendapatan dan belanja daerah |
| | Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah | Mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi |
| | Dukungan anggaran | Koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran |
| | Penggunaan IT | Penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi |
| | Bimtek inovasi | Melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi |
| | Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | Koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran |
| Kecanggihan Produk | Online sistem | Mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE |
| | Replikasi | Aktif mendiseminasikan inovasi – inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain |
| | Kecepatan penciptaan inovasi | Mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi |
| Kecepatan Bisnis Proses | Pedoman teknis | Menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses |
| | Kemudahan informasi layanan | Memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat |
| | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan | Mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan |
| | Penyelesaian layanan pengaduan | Menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan |

Berdasarkan gambar 63 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Brebes tersebar hanya di 3 (tiga) urusan. Hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,

mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 64 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh gambar 65 menunjukkan bahwa kebanyakan dari indikator tidak mempunyai bukti dukung. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 66 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas masih berada pada parameter 1. Optimalisasi keterisian dokumen dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 29. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Brebes

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|---|
| 1. Sosialisasi Inovasi Daerah | 1. Replikasi |
| 2. Replikasi | 2. Regulasi Inovasi Daerah |
| 3. Regulasi Inovasi Daerah | 3. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| 4. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 4. Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| 5. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 5. Pedoman Teknis |
| 6. Penggunaan IT | 6. Online Sistem |
| 7. Pelaksana Inovasi Daerah | 7. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| 8. Pedoman Teknis | 8. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| 9. Online Sistem | 9. Keterlibatan aktor inovasi |
| 10. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 10. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan |
| 11. Kualitas Inovasi Daerah | 11. Kecepatan Inovasi |
| 12. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah | 12. Dukungan Anggaran |
| 13. Keterlibatan aktor inovasi | 13. Bimtek Inovasi |
| 14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | |
| 15. Kemudahan Informasi Layanan | |
| 16. Kemanfaatan Inovasi | |
| 17. Kecepatan Inovasi | |
| 18. Jejaring Inovasi | |
| 19. Dukungan Anggaran | |
| 20. Bimtek Inovasi | |

Seluruh indikator masih memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% karena hanya 1 dari 3 inovasi yang dilaporkan dilengkapi data dukung. Dari 1 inovasi yang telah dilengkapi data dukung tersebut, terdapat 13 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sebagaimana pada tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan

konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

G. KABUPATEN CILACAP

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Cilacap mendapat skor 52.61 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 67 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 30%. Namun optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel – variabel yang memiliki skor dibawah 60%, yaitu variabel kecanggihan produk serta output pengetahuan dan teknologi. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Cilacap berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 30. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Cilacap Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|---|------------------------------|---|
| Kecanggihan Produk | Online sistem | Mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE |
| | Replikasi | Aktif mendiseminasikan inovasi – inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain |
| | Kecepatan penciptaan inovasi | Mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi |
| Output Pengetahuan dan Teknologi | Keterlibatan aktor inovasi | Melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah |
| | Pelaksana inovasi daerah | Membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada |
| | Jejaring inovasi | Bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi |
| | Sosialisasi Inovasi Daerah | Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses |

Berdasarkan gambar 74 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Cilacap tersebar di 31 urusan yang mana seluruh urusan wajib pelayanan dasar sudah terpenuhi. Capaian inovasi pada Kabupaten Cilacap sudah baik sehingga Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu mempertahankan kinerja tersebut dengan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 75 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa mayoritas inovasi masih menunjukkan

nilai kematangan sedang. Gambar 76 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung masih sekitar 50%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 77 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas masih berada pada parameter 1. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 31. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Cilacap

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|---|
| 1. Sosialisasi Inovasi Daerah | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Replikasi | 2. Replikasi |
| 3. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 4. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| 5. Penggunaan IT | 5. Penggunaan IT |
| 6. Pelaksana Inovasi Daerah | 6. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 7. Pedoman Teknis | 7. Pedoman Teknis |
| 8. Online Sistem | 8. Online Sistem |
| 9. Keterlibatan aktor inovasi | 9. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| 10. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | 10. Kualitas Inovasi Daerah |
| 11. Kemudahan Informasi Layanan | 11. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| 12. Kecepatan Inovasi | 12. Keterlibatan aktor inovasi |
| 13. Jejaring Inovasi | 13. Kemudahan Informasi Layanan |
| 14. Bimtek Inovasi | 14. Jejaring Inovasi |
| | 15. Bimtek Inovasi |

Terdapat 14 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 15 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 69 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Cilacap, terdapat 52 atau 34% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Jumlah tersebut cukup tinggi sehingga inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

H. KABUPATEN DEMAK

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Demak mendapat skor 55.56 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 78 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 30%. Namun optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel – variabel yang memiliki skor dibawah 60%, yaitu variabel kecanggihan produk. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Demak berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 32. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Demak Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Kecanggihan Produk | Online sistem | Mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE |
| | Replikasi | Aktif mendiseminasikan inovasi – inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain |
| | Kecepatan penciptaan inovasi | Mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi |

Berdasarkan gambar 85 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Demak tersebar di 34 urusan yang mana seluruh urusan wajib pelayanan dasar sudah terpenuhi. Capaian inovasi pada Kabupaten Demak sudah baik sehingga Pemerintah Kabupaten Demak perlu mempertahankan kinerja tersebut dengan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 86 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa mayoritas inovasi masih menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 87 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 88 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas sudah berada pada parameter 3. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 33. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Demak

| Keterisian Dokumen di bawah 60% | Kesesuaian Bukti Dukung pada Parameter 3 dibawah 60% |
|---|--|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 2. Replikasi |
| 3. Online Sistem | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 4. Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| 5. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | 5. Penggunaan IT |

| | |
|---------------------|---|
| 6. Jejaring Inovasi | 6. Pelaksana Inovasi Daerah |
| | 7. Pedoman Teknis |
| | 8. Online Sistem |
| | 9. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 10. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 11. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihilangkan |
| | 12. Kemudahan Informasi Layanan |
| | 13. Kemanfaatan Inovasi |
| | 14. Jejaring Inovasi |
| | 15. Bimtek Inovasi |

Terdapat 6 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 15 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 80 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Demak, mayoritas inovasi diterapkan pada tahun 2019, yaitu sejumlah 111 atau 56% inovasi. Jumlah tersebut cukup tinggi sehingga berpotensi untuk menurunkan nilai indeks inovasi daerah pada tahun berikutnya jika tidak diperbaharui. Oleh karena itu, inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya.

I. KABUPATEN GROBOGAN

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Grobogan mendapat skor 43.35 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 89 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 30%. Namun optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel – variabel yang memiliki skor dibawah 60%, yaitu variabel output pengetahuan dan teknologi serta hasil kreatif. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Grobogan berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 34. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|---|--|--|
| Output Pengetahuan dan Teknologi | Keterlibatan aktor inovasi | Melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah |
| | Pelaksana inovasi daerah | Membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada |
| | Jejaring inovasi | Bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi |
| | Sosialisasi Inovasi Daerah | Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses |
| Hasil Kreatif | Kemanfaatan inovasi | Menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas |
| | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan <i>feed back</i> atau <i>review</i> kegiatan inovasi |
| | Kualitas inovasi daerah | Menyusun rencana ataupun <i>template</i> pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi |

Berdasarkan gambar 96 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Grobogan tersebar di 13 urusan. Hanya terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan kesehatan dan urusan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum dilaporkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 97 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa mayoritas inovasi masih menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 98 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 88 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas masih berada pada parameter 1. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 35. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Grobogan

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|--|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 2. Replikasi |
| 3. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 4. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 5. Keterlibatan aktor inovasi | 5. Pedoman Teknis |
| 6. Kemanfaatan Inovasi | 6. Online Sistem |
| | 7. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 8. Kualitas Inovasi Daerah |
| | 9. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 10. Kemudahan Informasi Layanan |
| | 11. Kemanfaatan Inovasi |
| | 12. Jejaring Inovasi |
| | 13. Bimtek Inovasi |

Terdapat 6 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 13 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 91 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Grobogan, terdapat 10 atau 53% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

J. KABUPATEN JEPARA

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Jepara mendapat skor 46.52 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 100 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 107 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Jepara tersebar di 15 urusan. Terdapat 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.. Pemerintah Kabupaten Jepara perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum melaporkan. Upaya

yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 108 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa seluruh inovasi masih menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 109 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 110 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas telah berada pada parameter 3. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 36. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Jepara

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|--|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 2. Replikasi |
| 3. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Online Sistem | 4. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah |
| 5. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 5. Penggunaan IT |
| 6. Keterlibatan aktor inovasi | 6. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 7. Kemudahan Informasi Layanan | 7. Pedoman Teknis |
| 8. Jejaring Inovasi | 8. Online Sistem |
| | 9. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 10. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 11. Kemudahan Informasi Layanan |
| | 12. Kecepatan Inovasi |
| | 13. Jejaring Inovasi |
| | 14. Bimtek Inovasi |

Terdapat 8 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 14 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 105 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Jepara, terdapat 12 atau 52% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat

diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

K. KABUPATEN KARANGANYAR

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Karanganyar mendapat skor 49.59 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 111 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 118 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Karanganyar tersebar di 14 urusan. Terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum dilaporkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 119 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa mayoritas inovasi telah menunjukkan nilai kematangan tinggi. Gambar 120 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 121 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas telah berada pada parameter 3. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 37. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Karanganyar

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|-----------------------------------|--|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 2. Replikasi |
| 3. Keterlibatan aktor inovasi | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Kemudahan Proses Inovasi | 4. Pelaksana Inovasi Daerah |
| | 5. Pedoman Teknis |
| | 6. Online Sistem |
| | 7. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 8. Kualitas Inovasi Daerah |
| | 9. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 10. Kemudahan Informasi Layanan |
| | 11. Kemanfaatan Inovasi |
| | 12. Jejaring Inovasi |
| | 13. Bimtek Inovasi |

Terdapat 4 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 13 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 116 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Karanganyar, terdapat 6 atau 26% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

L. KABUPATEN KEBUMEN

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Kebumen mendapat skor 43.23 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 122 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 129 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Kebumen tersebar di 11 urusan. Hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum terlaporkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 130 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa mayoritas inovasi telah menunjukkan nilai kematangan tinggi. Gambar 131 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 132 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas telah berada pada parameter 3. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 38. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Kebumen

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---------------------------------|--|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Online Sistem | 2. Replikasi |
| 3. Kecepatan Inovasi | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| | 4. Pelaksana Inovasi Daerah |
| | 5. Pedoman Teknis |
| | 6. Online Sistem |
| | 7. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 8. Kualitas Inovasi Daerah |
| | 9. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 10. Jejaring Inovasi |
| | 11. Bimtek Inovasi |

Terdapat 3 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 11 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 127 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Kebumen, terdapat 8 atau 47% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

M. KABUPATEN KENDAL

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Kendal mendapat skor 59.43 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 133 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 140 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Kendal tersebar di 28 urusan, dimana terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mempertahankan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah tetap memberikan sosialisasi secara massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk

dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 141 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa mayoritas inovasi telah menunjukkan nilai kematangan tinggi. Gambar 142 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 143 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas telah berada pada parameter 3. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 39. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Kendal

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PAD PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---------------------------------|---|
| 1. Replikasi | 1. Replikasi |
| | 2. Regulasi Inovasi Daerah |
| | 3. Penggunaan IT |
| | 4. Pelaksana Inovasi Daerah |
| | 5. Pedoman Teknis |
| | 6. Online Sistem |
| | 7. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 8. Persediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 9. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan |
| | 10. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 11. Jejaring Inovasi |
| | 12. Bimtek Inovasi |

Terdapat 1 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 12 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 138 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Kendal, terdapat 52 atau 66% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

N. KABUPATEN KLATEN

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Klaten mendapat skor 46.35 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 144 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 151 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Klaten tersebar di 24 urusan. Terdapat 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum melaporkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 152 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa inovasi dengan nilai kematangan rendah dan tinggi menunjukkan proporsi yang seimbang. Gambar 153 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 153 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas telah berada pada parameter 3. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 40. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Klaten

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|-----------------------------------|--|
| 1. Replikasi | 1. Replikasi |
| 2. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 2. Regulasi Inovasi Daerah |
| 3. Kecepatan Inovasi | 3. Pelaksana Inovasi Daerah |
| | 4. Pedoman Teknis |
| | 5. Online Sistem |
| | 6. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 7. Kualitas Inovasi Daerah |
| | 8. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 9. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 10. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan |
| | 11. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah |
| | 12. Bimtek Inovasi |

Terdapat 3 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 12 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 149 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Klaten, terdapat 31 atau 51% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

O. KABUPATEN KUDUS

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Kudus mendapat skor 42.51 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 155 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 162 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Kudus tersebar di 32 urusan, dimana terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu mempertahankan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah tetap memberikan sosialisasi secara massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 163 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa mayoritas inovasi masih menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 164 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung masih kurang dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 165 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas telah berada pada parameter 3. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 41. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Kudus

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|---|
| 1. Sosialisasi Inovasi Daerah | 1. Replikasi |
| 2. Replikasi | 2. Regulasi Inovasi Daerah |
| 3. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | 3. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| 4. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 4. Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| 5. Penggunaan IT | 5. Penggunaan IT |
| 6. Pelaksana Inovasi Daerah | 6. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 7. Pedoman Teknis | 7. Pedoman Teknis |
| 8. Online Sistem | 8. Online Sistem |
| 9. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 9. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| 10. Kualitas Inovasi Daerah | 10. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah |
| 11. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah | 11. Keterlibatan aktor inovasi |
| 12. Keterlibatan aktor inovasi | 12. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan |
| 13. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | 13. Kemudahan Informasi Pelayanan |
| 14. Kemudahan Informasi Pelayanan | 14. Kemanfaatan Inovasi |
| 15. Kemanfaatan Inovasi | 15. Jejaring Inovasi |
| 16. Kecepatan Inovasi | 16. Bimtek Inovasi |
| 17. Jejaring Inovasi | |
| 18. Dukungan Anggaran | |
| 19. Bimtek Inovasi | |

Terdapat 19 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 16 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 160 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Kudus, terdapat 99 atau 57% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

P. KABUPATEN MAGELANG

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Magelang mendapat skor 41.81 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 188 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 30%. Namun optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel

– variabel yang memiliki skor dibawah 60%, variabel hasil kreatif, variabel kecanggihan produk, variabel kecepatan bisnis proses dan variabel output pengetahuan dan teknologi. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Magelang berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 42. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|---|--|---|
| Hasil Kreatif | Kemanfaatan inovasi | Menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas |
| | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan <i>feed back</i> atau <i>review</i> kegiatan inovasi |
| | Kualitas inovasi daerah | Menyusun rencana ataupun <i>template</i> pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi |
| Kecanggihan Produk | Online sistem | Mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE |
| | Replikasi | Aktif mendiseminasikan inovasi – inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain |
| | Kecepatan penciptaan inovasi | Mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi |
| Kecepatan Bisnis Proses | Pedoman teknis | Menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses |
| | Kemudahan informasi layanan | Memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat |
| | Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan | Mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan |
| | Penyelesaian layanan pengaduan | Menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjupnya sebagai bahan perbaikan layanan |
| Output Pengetahuan dan Teknologi | Keterlibatan aktor inovasi | Melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah |
| | Pelaksana inovasi daerah | Membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada |
| | Jejaring inovasi | Bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi |

| VARIABEL | INDIKATOR | HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN |
|----------|----------------------------|--|
| | Sosialisasi Inovasi Daerah | Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses |

Berdasarkan gambar 173 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Magelang tersebar di 31 urusan, dimana terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mempertahankan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah tetap memberikan sosialisasi secara massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 174 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa mayoritas inovasi masih menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 175 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung masih kurang dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 176 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas masih berada pada parameter 2. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 43. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Magelang

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|--|---|
| 1. Sosialisasi Inovasi Daerah | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Replikasi | 2. Replikasi |
| 3. Penyelesaian Layanan Pengaduan | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| 4. Penggunaan IT | 4. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD |
| 5. Pelaksana Inovasi Daerah | 5. Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| 6. Pedoman Teknis | 6. Penggunaan IT |
| 7. Online Sistem | 7. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 8. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | 8. Pedoman Teknis |
| 9. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah | 9. Online Sistem |
| 10. Keterlibatan aktor inovasi | 10. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| 11. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | 11. Kualitas Inovasi Daerah |
| 12. Kemudahan Informasi Pelayanan | 12. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah |
| 13. Kemanfaatan Inovasi | 13. Keterlibatan aktor inovasi |
| 14. Kecepatan Inovasi | 14. Kemudahan Proses Inovasi Yang |

| | Dihasilkan |
|----------------------|-----------------------------------|
| 15. Jejaring Inovasi | 15. Kemudahan Informasi Pelayanan |
| 16. Bimtek Inovasi | 16. Kemanfaatan Inovasi |
| | 17. Kecepatan Inovasi |
| | 18. Jejaring Inovasi |
| | 19. Dukungan Anggaran |
| | 20. Bimtek Inovasi |

Terdapat 16 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 20 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 171 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Magelang, terdapat 22 atau 23% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

Q. KABUPATEN PATI

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Pati mendapat skor 53.81 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 177 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 184 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Pati tersebar di 19 urusan. Hanya terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan sosial. Pemerintah Kabupaten Pati perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum dilaporkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 185 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa mayoritas inovasi masih menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 186 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 187 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas telah berada pada parameter 3. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu

dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 44. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pati

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---------------------------------|--|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| | 2. Replikasi |
| | 3. Regulasi Inovasi Daerah |
| | 4. Penyelesaian Layanan Pengaduan |
| | 5. Pelaksana Inovasi Daerah |
| | 6. Pedoman Teknis |
| | 7. Online Sistem |
| | 8. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 9. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah |
| | 10. Keterlibatan aktor inovasi |
| | 11. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan |
| | 12. Kemudahan Informasi Pelayanan |
| | 13. Kecepatan Inovasi |
| | 14. Jejaring Inovasi |
| | 15. Bimtek Inovasi |

Terdapat 1 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 15 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 182 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Pati, terdapat 33 atau 56% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.

R. KABUPATEN PEKALONGAN

Pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kabupaten Pekalongan mendapat skor 52.05 dan masuk pada kategori inovatif. Berdasarkan gambar 188 pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat variabel Satuan Inovasi Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh variabel telah memiliki skor di atas 60%. Sebagai informasi, standar skor 30% sebagai kategori kurang dan skor 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan gambar 195 pada bab sebelumnya tentang jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, Inovasi di Kabupaten Pekalongan tersebar di 16 urusan. Terdapat 5 dari 6

urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu mengoptimalkan inovasi di setiap urusan pemerintahan, terutama pada urusan wajib pelayanan dasar lain yang belum dilaporkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Namun demikian, berdasarkan gambar 196 tentang persentase inovasi berdasarkan tingkat skor kematangan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa mayoritas inovasi masih menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 197 menunjukkan bahwa tingkat keterisian bukti dukung sudah lebih dari 60%. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, gambar 198 menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas telah berada pada parameter 3. Untuk meningkatkan skor kematangan pada setiap inovasi, perlu dilakukan optimalisasi keterisian dokumen pada indikator yang menunjukkan keterisian bukti dukung dibawah 60% dan kesesuaian bukti dukung pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 45. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pekalongan

| KETERISIAN DOKUMEN DI BAWAH 60% | KESESUAIAN BUKTI DUKUNG PADA PARAMETER 3 DIBAWAH 60% |
|---|--|
| 1. Replikasi | 1. Sosialisasi Inovasi Daerah |
| 2. Pedoman Teknis | 2. Replikasi |
| 3. Kualitas Inovasi Daerah | 3. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah |
| 4. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah | 4. Penggunaan IT |
| 5. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | 5. Pelaksana Inovasi Daerah |
| 6. Kecepatan Inovasi | 6. Pedoman Teknis |
| 7. Bimtek Inovasi | 7. Online Sistem |
| | 8. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah |
| | 9. Kualitas Inovasi Daerah |
| | 10. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah |
| | 11. Keterlibatan aktor inovasi |
| | 12. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan |
| | 13. Kecepatan Inovasi |
| | 14. Jejaring Inovasi |
| | 15. Bimtek Inovasi |

Terdapat 7 indikator yang memiliki persentase keterisian data dukung dibawah 60% dan 15 indikator yang masih memiliki persentase bukti dukung paramater 3 dibawah 60%, sesuai dengan tabel diatas. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung pada indikator – indikator tersebut dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan Indeks Inovasi Daerah oleh admin atau operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan

bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, diperlukan *update* dan *upgrade* terhadap inovasi – inovasi yang masih berjalan namun sudah melewati masa tahun penilaian Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan gambar 193 tentang jumlah inovasi berdasarkan tahun penerapan inovasi pada Kabupaten Pekalongan, terdapat 23 atau 66% inovasi yang diterapkan pada tahun 2019. Inovasi – inovasi tersebut sebaiknya dapat diperbaharui kembali agar tetap dapat dilaporkan pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun selanjutnya sehingga dapat meningkatkan nilai indeks inovasi.